



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN
2016 – 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih Tahun 2016-2021.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Badung adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah instrument kebijakan yang bersisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih Tahun 2016-2021.
- (2) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Badung setiap tahun.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD SEMESTA BERENCANA

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4 Aspek Daya Saing daerah
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.3 Kerangka Pendanaan
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.2 Isu Strategis
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- 5.1 Visi
 - 5.2 Misi
 - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 6.1 Strategi
 - 6.2 Arah Kebijakan
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- 10.1 Pedoman Transisi
 - 10.2 Kaidah Pelaksanaan

Pasal 4

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selengkapnya disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Seluruh perencanaan pembangunan Daerah dan perangkat Daerah lima tahunan dan tahunan yang disusun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,

PROVINSI BALI : (13 , 50 / 2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13

L A M P I R A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH

SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2016 - 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-8
1.5 Maksud dan Tujuan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II- 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-27
2.4 Aspek Daya Saing daerah	II-32
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-12
3.3 Kerangka Pendanaan	III-21
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2 Isu Strategis.....	IV-7
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi	V-2
5.2 Misi	V-3
5.3 Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1 Strategi	VI-1
6.2 Arah Kebijakan.....	VI-6
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1

BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
	10.1 Pedoman Transisi	X-1
	10.2 Kaidah Pelaksanaan.....	X-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan	II-1
Tabel 2.2	Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2014.....	II-6
Tabel 2.3	Proyeksi Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2011-2021 (Ribu Jiwa)	II-6
Tabel 2.4	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2010-2014.....	II-8
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2010-2014.....	II-9
Tabel 2.6	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung Tahun 2014	II-11
Tabel 2.7	Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014.....	II-12
Tabel 2.8	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Badung	II-15
Tabel 2.9	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung.....	II-16
Tabel 2.10	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Badung	II-18
Tabel 2.11	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Badung.....	II-20
Tabel 2.12	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung	II-25
Tabel 2.13	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d .2014 Kabupaten Badung.....	II-25
Tabel 2.14	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d .2014 Kabupaten Badung	II-26
Tabel 2.15	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung.....	II-26
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d .2014 Kabupaten Badung	II-27
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	II-28

Tabel 2.18 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d .2014	
Kabupaten Badung	II-28
Tabel 2.19 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014	
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung.....	II-29
Tabel 2.20 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar	
Tahun 2011 s.d .2014 Kabupaten Badung	II-29
Tabel 2.21 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014	
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung.....	II-30
Tabel 2.22 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Badung	II-31
Tabel 2.23 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2014	
Kabupaten Badung	II-31
Tabel 2.24 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2014	
Kabupaten Badung	II-32
Tabel 2.25 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Badung.....	II-33
Tabel 2.26 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2014	
Kabupaten Badung	II-33
Tabel 2.27 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2011 s.d 2014	
Kabupaten Badung	II-34
Tabel 2.28 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 s.d 2014	
Kabupaten Badung	II-34
Tabel 2.29 Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Badung.....	II-35
Tabel 2.30 Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Badung	II-36
Tabel 2.31 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian	
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung	II-37
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	
Tahun 2011 s/d 2014 Kabupaten Badung	III-2
Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Badung.....	III-4
Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2010 s.d 2014	
Kabupaten Badung	III-5
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2010 s/d 2014	
Kabupaten Badung	III-6
Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2010 s/d 2014 Kabupaten Badung.....	III-10

Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2010 s/d 2014 Kabupaten Badung	III-15
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012 s/d 2014 Kabupaten Badung	III-16
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Badung	III-18
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2012-2014 Kabupaten Badung.....	III-19
Tabel 3.10	Defisit Riil Tahun 2012-2014 Kabupaten Badung.....	III-20
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun 2012 s/d 2014 Kabupaten Badung	III-21
Tabel 3.12	Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Badung	III-22
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung..	III-23
Tabel 3.14	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016-2021 Kabupaten Badung	III-24
Tabel 3.15	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung	III-24
Tabel 3.16	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung.....	III-25
Tabel 3.17	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung.....	III-27
Tabel 4.1	Identifikasi Program Prioritas	IV-19
Tabel 4.2	Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh.....	IV-21
Tabel 4.3	Analisis Pengaruh Negatif Program 1.....	IV-22
Tabel 4.4	Analisis Pengaruh Negatif Program 2.....	IV-24
Tabel 4.5	Analisis Pengaruh Negatif Program 3.....	IV-24
Tabel 4.6	Analisis Pengaruh Negatif Program 4.....	IV-26
Tabel 4.7	Analisis Pengaruh Negatif Program 5.....	IV-27
Tabel 4.8	Analisis Pengaruh Negatif Program 6.....	IV-28
Tabel 4.9	Analisis Pengaruh Negatif Program 7.....	IV-30

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8.....	IV-31
Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9.....	IV-32
Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD	IV-34
Tabel 4.13 Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021	
Kabupaten Badung	IV-36
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Badung.....	V-9
Tabel 5.2 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	V-12
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Badung	VI-14
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Badung	VII-6
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Badung.....	VIII-2
Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Kabupaten Badung.....	VIII-45
Tabel 8.3 Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021.....	VIII-77
Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung	IX-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2010-2014.....	II-7
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000,2010 dan BPS Tahun 2014.....	II-10
Grafik 2.3	Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014.....	II-12
Grafik 2.4	PDRB Kabupaten Badung ADHB Tahun 2011-2014 (Milyar Rupiah) ...	II-13
Grafik 2.5	PDRB Perkapita Kabupaten Badung ADHB Tahun 2011-2014 (Juta Rupiah)	II-14
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2011-2014 (%)	II-20
Grafik 2.7	Indeks Gini Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2009-2014.....	II-22
Grafik 2.8	Pemerataan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2011-2014 (Persen)	II-23
Grafik 2.9	Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.....	II-24
Grafik 2.10	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Badung Tahun 2014.....	II-27
Grafik 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2014.....	II-54
Grafik 2.12	Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK.....	II-54
Grafik 2.13	Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. Badung, Tahun 2010 – 2014.....	II-56
Grafik 2.14	Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kab. Badung, Tahun 2010 – 2014.....	II-56
Grafik 2.15	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2011-2014	II-58
Grafik 2.16	Distribusi Pendapatan Pada Kelompok 40% Penduduk Berpendapatan Rendah di Kabupaten Badung Tahun 2011-2014	II-59
Grafik 2.17	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung, Bali dan Nasional Tahun 2011-2013.....	II-60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Implementasi PPNSB dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	I-2
Gambar 1.2 Diagram Alir Penyusunan RPJMD	I-3
Gambar 1.3 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah	I-5
Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya	IV-23
Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan	IV-25
Gambar 4.3 Potensi Agribisnis sekaligus daerah resapan Petang.....	IV-29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Mengingat RPJMD mencakup berbagai dimensi pembangunan daerah serta merupakan subsistem dari pembangunan provinsi dan nasional, maka proses penyusunan RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan yakni : teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Melalui keempat pendekatan tersebut maka secara substansi dokumen RPJMD dapat diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional serta memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, menyebutkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, dalam Surat Edaran tersebut disebutkan pula bahwa perodesasi Peraturan Daerah tentang RPJMD pasca pemilukada adalah Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tahapan penyusunan RPJMD meliputi : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode Tahun 2016-2021 pada tanggal 17 Pebruari 2016 oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-758 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Badung Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-759 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Badung Provinsi Bali, wajib menyusun RPJMD yang merupakan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.

Adapun sasaran pokok dari RPJMD periode ketiga tersebut yakni meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjabarkan visi-misi dan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD, secara substansi berpedoman pada prinsip-prinsip **Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB)** yang merupakan implementasi dari **Ajaran Tri Sakti** yaitu : **berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan**. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga mengadopsi filosofis kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karna* serta *Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*.

Pembangunan bersifat **Semesta** merupakan pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kewilayahan pada semua jenjang yang dilaksanakan secara terpimpin. Sedangkan pembangunan secara **Berencana** merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpola, dapat dilaksanakan tahap demi tahap namun tuntas sesuai dengan irama dan dinamika perubahan lokal, nasional dan global.

Implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Gambar 1.1.

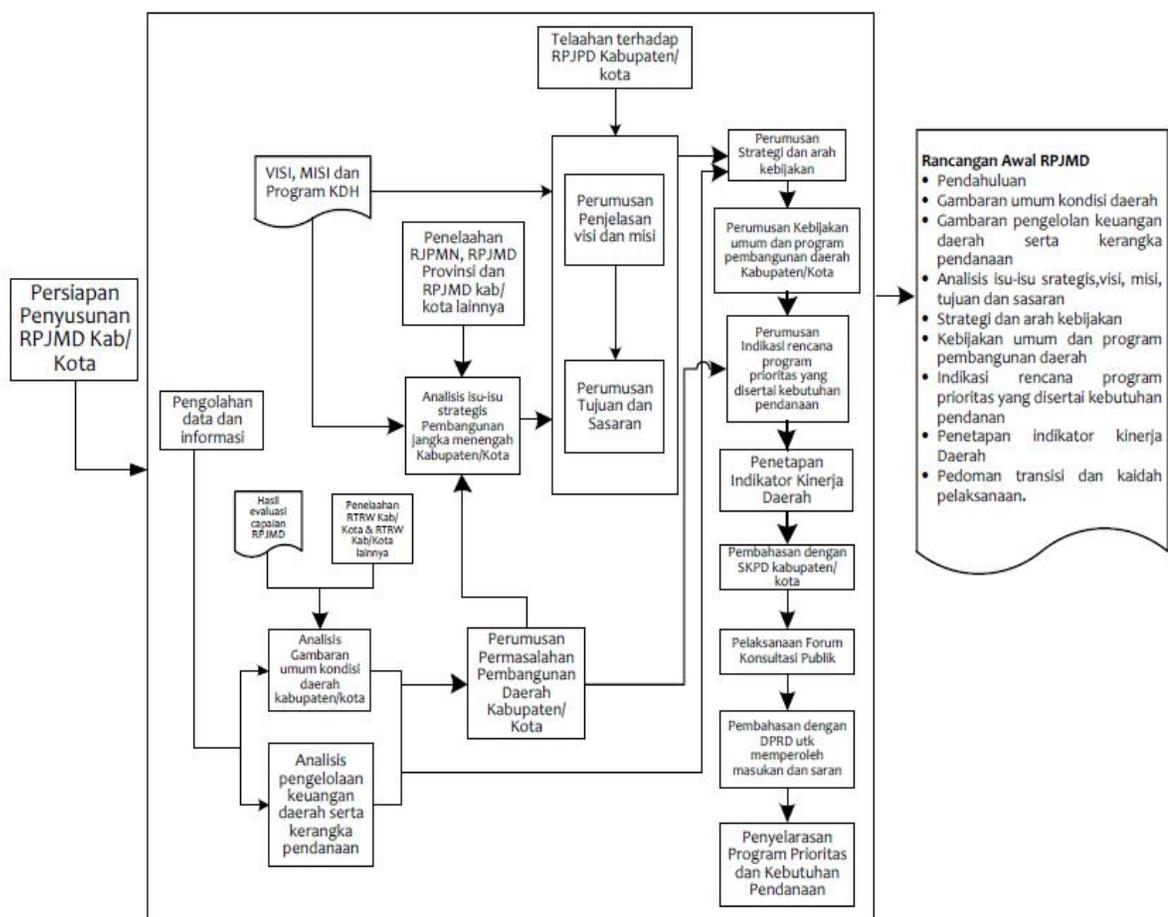
Gambar 1.1.
Implementasi PPNSB dalam RPJMD Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Mengacu pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dimaksud, maka substansi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, lebih difokuskan pada pencapaian terhadap 5 (lima) bidang prioritas meliputi : 1). Bidang pangan, sandang dan papan; 2). Bidang pendidikan dan kesehatan; 3). Bidang adat, agama dan kebudayaan; 4) Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan; serta 5) Bidang pariwisata. Kelima bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan pada bidang Infrastruktur, Legislasi serta Anggaran. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain memuat 5 (lima) bidang prioritas tersebut, pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga dirancang program-program yang merupakan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah dengan target dan indikator kinerja yang terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan program-program sesuai prioritas dan urusan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjangkaran aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dari berbagai unsur, sebagaimana termuat dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Diagram Alir Penyusunan RPJMD



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi

Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

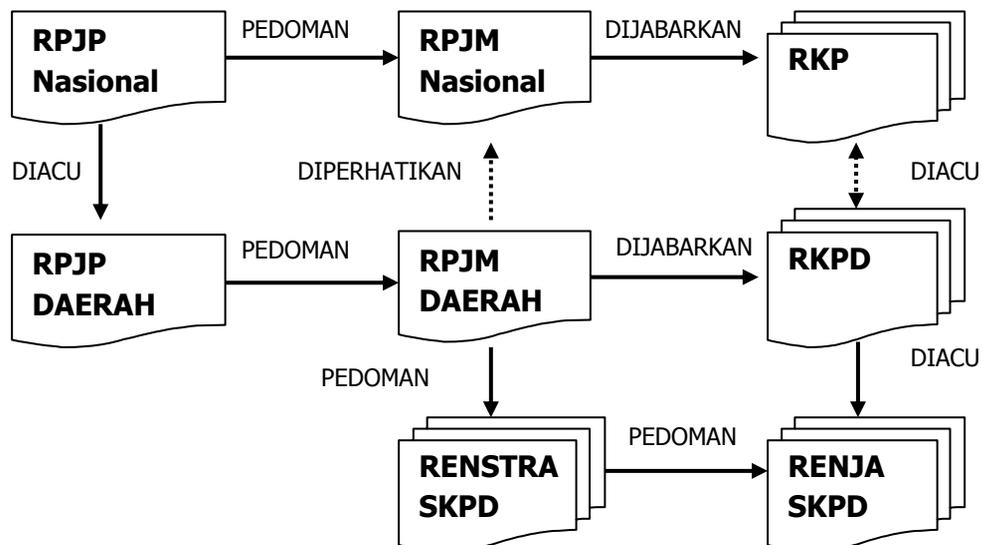
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pembangunan daerah adalah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selanjutnya RPJPD menjadi pedoman untuk menyusun RPJMD yang bersangkutan. Hubungan antar dokumen perencanaan dimaksud disajikan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3.

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Tahun 2010.

Keterangan :

- a. Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
- b. Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- d. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Badung. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Bali yang perlu diperhatikan yaitu : RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Provinsi Bali, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Bali, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Bali, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Bali, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Provinsi Bali.

Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kabupaten Badung yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2015

yaitu : RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Kabupaten Badung, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Badung.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - 1.5 Maksud dan Tujuan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.4 Kerangka Pendanaan
- Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.2 Isu-Isu Strategis
- Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - 5.1. Visi
 - 5.2. Misi
 - 5.3. Tujuan dan Sasaran
- Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - 6.1. Strategi
 - 6.2. Arah Kebijakan
- Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
 - 10.1. Pedoman Transisi
 - 10.2. Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi-misi dan program-program unggulan daerah dengan memperhatikan kondisi terkini dan isu-isu strategis serta kemampuan keuangan daerah guna mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, yaitu:

- a. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang meliputi : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD serta perencanaan anggaran pembangunan;
- b. Menyediakan landasan formal bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menetapkan kebijakan serta mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui program-program prioritas sesuai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Sebagai instrumen untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh seluruh Perangkat Daerah dalam bentuk program/kegiatan yang terukur dan berorientasi kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- d. Pedoman sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah antar bidang, antar wilayah dan antar jenjang pemerintahan secara terpadu dan sinergis; dan
- e. Pedoman untuk mengukur kinerja dan evaluasi capaian program-program pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lahan dan Wilayah

A. Luas Wilayah Batas Administratif

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali. Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20" - 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" dan 115°26'51" Bujur Timur. Bentuk bentangan wilayah Kabupaten Badung menyerupai sebilah keris yang membujur dari utara ke selatan, yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di utara, Samudera Indonesia di sisi selatan, Kabupaten Bangli, Gianyar dan Kota Denpasar di sisi timur dan Kabupaten Tabanan di sisi barat.

Luas wilayah Kabupaten Badung yaitu seluas 418,52 km² (7,43% dari luas daratan Pulau Bali), dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Petang yaitu 115 km² atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil terdapat di Kecamatan Kuta, yaitu seluas 17,52 km² atau 4,19 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung per kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Prosentase Luas Wilayah (%)
1	Kuta Selatan	101,13	24,16
2.	Kuta	17,52	4,19
3.	Kuta Utara	33,86	8,09
4.	Mengwi	82,00	19,59
5.	Abiansemal	69,01	16,49
6.	Petang	115	27,48
BADUNG		418,52	100

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

B. Keadaan Iklim

Kabupaten Badung merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau (April-Oktober) dan musim penghujan (Nopember-Maret), hal ini dipengaruhi oleh adanya arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya kandungan uap air. Curah hujan di bawah normal terjadi pada bulan Pebruari, Maret, April, September dan Oktober. Sedangkan curah hujan di atas normal terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, Nopember, dan Desember. Curah hujan rata-rata per tahun antara 893,4 - 2.702,6 mm.

Suhu minimum terjadi pada bulan Agustus mencapai 23,4°C dan maksimum pada bulan Oktober mencapai 31,5 °C, sedangkan suhu rata-rata 26,1 °C – 27,9°C. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Agustus, September dan Oktober mencapai 77% sedangkan tertinggi pada bulan Januari mencapai 84%. Ditinjau dari penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Desember mencapai 53% sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Oktober mencapai 95%.

C. Topografi

Ditinjau dari topografi wilayah, Kabupaten Badung berada pada ketinggian antara 0 – 2.075 meter Diatas Permukaan Laut (DPL). Wilayah Kecamatan Petang memiliki topografi paling tinggi antara 275-2.075 DPL, sedangkan terendah berada di wilayah Kecamatan Mengwi 0-350 meter DPL.

Berdasarkan kondisi topografi tersebut, wilayah Kabupaten Badung memiliki kemiringan lereng antara 0 - >40%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kemiringan lereng 0 – 5%, merupakan daerah landai, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi Kelurahan Tanjung Benoa, sebagian Kelurahan Benoa dan Jimbaran, serta Kelurahan Kuta, Tuban dan Kedonganan, sebagian Kelurahan Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak dan Kelurahan Kerobokan Kelod, dengan luas daerah ± 4.733 Ha atau 11,3% dari luas daerah;

- b. Kemiringan lereng 5 – 15%, merupakan daerah bergelombang umumnya merupakan daerah perbukitan bergelombang, penyebarannya meliputi daerah : sebagian Kecamatan Kuta Utara, sebagian Kecamatan Mengwi, dan sebagian Kecamatan Abiansemal dengan luas daerah ± 20.540 Ha atau 49,1 % dari luas daerah;
- c. Kemiringan lereng 15 – 40%, merupakan daerah miring. Penyebarannya meliputi Sebagian Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta sebagian Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan dengan luas daerah ± 15.813 Ha atau 37,8% dari luas daerah;
- d. Kemiringan lereng > 40%, merupakan daerah yang sampai curam. Penyebarannya meliputi sebagian Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta daerah puncak G. Catur Desa Pelaga, dengan luas daerah ± 766 Ha atau 1,8% dari luas daerah.
- e. Ketinggian di atas permukaan laut adalah 0 – 2.075 Meter

D. Kondisi Morfologi

Pembagian satuan morfologi Kabupaten Badung didasarkan pada bentuk bentang alam dan kemiringan lereng, yang dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi yaitu :

a. Dataran

Merupakan daerah dataran alluvium dan pantai, bentuk lereng datar hingga landai dengan kemiringan lereng umumnya 0-2%, terletak pada ketinggian 0 – 50 m di atas permukaan laut. Sungai yang mengalir pada satuan morfologi ini kondisi keairannya bersifat permanen (mengalir sepanjang tahun). Bentuk sungai melebar ke arah horizontal dengan tebing yang landai dan dangkal. Batuan penyusun terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan liat.

Penyebarannya di bagian tengah-selatan dengan luas daerah lebih kurang 11,56% dari luas wilayah, meliputi Kuta, Legian, Tuban, Benoa, dan Nusa Dua. Daerah ini umumnya dipergunakan sebagai daerah permukiman, industri, perkantoran, pertokoan, dan obyek wisata.

b. Perbukitan Berelief Halus

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng umumnya antara 2–5% dan berada pada ketinggian 100 – 500 m di atas permukaan laut.

Bentuk morfologi dipengaruhi oleh adanya torehan alur-alur sungai yang membentuk pola aliran sejajar (pararel) dengan lembah yang cukup lebar dan agak dalam serta bentuk sungai mulai mengarah ke bentuk "U". Erosi lateral sudah mulai berjalan lebih intensif dibandingkan dengan erosi vertikal. Batuan penyusun terdiri dari tufa dan lahar yang berasal dari batuan gunung api kelompok Buyan – Bratan dan Batur (Qpbb).

Penyebarannya terdapat di bagian tengah dengan luas lebih kurang 43,38% dari luas wilayah yaitu sekitar daerah Mengwi, Kapal, Abiansemal, Blahkiuh, Lukluk dan Sangeh. Penggunaan lahan di daerah ini digunakan untuk kawasan permukiman, pertanian dan obyek wisata.

c. Perbukitan Berelief Sedang

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng umumnya 5–15% dan berada pada ketinggian 7 - 213 meter di atas permukaan laut.

Penyebarannya di bagian selatan wilayah dengan luas lebih kurang 23,94% dari luas daerah, meliputi daerah Pecatu, Petang, Kutuh dan Uluwatu. Penggunaan lahan pada satuan ini umumnya berupa daerah alang-alang, tegalan dan permukiman.

d. Perbukitan Berelief Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang kasar dengan kemiringan lereng 15-40% dan berada pada ketinggian 500 – 1000 m di atas permukaan laut. Pola aliran sungainya umumnya membentuk pola aliran sejajar (pararel) dengan kenampakan tebing-tebing sungai cukup dalam. Keadaan ini menunjukkan bahwa erosi vertikal lebih intensif dibandingkan dengan erosi lateral. Batuan penyusun terdiri dari tufa dan lahar yang berasal dari batuan gunung api kelompok Buyan – Bratan dan Batur (Qpbb).

Sebarannya terdapat di bagian utara dengan luas lebih kurang 19,58% dari luas daerah yaitu sekitar daerah Pangsan, Petang, Sandakan, Nungnung Kiadan dan Pelaga. Penggunaan lahan di daerah ini adalah untuk kawasan perkebunan, permukiman setempat dan persawahan.

e. Perbukitan Berelief Sangat Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sangat kasar dengan kemiringan lereng umumnya > 40% dan berada pada ketinggian 1500 – 2096 m di atas permukaan laut. Pola aliran sungai menunjukkan pola memancar (radial) dengan lembah dalam dan sempit. Sifat sungai umumnya musiman (intermitten) artinya hanya berair pada musim penghujan. Batuannya terbentuk dari hasil kegiatan gunung api kelompok Buyan – Bratan Purba berupa lava dan Breksi (Qvbb).

Sebarannya menempati bagian utara dengan luas lebih kurang 1,53% dari luas daerah, yang meliputi daerah sekitar G. Catur yang umumnya masih ditutupi oleh hutan tropik.

E. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan wilayah Kabupaten Badung terdiri dari 2 (dua) klasifikasi, yakni lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian dimaksud berupa lahan sawah dan lahan bukan sawah seluas 28.465 hektar (68,01%) , sedangkan lahan bukan pertanian berupa jalan, permukiman, perkantoran, sungai dan hutan negara seluas 13.387 hektar (31,99%).

Sebaran penggunaan lahan pertanian sawah yang terluas terdapat di Kecamatan Mengwi mencapai 4.597 hektar dan terkecil terdapat di Kecamatan Kuta mencapai 30 hektar, sedangkan di Kecamatan Kuta Selatan tidak terdapat lahan pertanian sawah. Sementara untuk lahan bukan sawah berupa : tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, lahan yang tidak diusahakan sementara waktu, dan lainnya (tambak, kolam, empang dan hutan yang diusahakan) terluas terdapat Kecamatan Petang mencapai 8.939 hektar, dan terkecil terdapat di Kecamatan Kuta mencapai 164 hektar. Secara rinci pola penggunaan lahan Kabupaten Badung dimuat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Badung
Tahun 2014

No	Penggunaan Lahan	Luas (Hektar)	Persen (%)
1	Lahan Pertanian	28.244	68,01
1.1	Lahan Sawah (irigasi teknis)	9.984	24,23
1.2	Lahan bukan sawah	18.260	43,77
	a. Tegal/Kebun	8.084	19,48
	b. Perkebunan	6.415	15,34
	c. Hutan Rakyat	2.122	5,10
	d. Sementara tidak diusahakan	231	0,55
	e. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan yang diusahakan)	1.408	3,33
2	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, Hutan Negara)	13.608	31,99
Jumlah		41.852	100

Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2015

2.1.2 Demografi

A. Perkembangan dan Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, maka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2016 mencapai sekitar 462,68 ribu jiwa, Tahun 2017 mencapai sekitar 463,33 ribu jiwa, Tahun 2018 mencapai sekitar 463,97 ribu jiwa, Tahun 2019 mencapai sekitar 464,62 ribu jiwa, Tahun 2020 mencapai sekitar 465,28 ribu jiwa, dan pada Tahun 2021 mencapai sekitar 465,93 ribu jiwa. Sedangkan apabila dilihat dari komposisinya, penduduk Kabupaten Badung didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki – laki. Kondisi ini tentu perlu segera diantisipasi mengingat jumlah penduduk yang padat akan berkonsekwensi pada peningkatan sumber daya penunjang kehidupan antara lain mencakup pangan, sandang dan papan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Badung dari Tahun 2011-2021 dimuat pada Tabel 2.3..

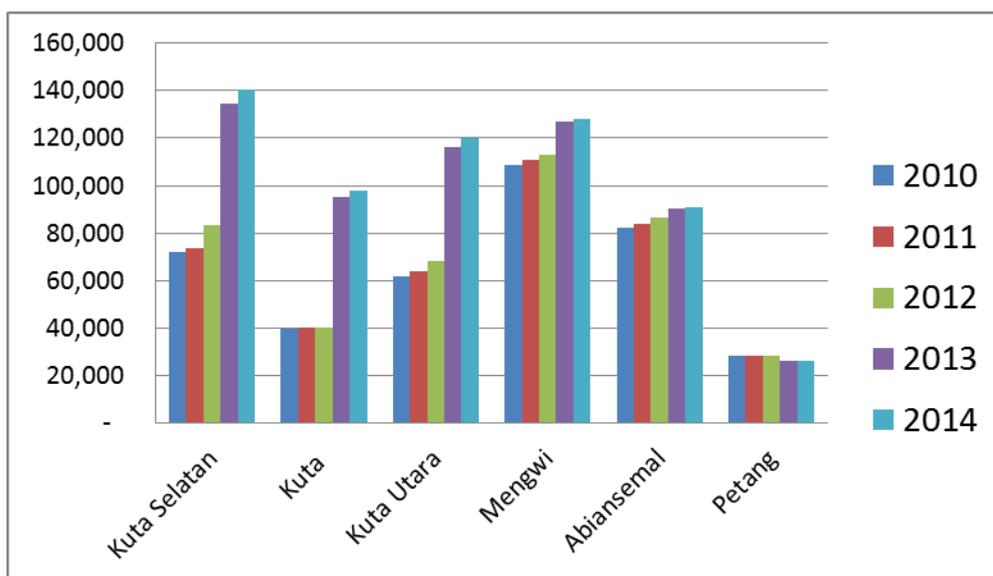
Tabel 2.3
 Proyeksi Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Badung
 Tahun 2011-2021 (Ribu Jiwa)

Jenis Kelamin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laki - Laki	220,48	231,08	232,82	231,55	232,30	232,22	232,54	232,87	233,19	233,52	233,85
Perempuan	212,34	223,82	225,58	229,83	229,73	230,46	230,78	231,10	231,43	231,75	232,08
Kab.Badung	432,82	454,90	458,40	461,38	462,03	462,68	463,33	463,97	464,62	465,28	465,93

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

Selanjutnya grafik perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Badung per kecamatan pada tahun 2010 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1.
 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Badung
 Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2010-2015

B. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan pariwisata dunia memiliki berbagai lapangan usaha sehingga menjadi salah satu tujuan migran di Provinsi Bali. Hal ini membawa dampak terhadap tingginya kepadatan penduduk Kabupaten Badung yakni mencapai 1.440 jiwa/km² pada Tahun 2014. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kuta yang mencapai 5.574 jiwa/km², sementara kepadatan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Petang yang hanya sebesar 227 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Kuta tidak dapat dihindari mengingat Kuta merupakan pusat aktivitas kepariwisataan sehingga lapangan usaha juga terkonsentrasi di wilayah tersebut.

Wilayah yang memiliki perkembangan kepadatan penduduk cukup tinggi setelah Kecamatan Kuta yakni Kecamatan Kuta Utara yang mencapai 3.538 jiwa/km². Hal ini disebabkan oleh perkembangan sarana kepariwisataan dan permukiman di wilayah Kecamatan Kuta Utara yang berfungsi sebagai *hinterland* dari pusat pariwisata Kuta meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Tingginya kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Kuta Utara perlu dikendalikan mengingat berdampak pada meningkatnya beban lingkungan, serta rawan timbulnya permasalahan sosial kemasyarakatan.

Secara rinci kepadatan penduduk Kabupaten Badung dari Tahun 2010-2014 dimuat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Badung
Tahun 2010-2014

NO	KECAMATAN	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kuta Selatan	709	729	826	1,330	1,389
2	Kuta	2,272	2,287	2,301	5,428	5,576
3	Kuta Utara	1,829	1,890	2,021	3,429	3,538
4	Mengwi	1,328	1,349	1,377	1,550	1,562
5	Abiansemal	1,191	1,211	1,254	1,306	1,313
6	Petang	248	248	247	228	227
BADUNG		939	957	1,004	1,408	1,440

Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2010-2015

C. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk sering digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha – usaha pemerintah di bidang kependudukan. Semakin kecil laju pertumbuhan penduduk, maka usaha pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk semakin berhasil. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung selama 5 tahun terakhir rata-rata 3,04% dengan kepadatan penduduk rata-rata 1,440 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk tertinggi mulai Tahun 2010-2014 terjadi di Kecamatan Kuta Selatan yang mencapai 6,85%, disusul Kecamatan Kuta Utara mencapai 4,48%, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan Petang yaitu -0,22%.

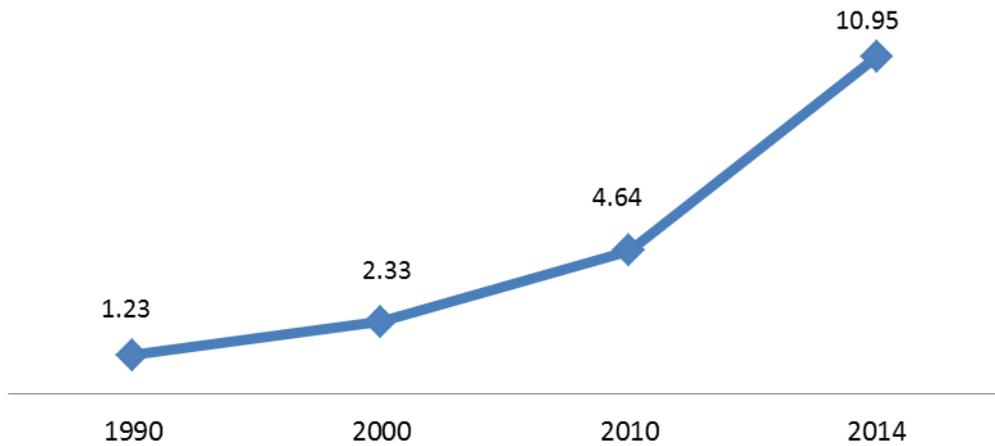
Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung perlu dikendalikan secara komprehensif dan lintas wilayah, mengingat fenomena aglomerasi penduduk dan ekonomi semakin menguat yang akan membawa berbagai dampak terhadap lingkungan, prasarana wilayah dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung ditunjukkan pada Tabel 2.5. dan Grafik 2.2.

Tabel 2.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung
Tahun 2010-2014

NO	KECAMATAN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)			RATA-RATA
		2010-2011	2011-2012	2013-2014	
1	Kuta Selatan	2.79	13.31	4.46	6.85
2	Kuta	0.63	0.64	2.73	1.33
3	Kuta Utara	3.34	6.92	3.19	4.48
4	Mengwi	1.54	2.09	0.79	1.47
5	Abiansemal	1.71	3.50	0.55	1.92
6	Petang	0.05	(0.34)	(0.38)	(0.22)
	BADUNG	1.89	4.90	2.33	3.04

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2010-2015

Grafik 2.2.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, 2010 dan
BPS Tahun 2014



Sumber : Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, dan 2010
Badung Dalam Angka Tahun 2015

D. Rata – rata Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup (*life expectancy rate*) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Rata-rata usia harapan hidup menjadi salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah dan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Oleh sebab itulah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dilaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas kehidupan.

Seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, rata-rata usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan. Usia rata-rata harapan hidup masyarakat Kabupaten Badung pada Tahun 2014 mencapai 74,30 tahun sehingga berada di atas rata – rata umur harapan hidup Bali sebesar 71,20 tahun dan nasional sebesar 70,1 tahun.

E. Indikator Ketenagakerjaan

Berdasarkan indikator ketenagakerjaan Tahun 2014, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Badung mencapai sekitar 454.358 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak sekitar 324.471 orang di antaranya bekerja dan sebanyak 1558 menganggur. Berdasarkan kondisi tersebut maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2014 mencapai 71,41% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 0,48 sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung
Tahun 2014

NO	URAIAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Penduduk Usia Kerja (Orang)	230,952	223,406	454,358
2	Angkatan Kerja (Orang)	184,059	140,412	324,471
3	Bekerja (Orang)	182,993	139,920	322,913
4	Pengangguran Terbuka (Orang)	1,066	492	1,558
5	Bukan Angkatan Kerja (Orang)	46,893	82,994	129,887
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79.70	62.85	71.41
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0.58	0.35	0.48

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

F. Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Distribusi penduduk Kabupaten Badung berdasarkan lapangan usaha Tahun 2014, menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Badung sebagian besar bergerak pada lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan hotel yaitu mencapai 35,83%, disusul jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan mencapai 19,02%, sedangkan yang paling rendah pada lapangan usaha listrik dan air yaitu 0,12%.

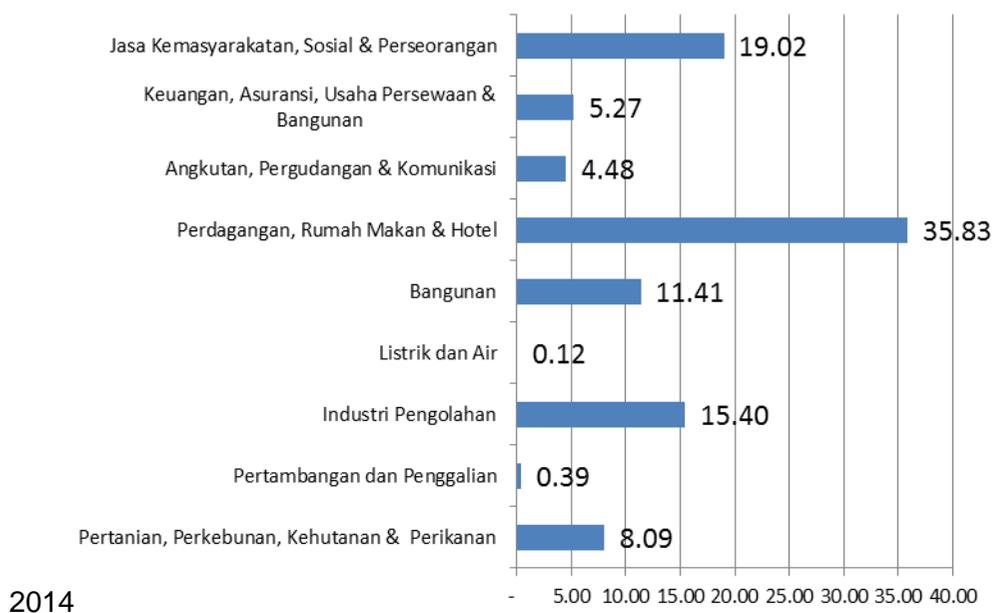
Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Badung dominan bergerak pada lapangan usaha sektor tersier, dan paling sedikit pada lapangan usaha sektor primer. Secara rinci distribusi penduduk berdasarkan lapangan usaha ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2014

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH	PERSEN
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan & Perikanan	26,129	8.09
2	Pertambangan dan Penggalian	1,244	0.39
3	Industri Pengolahan	49,733	15.40
4	Listrik dan Air	396	0.12
5	Bangunan	36,839	11.41
6	Perdagangan, Rumah Makan & Hotel	115,686	35.83
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	14,453	4.48
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan & Bangunan	17,007	5.27
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perseorangan	61,426	19.02
	Total	322,913	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

Grafik 2.3.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun



Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015 (data diolah)

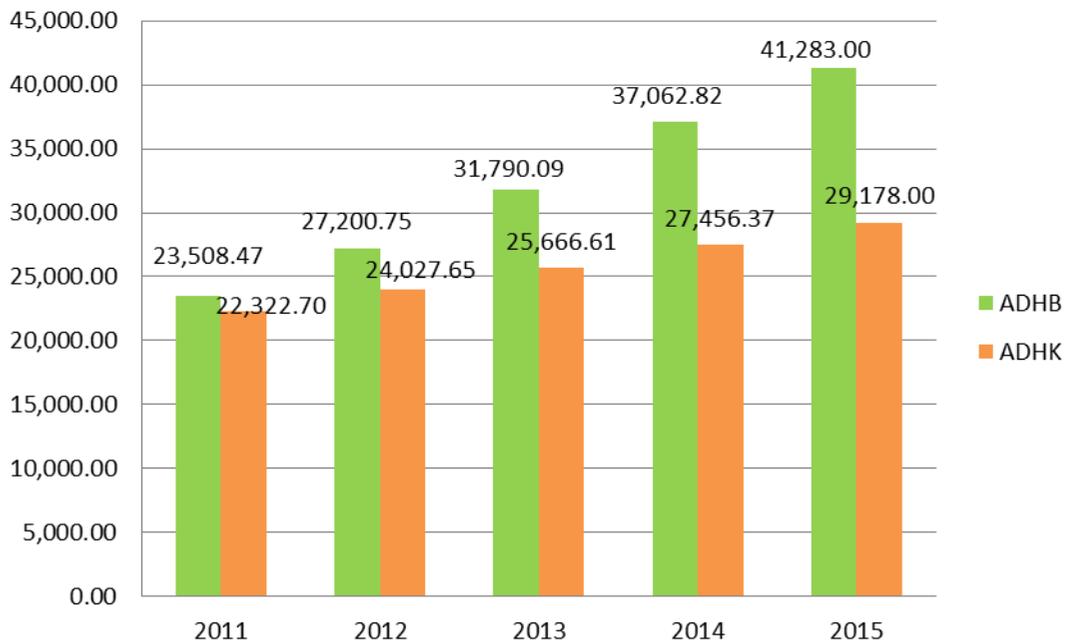
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

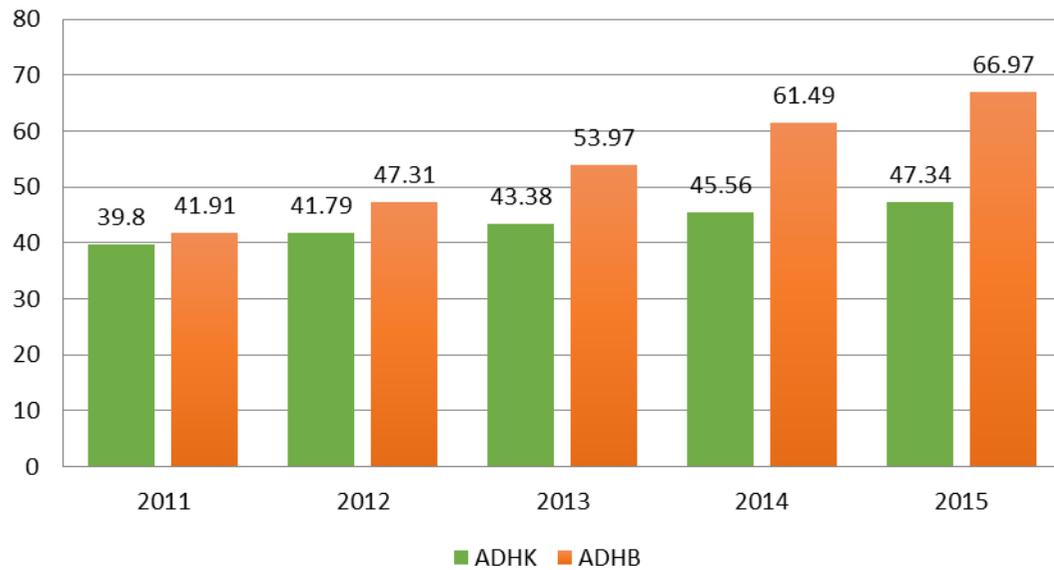
Grafik 2.4
PDRB Kabupaten Badung ADHB
Tahun 2011-2014 (Milyar Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Badung terus meningkat yang diindikasikan dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada Tahun 2011, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku baru mencapai Rp.23.508,47 milyar, meningkat menjadi Rp.41.283,00 milyar pada Tahun 2015. Peningkatan juga terlihat pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) yaitu dari Rp.22.322,70 milyar pada Tahun 2010 meningkat menjadi Rp.29.178,00 milyar pada Tahun 2015.

Grafik 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2011-2014 (Juta Rupiah)



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Peningkatan juga terlihat dari hasil perhitungan PDRB perkapita Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2011, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) Kabupaten Badung baru mencapai Rp.39,80 juta meningkat pada Tahun 2015 menjadi Rp.47,34 juta lebih. Sedangkan pada PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku meningkat dari Rp.41,91 juta pada Tahun 2011 menjadi Rp.66,97 juta pada Tahun 2015.

Tabel 2.8
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014
 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010
 Kabupaten Badung

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.836,40	8,23	1.954,37	8,13	1.982,15	7,72	2.087,31	7,60
2	Pertambangan dan Penggalian	84,58	0,38	98,02	0,41	105,14	0,41	106,35	0,39
3	Industri Pengolahan	1.024,52	4,59	1.074,57	4,47	1.163,28	4,53	1.283,50	4,67
4	Pengadaan Listrik dan Gas	46,21	0,21	51,32	0,21	55,45	0,22	57,75	0,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	72,21	0,32	74,59	0,31	78,64	0,31	85,52	0,31
6	Konstruksi	2.074,42	9,29	2.478,05	10,31	2.623,08	10,22	2.705,93	9,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.649,39	7,39	1.749,22	7,28	1.905,69	7,42	2.073,02	7,55
8	Transportasi dan Pergudangan	4.292,63	19,23	4.552,04	18,95	4.826,61	18,81	4.985,18	18,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.657,14	25,34	6.117,81	25,46	6.631,28	25,84	7.132,96	25,98
10	Informasi dan Komunikasi	1.685,97	7,55	1.824,27	7,59	1.927,37	7,51	2.092,93	7,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	601,69	2,70	653,92	2,72	737,53	2,87	819,73	2,99
12	Real Estate	888,02	3,98	945,47	3,93	1.010,17	3,94	115,70	0,42
13	Jasa Perusahaan	181,36	0,81	185,23	0,77	202,08	0,79	220,51	0,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	988,89	4,43	999,98	4,16	998,01	3,89	1.122,02	4,09
15	Jasa Pendidikan	766,14	3,43	768,88	3,20	873,74	3,40	981,17	3,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	286,94	1,29	304,44	1,27	343,02	1,34	391,44	1,43
17	Jasa Lainnya	186,18	0,83	195,49	0,81	203,37	0,79	222,35	0,81
	PDRB	22.322,70	100,00	24.027,65	100,00	25.666,61	100,00	27.456,37	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Tabel 2.9
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014
 atas Dasar Harga Berlaku
 Kabupaten Badung

No	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.894,34	8,06	2.100,22	7,72	2.352,69	7,40	2.516,30	6,79
2	Pertambangan dan Penggalian	88,15	0,37	105,55	0,39	120,37	0,38	128,27	0,35
3	Industri Pengolahan	1.077,02	4,58	1.186,71	4,36	1.339,29	4,21	1.487,96	4,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	40,37	0,17	39,91	0,15	39,06	0,12	48,85	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,82	0,31	74,26	0,27	79,65	0,25	84,48	0,23
6	Konstruksi	2.186,85	9,30	2.802,29	10,30	3.121,73	9,82	3.216,49	8,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.771,43	7,54	1.926,01	7,08	2.152,45	6,77	2.413,11	6,51
8	Transportasi dan Pergudangan	4.769,00	20,29	5.610,46	20,63	6.913,40	21,75	8.831,24	23,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.948,21	25,30	7.186,66	26,42	8.807,67	27,71	10.815,28	29,18
10	Informasi dan Komunikasi	1.682,45	7,16	1.833,38	6,74	1.940,83	6,11	2.065,23	5,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	628,09	2,67	753,08	2,77	896,70	2,82	997,52	2,69
12	Real Estate	915,48	3,89	999,50	3,67	1.124,15	3,54	1.239,79	3,35
13	Jasa Perusahaan	182,86	0,78	198,61	0,73	224,19	0,71	247,84	0,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	999,95	4,25	1.025,89	3,77	1.043,15	3,28	1.149,85	3,10
15	Jasa Pendidikan	766,55	3,26	818,67	3,01	1.004,17	3,16	1.120,14	3,02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	296,16	1,26	329,96	1,21	390,76	1,23	435,44	1,17
17	Jasa Lainnya	296,16	1,26	329,96	1,21	390,76	1,23	435,44	1,17
	PDRB	23.508,47	100,00	27.200,75	100,00	31.790,09	100,00	37.062,82	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Potret kinerja perekonomian Kabupaten Badung periode Tahun 2011-2014 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai PDRB Kabupaten Badung yang dihasilkan oleh masing-masing lapangan usaha. PDRB atas dasar harga konstan memiliki pola yang hampir sama dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada Tahun 2014 besaran PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga konstan sebesar Rp. 27,46 triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 25,67 triliun. Total nilai tambah yang terbentuk (PDRB atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2014 sebesar Rp. 37,06 triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 31,79 triliun.

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembentukan besarnya nilai tambah ini, termasuk keberadaan DTW (Daya Tarik Wisata) turut memberi sumbangan besar terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Badung. Hal ini dapat terlihat dari besarnya nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai Rp. 10,82 triliun. Dari seluruh nilai tambah pada lapangan usaha ini, sub kategori penyediaan akomodasi memberikan kontribusi sebesar 73,42 persen, sedangkan sub kategori penyediaan makan minum memberikan kontribusi sebesar 26,58 persen.

Selain lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha yang memiliki nilai tambah cukup besar yakni transportasi dan pergudangan yang mencapai Rp. 8,83 triliun pada Tahun 2014. Meningkatnya kontribusi lapangan usaha ini disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisman maupun wisdom ke Bali. Keberadaan Bandara Ngurah Rai mampu menghasilkan nilai tambah hampir 90 persen terhadap nilai tambah di lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Di posisi ketiga terdapat lapangan usaha konstruksi yang menghasilkan nilai tambah terbesar mencapai Rp. 3,22 triliun pada Tahun 2014. Diposisi selanjutnya ditempati oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan juga lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.10
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Badung

No	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		ABHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06	8,23	7,72	8,13	7,40	7,72	6,79	7,60
2	Pertambangan dan Penggalian	0,37	0,38	0,39	0,41	0,38	0,41	0,35	0,39
3	Industri Pengolahan	4,58	4,59	4,36	4,47	4,21	4,53	4,01	4,67
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,21	0,15	0,21	0,12	0,22	0,13	0,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	0,32	0,27	0,31	0,25	0,31	0,23	0,31
6	Konstruksi	9,30	9,29	10,30	10,31	9,82	10,22	8,68	9,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,54	7,39	7,08	7,28	6,77	7,42	6,51	7,55
8	Transportasi dan Pergudangan	20,29	19,23	20,63	18,95	21,75	18,81	23,83	18,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,30	25,34	26,42	25,46	27,71	25,84	29,18	25,98
10	Informasi dan Komunikasi	7,16	7,55	6,74	7,59	6,11	7,51	5,57	7,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	2,70	2,77	2,72	2,82	2,87	2,69	2,99
12	Real Estate	3,89	3,98	3,67	3,93	3,54	3,94	3,35	0,42
13	Jasa Perusahaan	0,78	0,81	0,73	0,77	0,71	0,79	0,67	0,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,25	4,43	3,77	4,16	3,28	3,89	3,10	4,09
15	Jasa Pendidikan	3,26	3,43	3,01	3,20	3,16	3,40	3,02	3,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,29	1,21	1,27	1,23	1,34	1,17	1,43
17	Jasa Lainnya	1,26	0,83	1,21	0,81	1,23	0,79	1,17	0,81
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Selama periode Tahun 2011 – 2014, struktur perekonomian Badung masih didominasi oleh lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum serta lapangan usaha transportasi. Sarana kepariwisataan di Kabupaten Badung yang cukup banyak memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Badung. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung, mampu memberikan sumbangan terbesar di lapangan usaha transportasi disamping transportasi darat.

Selanjutnya lapangan usaha konstruksi menempati posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 8,68 persen pada Tahun 2014, diikuti oleh lapangan usaha pertanian sebesar 6,79 persen dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang menyumbang sebesar 6,51 persen.

Jenis-jenis investasi yang memberi pengaruh signifikan terhadap PDRB disebabkan oleh pembangunan hotel, restoran, toko, ruko dan jasa lainnya. Demikian pula dampak pembangunan mega proyek pada Tahun 2012 diantaranya perluasan Bandara Ngurah Rai, pembangunan jalan tol diatas perairan, serta *underpass* Dewa Ruci memberi kontribusi mencapai 10,30 persen terhadap total PDRB Badung.

Pembangunan irigasi dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan gedung yang bersumber dari belanja pemerintah daerah turut menjadi stimulan dalam perkembangan lapangan usaha konstruksi. Pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan nilai tambah lapangan usaha ini bertambah dari sebesar Rp. 2,19 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 3,22 triliun pada tahun 2014. Setelah tahun 2012 peranan sektor ini mulai mengalami penurunan yaitu sebesar 9,82 persen pada Tahun 2013 dan menjadi 8,68 persen pada Tahun 2014.

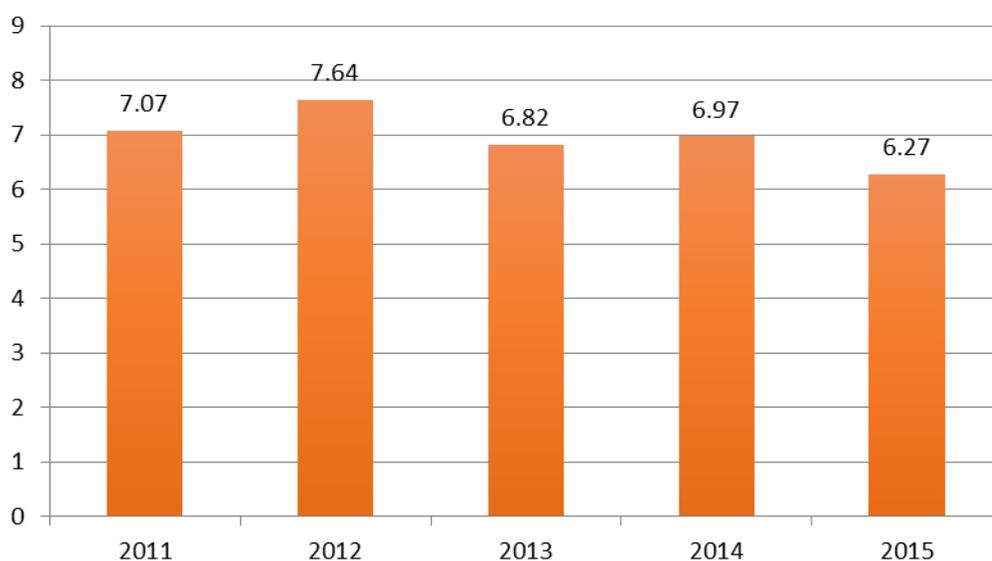
Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, menempati posisi kelima pada Tahun 2014 dengan kontribusi mencapai 6,51 persen. Besarnya keterkaitan antara industri pariwisata dan lapangan usaha perdagangan mengakibatkan nilai tambah di lapangan usaha ini cukup signifikan mencapai Rp. 12,94 triliun. Peranan atau distribusi masing-masing lapangan usaha ditunjukkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.11
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011 - 2014
 Kabupaten Badung

No	Sektor	Pertumbuhan	
		ADHB	ADHK
		%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,95	4,38
2	Pertambangan dan Penggalian	13,45	8,10
3	Industri Pengolahan	11,38	7,83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,26	7,75
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,57	5,82
6	Konstruksi	14,19	9,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,86	7,93
8	Transportasi dan Pergudangan	22,87	5,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,06	8,03
10	Informasi dan Komunikasi	7,08	7,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,74	10,87
12	Real Estate	10,65	7,92
13	Jasa Perusahaan	10,68	6,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,84	4,45
15	Jasa Pendidikan	13,67	8,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,76	10,96
17	Jasa Lainnya	13,76	6,12
	PDRB	16,39	7,14

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Grafik 2.6
 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung
 Tahun 2011-2015 (%)



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

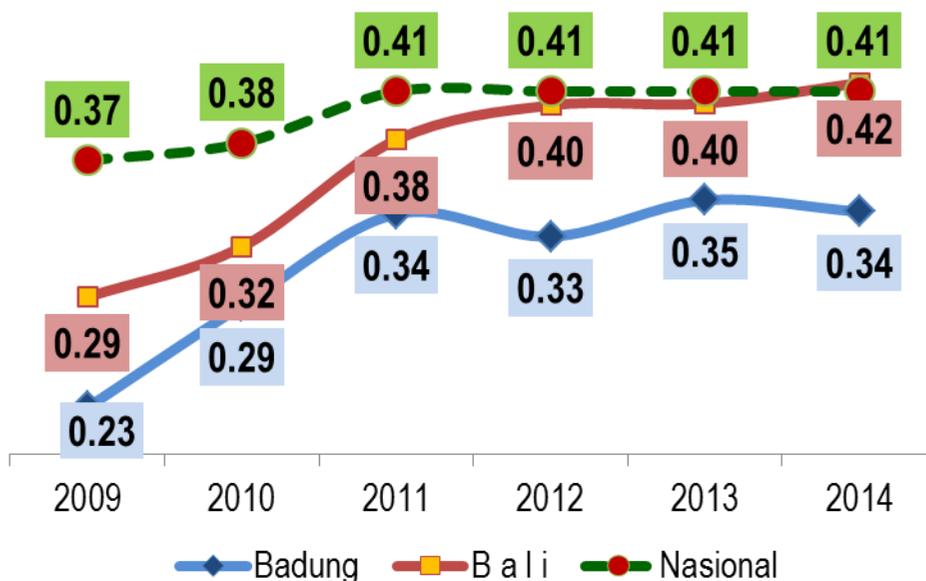
Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, seiring perkembangan perekonomian nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya kondisi perekonomian global (ekonomi global yang belum pulih dari krisis dalam 3 tahun terakhir, perekonomian nasional yaitu akibat kenaikan BBM) dan isu-isu lainnya yang berpengaruh terhadap kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami puncaknya pada Tahun 2012 yaitu mencapai 7,64%. Kondisi ini didorong oleh pelaksanaan proyek/investasi skala besar di sektor bangunan pada Tahun 2012 diantaranya proyek *Underpass*, Jalan di atas Perairan (JDP) dan perluasan Bandara Ngurah Rai. Selain hal tersebut kondisi ini dipicu oleh adanya berbagai *event* yang berskala internasional yang bertempat di Nusa Dua, Kuta Selatan antara lain KTT *APEC*, KTT *ASEAN*, *Bali Democracy Forum* serta *World Trade Organization (WTO)*. Sedangkan pada Tahun 2013 hingga Tahun 2015 terjadi perlambatan yang disebabkan proyek investasi skala besar telah berakhir pelaksanaannya serta dampak dari perekonomian nasional dan global mengalami perlambatan.

Di samping dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan di suatu daerah juga perlu dilihat dari sisi lain, antara lain aspek kesenjangan pendapatan antar penduduk yang diukur dengan gini rasio. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Kisaran nilai indeks gini rasio dari 0 - < 0,35 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran 0,35 - 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio > 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2009 hingga Tahun 2014 menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung masih dalam tingkat ketimpangan sedang, namun trennya menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Tentu hal ini yang perlu diantisipasi melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi. Perbandingan gini rasio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan nasional Tahun 2009 - 2014 dapat dilihat pada Grafik 2.7 berikut.

Grafik 2.7
 Indeks Gini Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional
 Tahun 2009-2014



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Selain gini rasio, indikator lain yang juga dapat digunakan untuk mengetahui dimensi lain dari kesenjangan adalah indikator distribusi pendapatan pada kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah. Kondisi yang diharapkan adalah agar distribusi pendapatan yang dinikmati kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah menerima > 17% dari total pendapatan. Kriteria distribusi pendapatan ini disusun oleh Bank Dunia sebagai berikut:

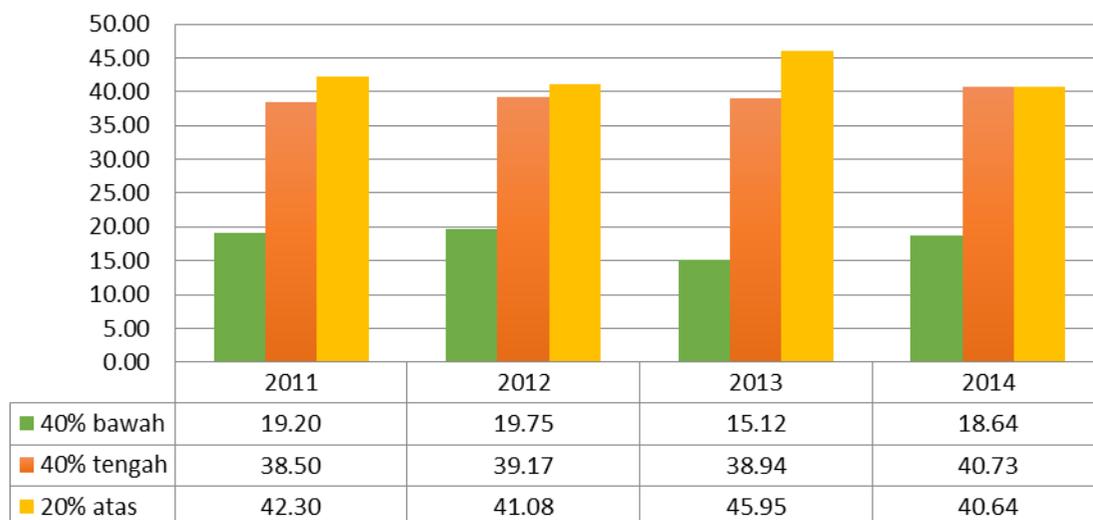
- 40% penduduk berpendapatan terendah menerima < 12% total pendapatan: pemerataan rendah/ketimpangan distribusi pendapatan tinggi
- 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12% - 17% total pendapatan: pemerataan sedang/ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
- 40% penduduk berpendapatan terendah menerima > 17% total pendapatan: pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Badung pada Tahun 2011 - 2014 ditunjukkan pada grafik 2.8 berikut:

Grafik 2.8

Pemerataan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung

Tahun 2011-2014 (Persen)



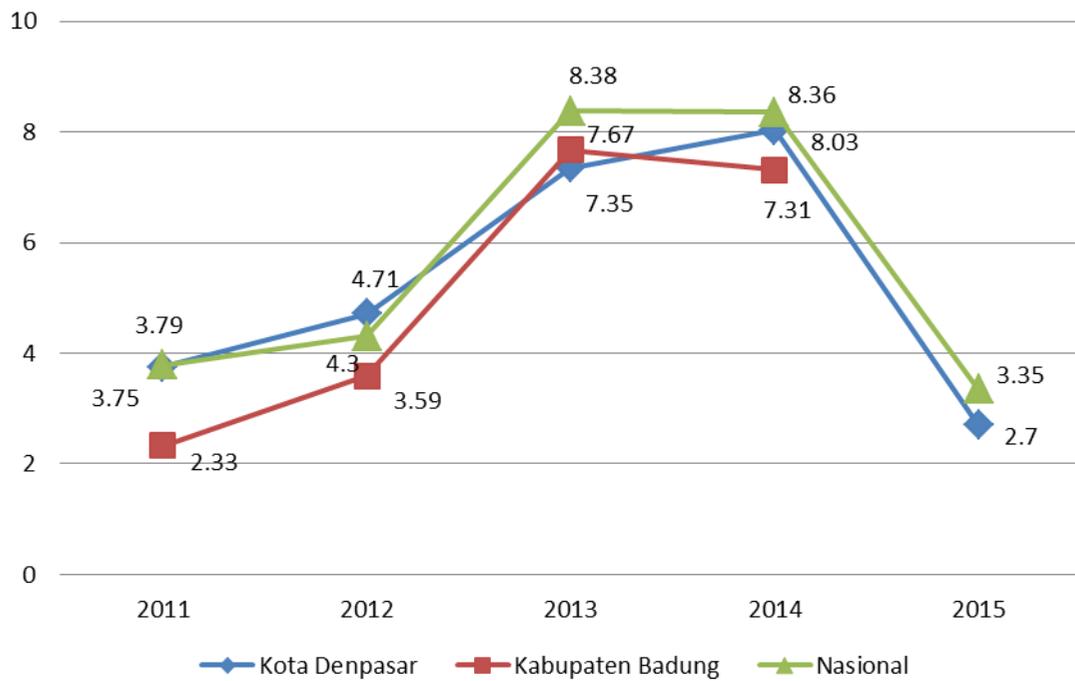
Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada Tahun 2014 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 18,64 persen dari total pendapatan sehingga pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Adapun Laju Inflasi Kabupaten Badung dari Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Grafik 2.9 berikut ini :

Grafik 2.9
Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Dalam kurun waktu Tahun 2011 hingga Tahun 2014, tingkat inflasi Kabupaten Badung selalu berada di bawah inflasi Kota Denpasar dan Nasional. Namun pada Tahun 2013 tingkat inflasi Kabupaten Badung berada di atas inflasi Kota Denpasar yang juga merupakan kondisi puncak inflasi Kabupaten Badung yang mencapai 7,67 persen. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dan ketahanan perekonomian khususnya ketersediaan dan distribusi barang komponen pembentuk inflasi di Kabupaten Badung telah berjalan cukup baik sehingga membuat harga-harga cukup stabil. Dalam empat tahun terakhir puncak inflasi terjadi pada Tahun 2013 dimana mencapai 7,67 persen. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang telah mendorong peningkatan harga-harga komoditas dan biaya transportasi. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada Tahun 2011 yang mencapai 2,33%.

Mulai Tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung tidak lagi melakukan perhitungan terhadap laju inflasi di Kabupaten Badung sehingga nilai yang digunakan sebagai acuan laju inflasi adalah pendekatan laju inflasi Kota Denpasar dengan nilai laju inflasi pada Tahun 2015 sebesar 2,70%, lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi nasional sebesar 3,35%.

Tabel 2.12
 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d .2015
 Kabupaten Badung

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Inflasi
Inflasi	2,33	3,59	7,67	7,31	2,70	4,72

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2011-2015

Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2011 mencapai 2,33%, dan juga lebih rendah bila dibanding dengan inflasi nasional sebesar 3,79%. Sedangkan untuk Tahun 2014 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,31%, lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 8,36%. Hal ini terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada Desember 2014 sehingga memicu kenaikan harga-harga barang secara umum. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya untuk mempertahankan agar laju inflasi relatif stabil dengan mengarahkan sektor produksi untuk terus melakukan peningkatan kuantitas dan pemantauan distribusi barang, dapat dilihat pada tabel 2.12.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah siswa Kabupaten Badung pada Tahun 2011-2014 untuk jenjang pendidikan SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA/SMK selama 3 tahun. Dengan demikian mulai jenjang SD sampai SMA/SMK angka rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun. Secara rinci rata-rata lama sekolah ditunjukkan pada tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.13
 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d .2014
 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014
1	SD	6	6	6	6
2	SMP	3	3	3	3
3	SMA/SMK	3	3	3	3
	Jumlah	12	12	12	12

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2011-2014

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga mempunyai kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas dan kemampuan daya saing masyarakat. Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Badung dalam kurun waktu Tahun 2011 - 2014 dapat dilihat dari keberadaan sekaa-sekaa kesenian/ grup kesenian, gedung kesenian, klub olahraga dan sarana olahraga. Kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan seni budaya dan olahraga mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya tersebut.

Perkembangan seni, budaya dan olahraga yang terdapat di wilayah Kabupaten Badung dapat dilihat dalam tabel 2.14 dan tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.14
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2011 s.d .2014
Kabupaten Badung

No	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	150	152	152	155
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	-	1	1	1
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	89	89	89	89
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	6	6	6	6

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung dan Disbud Kabupaten Badung

Tabel 2.15
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2014
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kecamatan Petang	50	-	2	-
2	Kecamatan Abiansemal	200	-	24	2
3	Kecamatan Mengwi	200	-	24	2
4	Kecamatan Kuta Utara	150	-	25	2
5	Kecamatan Kuta	150	1	8	1
6	Kecamatan Kuta Selatan	150	1	6	-
	Jumlah	900	2	89	7

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

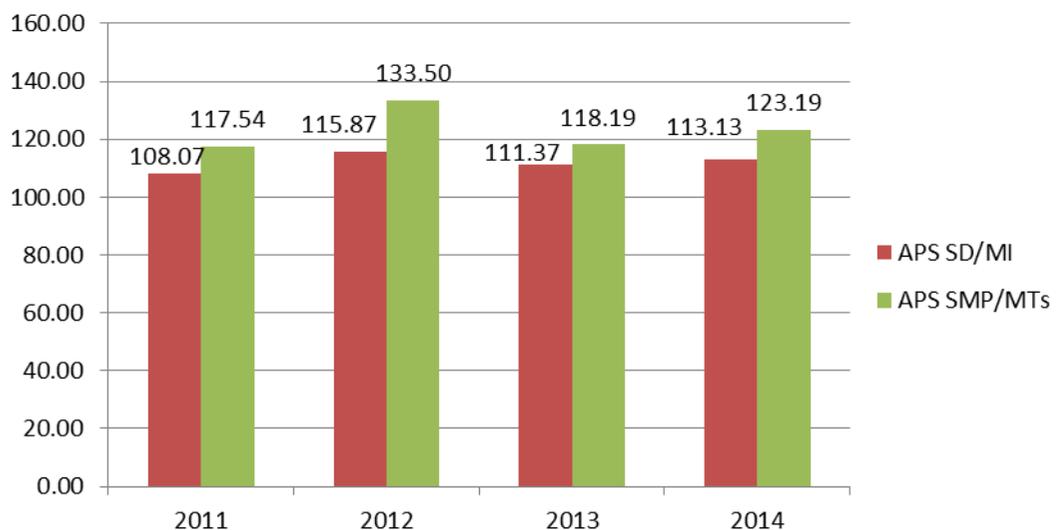
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2011 s.d .2014
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI				
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	59.502	60.265	60.884	61.266
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	55.059	52.009	54.669	54.156
1.3.	APS SD/MI	108,07	115,87	111,37	113,13
2	SMP/MTs				
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	23.930	24.909	25.506	26.791
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.359	18.659	21.581	21.748
2.3.	APS SMP/MTs	117,54	133,50	118,19	123,19

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung, Tahun 2011-2014

Grafik 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP
Kabupaten Badung
Tahun 2014



Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung, Tahun 2011-2014

Angka partisipasi sekolah memberikan informasi tentang daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Kondisi angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Badung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami sedikit dinamika namun tetap berada diatas target yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan capaian angka partisipasi sekolah pada tiap-tiap kecamatan sebagai unsur pembentuk capaian tingkat kabupaten, telah menunjukkan capaian melampaui target yang ditetapkan. Adapun angka partisipasi sekolah masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel 2.17 berikut :

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kecamatan Petang	2.786	2.714	102,65	1.434	1.318	108,80
2	Kecamatan Abiansemal	9.328	8.218	113,51	4.440	3.701	119,97
3	Kecamatan Mengwi	12.649	10.896	116,09	5.712	4.997	114,31
4	Kecamatan Kuta Utara	12.328	11.053	111,54	5.278	3.436	153,61
5	Kecamatan Kuta	9.720	8.583	113,25	3.882	3.273	118,61
6	Kecamatan Kuta Selatan	14.455	12.692	113,89	6.045	5.023	120,35
	Jumlah	61.266	54.156	113,13	26.791	21.748	123,19

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung

a. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Tabel 2.18
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2011 s.d .2014
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah gedung sekolah	269	271	272	274
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	55.059	52.009	54.669	54.156
1.3.	Rasio	49	52	50	51
2	SMP/MTs				
2.1.	Jumlah gedung sekolah	47	50	50	50
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.359	18.659	21.581	21.748
2.3.	Rasio	23	27	23	23

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung

Tabel 2.19
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan Petang	27	2.714	99	4	1.318	30
2	Kecamatan Abiansemal	64	8.218	78	6	3.701	16
3	Kecamatan Mengwi	72	10.896	66	12	4.997	24
4	Kecamatan Kuta Utara	34	11.053	31	10	3.436	29
5	Kecamatan Kuta	27	8.583	31	6	3.273	18
6	Kecamatan Kuta Selatan	50	12.692	39	12	5.023	24
	Jumlah	274	54.156	51	50	21.748	23

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung

Rasio ketersediaan sekolah sebagaimana dalam Tabel 2.18 dan Tabel 2.19 diatas mencerminkan ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar per 10.000 orang penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan dasar sesuai dengan jenjang usia tertentu.

Di kabupaten Badung rasio ketersediaan sekolah pada masing-masing kecamatan sangat berfluktuasi, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk usia pendidikan dasar pada wilayah kecamatan tertentu dengan kisaran untuk tingkat sekolah dasar yaitu terendah kecamatan Kuta dan tertinggi Kecamatan Petang serta untuk jenjang SMP, terendah Kecamatan Abiansemal dan tertinggi Kecamatan Petang.

b. Rasio guru/murid

Tabel 2.20
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2011 s.d .2014
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah Guru	3.505	3.523	3.530	3.623
1.2.	Jumlah Murid	60.586	61.290	61.400	61.284
1.3.	Rasio	58	57	57	59
2	SMP/MTs				
2.1.	Jumlah Guru	1.663	1.748	1.765	1.831
2.2.	Jumlah Murid	24.955	25.828	27.002	27.868
2.3.	Rasio	67	68	65	66

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung

Rasio guru terhadap murid merupakan perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini memberikan informasi ketersediaan tenaga pengajar dan dapat juga dipergunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu orang guru agar tercapai mutu pengajaran.

Perkembangan antar waktu rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Badung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup statis yaitu antara kisaran 57 sampai dengan 59 per 1000 jumlah murid. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan jumlah guru dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah siswa, namun belum signifikan.

Demikian juga halnya dengan perkembangan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang berkisar pada angka 67 per 1000 jumlah murid pada tahun 2011 menjadi 66 per 1000 jumlah murid. Kondisi ini menggambarkan adanya penurunan jumlah guru pada jenjang sekolah menengah pertama bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah siswa. Situasi seperti ini mengisyaratkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk merancang program kegiatan yang berkontribusi positif terhadap peningkatan ketersediaan guru agar mampu mencapai mutu pengajaran yang optimal.

Selanjutnya, apabila dilihat data per kecamatan yang ada di Kabupaten Badung sesuai dengan Tabel 17, dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid pada tahun 2014 pada jenjang sekolah dasar paling tinggi berada pada Kecamatan Petang dan terendah pada Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama, rasio guru terhadap murid tertinggi pada Kecamatan Petang dan terendah pada Kecamatan Kuta Selatan. Keadaat tersebut dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut :

Tabel 2.21

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan Petang	260	2.739	95	113	1.457	78
2	Kecamatan Abiansemal	783	9.164	85	313	4.620	68
3	Kecamatan Mengwi	811	12.341	66	484	6.410	76
4	Kecamatan Kuta Utara	624	12.788	49	301	4.742	63
5	Kecamatan Kuta	462	9.807	47	253	4.112	62
6	Kecamatan Kuta Selatan	683	14.445	47	367	6.527	56
	Jumlah	3.623	61.284	59	1.831	27.868	66

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.22
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2011	Jumlah Investor	597	92	689
2012	Jumlah Investor	607	170	777
2013	Jumlah Investor	528	257	785
2014	Jumlah Investor	1.264	195	1.459

Sumber Data : Bagian Adm Perekonomian Setda Kabupaten Badung

Jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Badung tercermin dari jumlah izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Dari data Tabel 2.22, terlihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 secara keseluruhan jumlah investor selalu mengalami peningkatan, namun jumlah investor (PMDN) atau investor (PMA) berfluktuasi.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.23
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2011	611	8.536.644.647.061	689	3.173.814.437.239
2012	762	8.808.590.543.488	777	7.180.810.126.088
2013	667	6.297.274.880.989	785	6.147.499.450.989
2014	1.356	3.086.430.085.315	1.459	2.618.136.988.815

Sumber Data : Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Badung

Dari data tabel 1.19 di atas terlihat bahwa jumlah nilai investasi dari tahun 2011 sampai 2014 berfluktuasi. Jumlah investasi terbesar terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini disebabkan karena adanya perluasan pembangunan bandara Ngurah Rai, pembangunan jalan tol di Nusa Dua dan meningkatnya investasi di bidang akomodasi pariwisata.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	2.985	6.785	17.012	9476
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	689	777	785	1459
3	Rasio daya serap tenaga kerja	4,33	8,73	21,67	6,49

Sumber Data : Disosnaker Kabupaten Badung

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga yang bekerja pada perusahaan (PMA/PMDN). Dari data Tabel 20 di atas terlihat ratio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Badung pada tahun 2011 – 2014 berfluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 21,67. Hal ini disebabkan karena adanya perluasan pembangunan bandara Ngurah Rai dan meningkatnya pembangunan akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung, sehingga dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Nilai tukar petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2012
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	99,8	100	110,29	157,53
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	90,52	100	112,24	124,46
3.	Rasio	1,103	1	0,98	1,265

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Dan Dinas Pertanian Kabupaten Badung

Dari tabel 2.25 terlihat bahwa Nilai tukar petani (NTP) setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan indikator Indeks yang diterima petani 99,8 pada tahun 2011 menjadi 157,53. Sedangkan Indeks yang dibayar petani hanya meningkat pada tahun 2013 yang artinya pengeluaran petani lebih tinggi 1,95 point dibandingkan pendapatannya. Pada tahun 2012 Indeks yang diterima dan Indeks yang dibayar sama, sedangkan tahun 2011 dan 2014 Indeks yang diterima petani lebih besar dari Indeks yang dibayar.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel 2.26
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun 2011 s.d 2014

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Total pengeluaran RT non pangan	617.273	728.813	827.250	-
2.	Total pengeluaran	1.016.725	1.211.685	1.331.826	-
3.	Rasio	60,71	60,11	62,11	-

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung

Pada tabel 2.26. Tabel Pengeluaran RT non pangan terus mengalami peningkatan dari Total Pengeluaran, dengan ratio di kisaran 60,11 s/d 62,11, yang artinya pengeluaran RT untuk kebutuhan pangan pengeluarannya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsi non pangan. Indikasi ini mencerminkan tingkat kesejahteraan petani semakin meningkat.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 2.27
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Badung
Tahun 2011 s.d 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Realisasi pemanfaatan ruang (Kawasan Lindung)	-	-	-	28,98
2.	Realisasi pemanfaatan ruang (Kawasan Budidaya)	-	-	-	366,63
3.	Rencana Peruntukan RTRW (Kawasan Lindung)	-	-	-	28,82
4.	Rencana Peruntukan RTRW (Kawasan Budidaya)	-	-	-	389,69
5.	Rasio kawasan lindung (1./3.)	-	-	-	100,5
6.	Rasio kawasan budidaya (2./4.)	-	-	-	94,08

Sumber Data : Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Rasio ketaatan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 untuk pola pemanfaatan ruang kawasan lindung eksisting sudah sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Badung. Sedangkan ketaatan pada pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebesar 94,08% terhadap RTRW Kabupaten Badung.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28
Persentase Luas Wilayah Produktif
Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Luas wilayah produktif	-	-	-	256,70
2.	Luas Seluruh wilayah budidaya	-	-	-	389,69
3.	Rasio (1/2.)	-	-	-	65,87

Sumber Data : Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Untuk luas wilayah produktif di Kabupaten Badung sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 sebagai kawasan budidaya pertanian dalam arti luas dengan rasio sebesar 65,87% dari total luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Tabel 2.29
Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah kasus narkoba	15	19	25	17
2.	Jumlah kasus pembunuhan	2	2	4	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	11	8	5	5
4.	Jumlah kasus penganiayaan	80	71	116	97
5.	Jumlah kasus pencurian	408	310	466	319
6.	Jumlah kasus penipuan	58	51	79	21
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	1	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	574	461	696	460
9.	Jumlah penduduk	506.043	524.659	533.203	460.618
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,11%	0,09%	0,13%	0,10%

Sumber Data : Satpol PP Kabupaten Badung dan Kesbangpolinmas Kabupaten Badung

Keamanan dan ketertiban merupakan landasan utama menciptakan situasi dan kondisi Kabupaten Badung yang aman dan damai. Rasa aman dan tenteram merupakan prasyarat bagi berputarnya roda pembangunan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meningkatnya jumlah kejahatan merupakan gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Badung menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 terjadi 574 kasus, kemudian menurun menjadi 461 kasus pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 696 kasus pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 menurun menjadi 460 kasus. Jenis kriminalitas yang mencolok adalah pencurian dan penipuan.

Tindak kejahatan lainnya yang juga cenderung meningkat adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pada tahun 2012 dan tahun 2013, jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba meningkat dibanding tahun 2011. Namun pada tahun 2014 terdapat kasus narkoba sebanyak 17 kasus menurun sebesar 68 % dibanding tahun 2013 sebanyak 25 kasus.

b. Jumlah Demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demonstrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30
Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Bidang politik	-	-	-	1
2	Ekonomi	-	-	1	2
3	Kasus pemogokan kerja	-	1	1	2
4	Jumlah unjuk rasa	-	1	2	5

Sumber Data : Satpol PP Kabupaten Badung dan Kesbangpolinmas Kabupaten Badung

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bersama-sama dengan Kepolisian dan aparat pengamanan lainnya melaksanakan tugas pengamanan demo yang dilakukan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang terjadi di areal Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Adapun demo yang diamankan selama kurun waktu dari Tahun 2011 - 2014 terkait dengan bidang politik, ekonomi dan kasus pemogokan kerja sebagai berikut : Tahun 2011 tidak ada Demo oleh masyarakat, Tahun 2012 ada satu kasus pemogokan kerja yang dilakukan oleh Karyawan Hotel Kartika di Kuta, Tahun 2013 terjadi dua kali demo yang dilakukan oleh pegawai taxi di Jimbaran Kuta Selatan dan Demo pedagang di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kuta. Sedangkan pada Tahun 2014 terjadi demo sebanyak lima kali yang dilakukan oleh penambang galian C, sopir taxi di Jimbaran, Demo oleh mahasiswa Universitas Mahendradata Denpasar, Demo oleh Forum Kaling dan demo oleh masyarakat Desa Adat Cemagi, Kecamatan Mengwi.

2.5. Hasil analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditunjukkan dalam Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	7,07	7,64	6,82	6,97	6,27	-	
1.2.	Laju inflasi provinsi	3,75	4,71	7,35	8,03	2,70	-	
1.3.	PDRB per kapita	39,80	41,79	43,58	45,56	47,34	-	
1.4.	Indeks Gini	0,3385	0,3258	0,3468	0,3404		-	
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	19,20	19,75	15,12	18,64		-	
1.6.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	2,62	2,16	2,46	2,54	2,49	2,00 – 3,00	Sesuai
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka partisipasi kasar	115,01	129,23	117,73	120,37		100	Melampaui
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	99,95	99,96	99,99	100	100	100	Belum Tercapai
1.3.	Angka Partisipasi Murni							
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,87	103,67	98,62	99,12	99,30	90 - 100	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	91,28	101,62	91,59	92,10	93,27	90 - 100	Melampaui
1.3.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/ Paket C	78,04	91,09	83,69	83,72	90,02	90 - 100	Belum Tercapai
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	95,10	99,70	99,74	99,57	99,81	-	
2.2.	Angka usia harapan hidup	73,91	74,05	74,19	74,30	74,61	-	
2.3.	Prevalensi balita gizi buruk	0,21	0,11	0,42	0,25	0,21	3,60	Belum Tercapai
3.	Ketenagakerjaan							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja	54,53	54,49	56,18	53,58	57,11	-	
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	108,07	115,87	111,37	113,13	113,13	100	Melampaui
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	49	52	50	51	56	-	
1.1.3.	Rasio guru/murid	17	17	17	17	17	40	Belum Tercapai
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	29	29	28	28	28	40	Belum Tercapai
1.2.	Pendidikan menengah:							

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	117,54	133,5	118,19	123,19	124,01	100	Melampaui
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	23	27	23	23	24	-	
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	15	15	15	15	15	21	Belum Tercapai
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	39	38	37	35	36	21	Melampaui
1.3.	Fasilitas Pendidikan:							
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	269	271	272	274	274	275	Belum tercapai
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85	87	87	91	90	91	Belum Tercapai
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	320	320	320	320	320	-	
1.5.	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	Sesuai
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,00	0,12	0,06	0,01	0,03	0,00	Belum Tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.6.	Angka Kelulusan:							
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99,99	100	100	100	100	Sesuai
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99,97	99,99	99,99	99,99	100	Belum tercapai
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	99,98	100	99,99	100	Sesuai
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	94,60	97,91	96,93	96,96	100	Belum tercapai
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,27	94,89	98,44	100	99,21	100	Belum tercapai
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV	61,04	62,56	80,32	81,61	82,11	100	Belum tercapai
2.	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	80,8	53,2	59,0	60,0	71,0	1:100	
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	14,7	14,8	14,9	15,9	15,9	-	
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,070	0,069	0,100	0,116	0,116	-	
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	36,5	26,2	55,3	110,0	110,0	1 :40	Sesuai
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	78,2	73,5	73,3	61,72	61,74	1 :100	Sesuai
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60,3	54,9	80,6	72,99	72,99	80	Belum tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,09	92,0	95,7	99,72	99,73	90	Melampaui
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positive	8,49	43	45,2	51,8	51,8	85	Belum Tercapai
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	105,87	104,3	96,77	93,86	93,86	90	Melampaui
2.14.	Jumlah puskesmas	12	12	13	13	13	-	
2.15.	Jumlah pembantu puskesmas	53	54	54	54	54	-	
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	62,78 5%	84,21 8%	89,06 9%	91,39 2%	91,392 %	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	0,057	0,0571	0,0567	0,0567	0,0567	-	
3.3.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	Belum Tercapai
3.4.	Panjang jalan dilalui Roda 4	565.9 81	628.7 44	628.7 44	628.7 44	628.74 4	-	
3.5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	355.3 53	529.5 17	560.0 18	574.6 26	574.62 6	-	
3.6.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	-	569.5 54	569.55 4	-	
3.7.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	-	569.5 54	569.55 4	-	
3.8.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	10.27 2,39	10.34 5,77	10.68 5,17	10.82 9,64	10.829 ,64	-	
4.	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	64.02 5,50	63.02 5,50	83.00 2,67	86.66 7,00	97.06 6,83	-	
4.2.	Rumahtangga pengguna listrik	100	100	100	100	100	100,00 %	
4.3.	Rumahtangga ber-Sanitasi	86.51 9	868,5 80	89.03 5	105.1 54	105.1 54	-	
4.4.	Rumah layak hun	85.636	85.636	85.636	85.636	85.636	-	
5.	Perencanaan Pembangunan							
5.6.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	sesuai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
5.7.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	sesuai
5.8.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sesuai
5.9.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
6.	Perhubungan							
6.6.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	372.750	1.162.527	1.087.571	1.279.597	1.279.597	1.279.597	Sesuai
6.7.	Rasio ijin trayek	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,0000050	Sesuai
6.8.	Jumlah uji kir angkutan umum	7.138	10.500	12.285	13.689	13.689	13.689	Sesuai
6.9.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3	3	Sesuai
6.10.	Angkutan darat							
6.11.	Kepemilikan KIR angkutan umum	7.150	7.464	8.909	10.316	10.316	10.316	Sesuai
6.12.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	46 menit	46 menit	46 menit	48 menit	48 menit	48 menit	Sesuai
6.13.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	Sesuai
6.14.	Pemasangan Rambu-rambu	4861	4969	5088	5508	5508	7845	Belum Tercapai
7.	Lingkungan Hidup							
7.6.	Persentase penanganan sampah	72,9	89,3	97,3	97,9	97,9	100	Belum Tercapai
7.7.	Pencemaran status mutu air	85%	99%	108%	112%	112%	100%	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
7.8.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
7.9.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,000 50	0,000 50	0,000 50	0,000 50	0,0005 0	5	Belum Tercapai
7.10.	Penegakan hukum lingkungan	-	-	-	100%	100%	100%	Sesuai
8.	Pertanahan							
8.6.	Persentase luas lahan bersertifikat	-	67,60	73,75	80,16	80,16	100%	Belum Tercapai
8.7.	Penyelesaian kasus tanah Negara	18	22	24	28	28	14	Melampaui
8.8.	Penyelesaian izin lokasi	31,58 %	45,83 %	-	-	-	100%	Belum Tercapai
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
9.6.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	1	Belum Tercapai
9.7.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,70	0,86	0,90	0,92	0,92	1	Belum Tercapai
9.8.	Rasio pasangan berakte nikah	0,74	0,77	0,60	0,104	0,104	1	Belum Tercapai
9.9.	Kepemilikan KTP	99%	99%	0,98	99%	99%	100%	Belum Tercapai
9.10.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	700	800	900	920	920	1.000	Belum Tercapai
9.11.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	100%	Belum Tercapai
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
10.6.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	44,69 %	45,12 %	44,31 %	46,56 %	46,56 %	100%	Belum Tercapai
10.7.	Rasio KDRT	0,50	0,071	0,044	0,048	0,048	0	Belum Tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
10.8.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	6 Kasus	13 Kasus	12 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	0	Belum Tercapai
10.9.	Persentase Penanganan kasus KDRT yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
11.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,14	2,10	2,11	2,12	2,12	2,1	Sesuai
11.2.	Rasio akseptor KB	85,21	85,49	85,46	84,49	84,49	74,00	Melampaui
11.3.	Cakupan peserta KB aktif	82,21 % (65.88 5)	85,46 (%) (67.07 0)	85,57 % (67.1 45)	88,91 % (70.3 48)	88,91 % (70.34 8)	65 %	Melampaui
11.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	3577	3906	3787	2827	2827	-	
12.	Sosial							
12.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	9	9	9	9	9	-	
12.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	2.375	2.773	2.773	2.773	2.773	-	
12.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	297	372	682	782	782	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
13.	Ketenagakerjaan							
13.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	2,36	1,63	2,20	3,28	3,28	-	
13.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	51	54	54	62	62	-	
13.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	77,8	72,92	73,04	73,05	72,92	-	
13.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	1.251	1.396	1.312	1.128	1.128	-	
13.5.	Tingkat pengangguran terbuka	2,30	1,60	0,77	0,48	0,34	-	
14.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
14.1.	Persentase koperasi aktif	88,87 %	90%	78%	78,92 %	78,92 %	75%	Melampaui
14.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	14.754	15.862	17.496	18.700	18.700	-	
14.3.	Jumlah BPR/LKM	607	629	639	663	663	-	
14.4.	Usaha Mikro dan Kecil	839	912	338	786	786	-	
15.	Penanaman Modal							
15.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	689	777	785	1.459	1.459	-	
15.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3.173.814.437.239	7.180.810.126.088	6.147.499.450.989	2.618.136.988.815	2.618.136.988.815	19.032.403.640.000	Melampaui
15.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	4,33	8,73	21,67	6,49	6,49	4,86	Melampaui
15.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1,74	1,36	0,03	(1,47)	(1,47)	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
16.	Kebudayaan							
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Kali	1 Kali	Sesuai				
16.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
16.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	23 Situs	-	-	-		
17.	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri							
17.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60	46	40	40	40	-	
17.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	2	3	3		
18.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
18.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,2	5,4	5,2	5,1	5,1	7	Belum Tercapai
18.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	33,01	33,18	33,47	31,71	31,18	1 orang / 1 RT	Sudah tercapai
18.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	378	378	378	378	378	-	
18.4.	Pertumbuhan ekonomi	7,07	7,64	6,82	6,97	6,27	-	
18.5.	Kemiskinan	3.726 RTS-PM	11.54 2RTS-PM	10.87 9 RTS-PM	9.783 RTS-PM	9.783 RTS-PM	0	Belum Tercapai
18.6.	Penegakan PERDA	105,23	113,43	104,88	106,88	106,88	100	Melampaui
18.7.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 kali patroli dalam sehari	2 kali sehari dalam sehari	Sesuai				

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
18.8.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	60%	65%	70%	75%	80%	100%	Belum tercapai
18.9.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1922 orang	1922 orang	1922 orang	1922 orang	1922 orang	-	
18.10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	84.20 %	84.20 %	295.4 %	295.4 %	295.4 %	25%	Melampaui
18.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	84.20 %	84.20 %	295.4 %	295.4 %	295.4 %	25%	Melampaui
18.12	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	80.40 %	88.14 %	88.32 %	96.33 %	96.33 %	75%	Melampaui
18.13	Sistim Informasi Manajemen Pemda	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	Sesuai
18.14	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-	74,90	79,43	(62,51–81,25) untuk interval Baik	Memenuhi nilai interval baik
19.	Ketahanan Pangan							
19.1.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1	-	
19.2.	Ketersediaan pangan utama	86,98 %	85,89 %	80,47 %	89,51 %	89,51 %	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
20.	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
20.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok	62 Kelompok	Belum Tercapai				
20.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3 kelompok-pok	606 Kelompok-pok	Belum Tercapai				
20.3.	Jumlah LSM (yang memiliki SKT)	7	7	7	5	2		
20.4.	LPM Berprestasi	1 kelompok-pok	5 kelompok-pok	Belum Tercapai				
20.5.	PKK aktif	606 kelompok-pok	Sesuai					
20.6.	Posyandu aktif	572 Kelompok-pok	572 Kelompok-pok	573 Kelompok-pok	573 Kelompok-pok	573 Kelompok-pok	573 Kelompok-pok	Sesuai
20.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	93,5%	79,4%	89,3%	93,9%	93,9%	70%	Melampaui
20.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	62 Kelompok-pok	Sesuai					
21.	Statistik							
21.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
21.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
22.	Kearsipan							
22.1.	Pengelolaan arsip secara baku	30 SKPD	30 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	135 SKPD	Belum tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
22.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	40 Orang	40 Orang	104 Orang	132 Orang	132 Orang	233 Orang	Terlampau
23.	Komunikasi dan Informatika							
23.1.	Jumlah jaringan komunikasi	6	6	6	6	6	6	Sesuai
23.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	227	227	211	211	211	211	Belum tercapai
23.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	22	22	22	22	22	22	Sesuai
23.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	10	10	10	10	10	10	Sesuai
23.5.	Web site milik pemerintah daerah				62	62	62	Sesuai
23.6.	Pameran/expo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Sesuai
24.	Perpustakaan							
24.1.	Jumlah perpustakaan	336 Perpus takaan	336 Perpus takaan	336 Perpus takaan	440 Perpus takaan	440 Perpus takaan	Setiap sekolah, desa/Kel urahan memiliki perpusta kaan yang standar nasional perpusta kaan	Sebagian besar belum memenuhi standar perpustakaa n
24.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	817 Orang	1.024 Orang	4.621 Orang	3.507 Orang	3.507 Orang	0,55 perjum- lah pendu- duk	Belum tercapai
24.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.671 Exp	3.461 Exp	9.105 Exp	6.359 Exp	6.359 Exp	10 persen dari jumlah koleksi 5 tahun terakhir	Masih perlu penambahan 10 % pertahun

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1. Pertanian								
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62,88	63,20	64,61	62,91	62,91	-	
1.2.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	12,91 M	13,43 M	14,21 M	-	-	-	
1.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	666,32 M	693,76 M	744,55 M	-	-	-	
1.4.	Cakupan bina kelompok petani	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	-	
1.5.	Jumlah Populasi ternak	1.661.692	1.357.001	1.366.005	1.476.035	1.476.035	-	
2. Kehutanan								
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	137,54 ha	175,68 ha	37,62 ha	82,13 ha	82,13 ha	-	
2.2.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	40 Jt	40 Jt	40 Jt	-	-	-	
3. Pariwisata								
3.1.	Kunjungan wisata	2.756.579	2.892.019	3.148.443	3.681.342	3.681.342	Pada 2011 target 2.700.000 wisman, bertambah 150.000 wisman setiap tahunnya	Melampaui
3.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	5.948.208,92	7.186.658,79	8.807.667,89	10.815.279,76	10.815.279,76	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
4.	Kelautan dan Perikanan							
4.1.	Produksi perikanan	38.386,30	48.563,50	49.099	6.619,60	6.619,60	152.494,63	Belum tercapai
4.2.	Konsumsi ikan	30,91	31,10	32,20	32,87	32,87	32,7	Melampaui
4.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	150	169	167	167	167	167	sesuai
4.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	4.467,9	4.570,3	4.748,4	6.094,7	6.094,7	16.523,2	Melampaui
5.	Perdagangan							
5.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,30%	10,30%	9,82%	8,68%	8,68%	-	
5.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	128.296.174,45	64.119.363,27	57.770.469,90	63.675.447,62	63.675.447,62	117.496.806,53	Belum Tercapai
6.	Perindustrian							
6.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,58%	4,36%	4,21%	4,01%	4,01%	-	
6.2.	Pertumbuhan Industri.	54	41	50	22	22	-	
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.	Pertanian							
1.1.	Nilai tukar petani	1,103	1	0,98	1,265	1,265	-	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,77	2,04	2,70	1,36	1,36	1,36	Sesuai
1.2.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	372.750	1.162.527	1.087.571	1.279.597	1.279.597	1.279.597	sesuai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	240.740 Orang	538.011 Orang	702.032 Orang	702.032 Orang	702.032 Orang	sesuai
2.	Lingkungan Hidup							
2.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	-	
	Fokus Iklim Berinvestasi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas	0,11%	0,09%	0,13%	0,10%	0,10%	-	
1.2.	Jumlah demo	-	1	2	5	5	-	

Sumber Data : SKPD Terkait

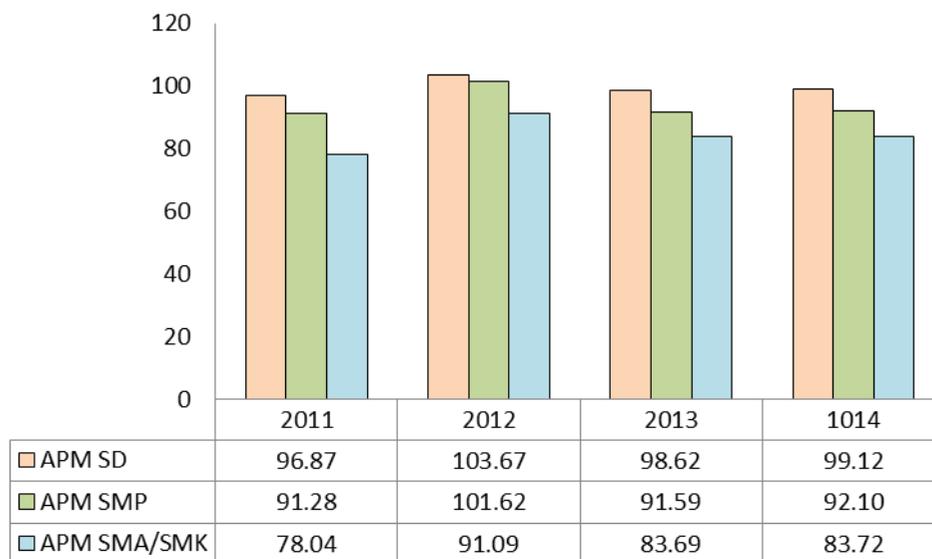
Berdasarkan Tabel 30 tentang hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Badung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.5.1 Fokus kesejahteraan rakyat

a) Pendidikan

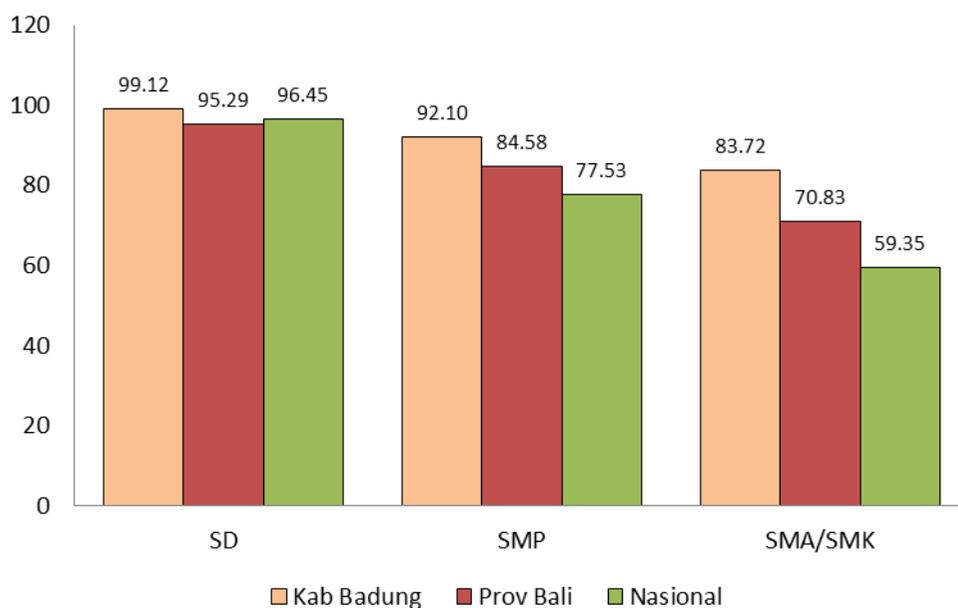
Dari beberapa indikator pada fokus kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni jenjang SD dan angka partisipasi murni jenjang SMP telah mampu melampaui standar yang ditetapkan. Sedangkan indikator angka partisipasi sekolah dan angka pendidikan yang ditamatkan telah sesuai dengan standar. Namun terdapat pula beberapa indikator yang belum mampu memenuhi standar yaitu : angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK. Kondisi ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang cukup tinggi serta adanya motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah di luar wilayah Kabupaten Badung.

Grafik 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK
Kabupaten Badung
Tahun 2011 - 2014



Sumber Data: Disdikpora Kab Badung, data diolah

Grafik 2.12
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni
SD, SMP dan SMA/SMK



Sumber Data: Disdikpora dan BPS Kab Badung, Data Diolah

Apabila dilihat dari posisi relatif capaian indikator angka partisipasi murni Kabupaten Badung dengan Propinsi Bali dan Nasional maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Badung telah berada diatas capaian Propinsi Bali dan Nasional.

1.5.2 Fokus layanan wajib

a) Pendidikan dasar

Ditinjau dari indikator pendidikan dasar maka menunjukkan bahwa terdapat indikator yang telah melampaui standar yaitu angka partisipasi sekolah dan terdapat beberapa indikator yang belum mampu memenuhi standar, antara lain : rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Badung, masih terdapat kekurangan guru sebagai tenaga pendidik.

b) Pendidikan menengah

Dalam penyediaan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Badung dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata telah mampu melampaui standar, namun rasio jumlah guru terhadap murid masih berada dibawah standar yang ditetapkan.

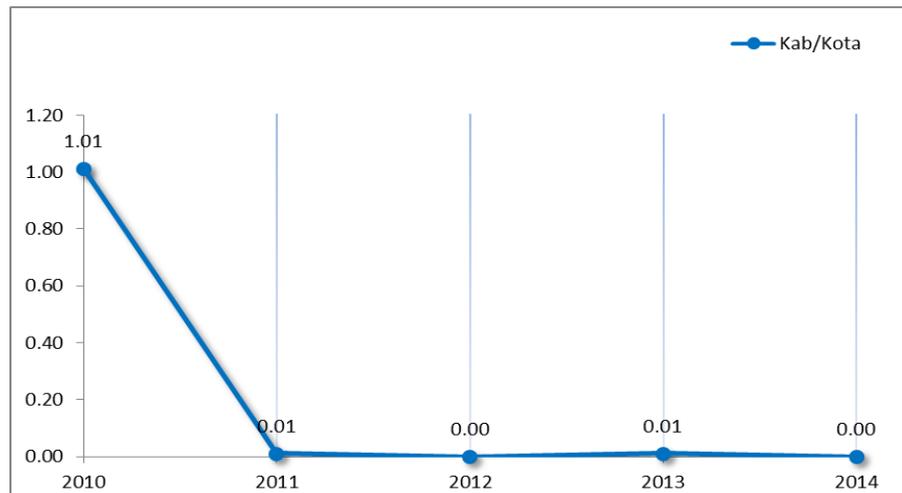
c) Fasilitas pendidikan

Selanjutnya dalam bidang penyediaan fasilitas pendidikan terdapat beberapa indikator yang telah mampu memenuhi standar antara lain : indikator sekolah SMP dengan kondisi bangunan baik, angka putus sekolah jenjang sekolah dasar, angka putus sekolah jenjang sekolah menengah pertama, angka kelulusan jenjang sekolah dasar, serta angka kelulusan jenjang sekolah menengah atas/kejuruan. Sedangkan untuk indikator yang belum memenuhi standar antara lain : angka putus sekolah jenjang SMA/K, angka kelulusan jenjang sekolah menengah pertama, angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama serta dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas/kejuruan, dan pencapaian jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D IV. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan dalam beberapa indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk/migrasi, serta keterbatasan kemampuan anak didik dalam mengikuti proses pendidikan serta terdapat tenaga pendidik/guru yang pada saat sekarang ini sedang dalam proses menempuh pendidikan untuk memenuhi kualifikasi S1/D IV.

Mengenai perkembangan angka putus sekolah pendidikan dasar jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengalami perkembangan yang cukup signifikan, walaupun untuk jenjang sekolah menengah pertama sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013, namun kembali mengalami penurunan yang

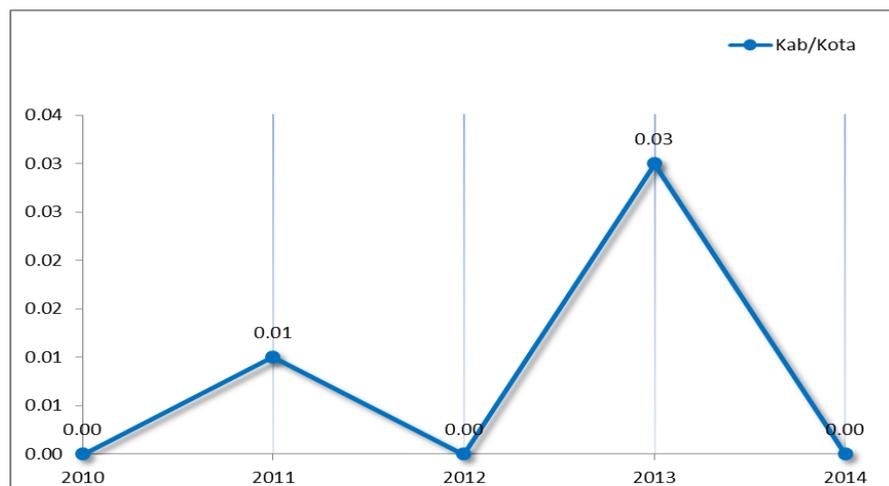
sangat drastic pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun perkembangan angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.13
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)
Kabupaten Badung, Tahun 2010 - 2014



Sumber data : Disdikpora Kabupaten Badung

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)
Kabupaten Badung, Tahun 2010 - 2014



Sumber data : Disdikpora Kabupaten Badung

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, perkembangan indikator pendukung secara umum menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011 hingga 2014 telah terjadi kemajuan yang berarti. Hal ini antara lain terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di atas 6,5%. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dengan menggunakan tahun dasar 2010 mencapai 7,07% dan kembali meningkat mencapai 7,67% pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi sedikit

pelemahan menjadi 6,82% dan pada tahun 2014 kembali menguat mencapai angka 6,97%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tentunya diharapkan dapat menstimulasi pembukaan lapangan pekerjaan baru sehingga berimplikasi pada penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan.

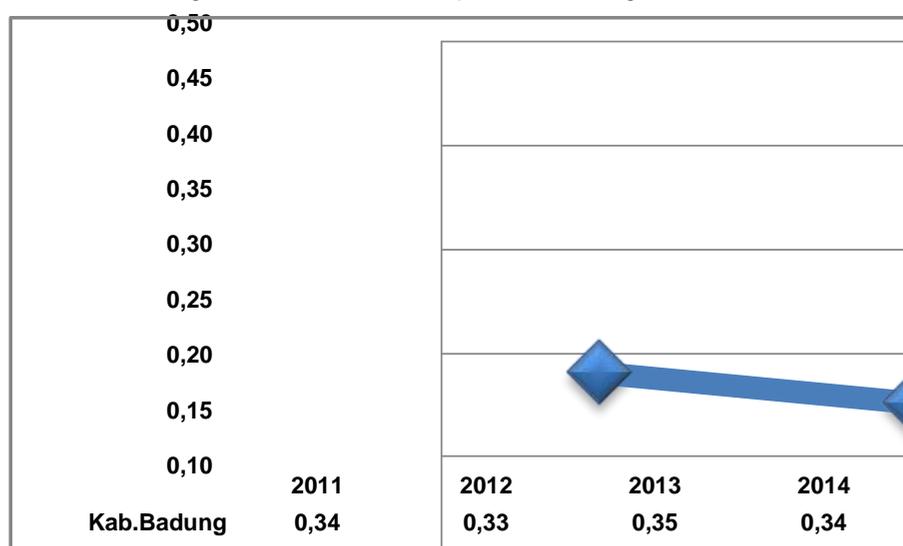
Demikian pula bila dilihat dari indikator pendapatan per kapita, dalam periode yang sama selalu mengalami peningkatan dari rata-rata sebesar Rp 38,90 juta/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi Rp 45,56 juta/kapita/tahun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan per kapita ini, membantu daya beli masyarakat seiring dengan rata-rata laju inflasi di tingkat Provinsi yang cenderung terus bergerak naik dari 3,75% pada tahun 2011 hingga mencapai 8,43% pada tahun 2014. Laju inflasi yang tinggi ini tentunya mempengaruhi tingkat harga komoditi makanan maupun non makanan, yang amat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tentunya menarik pula untuk menyandingkan perkembangan indikator ekonomi tersebut dengan indikator kemiskinan sehingga dapat diperoleh gambaran apakah laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rata-rata pendapatan per kapita dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Bila dilihat dari indikator kesenjangan, data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa gini rasio berkembang secara fluktuatif dari 0,3385 pada tahun 2011 lalu pada tahun 2012 turun menjadi 0,3258. Penurunan indeks gini ini tentunya bermakna positif karena menunjukkan penurunan tingkat kesenjangan. Sekalipun demikian, gini rasio Kabupaten Badung pada tahun 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan menjadi 0,3468 dan selanjutnya pada tahun 2014 turun sedikit menjadi 0,3404.

Kondisi yang diharapkan tentunya indikator gini rasio dapat terus mengecil mendekati angka 0 karena menunjukkan menurunnya kesenjangan antar penduduk/pertumbuhan dinikmati secara merata. Dari perkembangan tersebut, kondisi kesenjangan yang rendah ditunjukkan dengan angka gini rasio yang berada pada kisaran 0 - 0,35 sehingga perkembangan angka gini rasio Kabupaten Badung selama kurun waktu tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan rendah.

Bila dilihat dari kondisi di tingkat Provinsi Bali maupun nasional, perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada tahun 2014 cenderung lebih baik, karena arah perkembangannya menurun. Berbeda halnya dengan gini rasio Provinsi Bali dan nasional yang pada tahun terakhir bergerak naik, yang selama empat tahun terakhir telah berada dalam tingkat ketimpangan sedang, dengan indeks lebih besar dari 0,35. Peningkatan gini rasio tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan kesenjangan pendapatan masyarakat secara umum di tingkat Provinsi Bali dan nasional.

Grafik 2.15
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2011-2014



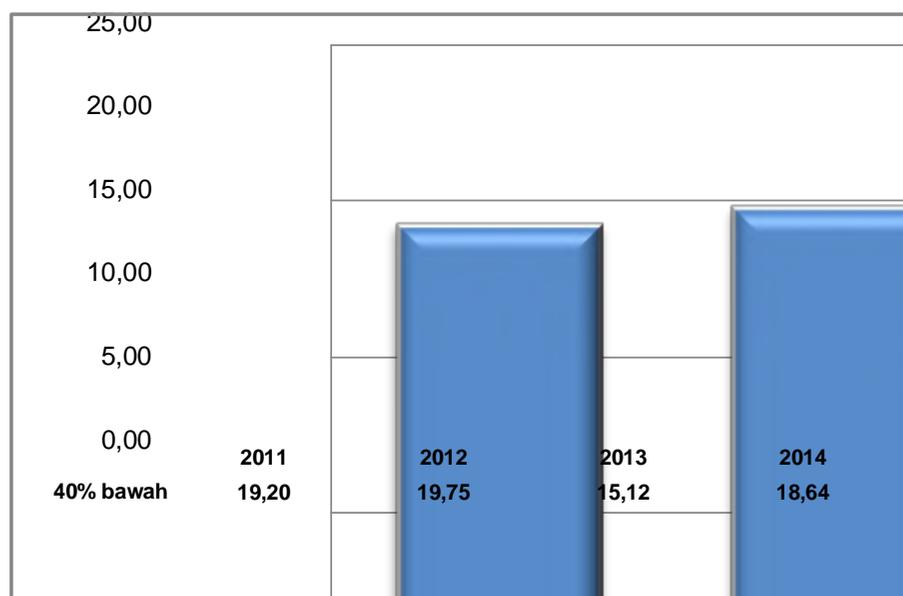
Sumber: BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya bila dilihat dari indikator pemerataan, sepanjang tahun 2011 hingga 2014 distribusi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah berfluktuasi dari kisaran 19% lebih pada tahun 2011 dan tahun 2012, selanjutnya turun menjadi 15,12% pada tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi 18,64% pada tahun 2014. Kondisi peningkatan indikator pemerataan pada tahun 2014 ini menggembirakan karena menunjukkan peningkatan distribusi pendapatan yang dinikmati 40% penduduk berpendapatan terendah. sekaligus menunjukkan berkurangnya tingkat kesenjangan antar lapisan masyarakat.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia bila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati lebih besar dari 17% pendapatan, maka pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah. Kondisi Kabupaten Badung dalam empat tahun terakhir memang berfluktuasi, namun kisarannya masih tetap berada di atas 17%. Oleh sebab itu maka perlu

diupayakan agar porsi distribusi pendapatan yang dinikmati oleh 40% terendah ini dapat tetap di atas 17% dan terus meningkat. Grafik distribusi pendapatan pada kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Badung tahun 2011 hingga 2014 adalah sebagai berikut.

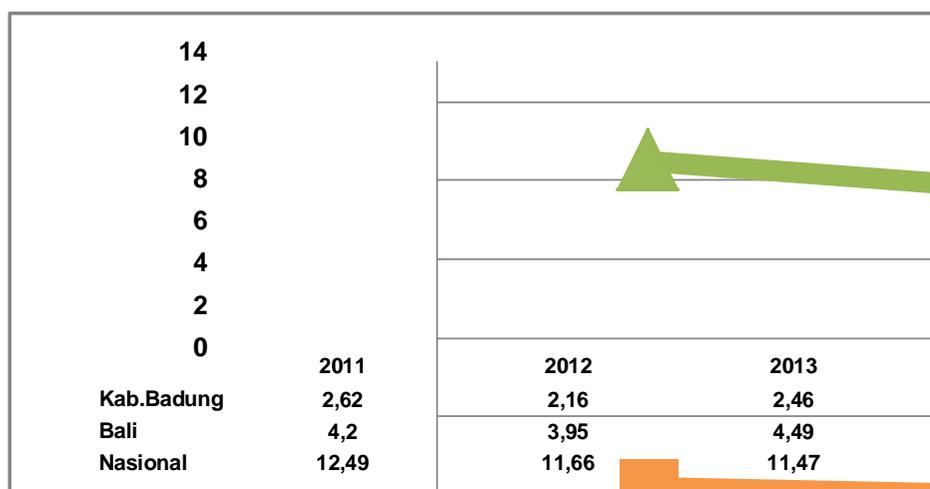
Grafik 2.16
Distribusi Pendapatan Pada Kelompok
40% Penduduk Berpendapatan Rendah
Di Kabupaten Badung Tahun 2011-2014



Di sisi lain bila dilihat dari proporsi penduduk yang tergolong miskin karena daya belinya berada di bawah garis kemiskinan, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Badung hingga tahun 2013 berada pada tingkat 2,46%. Oleh sebab itu dari sudut pandang persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan pada tahun 2011 mencapai 97,38% (tingkat kemiskinan 2,62%) dan tahun 2012 naik menjadi 97,84% seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 2,16%. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 2,46% sehingga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan mengalami penurunan menjadi 97,54%.

Bila tingkat kemiskinan Kabupaten Badung ini dibandingkan dengan kondisi di Provinsi Bali dan nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung telah berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Bali dan nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Bali dari tahun 2011 hingga tahun 2013 masih berada pada kisaran 4%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2013 masih sebesar 11,47%. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Badung, Bali dan nasional dari tahun 2011 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.17
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Badung, Bali dan Nasional
Tahun 2011-2013



Sejauh ini tidak terdapat standar persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan yang dapat menjadi acuan. Namun tentunya kondisi yang diupayakan dan diharapkan dapat terwujud adalah semakin kecilnya tingkat kemiskinan sehingga hampir mencapai 100% penduduk berada di atas garis kemiskinan.

Dari berbagai indikator pendukung Aspek Kesejahteraan Masyarakat nampak bahwa secara umum kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2011-2014 mengalami peningkatan, dan untuk memperbaiki capaian aspek kesejahteraan fokus perhatian perlu dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan per kapita agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Oleh sebab itulah indikator gini rasio perlu diarahkan agar terus menurun mendekati nol dan distribusi pendapatan terhadap 40% penduduk berpendapatan terendah perlu terus diarahkan agar menguat, mencapai posisi yang lebih tinggi dari yang pernah dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 19,75% (posisi tertinggi selama kurun waktu 2011-2014).

Dari beberapa indikator pada fokus kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni jenjang SD dan angka partisipasi murni jenjang SMP telah mampu melampaui standar yang ditetapkan. Sedangkan indikator angka partisipasi sekolah dan angka pendidikan yang ditamatkan telah sesuai dengan standar. Namun terdapat pula beberapa indikator yang belum mampu memenuhi standar yaitu : angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK. Kondisi ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang

cukup tinggi serta adanya motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah di luar wilayah Kabupaten Badung.

Untuk indikator pendidikan dasar terdapat indikator yang telah melampaui standar yaitu angka partisipasi sekolah dan ada pula indikator yang belum mampu memenuhi standar, antara lain : rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Badung, masih terdapat kekurangan guru sebagai tenaga pendidik.

Dalam penyediaan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Badung dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata telah mampu melampaui standar, namun rasio jumlah guru terhadap murid masih berada dibawah standar yang ditetapkan.

Selanjutnya dalam bidang penyediaan fasilitas pendidikan terdapat beberapa indikator yang telah mampu memenuhi standar antara lain : indikator sekolah SMP dengan kondisi bangunan baik, angka putus sekolah jenjang sekolah dasar, angka putus sekolah jenjang sekolah menengah pertama, angka kelulusan jenjang sekolah dasar, serta angka kelulusan jenjang sekolah menengah atas/kejuruan. Sedangkan untuk indikator yang belum memenuhi standar antara lain : angka putus sekolah jenjang SMA/K, angka kelulusan sjenjang sekolah menengah pertama, angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama serta dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas/kejuruan, dan capaian jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D IV. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan dalam beberapa indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk/migrasi, serta keterbatasan kemampuan anak didik dalam mengikuti proses pendidikan serta terdapat tenaga pendidik/guru yang pada saat sekarang ini sedang dalam proses menempuh pendidikan untuk memenuhi kualifikasi S1/D IV.

Pada Aspek Pelayanan Umum khususnya Kesehatan dari indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pencapaian kinerja dari tahun 2011 hingga tahun 2014 masih berfluktuasi, dan secara keseluruhan indikator tersebut masih belum mencapai standar yang ditetapkan.

Dari indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaian kinerja Dinas Kesehatan dari tahun 2011 hingga 2014 secara keseluruhan telah melampaui standar. Sedangkan pada indikator cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin, pencapaian kinerja pada 4 (empat) indikator tersebut dari tahun 2011 hingga tahun 2014 telah sesuai standar (100%).

Dari indikator cakupan kunjungan bayi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari tahun 2011 hingga tahun 2014 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Bila capaian indikator ini dibandingkan dengan standar yang ditetapkan maka pencapaiannya telah melampaui standar.

Pada Aspek Pelayanan Umum khususnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari indikator rata-rata jumlah anak per keluarga penurunan. Bila capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Bali dengan rata-rata jumlah anak sebesar 2,3, maka capaian indikator tersebut di Kabupaten Badung telah jauh lebih kecil yaitu 2,14. Bercermin dari perkembangan selama tahun 2011 hingga 2014 tersebut maka tantangan selanjutnya adalah menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga di tahun 2015 menjadi 2,0 sehingga dapat mendukung visi program KB Nasional untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.

Dari indikator ratio akseptor KB, capaian kinerja BKBKS dari tahun 2011 hingga 2014 secara keseluruhan juga telah menunjukkan terjadinya peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kesadaran pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Badung untuk menggunakan alat kontrasepsi yang meningkat. Sebagai gambaran, dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 72.123, yang telah menggunakan alat kontrasepsi mencapai 60.937 (84,49 %) dari standar yang ditentukan sebesar 74,00 % dari total PUS. Demikian pula dari indikator cakupan Peserta KB Aktif, peserta KB Aktif di Kabupaten Badung dari tahun 2011 hingga 2014 secara konsisten juga terus mengalami peningkatan, antara lain melalui pemakaian kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implant, vasektomi dan tubektomi, sehingga cakupan peserta peserta KB Aktif pada tahun 2014. Namun perlu diakui bahwa dari tingginya

cakupan peserta KB Aktif tersebut, nampaknya masih didominasi perempuan, sehingga tantangan ke depan adalah mendorong partisipasi laki-laki dalam program KB. Perhatian ke depan juga perlu diperkuat untuk mendorong pemakaian kontrasepsi jangka panjang (MKPJ) ini untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Sedangkan bila dilihat dari indikator jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, perkembangan dari tahun 2011 hingga 2014 jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Badung terus mengalami penurunan, dalam artian kualitasnya keluarga yang ada telah mengalami penguatan. Namun mengingat dinamika faktor sosial ekonomi, politik dan lainnya yang amat kompleks dan tidak seluruhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, maka upaya perlindungan sosial kepada Rumah Tangga Sasaran juga perlu dilakukan untuk memastikan mereka tidak jatuh di bawah garis kemiskinan.

Dari dimensi sosial, di Kabupaten Badung terdapat sembilan panti asuhan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama dan juga memperoleh perhatian Pemerintah Kabupaten Badung. Sebagai daerah yang secara sosial ekonomi mengalami perkembangan yang pesat, berbagai masalah terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga dialami oleh Kabupaten Badung, utama keberadaan Pekerja Seks Komersil (PSK) serta gelandangan pengemis. Terhadap keberadaan PMKS yang jumlahnya sulit untuk diketahui secara pasti ini telah terus dilakukan penanganan, baik melalui pembinaan dan pemulangan ke daerah asalnya. Demikian pula terhadap PMKS lainnya terus dilakukan pembinaan dan bantuan sosial yang dapat mendukung peningkatan kualitas kehidupannya.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Badung tentunya berimplikasi terhadap berbagai masalah sosial bahkan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata di atas 6,5% telah mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menekan angka tingkat pengangguran terbuka dari kondisi awal sebesar 2,30% pada tahun 2011 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,48% pada tahun 2014. Fenomena yang menarik dicermati adalah bahwa penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ini juga diikuti dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berturut-turut dari 76,38% pada

tahun 2011 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 71,41% pada tahun 2014. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kondisi TPAK Kabupaten Badung yang terus menurun selama kurun waktu 2011-2014 ini selanjutnya tentu perlu ditelusuri kembali penyebabnya, apakah karena sebagian besar pekerja lebih banyak bekerja ke luar wilayah Kabupaten Badung, atau ada penyebab lainnya.

Untuk memperluas peningkatan penempatan para pencari kerja maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung bersinergi dengan perusahaan secara berkelanjutan juga melaksanakan layanan bursa kerja. Dalam pelaksanaannya hingga tahun 2014 sebanyak 5000 lebih pencari kerja telah berhasil ditempatkan sehingga diharapkan dapat terus menekan angka pengangguran. Selanjutnya dari aspek hubungan industrial, berbagai permasalahan menjadi pemicu terjadinya sengketa antara pengusaha-pekerja. Data tahun 2011 hingga 2014 nampaknya menunjukkan gejala peningkatan jumlah sengketa per tahunnya, dari 51 per tahun pada tahun 2011 menjadi 62 per tahun pada tahun 2014. Berbagai perselisihan tersebut terjadinya dengan derajat yang beragam dari ringan. Hal ini perlu menjadi perhatian ke depan agar dapat ditekan dan derajatnya juga tetap berada pada derajat yang ringan dan tidak berimplikasi pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dijelaskan bahwa pada Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah diantaranya Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK seluruhnya belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijelaskan bahwa pada Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah diantaranya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan

Rasio KDRT belum tercapai sesuai dengan dengan standar yang ditetapkan sedangkan pada aspek Persentase Penanganan Kasus KDRT yang terselesaikan sudah mencapai standar yang telah ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dapat dijelaskan bahwa pada aspek Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) telah melampaui dari standar yang telah ditetapkan.

Untuk Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD dan PEMDES) dapat dijelaskan bahwa pada cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, PKK aktif, Posyandu aktif, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat telah mencapai standar yang telah ditetapkan dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat telah melampaui standar yang telah ditetapkan sedangkan pada aspek kemiskinan, Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan LPM Berprestasi belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dapat dijelaskan bahwa pada aspek Pengelolaan arsip secara baku belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan sedangkan pada aspek Peningkatan SDM pengelola kearsipan telah melampaui sebanyak 83 orang dari standar yang ditetapkan yaitu sebanyak 233 orang.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dapat dijelaskan bahwa pada aspek jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah seluruhnya belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam menjalankan Bidang Ketahanan Pangan menggunakan satu regulasi ketahanan pangan yang telah diatur berdasarkan permentan no 65 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Ketahanan Pangan berupa ketersediaan bahan pangan utama

telah mampu dipenuhi oleh Pemkab Badung dengan rasio kecukupan 80,47% - 89,51%.

Produktivitas padi memiliki tren yang cukup fluktuatif, terutama di tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 dari 64,61 Kw/ha menjadi 62,91 kw/ha, hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2014 adanya tunda tanam terkait musim kering yang berkepanjangan dan adanya rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani di beberapa subak abian.

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB sebesar 12,913 Milyar tahun 2011 dan tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan tren yang semakin meningkat. Untuk cakupan bina kelompok tani setiap tahunnya telah dilaksanakan pembinaan kelompok tani sebanyak 9 kelompok tani yang di harapkan dapat meningkatkan ketrampilan teknis kelompok tani tersebut.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan luas 137, 545 Ha pada tahun 2011 seluas 175,68 ha tahun 2012 seluas 37,625 ha tahun 2013 dan tahun 2014 seluas 82,13 ha. Tren penanaman sangat fluktuatif hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan permintaan masyarakat pemilik lahan untuk melaksanakan peningkatan kualitas tanam tanaman jenis tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis.

Untuk kerusakan kawasan hutan tidak terjadi kerusakan dalam kawasan hutan. Kondisi Hutan di Kabupaten Badung relatif aman sehingga penebangan liar, perusakan hutan tidak terjadi. Kontribusi sektor kehutanan yang dilaporkan masyarakat secara ekonomi dalam PDRB mencapai rata-rata 40 juta rupiah setiap tahunnya.

Produksi perikanan di Kabupaten Badung berasal dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Secara keseluruhan realisasi produksi perikanan dari tahun 2011 – 2014 sebesar 142.669,3 ton. Jika dibandingkan dengan target produksi perikanan dari tahun 2011-2014 yaitu sebesar 152.494,63 ton maka realisasinya baru mencapai 93,56 %. Belum tercapainya target produksi perikanan disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi budidaya rumput laut yang ada di Kecamatan Kuta Selatan akibat adanya pergeseran peruntukan di Desa Kutuh kecamatan Kuta Selatan yang sebelumnya merupakan sentra pengembangan rumput laut berubah menjadi pengembangan pariwisata. Hal ini menyebabkan banyak pembudidaya yang

beralih mata pencaharian dari usaha budidaya rumput laut ke bidang usaha pariwisata sehingga berdampak pada pengurangan jumlah kelompok pembudidaya rumput laut yang semula berjumlah 5 kelompok menjadi 1 kelompok. Ini secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi perikanan karena produksi rumput laut memberikan kontribusi paling besar terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung.

Konsumsi ikan secara keseluruhan dari tahun 2011-2014 setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 dari target tingkat konsumsi ikan sebesar 32,40 kg/kapita/tahun sudah terealisasi sebesar 32,87 kg/kapita/tahun atau sebesar 100,93%. Peningkatan konsumsi ikan ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kandungan gizi dan manfaat dari ikan terhadap kesehatan.

Pada bidang kelautan dan perikanan terdapat beberapa kelompok binaan sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan yaitu kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan rumput laut, kelompok pengolah, kelompok pemasar dan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Pembinaan terhadap kelompok dilakukan secara kontinyu setiap tahun baik itu yang dilakukan oleh bidang teknis di kabupaten maupun oleh petugas penyuluh kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Badung. Dari target jumlah kelompok yang dibina sebanyak 167 kelompok sudah dapat terlaksana 100 %.

Produksi perikanan kelompok nelayan adalah lebih dominan kepada produksi perikanan tangkap di laut yang merupakan hasil produksi tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan yang ada di sepnajang wilayah pesisir kabupaten Badung yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Mengwi. Produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2011 – 2014 setiap tahun mengalami peningkatan. Dari target produksi sebesar 16.523,2 ton sudah mencapai realisasi sebesar 19.881,8 ton atau 120,33 % dari target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari hasil berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan baik dalam bentuk pembinaan, bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Badung.

Urusan pilihan pada bidang pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dimana salah satu indikator keberhasilan kepariwisataan di Kabupaten Badung ditunjukkan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten

Badung, dalam hal ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung serta jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 34, berdasarkan tabel tersebut kita melihat bahwa adanya peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata. Tentunya peranan pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai tiga pilar pembangunan, yang mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada wisatawan sehingga Kabupaten Badung tetap menjadi primadona destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan Ke Kabupaten Badung tentunya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung, yang mengalami peningkatan secara signifikan pula.

Jumlah arus penumpang angkutan umum adalah jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk / keluar Daerah. Dari data tabel tersebut terlihat jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2011 - sebanyak 372.750 orang, tahun 2012 sebanyak 1.162.527 orang, tahun 2013 sebanyak 1.087.571 orang, tahun 2014 sebanyak 1.279.597 orang, dan jumlah kenaikan yang paling signifikan adalah pada tahun 2012, hal ini disebabkan karena pada bulan juni 2012 terminal Mengwi sudah mulai beroperasi meskipun belum optimal.

Rasio ijin trayek adalah Jumlah ijin Trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk dikali 100. Sesuai dengan Pasal 2, Ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Badung dalam disebutkan :

1. Trayek Mengwi - Mambal - Jagapati
2. Trayek Mengwi - Darmasabha - Mambal - Pendarungan
3. Trayek Mengwi - Puspem - Dalung - Canggu
4. Trayek Mengwi - Balhkiuh - Sangeh
5. Trayek Munggu - Kerobokan - Sentral Parkir
6. Trayek Sentral Parkir - Pantai Kuta
7. Trayek Jimbaran - GWK - Tanjung Benoa
8. Trayek Tuban - GWK Uluwatu

Dari 8 (delapan) trayek yang ada baru terisi 3 (tiga) trayek, sedangkan lagi 5 (lima) trayek lainnya belum terisi, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya dunia usaha untuk menanam modalnya (investasi) di Kabupaten Badung.

Jumlah wajib uji angkutan umum adalah jumlah kendaraan yang bersifat umum, baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang yang wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga setiap unit kendaraan umum wajib uji melaksanakan pengujian kendaraan dua kali dalam setahun.. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2011 s/d 2014 terdapat peningkatan kendaraan bermotor wajib uji yang bersifat umum, khususnya kendaraan umum jenis angkutan sewa dan pariwisata. Hal ini merupakan suatu peningkatan yang bersifat positif. Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dalam upaya menjamin keselamatan pemakai kendaraan itu sendiri maupun pelaku lalu lintas lainnya, maka dengan demikian merupakan kewajiban bagi pemilik angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Prasarana pendukung sistem transportasi di Kabupaten Badung disamping prasarana jalan juga terdapat beberapa terminal yang digunakan untuk mengatur keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan barang. Terminal yang terdapat di Kabupaten Badung pada tahun 2011 hanya memiliki 2 Terminal tipe C yaitu : terminal Dalung yang berlokasi pada akses masuk Perumahan Dalung Permai dan sentral Parkir yang berlokasi di Kecamatan Kuta . Sedangkan mulai bulan Juni 2012 Kabupaten Badung memiliki 3 terminal yaitu 2 terminal tipe C dan 1 Terminal tipe A. Terminal Tipe A Mengwi yang berlokasi di Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi. Terminal Tipe A Mengwi melayani angkutan penumpang Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan kota, angkutan pedesaan dan angkutan pariwisata.

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada Tahun 2011 s/d 2013 adalah 46 menit. Sedangkan mulai tahun 2014, dilakukan perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor mulai dari awal penerimaan berkas sampai berkas dikembalikan kepada pemilik kendaraan sehingga diperoleh waktu pengujian yang baru yaitu selama 48 menit.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan maka analisis kinerja keuangan daerah dilakukan terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Analisis kinerja keuangan masalah dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu penerimaan daerah yang terdiri pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah menggambarkan kapasitas kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah serta pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kapasitas kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat dari posisi keuangan daerah yaitu dari neraca daerah. Neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui cerminan posisi aset daerah, kewajiban daerah sampai dengan ekuitas daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Badung

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, APBD Kabupaten Badung terdiri atas: (a).Pendapatan Daerah; (b).Belanja Daerah; (c). Pembiayaan Daerah, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2011-2014 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	PENDAPATAN	1.851.283.062.358	2.609.068.617.374	2.954.602.744.485	3.444.267.368.967	23,6
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.406.835.182.181	1.872.346.181.796	2.279.053.275.955	2.722.625.562.621	24,8
1.1.1.	Pajak Daerah	1.281.695.594.849	1.685.559.515.318	2.010.554.251.067	2.339.332.864.903	22,4
1.1.2.	Retribusi Daerah	35.837.593.226	68.946.271.044	90.414.452.112	116.502.660.909	50,8
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	36.092.597.140	41.756.733.380	71.350.739.922	125.339.002.878	54,1
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	53.209.396.967	76.083.662.054	106.733.832.854	141.451.033.930	38,6
1.2.	Dana Perimbangan	280.705.583.161	515.654.159.310	429.797.446.192	381.713.595.700	18,6
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	123.435.032.161	160.747.933.310	56.611.263.192	56.346.740.700	-11,7
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	157.052.376.000	353.067.906.000	372.625.383.000	324.815.695.000	39,2
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	218.175.000	1.838.320.000	560.800.000	551.160.000	223,8
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	163.742.297.016	221.068.276.268	245.752.022.338	339.928.210.646	28,2
1.3.1	Hibah	89.625.000	0	0	54.625.825.956	
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0,0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.903.646.274	122.552.870.720	102.342.371.338	130.253.477.690	36,3
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	84.655.996.760	76.432.769.000	113.491.184.000	131.532.528.000	18,2
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.015.040.000	10.583.569.648	960.285.000	205.000.000	85,2
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	7.125.000	0	0	0	0
1.3.7	Dana Jamkesmas	69.930.500	0	0	0	0
1.3.8	Dana Kompensasi Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) Konsolidasi Tanah (LC)	2.758.963.600	0	0	0	0

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1.3.9	Dana Kapitasi Askes PNS	681.492.982	0	0	0	0
1.3.10	Dana Jampersal	61.410.000	0	0	0	0
1.3.11	Dana JKBM	1.606.290.900	0	0	0	0
1.3.12	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	9.892.776.000	1.606.290.900	0	0	0
1.3.13	Dana Insentif Daerah	0	9.892.776.000	28.958.182.000	23.311.379.000	0
1.3.14	Pengembalian Kelebihan JKBM	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Badung

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat yaitu di periode tahun 2011 sebesar Rp1.851.283.062.358 sampai dengan periode tahun 2014 sebesar Rp3.444.267.368.967 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 23,6%. Pendapatan Asli Daerah rata-rata pertahun cenderung meningkat dari periode tahun 2011 – 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,8 %, Secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar 54,1%, Retribusi Daerah sebesar 50,8 %, lain – lain PAD yang sah sebesar 38,6 %, serta pertumbuhan yang terendah adalah Pajak daerah sebesar 14,4%

Pendapatan Kabupaten Badung berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar berasal dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum Kabupaten Badung setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan Periode 2011 – 2014 terakhir sebesar 18,6 persen. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 223,8% serta yang mengalami penurunan adalah Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak dengan penurunan sebesar 11,7%, selain dari dana perimbangan dan PAD, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain – lain Pendapatan yang Sah.

Lain – lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Badung dengan rata-rata pertumbuhan 28,2 % terbesar diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya sebesar 85,2 % dan pertumbuhan terendah Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 18,2%.

B. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar peningkatan belanja. Komponen belanja terdiri dari

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pada tabel berikut disajikan perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 2010-2014, sebagaimana tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	Rata - rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	BELANJA	1.572.210.487.617	2.334.080.297.426	2.755.459.722.078	3.276.164.109.817	28,5
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.059.192.474.981	1.268.529.842.646	1.488.224.176.921	1.654.384.787.120	16,1
1	Belanja Pegawai	657.803.294.154	767.437.703.476	881.464.639.348	982.021.268.535	14,3
3	Belanja Subsidi	540.000.000	910.000.000	2.090.000.000	3.837.400.000	93,9
4	Belanja Hibah	43.186.758.790	44.320.460.845	95.313.468.711	93.604.909.624	38,6
5	Belanja Bantuan Sosial	32.012.616.500	48.119.962.000	52.141.750.000	33.549.092.500	7,7
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	126.170.160.128	191.156.530.025	212.227.730.488	272.387.605.145	30,3
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	198.646.101.309	216.289.002.899	234.132.968.576	268.781.366.026	10,6
8	Belanja Tidak Terduga	833.544.100	296.183.400	10.853.619.798	203.145.290	1134,0
II	BELANJA LANGSUNG	513.018.012.636	1.065.550.454.780	1.267.235.545.157	1.621.779.322.697	51,5
1	Belanja Pegawai	51.806.055.584	63.448.806.722	75.694.057.565	63.427.200.338	8,5
2	Belanja Barang dan Jasa	261.507.743.379	374.395.947.727	424.829.297.562	609.282.785.114	33,4
3	Belanja Modal	199.704.213.673	627.705.700.331	766.712.190.030	949.069.337.245	86,7

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Badung

Memperhatikan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2011-2014 bahwa pertumbuhan Belanja mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 28,5%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dari Rp.1.059.192.474.981 tahun 2011 hingga Rp.1.654.384.787.120 tahun 2014,

dengan rata-rata kenaikan Belanja Tidak Langsung sebesar 16,1%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu Rp.513.018.012.636 tahun 2011 hingga Rp.1.621.779.322.697 tahun 2014, dengan rata-rata kenaikan Belanja Langsung sebesar 51,5%.

C. Pembiayaan

Komponen pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Badung

No	URAIAN	2011	2012	2013	2014	RATA RATA KENAIKAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	PEMBIAYAAN DAERAH					
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	497.292.438.596	759.887.764.420	902.998.736.991	893.884.086.627	23,5
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	497.292.438.596	757.401.951.605	901.461.570.467	888.147.920.029	23,3
2	Penarikan kembali pokok dana bergulir	0	2.485.812.815	1.537.166.524	5.736.166.598	0
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.447.400.000	145.200.000.000	214.000.000.000	154.000.000.000	235,5
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.500.000.000	145.200.000.000	214.000.000.000	154.000.000.000	266,4
2	Penguatan Modal Dana Bergulir	1.947.400.000	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	478.845.038.596	614.687.764.420	688.998.736.991	739.884.086.627	15,9

SISA LEBH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	757.401.951.605	901.461.570.467	888.201.985.529	923.705.602.144	7,2
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Badung

Memperhatikan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa realisasi Pembiayaan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15,9 %, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dari Rp.497.292.438.596 di tahun 2011 hingga Rp.893.884.086.627 di tahun 2014, dengan rata-rata kenaikan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 23,5 %.

Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran bahwa realisasi Pengeluaran Pembiayaan juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yaitu Rp.18.447.400.000 di tahun 2011 hingga Rp.154.000.000.000 di tahun 2014, dengan rata-rata kenaikan realisasi Pengeluaran pembiayaan sebesar 235,5 %. Pertumbuhan yang signifikan dari penyertaan modal (Investasi) yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 266,4%. Serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan mengalami kenaikan dari Rp.757.401.951.605 di tahun 2011 hingga Rp.923.705.602.144 di tahun 2014 dengan rata-rata kenaikan SILPA Tahun berjalan sebesar 7,2%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan kondisi keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah Kabupaten Badung, serta Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Badung dalam kurun waktu tahun 2011-2014 yang disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Badung

URAIAN	TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	%
ASET	4.441.186.555.640	5.427.956.479.093	6.867.820.899.396	8.670.320.796.798	25
ASET LANCAR	952.986.034.533	1.129.953.342.662	1.346.234.012.239	1.539.266.057.557	17
Kas	757.786.742.691	901.573.078.216	888.341.033.175	923.958.007.980	7
Kas di Kas Daerah	753.880.735.478	894.498.493.069	876.201.606.486	896.870.005.924	6

URAIAN	TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	%
Kas di Bendahara Penerimaan	164.947.007	77.127.207	60.207.500	86.960.602	(10)
Kas di Bendaha Pengeluaran	2.010.728.440	15.434.978	122.995.051	789.825.868	380
Kas di BLUD	1.730.331.766	6.982.022.962	11.956.224.138	21.890.602.445	153
Investasi jangk Pendek	-	-	-	-	-
Piutang	188.135.989.344	220.849.646.034	442.093.678.941	460.078.354.205	41
Piutang Pajak	116.861.878.920	127.497.039.012	350.206.481.355	419.414.081.906	68
Piutang Retribusi	3.052.957.577	3.826.288.179	9.098.536.545	19.155.272.703	91
Piutang Bagi Hasil Provinsi	19.831.752.282	89.828.056	19.334.646.192	24.113.133.885	7.116
Piutang Denda/Bunga Pajak Hotel, Restoran, Hiburan	59.501.443.930	99.770.602.000	86.677.237.969	103.245.269.884	25
Piutang Sanksi Administrasi	-	1.606.263.216	2.271.867.668	2.616.424.485	-
Biaya dibayar dimuka	1.717.724.513	356.667.034	459.045.522	566.648.403	(9)
Piutang JKBM	45.701.500	4.235.012.058	1.595.107.526	-	3.001
Piutang lain - lain	2.680.000	459.551	4.591.779	-	239
Penyisihan Piutang Pajak	(8.996.292.041)	(9.014.889.208)	(20.380.696.520)	(70.814.733.737)	125
Penyisihan Piutang Bunga Pajak	(3.881.857.337)	(7.437.310.704)	(7.059.545.712)	(37.994.825.278)	175
Penyisihan Piutang Sanksi Administrasi	-	(80.313.161)	(113.593.383)	(222.918.047)	-
Piutang Lain-lain			4.591.779	129.970.493.097	
Persediaan	7.063.302.498	7.530.618.412	15.799.300.122	25.259.202.275	59
Jumlah Aset Lancar	952.986.034.533	1.129.953.342.662	1.346.234.012.239	1.539.266.057.557	17
INVESTASI JANGKA PANJANG	365.614.050.059	527.178.005.241	1.024.284.191.780	1.240.381.224.393	53
Investasi Non Permanen	37.085.905.753	34.600.092.938	33.062.926.414	25.091.759.816	(12)
Investasi NonPermanan lainnya	9.337.558.220	9.337.558.220	9.337.558.220	9.337.558.220	-
Invesatasi Dana Bergulir	33.892.570.000	31.406.757.185	29.869.590.661	24.133.424.063	(10)
Investasi Non Permanen lainnya Diragukan Tertagih	(6.144.222.467)	(6.144.222.467)	(6.144.222.467)	(8.379.222.467)	12
Invesatasi Permanen	328.528.144.306	492.577.912.303	991.221.265.366	1.215.289.464.577	58
Penyertaan Modal Pemerintah daerah	328.528.144.306	492.577.912.303	991.221.265.366	1.215.289.464.577	58
ASET TETAP	3.069.082.012.484	3.685.666.164.923	4.413.348.155.707	5.805.955.412.325	24
Tanah	661.834.567.611	657.679.167.611	654.123.371.611	1.169.896.499.611	26
Peralatan dan Mesin	229.374.702.025	315.155.931.874	409.425.979.659	498.051.787.638	30
Gedung dan Bangunan	1.245.152.376.036	1.390.782.986.191	1.533.277.353.541	1.798.326.515.796	13

URAIAN	TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	850.980.004.619	1.281.458.804.888	1.764.723.882.896	2.211.217.421.496	38
Aset Tetap Lainnya	33.306.885.831	36.764.862.393	41.931.876.291	43.543.738.903	9
Konstruksi dalam Pengerjaan	48.433.476.363	3.824.411.966	9.865.691.708	84.919.448.881	276
Akumulasi Penyusutan					
Dana Cadangan			-	-	
Aset lainnya	53.504.458.565	85.158.966.268	83.954.539.671	84.718.102.523	20
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
TGR	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	1.435.139.625	3.155.343.125	4.339.751.675	6.688.685.475	71
Aset Lain-lain	52.069.318.940	82.003.623.143	79.614.787.996	78.029.417.048	18
Jumlah Aset Lainnya	53.504.458.565	85.158.966.268	83.954.539.671	84.718.102.523	20
JUMLAH AKTIVA	4.441.186.555.640	5.427.956.479.093	6.867.820.899.396	8.670.320.796.798	
KEWAJIBAN	9.097.551.425	29.799.205.895	17.048.429.700	72.677.898.157	170
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.097.551.425	29.799.205.895	17.048.429.700	72.677.898.157	170
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	219.844.079	34.380.542	139.050.646	145.008.103	75
Utang Bunga	-	-	-	-	-
Utang denda pajak	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Jangka Panjang	0	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	0	1.385.683.308	978.044.588	677.862.003	
Utang jangka Pendek lainnya	8.877.707.346	28.379.142.045	16.909.379.054	72.532.890.054	169
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	9.097.551.425	29.799.205.895	17.048.429.700	72.677.898.157	170
EKUITAS DANA	4.432.089.004.215	5.398.157.273.199	6.850.772.469.696	8.597.642.898.641	25
EKUITAS DANA LANCAR	943.888.483.108	1.100.154.136.767	1.329.185.582.539	1.466.588.159.400	16
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	757.401.951.605	901.461.570.467	888.201.982.529	923.705.992.377	7
Cadangan Piutang	188.135.989.344	220.849.646.034	442.093.678.941	590.048.847.302	50
Cadangan Persediaan	7.063.302.498	7.530.618.412	15.799.300.122	25.259.202.275	59

URAIAN	TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	%
Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(8.877.707.346)	(29.764.825.353)	(16.909.379.054)	(72.532.890.054)	174
Pendapatan yang ditangguhkan	164.947.007	77.127.207	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR					
EKUITAS DANA INVESTASI	3.488.200.521.108	4.298.003.136.431	5.521.586.887.157	7.131.054.739.241	27
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	365.614.050.059	527.178.005.241	1.024.284.191.780	1.240.381.224.393	53
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.069.082.012.484	3.685.666.164.923	4.413.348.155.707	5.805.955.412.325	24
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	53.504.458.565	85.158.966.268	83.954.539.671	84.718.102.523	20
EKUITAS DANA CADANGAN	0	0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.441.186.555.640	5.427.956.479.093	6.867.820.899.396	8.670.320.796.798	25

Sumber : Laporan Keuangan kab.Badung

A. Aset

Secara keseluruhan, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2011-2014 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25 . Aset lancar pemerintah Kabupaten Badung mengalami tren pertumbuhan pada tahun 2011 hingga 2014 dengan rata-rata kenaikan sebesar 17 %. Kas mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar Rp 757.786.742.690 dan sebesar Rp 923.958.007.980 di periode tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7 %. Investasi Jangka Panjang pemerintah Kabupaten Badung mengalami tren pertumbuhan yang signifikan dengan rata-rata sebesar 53%, Serta Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Kabupaten Badung selama tahun 2011-2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 24 %. Total aset tetap Kabupaten Badung pada tahun 2011 adalah Rp 3.069.082.012.483 dan meningkat menjadi Rp 5.805.955.412.325 pada tahun 2014.

B. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2011-2014 mengalami kenaikan dengan rata-rata 170 %, ini terjadi dikarenakan Hutang Jangka Pendek terutama Utang jangka Pendek lainnya kenaikan secara signifikan yaitu di tahun 2012 sebesar Rp 28.379.142.045 serta di tahun 2014 sebesar Rp 72.532.890.054.

C. Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Badung selama tahun 2011-2014 tumbuh rata-rata sebesar 25 %, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp 4.432.089.004.215 dan tahun 2014 Rp 8.597.642.898.641 Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan ekuitas dana investasi yaitu dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 27%, Ekuitas dana investasidiperoleh dari pertumbuhanyang signifikan dari Diinvestasikan dalam Investasi Jangka dengan rata rata pertumbuhan sebesar 53%.

Berdasarkan data neraca Kabupaten Badung periode tahun 2011 sampai dengan 2014 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan rasio keuangan Kab.Badung. Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas danrasio solvabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk Tahun 2011-2014 berdasarkan formulasi, yangdisajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2010 s/d 2014
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
A	Rasio Likuiditas				
1.	Rasio lancar (current ratio)	104,8	37,9	79,0	21,2
2.	Rasio quick (quick ratio)	104,0	37,7	78,0	20,8
B	Rasio Solvabilitas				
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00205	0,00549	0,00248	0,00838
2	Rasio hutang terhadap modal	0,00205	0,00552	0,00249	0,00845

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kab. Badung yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2011 adalah sebesar 104,8 dan tahun 2014 sebesar 21,2. Hal ini berarti menunjukkan tahun 2014 kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 21 kali lebih.

2. Rasio Quicks

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan quick ratio dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio Quick pada Tahun 2011 adalah sebesar 104,0 serta periode tahun 2014 rasio Quicks sebesar 20,8. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Badung dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2011 sebesar 0,00205 dan pada tahun 2014 sebesar 0,00838. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2011 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 0,00205 serta periode Tahun 2014 sebesar 0,00845. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Badung, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah didapat dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan, karena sangat berpengaruh penting terhadap keberhasilan program atau kegiatan yang direncanakan. Sampai saat ini, potensi terbesar Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berasal dari kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Hal ini disebabkan kekhususan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata yang didukung oleh kualitas dan kuantitas akomodasi pariwisata seperti tempat MICE (Meeting, Incentive, Conference and Event) yang memadai, adanya *event* seni budaya, olah raga dan pertemuan/konferensi baik nasional, regional maupun internasional yang diadakan di Kabupaten Badung.

Namun mengingat kepariwisataan bersifat sangat sensitif terhadap berbagai hal seperti isu gangguan keamanan, wabah penyakit dan instabilitas politik, maka hal – hal yang berkaitan dengan itu harus terus diantisipasi dengan cepat dan tepat. Disamping itu, potensi wajib pajak harus terus digali secara maksimal untuk ditetapkan menjadi wajib pajak daerah sejalan dengan perkembangan kemampuan masyarakat dan pertumbuhan kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Perkembangan indikator–indikator yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa pariwisata di Bali tetap bergairah pada tahun 2014 sehingga menambah optimisme dan menguatkan keyakinan untuk merumuskan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Tahun 2015.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- 1) Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 2) Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- 3) Melakukan Penagihan piutang Pajak Daerah secara aktif dan pasif untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan.
- 4) Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam upaya modernisasi administrasi Pajak Daerah demi terwujudnya e-governance di bidang Pajak Daerah.
- 5) Melakukan kerjasama dengan pihak Perbankan dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang transparan, mudah, dan cepat.
- 6) Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta instansi lainnya dalam meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat.

- 7) Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Dedikasi, Hormat, Akurat, Mudah dan Akuntabel.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru serta melaksanakan pemuktakhiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2) Melakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3) Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 5) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.
- 6) Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang terbaik serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.
- 7) Bekerja sama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.
- 8) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 9) Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain-lain Pendapatan Daerah.

B. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang menggambarkan arah kebijakan Belanja Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan Kabupaten Badung Tahun 2010-2014. Belanja Daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja untuk menyelenggarakan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib
2. Belanja pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran merupakan Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran KabupatenBadungbertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badungpada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah sertauntuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang, Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran dapat di jabarkan sebagai berikut:

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2012 s/d tahun 2014 secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Badung, yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran BelanjaTahun 2010 s.d 014
Kabupaten Badung

NO	URAIAN	2012			2013			2014			RATA - RATA	
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)		
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(%)	
2	BELANJA	2.671.642.814.959	2.334.080.297.426	87,4	3.027.775.911.367	2.755.459.722.078	91,0	3.614.006.551.503	3.276.164.109.817	90,7	89,7	
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.463.878.021.674	1.268.529.842.646	86,7	1.623.136.935.493	1.488.224.176.921	91,7	1.804.201.412.603	1.654.384.787.120	91,7	90,0	
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	920.296.751.682	767.437.703.476	83,4	977.496.630.367	881.464.639.348	90,2	1.093.374.066.148	982.021.268.535	89,8	87,8	
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	910.000.000	910.000.000	100,0	2.090.000.000	2.090.000.000	100,0	3.870.000.000	3.837.400.000	99,2	99,7	
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	45.454.215.798	44.320.460.845	97,5	96.874.582.650	95.313.468.711	98,4	100.242.049.336	93.604.909.624	93,4	96,4	
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	49.363.658.648	48.119.962.000	97,5	57.501.750.000	52.141.750.000	90,7	35.638.500.000	33.549.092.500	-	62,7	
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	212.066.068.817		90,1	219.855.161.334	212.227.730.488	96,5	284.286.151.505	272.387.605.145	95,8	94,2	

2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	232.787.326.730	216.289.002.899	92,9	255.465.191.345	234.132.968.576	91,6	283.790.645.614	268.781.366.026	94,7	93,1
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	296.183.400	9,9	13.853.619.798	10.853.619.798	78,3	3.000.000.000	203.145.290	6,8	31,7

NO	URAIAN	2012			2013			2014			RATA - RATA	
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	(%)	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)				
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.207.764.793.285	1.065.550.454.780	88,2	1.404.638.975.874	1.267.235.545.157	90,2	1.809.805.138.900	1.621.779.322.697	89,6	89,4	
2.2.1	Belanja Pegawai	69.182.049.949	63.448.806.722	91,7	79.788.831.923	75.694.057.565	90,2	67.622.576.549	63.427.200.338	89,6	90,5	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	430.512.061.957	374.395.947.727	87,0	473.202.533.790	424.829.297.562	94,9	650.599.465.027	609.282.785.114	93,8	91,9	
2.2.3	Belanja Modal	708.070.681.379	627.705.700.331	88,7	851.647.610.161	766.712.190.030	89,8	1.091.583.097.324	949.069.337.245	93,6	90,7	

Sumber : Laporan Bagian Keuangan Kabupaten Badung Tahun 2012 - 2014

Berdasarkan Tabel 3.6 Dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat, realisasi mengalami kenaikan dari Rp 1.268.529.842.646 atau 86,7% periode tahun 2012 hingga Rp 1.654.384.787.120 atau 91,7% pada periode 2014, dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 90%. Sertai tingkat realisasi Belanja Langsung dari tahun 2012 sebesar Rp 1.065.550.454.780 atau 88,2 % sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 1.621.779.322.697 atau 89,6%, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 89,4 % atau lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung.

B. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Badung tertuang pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012 s.d 2014
Kabupaten Badung

KODE	URAIAN	2012	2013	2014
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.	BELANJA	1.300.893.221.857	1.162.672.843.062	1.339.140.965.691
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	653.818.498.811	729.463.006.962	796.775.941.269
5.1.1	Belanja Pegawai	653.818.498.811	729.463.006.962	796.775.941.269

KODE	URAIAN	2012	2013	2014
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	452.544.105.050	473.780.224.737	509.017.016.921
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	195.877.913.761	249.656.782.225	281.073.549.348
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	5.396.480.000	6.026.000.000	6.685.375.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	647.074.723.046	433.209.836.100	542.365.024.422
5.2.1	Belanja Pegawai	58.523.118.468	72.169.967.565	63.427.200.338
5.2.1.01	Honorarium PNS	22.542.530.120	17.053.300.850	16.365.721.549
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34.562.294.848	53.888.428.215	45.688.120.789
5.2.1.03	Uang Lembur	1.418.293.500	1.228.238.500	1.373.358.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	545.780.874.101	295.101.232.228	421.491.287.808
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	374.395.947.727	99.933.210.041	165.056.496.349
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.756.332.643	98.688.016.956	148.534.925.792
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.256.260.200	10.754.154.679	11.021.659.152
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.992.821.432	1.393.333.872	1.942.631.702
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.339.608.000	5.960.926.855	6.107.302.000
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.491.773.430	2.271.205.952	3.151.887.000
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.377.173.010	24.362.717.809	21.149.594.577
5.2.2.11	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	766.915.080	4.818.645.248	7.759.748.800
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.415.932.050	3.660.344.115	3.898.760.550
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari- Hari Tertentu	13.441.059.715	5.274.252.232	9.457.629.500
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.094.466.274	32.175.122.417	34.536.286.671
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.395.905.200	1.108.500.000	1.043.500.000
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.056.679.340	4.700.802.052	3.785.401.164
5.2.2.38	Honorarium PNS			4.045.464.551

KODE	URAIAN	2012	2013	2014
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.3.	Belanja Modal	42.770.730.477	65.938.636.308	57.446.536.276
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	12.681.226.198	25.274.148.236	20.052.210.016
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.324.327.200	2.031.717.589	2.478.311.898
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.891.692.235	5.268.796.725	6.146.427.878
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.821.153.350	13.901.494.526	12.350.326.682
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.855.577.040	17.599.549.232	15.206.497.317
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	4.196.754.454	1.862.930.000	1.212.762.485

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Badung 2012– 2014

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2012 – 2013 cenderung mengalami penurunan, penurunan tersebut di karenakan terjadinya penurunan Belanja langsung . Pada tahun 2013 – 2014 cenderung mengalami peningkatan, Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena peningkatan Belanja barang dan jasa pada Belanja langsung , juga berkenaan dengan peningkatan belanja pegawai pada belanja tidak langsung.Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Badung

NO	URAIAN	BELANJA	TOTAL PENGELUARAN	PROSENTASE
		(UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR)	(BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	
		(a)	(b)	
1	Tahun Anggaran 2012	1.300.893.221.857	2.479.280.297.426	52,5
2	Tahun Anggaran 2013	1.162.672.843.062	2.969.459.722.078	39,2
3	Tahun Anggaran 2014	1.339.140.965.691	3.430.164.109.817	39,0

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Badung 2012– 2014

Berdasarkan Tabel 3.8, diperoleh Prosentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2012 prosentasenya sebesar 52,5persen dan tahun 2014 prosentasenya menurun menjadi sebesar 39,0 persen.Dari prosentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat

disimpulkan bahwa belanja untuk untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun telah dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD.

C. PengeluaranWajib Dan MengikatSerta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kab.Badung pada 3 (tiga) tahun terakhir, tertuang pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2012-2014
KabupatenBadung

NO	URAIAN	2012	2013	2014	Rata - rata Kenaikan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
I.	BELANJA	918.274.803.342	1.030.241.267.230	1.156.903.081.112	12,2
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	845.693.610.112	942.379.009.790	1.069.877.328.310	12,5
1	Gaji Dan Tunjangan	452.544.105.050	473.780.224.737	509.017.016.921	6,1
2	Tambahan Penghasilan PNS	195.877.913.761	249.656.782.225	281.073.549.348	20,0
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	5.396.480.000	6.026.000.000	6.685.375.000	11,3
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	169.531.940.000	192.212.017.000	251.682.036.500	22,2
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.281.086.750	14.379.279.375	17.589.948.875	38,6
6	Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa	12.343.503.275	5.636.434.113	3.115.619.770	-49,5
7	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	718.581.275	688.272.340	713.781.897	-0,3
B.	BELANJA LANGSUNG	72.581.193.230	87.862.257.440	87.025.752.802	10,1
1	Honorarium PNS	22.542.530.120	17.053.300.850	16.365.721.549	-14,2
2	Honorarium Non PNS	34.562.294.848	53.888.428.215	45.688.120.789	20,3
3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.992.821.432	1.393.333.872	1.942.631.702	4,7
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.339.608.000	1.393.333.872	6.107.302.000	135,2
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.395.905.200	1.108.500.000	1.043.500.000	-13,2
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.491.773.430	2.271.205.952	3.151.887.000	45,5

NO	URAIAN	2012	2013	2014	Rata - rata Kenaikan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
7	Belanja Premi Asuransi	6.256.260.200	10.754.154.679	12.726.589.762	45,1
JUMLAH		918.274.803.342	1.030.241.267.230	1.156.903.081.112	12,2

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Badung 2012– 2014

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan. Hasil Analisis pembiayaan tertuang pada Tabel 3.10, sbagai berikut :

Tabel 3.10
Defisit Riil Tahun 2012-2014
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2012	2013	2014	Rata - rata
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	PENDAPATAN DAERAH	.620.854.103.474	2.954.662.970.616	3.459.985.625.334	14,9
2	BELANJA DAERAH	.334.080.297.426	2.755.459.722.078	3.276.164.109.817	18,5
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	145.200.000.000	214.000.000.000	154.000.000.000	9,7
A.	Defisit Riil	141.573.806.048	(14.796.751.462)	29.821.515.517	-206,0
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	757.401.951.605	901.461.570.467	888.147.920.029	8,8

2	Penarikan Dana Bergulir	2.485.812.815	1.537.166.524	5.736.166.598	117,5
B.	Total Realisasi Penerimaan	759.887.764.420	902.998.736.991	893.884.086.627	8,9
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		901.461.570.467	888.201.985.529	923.705.602.144	1,3

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Badung 2012– 2014

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun 2012 s/d 2014
Kabupaten Badung

No.	Uraian	2012		2013		2014	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	901.461.570.467		888.201.985.529		923.705.602.144	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	250.913.724.425	28	141.699.867.776	16	249.951.305.853	27,1
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	36.078.991.250	4	73.338.487.849	8	(5.322.249.175)	-0,6
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	4.398.787.199	0,5	(4.878.217.596)	-1	(7.997.461.626)	-0,9
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	240.460.520.356	27	328.102.166.857	37	272.323.389.289	29,5
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0		0	0
7.	Kegiatan lanjutan	0	0	9.460.350.676	1,1	0	0

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Badung 2012– 2014

Berdasarkan tabel 3.11 diatas selanjutnya dapat disimpulkan analisis kebijakan pembiayaan daerah bahwa dari tahun 2012 – 2014 SILPA Tahun Berjalan cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,3 %, Kabupaten Badung untuk menghindari adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan dalam penentuan SILPA harus cermat dalam Penyusunan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Periode tahun 2013 sampai dengan 2014 terjadi Penurunan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi yang bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah serta akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran

periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2011-2014, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016-2021.

3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Gambaran tentang rata-rata pertumbuhan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Badung yang diperoleh dari pengolahan data dari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tertuang pada tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Badung

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
		(%)
A	Belanja Tidak Langsung	12,5
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	12,2
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	11,3
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	11,3
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	22,2
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	38,6
6	Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa	-49,5
7	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-0,3
B	Belanja Langsung	10,1
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	20,3
2	Honorarium Non PNS	20,3
3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,7
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	135,2
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-13,2
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45,5
7	Belanja Premi Asuransi	45,1

Berdasarkan Tabel 3.12, diperoleh Prosentase Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas UtamaKabupaten Badung untuk belanja tidak langsung pertumbuhan rata–rata kenaikan sebesar 12,5 %, serta untuk belanja langsung terkait Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebesar 10,1%, dari hasil analisis tersebut dapat dicerminkan bahwa pertumbuhan belanja tidak langsung lebih besar di dibandingkan dengan pertumbuhan rata Belanja langsung terkait dengan pengeluaran periodik, wajib dan mengikat.

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2021 menggunakan tahun dasar 2016 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	4.070.868	4.339.149	4.509.503	4.787.644	5.070.101	5.366.990
Pendapatan Asli Daerah	3.180.495	3.568.142	3.695.861	3.978.709	4.261.556	4.544.404
Dana Perimbangan	650.396	570.873	549.066	531.131	516.850	506.043
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	239.977	200.133	264.574	277.803	219.693	316.542

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

A. Proyeksi SILPA

Proyeksi SiLPA tahun 2016 dan 2020 dimana diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA dari periode tahun 2011 sampai dengan periode tahun 2015 mengalami peningkatan namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 5,1 % dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14
 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 – 2021
 Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	913.821	671.374	250.000	300.000	300.000	300.000

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan Kab.Badung untuk mendanai pembangunan Kabupaten Badung dalam jangka waktu lima tahun 2016-2020, disajikan pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15
 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Tahun 2016 – 2021
 Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	4.070.868	4.339.149	4.509.503	4.787.644	5.070.101	5.366.990
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	913.821	671.374	250.000	300.000	300.000	300.000
KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA		4.984.689	5.010.523	4.759.503	5.087.644	5.370.101	5.666.990

B. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2013-2014. Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16

Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016 – 2021
Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	4.984.689	5.010.523	4.759.503	5.087.644	5.370.101	5.666.990
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	2.217.539	2.358.209	2.054.360	2.175.555	2.574.847	2.742.579
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
	Dikurangi:			-	-	-	-
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-	-
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-	-
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	2.217.539	2.358.209	2.054.360	2.175.555	2.574.847	2.742.579
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	2.767.150	2.652.314	2.705.143	2.912.089	2.795.254	2.924.410
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II			-	-	-	-
III.a	Belanja Tidak Langsung	2.331.349	2.652.313	2.630.901	2.835.646	2.831.146	2.948.099
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-	-
III	Total rencana pengeluaran prioritas III (III.a-III.b)	2.331.349	2.652.313	2.630.901	2.835.646	2.831.146	2.948.099
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	435.801	1	74.242	76.443	(35.892)	(23.689)

C. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka akan ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

a. Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/ misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/ kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

c. Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun, total pada tabel untuk masing-

masing kolom persentase harus selalu berjumlah 100 persen. total untuk kolom rupiah dapat menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya.

Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka alokasikapasitas keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel 3.17 sebagai berikut.

Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021
Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

JENIS DANA	Alokasi											
	PROYEKSI		PROYEKSI		PROYEKSI		PROYEKSI		PROYEKSI		PROYEKSI	
	TA 2016		TA 2017		TA 2018		TA 2019		TA 2020		TA 2021	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
PRIORITAS I	52	4.984.689	50	5.010.523	50	4.759.503	50	5.087.644	50	5.370.101	50	5.666.990
PRIORITAS II	23	2.217.539	24	2.358.210	22	2.054.361	22	2.175.556	24	2.574.847	26	2.742.580
PRIORITAS III	26	2.331.349	26	2.652.314	28	2.630.901	28	2.835.647	26	2.831.146	26	2.948.100
JUMLAH	100	9.533.577	100	10.021.047	100	9.444.765	100	10.098.847	100	10.776.094	100	11.357.670

BAB IV

ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

4.1.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Pendidikan

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan keluarga.
- 2) Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
- 3) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- 5) Masih kurangnya sekolah jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Abiansemal.

b. Kesehatan

- 1) Belum optimalnya penurunan angka kematian ibu.
- 2) Masih tingginya angka kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
- 3) Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
- 4) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
- 5) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
- 6) Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- 7) Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
- 8) Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- 9) Terbatasnya sarana pendukung untuk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
- 10) Belum optimalnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir dan menjaga level air agar sungai terlihat lebih bersih saat kemarau.
- 2) Masih adanya pembuangan air limbah secara langsung ke pantai.
- 3) Masih kurangnya instalasi pengolahan air limbah komunal di kawasan perumahan.
- 4) Belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah terpadu di Kabupaten Badung terutama di kawasan Badung Selatan.
- 5) Belum tertanganinya beberapa badan jalan khususnya pada kawasan *Land Consolidation* (LC).
- 6) Belum tuntasnya penanganan terhadap sejumlah infrastruktur yang menghubungkan jalur-jalur pariwisata antara lain : jalan lingkar selatan dan lingkar barat di Kuta Selatan.
- 7) Masih kurangnya infrastruktur penunjang pada jalur-jalur menuju objek wisata, antara lain : Lampu Penerangan Jalan, jaringan telepon, trotoar dan drainase.
- 8) Belum ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyambungkan limbahnya ke sistem jaringan air limbah terpusat DSDP.
- 9) Belum jelasnya referensi pembangunan infrastruktur.
- 10) Belum adanya perangkat hukum tentang bangunan gedung yang mengatur ketentuan tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunan publik.

d. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 2) Masih rendahnya pemahaman pemilih pemula dalam partisipasi politik.
- 3) Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana masih kurang.
- 4) Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
- 5) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun perilaku sosial masyarakat.
- 6) Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- 7) Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
- 8) Belum terbangunnya pos siaga bencana di masing – masing kecamatan.
- 9) Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.
- 10) Terbatasnya paket individu masyarakat Kabupaten Badung yang terdampak bencana belum dapat diwujudkan.
- 11) Payung hukum tentang sumber pendanaan penanganan pasca bencana belum relevan.

e. Sosial

- 1) Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Belum optimalnya sinergi antar *stakeholder* dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan sosial.
- 3) Belum seluruh masyarakat terlindungi oleh jaminan sosial.

4.1.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Tenaga Kerja

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kerjasama Tripartit dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.
- 2) Masih terdapat tenaga kerja yang belum mengikuti sertifikasi uji kompetensi .
- 3) Masih terbatasnya jumlah assessor.
- 4) Rendahnya jiwa wirausaha.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
- 3) Rendahnya pengetahuan perempuan terhadap penyakit kanker, HIV-AIDS dan penyakit berbahaya lainnya.

c. Lingkungan Hidup

- 1) Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air.
- 2) Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup.
- 3) Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembuatan taman kota dan hutan kota.
- 4) Belum adanya masterplan pertamanan.
- 5) Pencemaran di wilayah Kabupaten Badung 55% berasal dari limbah domestik.

d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan catatan sipil.

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa.

f. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

- 1) Tingginya angka pernikahan dini.
- 2) Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB.
- 3) Rendahnya pemahaman remaja terhadap program generasi berencana (gen-re).
- 4) Belum optimalnya peran Tribina KB.

g. Perhubungan

- 1) Pertumbuhan jumlah kendaraan yang jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan prasarana jalan.
- 2) Terkonsentrasinya kegiatan/ aktivitas/ mobilitas di wilayah Badung Selatan menyebabkan beban lalu-lintas dan permasalahan kemacetan lalu-lintas bertumpu di wilayah Badung Selatan.
- 3) Belum optimalnya pelayanan penggunaan angkutan umum di Kabupaten Badung.

h. Komunikasi dan Informatika.

- 1) Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung.
- 2) Kurang tersedianya lahan parkir di luar badan jalan di wilayah padat aktivitas.

i. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1) Kurangnya sinergitas antara UMKM dengan lembaga keuangan dalam hal kemitraan, permodalan dan promosi produk.
- 2) Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas.
- 3) Terbatasnya kesempatan UKM dalam mengikuti informasi dan promosi produknya.
- 4) Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha.
- 5) Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM.
- 6) Belum memiliki Unit Pengelola Dana Bergulir.

j. Kebudayaan

- 1) Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
- 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah.
- 3) Belum optimalnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual seniman, sastrawan dan budayawan.
- 4) Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
- 5) Masih kurangnya tenaga guru Bahasa Bali yang dapat mendukung pengajaran seni, sastra dan budaya Bali.

k. Perpustakaan

- 1) Kondisi perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan yang belum memenuhi standar.
- 2) Kurangnya minat baca masyarakat.

4.1.3 Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- 1) Penataan peruntukan sektor perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik.
- 2) Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan masih rendah.
- 3) Fluktuasi harga sarana produksi perikanan sangat tinggi yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah.
- 4) Belum optimalnya fungsi TPI / Dermaga Kedonganan.

- 5) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

b. Pariwisata

- 1) Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk yang ramah lingkungan.
- 2) Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
- 3) Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
- 4) Perlunya penataan perizinan sarana akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
- 5) Optimalisasi pemasaran dan promosi pariwisata dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 6) Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata perlu ditingkatkan.
- 7) Daya Tarik Wisata (DTW) yang belum tertata secara optimal.
- 8) Belum maksimalnya pengembangan potensi Daya Tarik Wisata baru
- 9) Masih rendahnya kualitas SDM pengelola destinasi
- 10) Terbatasnya jumlah event promosi pariwisata yang diikuti.
- 11) Perlu adanya peningkatan infrastruktur pada Daya Tarik Wisata.
- 12) Terbatasnya ketersediaan sarana parasarana penunjang kepariwisataan.
- 13) Kurangnya ketaatan industri pariwisata melengkapi perijinan.
- 14) Belum adanya data base industri pariwisata.

c. Pertanian

- 1) Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan.
- 2) Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian.
- 3) Pesatnya alih fungsi lahan.
- 4) Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata.
- 5) Kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian.
- 6) Rendahnya adopsi inovasi pertanian.
- 7) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
- 8) Penataan peruntukan sektor peternakan belum terwujud dengan baik.
- 9) Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan masih rendah.
- 10) Fluktuasi harga sarana produksi peternakan sangat tinggi yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah Pemulihan *performance* sapi Bali, serta penurunan jumlah populasi sapi Bali.
- 11) Kurangnya fasilitas baik sarana maupun prasarana RPH Mambal untuk mewujudkan swasembada daging sapi, serta untuk menghasilkan BOB.

d. Perdagangan

- 1) Adanya kecenderungan semakin meningkatnya jumlah *mini market* dan makanan siap saji yang masuk ke kawasan pedesaan.
- 2) Kurangnya daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern.

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Fungsi Lainnya

- 1) Belum optimalnya pelayanan perizinan.
- 2) Belum maksimalnya analisis jabatan dan rasio kebutuhan pegawai.
- 3) Belum optimalnya disiplin aparatur pemerintah.
- 4) Belum maksimalnya penegakan Peraturan Daerah.
- 5) Belum ditetapkannya zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4.2 Isu - Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis perlu diantisipasi, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis ditunjukkan dari kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis yang berkembang akibat pengaruh kondisi global, regional dan nasional yang perlu mendapat perhatian dan fokus penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam kurun waktu lima tahun kedepan meliputi :

4.2.1 Isu-isu Strategis Global, Regional dan Nasional

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prospek ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global pada periode Tahun 2016-2021. Beberapa isu strategis yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai Tahun 2015, di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian Kabupaten Badung, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi termasuk sumberdaya manusianya.

2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian Kabupaten Badung yang mengandalkan pendapatan daerah dari sektor kepariwisataan antara lain berasal dari : (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor bagi produk-produk UMKM Kabupaten Badung, (b) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya belum sepenuhnya pulih berdampak pada menurunnya ekspor berbagai produk dari Kabupaten Badung; (c) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun flat sehingga mempengaruhi ekspor dan investasi di Kabupaten Badung; (d) proses normalisasi kebijakan moneter AS di Tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya.
3. Stabilitas politik dan keamanan menjadi tantangan utama dalam memelihara keberlanjutan pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karena itu diperlukan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sehingga menjadi kondusif termasuk bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.
4. Perubahan situasi geo-politik global yang ditandai dengan 'pertarungan' penguasaan sumber daya alam dalam rangka *food and energy security*. Krisis energi dunia dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia dan arus ekspor-impor pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam, bahkan persaingan negara besar dan negara industri baru ditandai dengan strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara ekonomi lebih kaya dan kuat.

5. Globalisasi nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan, yang sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial. Hal ini membawa Indonesia berada pada persilangan antara budaya global dan budaya lokal yang berorientasi pada identitas primordial.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terdapat beberapa tantangan utama yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung diantaranya meliputi :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum dan pemerintah, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun daerah terutama bagi dunia usaha yang akan berinvestasi di daerah.
2. Kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik, sehingga dapat mendukung proses pembangunan kedepan secara efektif dan efisien.
3. Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas.

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

4. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.
5. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
6. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai kondisi saat ini dan menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju karena saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain perlu direformasi.
7. Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah masih belum optimal. Disamping itu anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif perlu dikurangi, sehingga dapat diarahkan untuk membiaya pembangunan secara optimal.

4.2.2 Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Terdapat beberapa isu strategis dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan daerah meliputi :

a. Pendidikan

- 1) Perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
- 2) Memantapkan program pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 12 tahun
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan peserta didik
- 4) Restrukturisasi satuan pendidikan dasar menuju satuan pendidikan berbasis Hindu
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar
- 6) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
- 7) Pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 12 tahun
- 8) Peningkatan kualitas mutu lulusan yang berintegritas
- 9) Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan
- 10) Peningkatan pendidikan dan pengembangan anak usia dini
- 11) Pembentukan sekolah PAUD/TK berbasis Agama Hindu dan Bahasa Bali
- 12) Peningkatan manajemen guru dan pendidikan kejuruan
- 13) Masih kurangnya sekolah jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Abiansemal

b. Kesehatan

- 1) Perluasan akses dan mutu pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang berkualitas
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan
- 3) Peningkatan kesadaran, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam hidup sehat
- 4) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- 5) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- 6) Peningkatan kesehatan perempuan, ibu hamil, anak, remaja hingga lanjut usia (*continuum of care*)
- 7) Percepatan perbaikan status gizi masyarakat
- 8) Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan
- 9) Pengembangan dan peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan

- 10) Integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam jaminan kesehatan nasional yang berkelanjutan dan menjangkau seluruh masyarakat (*universal coverage*)

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Pengkajian mengenai pemanfaatan muara Tukad Mati sebagai Daerah Tujuan Wisata baru
- 2) Pembangunan utilitas terpadu
- 3) Peningkatan infrastruktur terkait penambahan jumlah penduduk

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Peningkatan intensitas dan kualitas penanggulangan PMKS
- 2) Perluasan akses rumah layak huni bagi masyarakat miskin/rentan
- 3) Optimalisasi jangkauan pelayanan air bersih dan sistem pelayanan air minum
- 4) Pengembangan sistem utilitas terpadu
- 5) Pengembangan sistem pengolahan sampah / limbah terpadu
- 6) Perluasan akses kredit kepemilikan rumah terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- 7) Pengolahan air laut menjadi air minum atau air bersih untuk mengantisipasi kekurangan air baku pada kawasan Badung Selatan
- 8) Pengamanan daerah tangkapan air
- 9) Pengendalian alih fungsi lahan
- 10) Pembangunan IPAL pada kawasan Badung Selatan untuk menanggulangi air limbah

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Peningkatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- 2) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan
- 3) Pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan organisasi kemasyarakatan terutama di lingkungan masyarakat perkotaan
- 4) Pengurangan resiko bencana
- 5) Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif terhadap penanggulangan bencana.
- 6) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
- 7) Peningkatan efektivitas waktu pelayanan dengan merealisasikan pos siaga bencana di masing-masing kecamatan
- 8) Peningkatan cakupan pelayanan tanggap darurat dengan penambahan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
- 9) Peningkatan jaminan kehidupan korban bencana dengan merealisasikan paket bantuan logistik

- 10) Pemberian santunan kepada individu dan kelompok masyarakat terdampak bencana
- 11) Optimalisasi penanganan pasca bencana dengan membuat dan mensinergikan peraturan/payung hukum pada saat pasca bencana.

f. Sosial

- 1) Perluasan jangkauan jaminan sosial terhadap masyarakat rentan
- 2) Peningkatan intensitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Peningkatan sinergitas antar pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam penanggulangan permasalahan sosial dan kemiskinan.

4.2.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Isu strategis dalam pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

a. Tenaga Kerja

- 1) Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui instrumen Upah Minimum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
- 3) Peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja dan pencari kerja dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- 4) Memberi pinjaman lunak kepada pekerja Indonesia (masyarakat Bali) yang ke luar negeri untuk menjadi pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja
- 5) Terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)
- 6) Perluasan penyerapan tenaga kerja berbasis wirausaha mandiri
- 7) Kurang optimalnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mempersiapkan tenaga kerja terlatih

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Peningkatan pengarusutamaan gender
- 2) Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
- 3) Penanggulangan lebih intensif penyakit kanker dan HIV-Aids
- 4) Peningkatan antisipasi terhadap daerah rawan *trafficking*

c. Pangan

- 1) Perubahan iklim (climate change) yang mengganggu suplai air, pola tanam dan produktivitas hasil pertanian
- 2) Terancamnya ketahanan pangan
- 3) Belum tersedianya peta potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Badung
- 4) Terancamnya ketahanan pangan
- 5) Penurunan kualitas sumber daya alam pertanian
- 6) Pesatnya alih fungsi lahan pertanian
- 7) Kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian
- 8) Rendahnya adopsi inovasi pertanian
- 9) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
- 10) Belum optimalnya sinergitas pertanian dengan pariwisata
- 11) Belum optimalnya database potensi sumberdaya pertanian
- 12) Menurunnya rumah tangga petani dan kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian
- 13) Pembentukan unit usaha untuk membeli hasil panen petani

d. Lingkungan Hidup

- 1) Penanganan kawasan resapan air hujan
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 3) Mempertahankan ruang Daya terbuka hijau
- 4) Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati
- 5) Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) 10 sungai

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Belum Sepenuhnya masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil.

f. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

- 1) Pengendalian angka kelahiran anak untuk menekan tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga (di atas 2 anak)
- 2) Peningkatan motivasi masyarakat terhadap pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang
- 3) Peningkatan usia remaja kawin pertama diatas 20 tahun
- 4) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
- 5) Penyebarluasan informasi (KIE) tentang program KB
- 6) Peningkatan peran Tri Bina KB dan UPPKS
- 7) Perluasan dukungan dari berbagai sektor untuk meraih bonus demografi

g. Perhubungan

- 1) Isu keamanan Global dan Regional menuntut Kabupaten Badung sebagai destinasi Internasional meningkatkan keamanan wilayahnya

h. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Peningkatan motivasi dan kapasitas kewirausahaan
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri tenun lokal
- 3) Peningkatan bantuan permodalan kepada UMKM
- 4) Penyertaan modal pemerintah untuk peningkatan kualitas, kuantitas, sarana dan prasarana pasar tradisional
- 5) Penguatan promosi potensi industri tenun lokal
- 6) Penguatan sumber bahan baku dan penggunaan bahan baku tenun lokal

i. Kebudayaan

- 1) Penguatan peran lembaga adat/tradisional sebagai wadah pelestarian adat, seni dan budaya.
- 2) Pelestarian kesenian, budaya serta lembaga adat dan lembaga tradisional lainnya ditengah dinamika kehidupan modern.
- 3) Peningkatan perlindungan asset budaya daerah
- 4) Pemantapan dan peningkatan kualitas kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama
- 5) Mulai mudarnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
- 6) Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
- 7) Lemahnya perlindungan hak cipta dan kurangnya penghargaan (*kerthi budaya*) bagi seniman, sastrawan dan budayawan
- 8) Kekurangan guru agama Hindu.
- 9) Peningkatan srada bhakti bagi generasi muda
- 10) Kurangnya minat generasi muda mendalami tentang Budaya Bali
- 11) Gangguan keamanan terhadap pura dan pratima
- 12) Beralihnya kepemilikan asset pura (pelaba pura)
- 13) Kerancuan penggunaan simbol-simbol keagamaan yang sakral.

j. Perpustakaan

- 1) Peningkatan minat baca masyarakat Kabupaten Badung untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah.
- 2) Kondisi perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan yang belum memenuhi standar

k. Kearsipan

- 1) Peningkatan pengelolaan arsip secara baku pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

4.2.3 Urusan Pilihan

Dalam pelaksanaan urusan pilihan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat penanganan meliputi :

a. Kelautan dan Perikanan

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan serta pengembangan teknologi
- 2) Peningkatan daya saing produk hasil perikanan
- 3) Penataan ruang wilayah yang terpadu bagi peruntukkan sektor perikanan dan kelautan
- 4) Fluktuasi harga sarana produksi perikanan yang sangat tinggi
- 5) Belum optimalnya fungsi TPI / Dermaga Kedonganan
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan

b. Pariwisata

- 1) Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk ramah lingkungan
- 2) Diversifikasi produk pariwisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata baru
- 3) Belum tergarapnya secara maksimal potensi kepariwisataan di Kabupaten Badung
- 4) Kurang optimalnya pengelolaan wisata pedesaan
- 5) Belum optimalnya sinergi pertanian, perikanan, kelautan, UMKM dan pelaku pariwisata
- 6) Pesatnya pertumbuhan destinasi/kompetitor baru
- 7) Lemahnya daya saing SDM kepariwisataan di Kabupaten Badung
- 8) Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.

c. Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 2) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kebencanaan

d. Pertanian

- 1) Pembentukan unit usaha untuk membeli hasil panen petani
- 2) Pemanfaatan teknologi dalam penghijauan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas

- 3) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternakan serta pengembangan teknologi
- 4) Peningkatan daya saing produk hasil peternakan
- 5) Penataan ruang wilayah yang terpadu bagi peruntukkan sektor peternakan
- 6) Fluktuasi harga sarana produksi peternakan yang sangat tinggi
- 7) Pemulihan *performance* sapi Bali, serta penurunan jumlah populasi sapi Bali
- 8) Kurangnya sarana maupun prasarana untuk mewujudkan swasembada daging sapi

4.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat penanganan meliputi :

a. Fungsi Lainnya

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
- 2) Optimalisasi analisis jabatan dan pengembangan karir PNS
- 3) Optimalisasi pembinaan terhadap kinerja aparatur pemerintah
- 4) Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- 5) Peningkatan penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
- 7) Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara berkelanjutan
- 8) Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
- 9) Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- 10) Optimalisasi pembinaan terhadap disiplin aparatur pemerintah
- 11) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah
- 12) Penetapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;
- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

Tabel 4.1 Identifikasi Program Prioritas

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1	0	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	1	1	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Bena, dan Tanjung Bena	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
4. Pengembangan Agropolitan Petang	0	1	1	0	1. Pembangunan terminal 2. Pembangunan Pasar
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	1	0	0	1. Pengembangan kawasan
6. Pengembangan dan pembangunan terminal	0	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan kawasan
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	1	0	0	1	1. Pengembangan kawasan
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	1	0	0	1	1. Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	1	1	0	1. Perluasan permukiman 2. Pembangunan jalan
10. Pengembangan kawasan pariwisata	1	0	1	1	1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan akomodasi wisata
11. Pengembangan kawasan pertanian modern	1	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan pasar
12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM	1	1	1	0	1. Pengembangan permukiman 2. Pembangunan jalan
13. Pengembangan kawasan perikanan	1	0	1	1	1. Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan	-	Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan	+	Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk	+	Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	-	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	0	Kemungkinan tidak berpengaruh
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
4. Pengembangan Agropolitan Petang	-	Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sarana /prasarana	+	Penataan kawasan	0	Tidak berdampak penting
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	Tidak berdampak penting	-	Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
6. pengembangan dan pembangunan terminal	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	+	Alih fungsi lahan disekitarnya	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	0	Tidak berdampak penting
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	++	Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	+	Menghindari alih fungsi DAS	+	Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai	+	Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	++	Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	0	Tidak berdampak penting	+	Tidak berdampak penting	++	Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	0	Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	-	Alih fungsi lahan disekitar kawasan	0	Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	0	Tidak berdampak penting
10. Pengembangan kawasan pariwisata	0	Air limbah dari akomodasi wisata	+	Penataan kawasan pariwisata	0	Sampah dari aktivitas pariwisata	0	Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
11. pengembangan kawasan pertanian modern	--	Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sapras yang layak	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
12.pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM	--	Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan	0	Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman	--	Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri	0	Penurunan kualitas air laut disekitar-nya
13.Pengembangan kawasan perikanan	--	Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan	0	Tidak berdampak penting	-	Sampah dari aktivitas pasar ikan	--	Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan

Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

Tabel 4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2. Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu

Pengaruh kumulatif

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut.
2. Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.

Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



Tabel 4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2

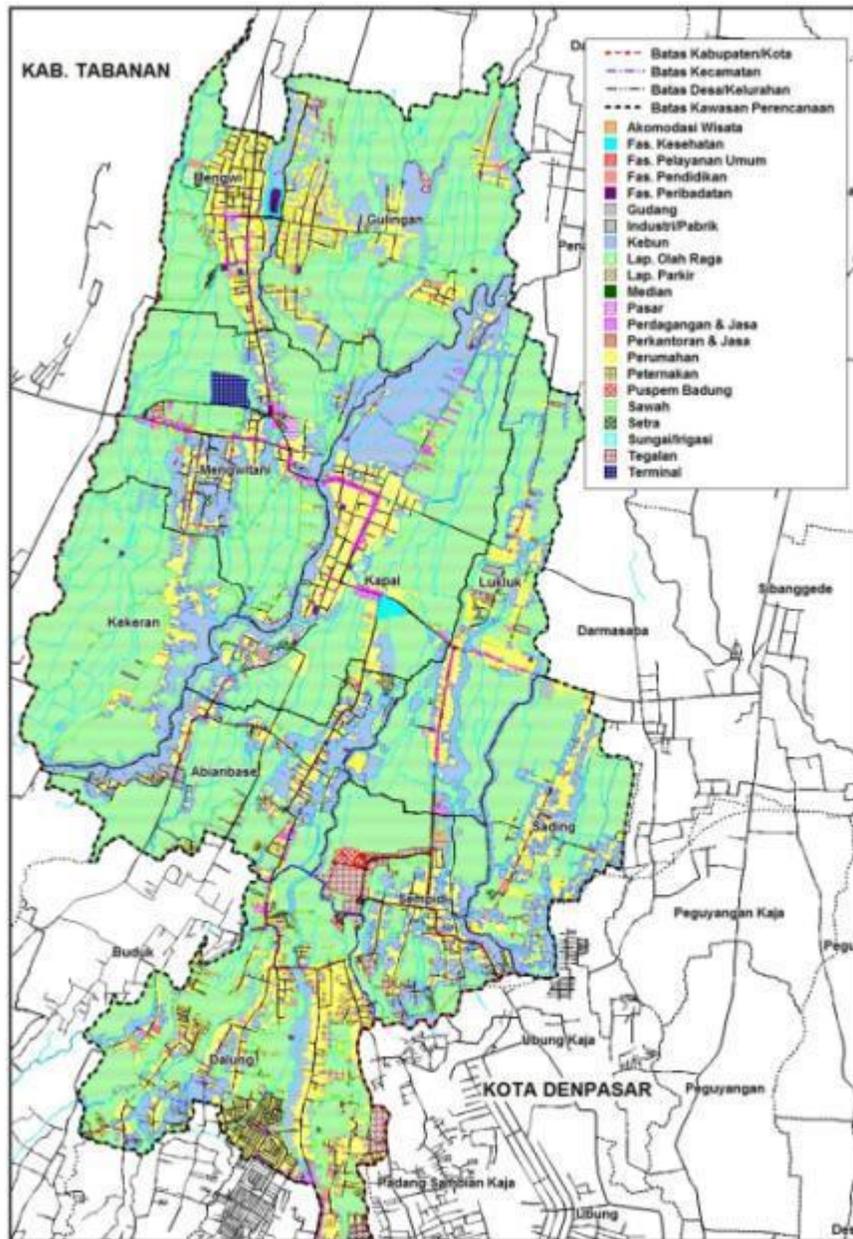
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan. 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir. 4. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir. sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk. 		

Tabel 4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi RTH.

	4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau.	
Pengaruh kumulatif		
<p>1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintahan dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir.</p> <p>2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.</p>		

Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi menimbulkan kepunahan biota dan gangguan kesehatan manusia. 2. Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas. 3. Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air. Namun kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak. 2. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir. 		

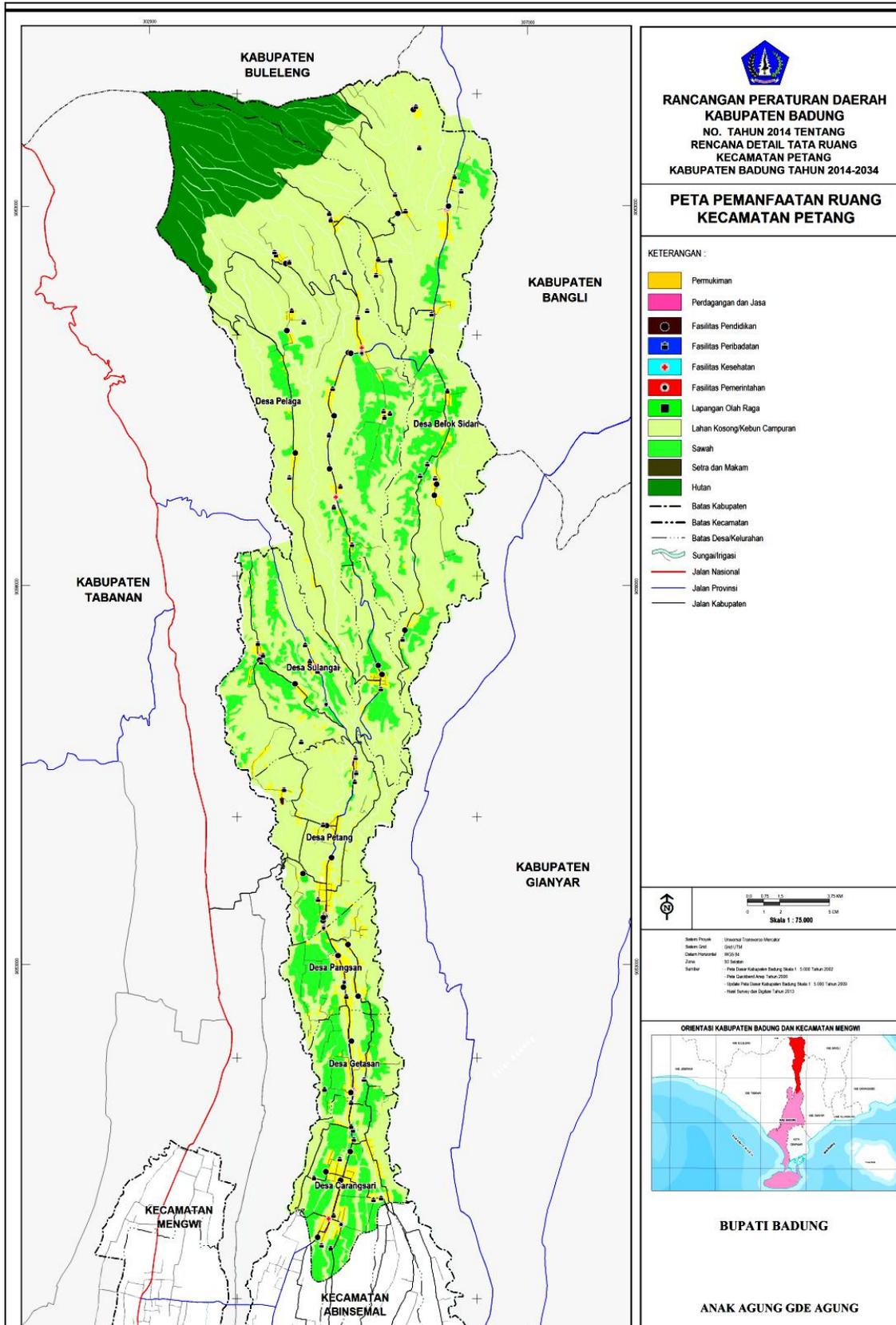
Tabel 4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pembangunan jalan bebas hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta- Tanah Lot- Soka, , Cangu - Mengwi, lingkaran Mengwi , Batuan –Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten. Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah-daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 4. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 		

Tabel 4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Perkembangan pusat perdagangan dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya. 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pemerataan perekonomian dengan akses yang cepat dan lengkap di seluruh Kabupaten Badung daerah pertanian dan reapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah munculnya pusat-pusat kepadatan dan kemacetan baru, menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 2. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat pemerataan akan akses perdagangan dan jasa, peningkatan perekonomian dengan dibuka pusat-pusat perdagangan dan jasa baru. Sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 		

Gambar 4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku mutu yang ditentukan.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industry yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industry tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya. 		

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Masalah Sampah		
Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industry		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industry yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 		

2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.

Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran air dan Masalah Sampah		
Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 2. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi. 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan).

Pengaruh kumulatif

3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.
4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.

4.3.2 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi,misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan,termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/dayaampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. Penetapan ruang terbuka hijau
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
3	Pengembangan Agropolitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi. 4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2. Pengembangan pertanian organik
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Menutup/mbatasi akses percabangan jalan TOL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.
5	Pengembangan Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan kawasan industri khusus

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kawasan perikanan khusus

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.13
Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ daya tampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau 	Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		<p>3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut).</p> <p>4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta</p>	<p>3.Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan</p> <p>4.Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama</p>		
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah.</p> <p>2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.</p> <p>3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan</p> <p>4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah</p>	<p>1.Penetapan sawah abadi.</p> <p>2.Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas</p> <p>3.Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga,perumahan dan kegiatan usaha</p> <p>4.Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah</p>	<p>1.integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan</p>	<p>Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.</p>
3	Pengembangan Agropolitan	<p>1. Dampak terhadap alih fungsi lahan</p>	<p>1.Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas</p>	<p>1.peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata</p>	<p>Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan</p>

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		<p>2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air</p> <p>3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi</p> <p>4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif</p>	<p>2.penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan).</p> <p>3.penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.</p> <p>4.integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani</p>	<p>pencaharian masyarakat setempat</p> <p>2.pengembangan pertanian organik</p>	<p>iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.</p>
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak</p>	<p>1.Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2.menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL.</p>	<p>1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.</p>	<p>Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung</p>
5	Pengembangan Kawasan Industri	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p>	<p>1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p>	<p>1.penetapan kawasan industri khusus</p>	<p>Penetapan kawasan industry khusus dengan kajian daya</p>

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		<p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak.</p> <p>4. Dampak pencemaran lingkungan</p> <p>5. Dampak sosial-kemasyarakatan</p>	<p>2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya.</p> <p>3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan</p> <p>4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.</p>		<p>tamping dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat</p>
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	<p>1. Dampak terhadap pencemaran pantai.</p> <p>2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya</p> <p>3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.</p>	<p>1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai.</p> <p>2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan</p> <p>3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai</p> <p>4. Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat</p>	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus	<p>Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.</p>

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat
6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2010-2015 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

Pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat Badung yang adil dan makmur, lahir dan bathin, *gemah ripah loh jinawi tata tentram kertha raharja*, secara berkelanjutan dan seimbang.

Berangkat dari komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan, maka terdapat 5 (lima) hal mendasar yang menjadi latar belakang perumusan Visi dan Misi Kabupaten Badung yaitu :

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2010-2015;
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (*resources*) pembangunan Kabupaten Badung sesuai ajaran Tri Sakti.
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan.
5. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana*
Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”**

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. **Memantapkan arah pembangunan Badung**, artinya bahwa pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2010-2015 menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Bali dan agenda pembangunan nasional (9 agenda Nawacita).
2. ***Tri Hita Karana***. Secara harfiah *Tri Hita Karana* berasal dari kata (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera, *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.
3. **Maju**, artinya bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi daerah dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sector pembangunan dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkeadilan.
4. **Damai**, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, distriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat.
5. **Sejahtera**, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 dimaksud, juga berpedoman pada :

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

Ideologi sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung 5 (lima) tahun kedepan adalah Pancasila dan ajaran Trisakti. Kedua Ideologi tersebut berfungsi sebagai penuntun, penggerak, pemersatu masyarakat dan pengarah tujuan pembangunan semesta berencana di Kabupaten Badung.

Selanjutnya penjabaran Trisakti dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diwujudkan dalam bentuk :

a) **Berdaulat dalam Bidang Politik**

Berdaulat dalam Bidang Politik diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan Bali yaitu: *wilayah, sektor, dan sumber daya manusia serta nilai-nilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Bali*; seperti sistem organisasi Desa Adat, Subak; sistem tata ruang dan perumahan tradisional Bali seperti arsitektur tradisional Bali dan *tata palemahan*.

b) **Berdikari dalam Bidang Ekonomi**

Berdikari dalam Bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Badung yang meliputi : pertanian dalam arti luas, industri kerajinan rakyat, UMKM, dan pariwisata berbasis budaya yang mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat Badung secara mandiri, dengan mengutamakan potensi alam dan sumber daya lokal, sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari pihak luar.

c) **Berkepribadian dalam Bidang Budaya**

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

- Budaya sebagai landasan membentuk karakter, mental, dan jati diri serta identitas masyarakat Badung;
- Budaya untuk mengembangkan produk seni dan kerajinan;
- Budaya sebagai landasan pembangunan ekonomi kerakyatan;
- Budaya sebagai landasan pelestarian lingkungan.

2) Landasan konstitusional : **Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

- 3) Landasan filosofis : ***Tri Hita Karana, paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka***, dan kearifan lokal masyarakat lainnya.
- a) Pengertian ***Tri Hita Karana*** sebagaimana disebutkan diatas, tercermin dalam tata kehidupan masyarakat Hindu yang meliputi tiga unsur yaitu :
- *Parahyangan*, berasal dari kata *Hyang* yang artinya Tuhan. Jadi *Parahyangan* berarti Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja *Ida Sang Hyang Widhi Waca*/Tuhan Yang Maha Esa.
 - *Pawongan*, berupa unsur dalam organisasi masyarakat adat sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia.
 - *Palemahan*, yaitu berupa unsur atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan.
- b) ***Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*** artinya bersatu-padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Pola itu tertanam awalnya sebagai "*dresta*", yakni tradisi adat yang berlaku sejak dahulu atau disebut *kuna dresta*, yang berlaku bagi sekelompok orang (*loka dresta*), dan di suatu tempat tertentu (*desa dresta*).
- 4) Landasan operasional : **9 (Sembilan) agenda Nawacita**.
- Nawacita** merupakan sembilan (9) agenda perubahan menuju Indonesia Hebat terdiri atas :
- a) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
- b) Membuat Pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
- d) Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
- h) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

5) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan.

Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung yaitu :

- a. Pro-Budaya /*Pro-Culture*
- b. Pro-Pertumbuhan /*Pro-Growth*
- c. Pro-Tenaga Kerja /*Pro-Job*
- d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*
- e. Pro-Lingkungan /*Pro-Environment*
- f. Pro-Penegakan Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan /*Pro Low Enforcement*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama, dengan tujuan :

Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya toleransi hidup beragama
- b) Meningkatnya eksistensi adat dan budaya

Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan :

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat
- b) Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah
- c) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan *clean government*, dengan tujuan :

Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
- b) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
- c) Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN
- d) Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan, dengan tujuan :

1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar
- b) Meningkatnya kompetensi guru
- c) Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik
- d) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- e) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

2) Terwujudnya perlindungan sosial, dengan sasaran :

Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran

Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan, dengan tujuan :

Meningkatnya UMKM yang aktif, dengan sasaran :

Meningkatnya Koperasi yang sehat.

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan tujuan :

1) Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda, dengan sasaran :

Meningkatnya penegakan perda

2) Terwujudnya Perlindungan Hukum dan HAM, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM
- b) Meningkatnya pengarusutamaan gender

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan tujuan :

1) Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah, dengan sasaran :

- a) Menurunnya Luas lahan kritis
- b) Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan
- c) Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d) Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis

2) Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu, dengan sasaran :

Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana

Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah, dengan tujuan :

1) Meningkatnya daya saing tenaga kerja, dengan sasaran :

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

2) Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah, dengan sasaran :

Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah.

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya., dengan tujuan :

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan**, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya produksi beras dan palawija
 - b) Meningkatnya produksi hasil peternakan
 - c) Meningkatnya produksi hasil perikanan
- 2) Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan**,
 - a) Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
 - b) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung
 - c) Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

(HAL 3 – 5)

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

(HAL 6 – 16)

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera	
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama
	2. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
	2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah
	3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat
	4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
	3. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN
	4. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas.	1. Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar
	2. Meningkatnya kompetensi guru
	3. Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik
	4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
2. Terwujudnya perlindungan sosial	1. Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	
Tujuan	Sasaran

1. Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan	1. Meningkatnya UMKM yang aktif 2. Meningkatnya Koperasi yang sehat
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda	1. Meningkatnya penegakan perda
2. Terwujudnya Perlindungan Hukum dan HAM	1. Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM
	2. Meningkatnya pengarusutamaan gender
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Menurunnya Luas lahan kritis
	2. Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan
	3. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	4. Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	1. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
2. Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah	1. Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Meningkatnya produksi beras dan palawija
	2. Meningkatnya produksi hasil peternakan
	3. Meningkatnya produksi hasil perikanan

2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan	1. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
	2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung
	3. Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian
	4. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka telah dirumuskan indikator kinerja tujuan dan sasaran beserta target selama kurun waktu lima tahun sebagaimana dituangkan pada Tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera												
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Keamanan dan kenyamanan beribadah	1. Jumlah agama yang dapat melaksanakan kegiatan keagamaan	6 Agama	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Jumlah Konflik SARA	Jumlah Konflik SARA	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	Disbud, Badan Kesbangpolinmas
	2. Penguatan adat dan budaya	1. Jumlah lembaga adat / tradisional yang dibina	122 Desa Adat	1. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	1. Persentase awig-awig yang disempurnakan	$\frac{\text{Jumlah awig-awig yang disempurnakan}}{\text{Jumlah awig-awig}} \times 100\%$	65.56%	100.00%	-	-	-	Disbud
					2. Persentase sekaa/ kelompok kesenian yang aktif	■ (Jumlah sekaa/kelompok@kesenian)	99.23%	99.44%	99.57%	99.70 %	99.87 %	Disbud
					3. Jumlah sekaa kesenian baru yang terbentuk	Jumlah seka kesenian baru yang terbentuk	6	6	6	6	7	Disbud
					4. Persentase sanggar tari yang berijin	■ (Jumlah sanggar tari yang @ berijin)/(Jumlah sanggar	68%	76%	84%	92%	100%	Disbud
			214 Subak		5. Persentase lembaga subak yang masih aktif	■ (Jumlah lembaga subak@ yang masih aktif)/(Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	Dispenda
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1. Interpretasi Hasil Rata rata Nilai SKM Perangkat Daerah	Sangat Baik	1. Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1. Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Interpretasi Hasil Rata-rata Nilai SKM Perangkat Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Bag. Ortal
				2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	1. Persentase penyelenggara pelayanan publik berkategori baik	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggara pelayanan publik berkategori baik}}{\text{Jumlah penyelenggara pelayanan publik}} \times 100\%$	50%	59%	68%	77%	86%	Bag. Ortal
	2. Persentase Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan	1. Jumlah Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan $\frac{\text{Jumlah Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah jenis pelayanan dasar}} \times 100\%$	100%	3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	1. Persentase capaian indikator SPM yang dipenuhi	$\frac{\text{Jumlah pernyataan standar SPM yg dipenuhi}}{\text{jumlah pernyataan standar SPM}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Bag. Ortal
					2. Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	1. ■ (Jumlah yang dilayani @akta capil)/■ (Jumlah yang wajib dilayani @akta capil)x100%	72%	75%	80%	95%	99%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
					2.	■(Jumlah yang dilayani@ adm kependudukan)/■(Jumlah penduduk yang wajib@ dilayani	87%	90%	93%	96%	99%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	1. Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK	■(Jumlah pelayanan publik @berbasis TIK)/■(Jumlah	40%	65%	75%	90%	100%	Dishub

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1 Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1 Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	1 Interpretasi AKIP Kabupaten	A (Memuaskan)	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	1 Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun Ke - N	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)	Bag. Ortal
					2 Persentase SKPD yang Memperoleh Nilai AKIP Minimal BB	Jumlah SKPD yang Memperoleh nilai AKIP minimal BB -----x 100% Jumlah SKPD	73%	75%	77%	80%	85%	Bag. Ortal
				2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	1. Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Bag. Keuangan
					2. Persentase Laporan BMD SKPD yang akurat dan akuntabel	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang akurat dan akuntabel ----- x 100 % Jumlah Unit Kerja	91%	93%	95%	98%	100%	Bag. Perlengkapan dan Aset Daerah
					3. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah	Jumlah LPJ hibah yg diterima -----x100% Jumlah hibah yg terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bag. Adm. Kesra
				3. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	1. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang menyebabkan kerugian daerah	■(Jumlah THP yang berindikasi@ kerugian material)/■(Jumlah Temuan	25%	20%	15%	10%	5%	Inspektorat
					2. Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK dan WBBM	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	Inspektorat
					3. Nilai Pelaksanaan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B	B	A	A	A	Inspektorat

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
				4. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah	1. Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Sangat Tinggi	Dispenda				
					2. Persentase penetapan Peraturan Daerah	■(Jumlah Perda yang @ditetapkan)/■(Jumlah Program @Legislasi	100%	100%	100%	100%	100%	Setwan, Bag. Hukum
					3. Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek/sejenisnya	Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek/sejenisnya -----x100% Jumlah seluruh pegawai	6%	6.50%	7%	7.50%	8%	BKD, Diklat
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas.	1. Tingkat kualitas pendidikan	1. Tingkat Kelulusan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar	100%	1. Meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	1 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	■(Jumlah siswa usia @(7 s.d. 12 tahun) +@(13 s.d. 15 tahun))/■(Jumlah penduduk usia @(7 s.d. 12 tahun) + @(13 s.d. 15	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora
				2. Meningkatkan kompetensi guru	1 Persentase guru yang bersertifikasi	■(Jumlah guru yang @bersertifikasi @)/(Total	55%	60%	65%	70%	75%	Disdikpora
				3. Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	1 Persentase gedung sekolah berkondisi baik	■(Jumlah gedung sekolah@ berkondisi baik)/(Jumlah	78%	81%	85%	90%	95%	Disdikpora
	2. Angka Umur Harapan Hidup (UHH)	1. Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidupnya.	75 Tahun	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Persentase kekurangan gizi pada anak balita	■(Jumlah Balita 0 – 59 bulan @yang mengalami gizi kurang	12.3%	12.10%	11%	10%	10%	Diskes, RSUD
					2 Angka kematian balita (AKABA)	■(Jumlah kematian penduduk@ usia 0–59 bulan@)/■(Jumlah penduduk@ usia 0–59 bulan	3.74 per 1000 Kelahiran Hidup	3.37 per 1000 Kelahiran Hidup	2.99 per 1000 Kelahiran Hidup	2.99 per 1000 Kelahiran Hidup	2.99 per 1000 Kelahiran Hidup	Diskes, RSUD
					3 Angka kematian Ibu Melahirkan (AKI)	■(Jumlah kematian ibu @melahirkan)/(Jumlah	93.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	90.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	87.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	85.00 per 100.000 Kelahiran Hidup	85.00 per 100.000 Kelahiran Hidup	Diskes, RSUD
					4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Jumlah penderita DBD dibagi Jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama kali 100.000	275 per 100.000 penduduk	250 per 100.000 penduduk	225 per 100.000 penduduk	200 per 100.000 penduduk	200 per 100.000 penduduk	Diskes, RSUD
	3. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	1. Jumlah peserta KB aktif -----x100% Jumlah Pasangan Usia Subur	77.24%	1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1 Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pada usia suburnya (15-49 tahun)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.00	BKBKS

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
2. Terwujudnya perlindungan sosial	1. Cakupan perlindungan sosial	1. Cakupan RTS yang mendapatkan perlindungan sosial	100%	1 Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	1 Persentase rumah tangga sasaran yang mendapatkan bantuan rumah sehat	Jumlah RTS yang menerima bantuan rumah sehat -----x100% Jumlah total RTS yang seharusnya menerima bantuan rumah sehat	66,05%	74,54%	83,04%	91,51%	100%	Disosnaker
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1 Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan	1 Persentase UMKM yang aktif	■(Jumlah UMKM@yang aktif @)/■(Jumlah UMKM@yang ada	100%	1 Meningkatnya UMKM yang aktif	1 Persentase UMKM yang aktif	(Jumlah UMKM yang aktif)/(Jumlah UMKM yang ada	47,56%	56,01%	65,51%	75,72%	86,99%	Diskoperindag
	2 Persentase Koperasi yang sehat	(Jumlah Koperasi yang sehat)/(Jumlah Koperasi yang ada)x100%	100%	1 Meningkatnya Koperasi yang sehat	1 Persentase Koperasi yang Sehat	(Jumlah Koperasi yang sehat)/(Jumlah Koperasi yang	82,77%	83,44%	84,06%	84,64%	85,17%	Diskoperindag
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda	1 Persentase pelanggaran Perda	1 Persentase pelanggaran Perda	10%	1 Meningkatnya penegakan perda	1 Persentase penegakan perda	■(Jumlah penyelesaian @penegakan perda)/(Jumlah pelanggaran perda)x100%	45%	55%	65%	75%	90%	Satpol PP
2 Terwujudnya Perlindungan Hukum dan HAM	1 Persentase Permasalahan Hukum dan HAM yang tertangani	1 Jumlah permasalahan Hukum yang ditangani pada akhir RPJM -----x100% Jumlah permasalahan hukum yang masuk pada akhir RPJM	100%	1 Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	1 Persentase penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Jumlah permasalahan Hukum yang ditangani pada tahun ke-n -----x100% Jumlah permasalahan hukum yang masuk pada tahun ke-n	100%	100%	100%	100%	100%	KPP, Bag. Hukum dan HAM
	2 Indeks Pembangunan Gender	1 Nilai IPG	75,53%	1 Meningkatnya pengarusutamaan gender	1 Indeks Pembangunan Gender	(Xede(1) + Xede(2) + linc-dis) ----- 3 Xede(1) = Xede untuk usia harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pengetahuan/pendidikan linc-dis = indeks distribusi pendapatan	75,49	75,5	75,51	75,52	75,53	KPP

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Nilai IKLH	>47	1 Menurunnya Luas lahan kritis	1 Persentase Luas lahan kritis	$(\text{Luas lahan kritis}) / (\text{Total luas lahan}) \times 100\%$	10,42 %	10,18 %	9,94 %	9,70 %	9,46 %	Distanbunhut
				2 Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	1 Indeks pencemaran air	Nilai Indeks Pencemaran Air	> 37	> 37	> 37	> 37	> 37	BLH
					2 Indeks pencemaran udara	Nilai Indeks Pencemaran Udara	>90	>90	>90	>90	>90	BLH
					3 Indeks tutupan lahan	Nilai Indeks Tutupan Hutan	>22	>22	>22	>22	>22	BLH
				3 Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Persentase Cakupan pelayanan sampah	$\frac{\text{Cakupan wilayah yang terlayani}}{\text{Luas wilayah pelayanan}} \times 100\%$	37%	42%	47%	52%	57%	DKP
					2 Persentase Sampah yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah volume sampah yang ditangani}}{\text{Jumlah produksi sampah}} \times 100\%$	89.8%	91.1%	92.1%	93.3%	94.4%	DKP
				4 Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	1 Persentase RTR kawasan strategis	$\frac{(\text{Jumlah RTR kawasan strategis})}{(\text{Jumlah Kawasan strategis})}$	68,51%	72,01%	75,51%	79,01%	82,51%	Bappeda Litbang
2 Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	1 Cakupan penanggulangan bencana	1 Persentase penanggulangan bencana	100%	1 Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana	1 Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	$\frac{\text{Kapasitas yang tersedia}}{\text{Kapasitas yang dibutuhkan}} \times 100\%$	55.45%	69.37%	79.40%	89.13%	100%	BPBD
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1 Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1 Tingkat partisipasi angkatan kerja	1 $\frac{(\text{Jumlah @penduduk@ angkatan@ kerja})}{(\text{Jumlah @penduduk@ usia kerja})}$	75.00%	1 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	1 Persentase tenaga kerja pariwisata yang mendapatkan sertifikasi uji kompetensi	$\frac{(\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata @yang memperoleh sertifikasi @uji})}{(\text{Total tenaga kerja pariwisata})}$	35,74%	41,39%	47,48%	54,00%	60,96%	Disosnaker
2 Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah	1 Infrastruktur wilayah yang handal	1 Cakupan layanan infrastruktur wilayah	100%	1 Meningkatkan komponen infrastruktur dasar wilayah	1 Persentase Ruas Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	$\frac{(\text{Panjang ruas jalan kabupaten @dalam kondisi baik@})}{(\text{Total panjang ruas@ jalan})}$	97%	98%	99%	100%	100%	DBMP

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
					2 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	$\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	91.90%	92.90%	94.40%	96.50%	97.20%	DCK
					3 Persentase Penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	87.43%	90.43%	93.43%	96.43%	100.00%	DCK
					4 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah rehab rumah}}{\text{Jumlah Korban}} \times 100\%$	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	DCK
					5 Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jaringan irigasi}} \times 100\%$	95,78%	96,83%	97,89%	98,94%	100.00%	DBMP
					6 Persentase zona rawan banjir dan genangan	$\frac{\text{Luas zona rawan banjir dan genangan}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Badung}} \times 100\%$	0,48%	0,36%	0,24%	0,12%	-	DBMP

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1 Meningkatnya ketersediaan pangan	1 Persentase ketersediaan pangan	$1 \frac{\text{Jumlah @persediaan @efektif@ pangan}}{\text{Jumlah}} \times 100\%$	100%	1 Meningkatnya produksi beras dan palawija	1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Beras	$\frac{\text{Jumlah Produksi Beras}}{\text{Jumlah Kebutuhan Beras}} \times 100\%$	87,50%	90,00%	93,00%	97,00%	100%	Distanbunhut
					2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Palawija	$\frac{\text{Jumlah Produksi Palawija}}{\text{Jumlah Kebutuhan Palawija}} \times 100\%$	88,00%	91,00%	94,00%	97,50%	100%	Distanbunhut
				2 Meningkatnya produksi hasil peternakan	1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan daging sapi	$\frac{\text{Jumlah Produksi Daging sapi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Daging}} \times 100\%$	34.00%	36.00%	38.00%	40.00%	42.00%	Disnakanlut
				3 Meningkatnya produksi hasil perikanan	1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan ikan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Ikan}} \times 100\%$	32.15%	32.20%	32.25%	32.30%	32.35%	Disnakanlut

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
2 Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan	1 Kunjungan wisatawan	1 Jumlah kunjungan wisatawan	36 DTW	1 Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	1 Persentase DTW yang ditata	$(\text{Jumlah DTW yang tertata}) / (\text{Jumlah total DTW}) \times 100\%$	61%	64%	66%	69%	72%	Diparda
				2 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	1 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	$\frac{\text{Jumlah kunjungan tahun } n-(n-1)}{\text{Jumlah kunjungan tahun } (n-1)} \times 100\%$	5%	5%	5%	5%	5%	Diparda
				3 Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian	1 Persentase desa wisata yang aktif	$\frac{\text{Jumlah desa wisata yang aktif}}{\text{Jumlah desa wisata yang ada}} \times 100\%$	36.36%	45.45%	54.55%	63.64%	72.73%	Diparda
				4 Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari	1 Persentase kawasan desa pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari	$\frac{\text{Jumlah kawasan yang ditata}}{\text{Jumlah kawasan yang ada}} \times 100\%$	16,67%	32,33%	50%	66,67%	100%	Disnakanlut

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi pembangunan daerah.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Strategi :

- a. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama.
- b. Meningkatkan peran subak dalam mengembangkan nilai budaya.
- c. Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.
- d. Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya.
- e. Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima.
- f. Melindungi aset pura (pelaba pura)
- g. meningkatkan sosialisasi dalam upaya pemahaman simbol-simbol keagamaan yang sakral

2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terkomudirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk.
- c. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- e. Mempermudah alur pelayanan umum di bidang perhubungan sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.
- f. Meningkatkan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- g. Mensosialisasikan standar pelayanan kepada masyarakat.
- h. Meningkatkan Persentase Izin dan Non Izin yang terbit tepat waktu .

- i. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pengaduan Perizinan.
 - j. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pelayanan publik.
 - k. Memenuhi sarana dan prasarana di seluruh Wilayah Manajemen Kebakaran.
 - l. Meningkatkan kualitas aparatur Pemadam Kebakaran.
 - m. Mempercepat penerapan SPM di daerah.
 - n. Menerapkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik.
 - o. Meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - p. Pemuatan berita kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah pada media cetak.
 - q. Melayani permintaan informasi masyarakat mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - r. Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informasi.
3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Strategi :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik.
- b. Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).
- c. Membuat perencanaan yang baik.
- d. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .
- f. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Barang di Masing-masing SKPD.
- g. Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah .
- h. Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.
- i. Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- j. Memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
- k. Mewujudkan PNS yang berkualitas.
- l. Mengkomunikasikan secara komprehensif program pembangunan kepada para pemangku kepentingan.
- m. Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.

Strategi :

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
 - b. Pengembangan penyelenggaran pendidikan satu atap jenjang pendidikan dasar
 - c. Penyelenggaran pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu
 - d. Peningkatan guru yang bersertifikasi.
 - e. Penyediaan sarana prasarana workshop tenaga pendidik
 - f. Peningkatan kualitas gedung sekolah yang berkondisi baik.
 - g. Meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan.
 - h. Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas.
 - i. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
 - j. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
 - k. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.
 - l. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - m. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.
 - n. Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.
 - o. Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
 - p. Meningkatkan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada generasi muda dan pasangan usia subur (PUS).
 - q. Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat.
 - r. Peningkatan Pendataan dan pengawasan terhadap penyaluran Raskin agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi kepada masyarakat miskin.
 - s. Memperluas Akses Perlindungan Sosial.
 - t. Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial.
 - u. Mengoptimalkan sarana prasarana perlindungan sosial
5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Strategi :

- a. Pemberdayaan dan Penguatan sektor UMKM.
- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Strategi :

- a. Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah.
- b. Penegakan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- c. Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM.
- d. Membentuk pos pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa/Kelurahan.
- e. Memasyarakatkan kesetaraan gender.

7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Strategi :

- a. Menggalakkan budaya menanam pohon.
- b. Meningkatkan penataan masyarakat terhadap lingkungan.
- c. Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- d. Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan informasi dibidang lingkungan hidup.
- f. Peningkatan Pengelolaan kebersihan.
- g. Peningkatan penyusunan rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis.
- h. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Strategi :

- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- b. Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Assesor.
- c. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
- d. Mengembangkan potensi kewirausahaan.
- e. Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri
- f. Melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
- g. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- h. Memfasilitasi dengan para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)

- i. Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah diantaranya melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
 - j. Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur.
 - k. Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman.
 - l. Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Strategi :

- a. Penelitian dan Pengkajian Potensi Baru Produksi dan produktivitas Pertanian
- b. Memetakan potensi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Badung
- c. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan
- d. Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi
- e. Melaksanakan pemupukan berimbang
- f. Menyediakan sarana produksi yang bermutu.
- g. Mengaktifkan peran Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.
- h. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.
- i. Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian
- j. Pemberian insentif dan penghargaan bagi Petani berprestasi.
- k. Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis
- l. Memfasilitasi penyaluran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.
- m. Optimalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
- n. Memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam-tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.
- o. Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten Badung
- p. Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan
- q. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya.
- r. Melaksanakan intensifikasi dan penerapan bio teknologi
- s. Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.

- t. Melaksanakan intensifikasi dan penerapan bio teknologi
- u. Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.
- v. Memanfaatkan lahan perkotaan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).
- w. Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani
- x. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- y. Membentuk Peraturan Bupati tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- z. Membentuk Peraturan Bupati tentang Subak Lestari/Subak Abadi.
- aa. Pengembangan Teknologi Peternakan
- bb. Memetakan potensi peternakan di kabupaten badung
- cc. Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan
- dd. Memetakan potensi perikanan dan kelautan di kabupaten badung
- ee. Mengembangkan DTW baru sebagai wisata alternatif
- ff. Melaksanakan penataan DTW.
- gg. Memantapkan kelembagaan pengelola DTW.
- hh. Meningkatkan pemasaran pariwisata.
- ii. Meningkatkan kualitas industri pariwisata.
- jj. Meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata pada desa wisata.
- kk. Peningkatan Kawasan pesisir yang lestari

6.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan yang diambil oleh Kabupaten Badung dalam jangka waktu Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama..

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan.
- b. Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
- c. Revitalisasi adat, dan karya seni .
- d. Restorasi warisan budaya daerah.
- e. Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba.

- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima
 - h. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura)
 - i. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral
2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah Kebijakan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
 - b. Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
 - c. Menciptakan suatu kondisi yang kondusif.
 - d. Mempercepat proses pelayanan.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain.
 - f. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - g. Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP).
 - h. Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan .
 - i. Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan perizinan.
 - j. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima.
 - k. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - l. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
 - m. Terlaksananya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - n. Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi.
 - o. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - p. Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
 - q. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi.
3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
- Arah Kebijakan :
- a. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek.
 - b. Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- c. Meningkatkan integritas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Badung.
 - d. Meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan.
 - e. Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah).
 - f. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - g. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
 - h. Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah.
 - i. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah.
 - j. Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah.
 - k. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal.
 - l. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
 - m. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah
 - n. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan BinteK/sejenisnya sebanyak mungkin terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Badung.
 - o. Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD.
 - p. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
- Arah Kebijakan :
- a. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%.
 - b. Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi.
 - c. Memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun.
 - d. Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu.
 - e. Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif
 - f. Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun
 - g. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu
 - h. Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi.
 - i. Pemenuhan sarana prasarana workshop tenaga pendidik
 - j. Pemenuhan kualitas gedung pendidikan.

- k. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi.
- l. Menerapkan ISO 9001 : 2008.
- m. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- n. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care).
- o. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.
- p. Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.
- q. Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- r. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- s. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.
- t. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.
- u. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan.
- v. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta.
- w. Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.
- x. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- y. Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
- z. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
- aa. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.
- bb. Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi.
- cc. Memantapkan sinergitas dengan mitra kerja.
- dd. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS.
- ee. Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin.
- ff. Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial.
- gg. Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya.
- hh. Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial.

5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing.
- b. Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi.

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM .
- c. Penegakan Hukum dan HAM.
- d. Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Meningkatkan kualitas hidup perempuan.

7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan :

- a. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan.
- c. Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan.
- d. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah.
- e. Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam
- f. Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- g. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- i. Peningkatan sistem informasi lingkungan.
- j. Meningkatkan kualitas database lingkungan.
- k. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan.
- l. Meningkatkan pengelolaan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- m. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis.
- n. Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
- o. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.

- p. Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai.
 - q. Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat.
 - r. Penanganan pasca bencana yang komprehensif.
 - s. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.
8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
 - b. Melaksanakan akreditasi terhadap LPK.
 - c. Meningkatkan jumlah dan kualitas Assesor.
 - d. Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Sama
 - e. Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan
 - f. Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri
 - g. Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
 - h. Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah
 - i. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)
 - j. Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
 - k. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis.
 - l. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
 - m. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Arah Kebijakan :

- a. Mengintensifkan penelitian dan Pengembangan Guna Meningkatkan Produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Kabupaten Badung
- b. Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah
- c. Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah
- d. Optimalisasi ketersediaan sumber daya air
- e. Mempertahankan kesuburan tanah
- f. Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.
- g. Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.
- h. Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.

- i. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian
- j. Meningkatkan kesejahteraan petani
- k. Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.
- l. Membuka akses pemasaran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.
- m. Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
- n. Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga
- o. Pelestarian plasma nutfah tanaman langka
- p. Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan
- q. Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian
- r. Meningkatkan produksi beras dan palawija
- s. Memantapkan program Badung go organik
- t. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).
- u. Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani
- v. Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani
- w. Menyusun regulasi tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- x. Menyusun regulasi tentang Subak Lestari/Subak Abadi.
- y. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging
- z. Mengembangkan Peternakan berdasarkan potensi wilayah.
- aa. Meningkatkan produksi ikan
- bb. Mengembangkan Perikanan dan Kelautan berdasarkan potensi wilayah
- cc. Mengembangkan pariwisata alternatif
- dd. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing DTW.
- ee. Penataan fasilitas penunjang DTW.
- ff. Penetapan Kelembagaan Pengelola DTW.
- gg. Peningkatan SDM Pengelola DTW.
- hh. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- ii. Publikasi pariwisata dalam berbagai media.
- jj. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat.
- kk. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
- ll. Penataan desa wisata.
- mm. Peningkatan SDM pengelola desa wisata.
- nn. Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian.
- oo. Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Badung

(HAL 12 – 24)

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera								
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1 Meningkatkan toleransi hidup beragama	1 Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama	1. Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan eksistensi adat dan budaya	1 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya	1 Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal	√	√	√	√	√
		2 Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah	1 Revitalisasi adat, dan karya seni	√	√	√	√	√
			2 Restorasi warisan budaya daerah	√	√	√	√	√
		3 Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya	1. Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba	√	√	√	√
		4 Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima	1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima	√	√	√	√	√
		5 Melindungi aset pura (pelaba pura)	1 Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura)	√	√	√	√	√
6 meningkatkan sosialisasi dalam upaya pemahaman simbol-simbol keagamaan yang sakral	1 meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral	√	√	√	√	√		

Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1 Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	√	√	√	√	√
	2 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	1 Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk	1 Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan	√	√	√	√	√
		2 Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan (siak)	1 Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan	√	√	√	√	√
		3 Meningkatkan kualitas pelayanan	1 Menciptakan suatu kondisi yang kondusif	√	√	√	√	√
			2 Mempercepat proses pelayanan	√	√	√	√	√
		4 Mempermudah alur pelayanan umum di bidang perhubungan sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain	√	√	√	√	√
		5 Meningkatkan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain	√	√	√	√	√
		6 Mensosialisasikan standar pelayanan kepada masyarakat	1 Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	√	√	√	√	√
		7 Meningkatkan Persentase Izin dan Non Izin yang terbit tepat waktu	1. Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	√	√	√	√	√
	2 Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan		√	√	√	√	√	
8 Meningkatkan Pelayanan terhadap Pengaduan Perizinan	1 Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan perizinan	√	√	√	√	√		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		9 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pelayanan publik	1 Terselenggaranya pelayanan publik yang prima	√	√	√	√	√
	3 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	1 Memenuhi sarana dan prasarana di seluruh Wilayah Manajemen Kebakaran	1 Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan kualitas aparatur Pemadam Kebakaran	1 Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur	√	√	√	√	√
		3 Mempercepat penerapan SPM di daerah	1 Terlaksananya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	√	√	√	√	√
	4 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	1 Menerapkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik	1 Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	1 Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	√	√	√	√	√
		3 Pemuatan berita kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah pada media cetak	1 Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat	√	√	√	√	√
		4 Melayani permintaan informasi masyarakat mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah	1 Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat	√	√	√	√	√
		5 Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informasi	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi	√	√	√	√	√
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik	1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek	√	√	√	√	√
			2. Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
		3 Membuat perencanaan yang baik	Meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).	√	√	√	√	√
		2 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .	1. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku	√	√	√	√	√
		3 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Barang di Masing-masing SKPD	1 Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur	√	√	√	√	√
		4 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah	1. Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah	√	√	√	√	√
		5 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.	1 Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah	√	√	√	√	√
2 Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah	√		√	√	√	√		
3 Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	1 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal	√	√	√	√	√	
		2 Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	√	√	√	√	√	
	4 Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah	1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah	√	√	√	√	√	
	4 Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah	2 Mewujudkan PNS yang berkualitas	1. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan BinteK/sejenisnya sebanyak mungkin terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Badung	√	√	√	√	√
		3 Mengkomunikasikan secara komprehensif program pembangunan kepada para pemangku kepentingan	1 Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		4 Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan	1 Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik	√	√	√	√	√
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas	1 Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	1. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal	1. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%	√	√	√	√	√
			2. Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi	√	√	√	√	√
			3. Memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun	√	√	√	√	√
			4. Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu	√	√	√	√	√
			5 Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif	√	√	√	√	√
		2 Pengembangan penyelenggaraan pendidikan satu atap jenjang pendidikan dasar	1 Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun	√	√	√	√	√
3 penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu	1 Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu	√	√	√	√	√		
	2 Meningkatnya kompetensi guru	1 Peningkatan guru yang bersertifikasi	1 Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi	√	√	√	√	√
		2 penyediaan sarana prasarana workshop tenaga pendidik	1 pemenuhan sarana prasaran workshop tenaga pendidik	√	√	√	√	√
	3 Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	1 Peningkatan kualitas gedung sekolah yang berkondisi baik	1 Pemenuhan kualitas gedung pendidikan	√	√	√	√	√
	4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan	1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi 2 Menerapkan ISO 9001 : 2008 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	
		2 Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas	1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (<i>continuum of care</i>).	√	√	√	√	√	
			2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.	√	√	√	√	√	
		3 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat	1 Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.	√	√	√	√	√	
			4 Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.	√	√	√	√	√
				2 Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah	√	√	√	√	√
			3 Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.	√	√	√	√	√	
		5 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	1 Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.	√	√	√	√	√	
			2 Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan	√	√	√	√	√	
			3 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	√	√	√	√	√	
			4 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile</i>), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.	√	√	√	√	√	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		6 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	√	√	√	√	√
		7 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.	1 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.	√	√	√	√	√
		8 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.	1 Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (<i>evidence based</i>).	√	√	√	√	√
	5 Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1 Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas	1. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi kepada generasi muda dan pasangan usia subur (PUS)	1 Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi	√	√	√	√	√
			2 Memantapkan sinergitas dengan mitra kerja	√	√	√	√	√
		3 Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS	√	√	√	√	√
	2 Terwujudnya perlindungan sosial	1 Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	1 Peningkatan Pendataan dan pengawasan terhadap penyaluran Raskin agar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat administrasi kepada masyarakat miskin	1 Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin	√	√	√	√
2 Memperluas Akses Perlindungan Sosial			1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial	√	√	√	√	√
3 Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial			1 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya	√	√	√	√	√
4 Mengoptimalkan sarana prasarana perlindungan sosial			1 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1. Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan	1. Meningkatnya UMKM yang aktif	1. Pemberdayaan dan Penguatan sektor UMKM	1. Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	2 Meningkatkan Koperasi yang sehat	1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	1 Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi	√	√	√	√	√
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda	1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah	1. Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah	1. Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	√	√	√	√	√
		2 Penegakan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1 Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM	√	√	√	√	√
2 Terwujudnya Perlindungan Hukum dan HAM	1. Meningkatnya Penanganan permasalahan Hukum dan HAM	1. Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	1. Penegakan Hukum dan HAM	√	√	√	√	√
	2 Meningkatnya pengarusutamaan gender	1 Membentuk pos pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa/Kelurahan	1. Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	√	√	√	√
		2 Memasyarakatkan kesetaraan gender	1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan	√	√	√	√	√
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Menurunnya luas lahan kritis	1. Menggalakkan budaya menanam pohon	1. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup		√	√	√	√
		2 Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	1 Meningkatkan penataan masyarakat terhadap lingkungan	1 Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan 2 Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan	√	√	√	√
	2 Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup		1. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah. 2 Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam	√	√	√	√	√
	3 Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup		1. Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	
			2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	
			3. Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan	√	√	√	√	√	
		4. Meningkatkan informasi dibidang lingkungan hidup	1. Peningkatan sistem informasi lingkungan	√	√	√	√	√	
			2. Meningkatkan kualitas database lingkungan	√	√	√	√	√	
	3. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Peningkatan Pengelolaan kebersihan	1. Meningkatkan parstisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan	√	√	√	√	√	
			2. Meningkatkan pengelolan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)	√	√	√	√	√	
	4. Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	1. Peningkatan penyusunan rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	1. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	√	√	√	√	√	
	1. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	1. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana	1. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1. Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan	√	√	√	√	√
				2. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan	√	√	√	√	√
3. Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai				√	√	√	√	√	
4. Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat				√	√	√	√	√	
5. Penanganan pasca bencana yang komprehensif				√	√	√	√	√	
6. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana				-	√	√	√	√	

Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	1. Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor	1. Melaksanakan akreditasi terhadap LPK	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan jumlah dan kualitas Assesor	√	√	√	√	√
		3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	1 Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Sama	√	√	√	√	√
		4 Mengembangkan potensi kewirausahaan	1 Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan	√	√	√	√	√
		5 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri	1 Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri	√	√	√	√	√
		6 Melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	1 Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	√	√	√	√	√
		7 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1 Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah	√	√	√	√	√
8 Memfasilitasi dengan para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)	1 Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)	√	√	√	√	√		
2 Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah	3 Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	1. Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah diantaranya melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	1. Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		2. Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur.	1 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis	√	√	√	√	√
		3 Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman	1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	√	√	√	√	√
		4 Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	1. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas	√	√	√	√	√
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatnya ketersediaan pangan	1 Meningkatkan produksi beras dan palawija	1. Penelitian dan Pengkajian Potensi Baru Produksi dan produktivitas Pertanian	1. Mengintensifkan penelitian dan Pengembangan Guna Meningkatkan Produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Kabupaten Badung		√			
		2 Memetakan potensi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Badung	1 Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah	√	√	√	√	√
		3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan	1 Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah	√	√	√	√	√
		4 Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi	1 Optimalisasi ketersediaan sumber daya air	√	√	√	√	√
		5 Melaksanakan pemupukan berimbang	1 Mempertahankan kesuburan tanah	√	√	√	√	√
		6 Menyediakan sarana produksi yang bermutu.	1 Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.	√	√	√	√	√
		7 Mengaktifkan peran Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.	1 Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.	√	√	√	√	√
		8 Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.	1 Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.	√	√	√	√	√
		9 Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	1 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian	√	√	√	√	√
		10 Pemberian insentif dan penghargaan bagi Petani berprestasi.	1 Meningkatkan kesejahteraan petani	√	√	√	√	√
		11 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis	1 Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		12 Memfasilitasi penyaluran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.	1 Membuka akses pemasaran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.	√	√	√	√	√
		13 Optimalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.	1 Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.		√			
		14 Memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam-tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.	1 Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga	√	√	√	√	√
		15 Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten Badung	1. Pelestarian plasma nutfah tanaman langka	√	√	√	√	√
		16 Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan	1. Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan		√	√	√	√
		17 Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya.	1. Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian	√	√	√	√	√
		18 Melaksanakan intensifikasi dan penerapan bio teknologi	1. Meningkatkan produksi beras dan palawija	√	√	√	√	√
		19 Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.	1. Memantapkan program Badung go organik	√	√	√	√	√
		20 Memanfaatkan lahan perkotaan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).	1. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).	√	√	√	√	√
		21 Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani	1. Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani	√	√	√	√	√
		22 Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	1 Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani	√				

		23 Membentuk Peraturan Bupati tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian	1 Menyusun regulasi tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian	√	√	√	√	√
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		24 Membentuk Peraturan Bupati tentang Subak Lestari/Subak Abadi.	1 Menyusun regulasi tentang Subak Lestari/Subak Abadi.					√
	2 Meningkatnya produksi hasil peternakan	1 Pengembangan Teknologi Peternakan	1. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	√	√	√	√	√
		2 Memetakan potensi Peternakan di Kabupaten Badung	1 Mengembangkan Peternakan berdasarkan potensi wilayah	√	√	√	√	√
	3 Meningkatnya produksi hasil perikanan	1 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan	1. Meningkatkan produksi ikan	√	√	√	√	√
		2 Memetakan potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Badung	1 Mengembangkan Perikanan dan Kelautan berdasarkan potensi wilayah	√	√	√	√	√
2 Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan	1. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	1 Mengembangkan DTW baru sebagai wisata alternatif	1 Mengembangkan pariwisata alternatif	√	√	√	√	√
		2 Melaksanakan penataan DTW	1. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing DTW	√	√	√	√	√
		3 Memantapkan kelembagaan pengelola DTW	2 Penataan fasilitas penunjang DTW	√	√	√	√	√
			1 Penetapan Kelembagaan Pengelola DTW	√	√	√	√	√
			2 Peningkatan SDM Pengelola DTW	√	√	√	√	√
					√	√	√	√
	2 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten badung	1 Meningkatkan pemasaran pariwisata	1 Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah , luar daerah maupun luar negeri	√	√	√	√	√
			2 Publikasi pariwisata dalam berbagai media	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan kualitas industri pariwisata	1 pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat	√	√	√	√	√
			2 peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata	√	√	√	√	√
	3 Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian	1 Meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata pada desa wisata	1 Penataan desa wisata	√	√	√	√	√
			2 peningkatan SDM pengelola desa wisata	√	√	√	√	√
3 mengembangkan paket wisata berbasis pertanian			√	√	√	√	√	

	4 Meningkatnya Jumlah kawasan pesisir yang lestari mendukung pariwisata bahari	1 Peningkatan Kawasan pesisir yang lestari	1 Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir	√	√	√	√	√
--	--	--	--	---	---	---	---	---

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan dari setiap misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan kiat pemerintah dalam bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum yang berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja dan program pembangunan daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun program pembangunan daerah yang merupakan arahan yang lebih jelas dan nyata dari setiap strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung, sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Bali dan sasaran pembangunan jangka menengah Nasional.

Program-Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah berdasarkan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Pengembangan Nilai budaya.
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- c. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- b. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik.
- f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- g. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- h. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal.

- j. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.
- k. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.

3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Penataan Daerah Otonomi Baru.
- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan.
- c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peningkatan kesejahteraan rakyat.
- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik di Wilayah Kab. Badung.
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- h. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- c. Program Pendidikan Non Formal.
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- e. Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi Dan Teknologi
- f. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- g. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
- h. Program Pengelolaan Blud Rsud
- i. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
- j. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak.
- k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
- l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- m. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- n. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- o. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
- p. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- q. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- r. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Dan Jaringannya.
- s. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- t. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- u. Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan.
- v. Program Pengawasan Obat Dan Makanan.
- w. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
- x. Program Keluarga Berencana.
- y. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
- z. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga.
- aa. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat.
- bb. Program Pembinaan Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga.
- cc. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- dd. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- ee. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
- b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM.
- d. Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif.
- e. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- f. Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi
- g. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- h. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- i. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal.
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Program Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan.
- d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- e. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan.
- f. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.
- b. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
- c. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- d. Program Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Perusakan Lingkungan Hidup.
- f. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.
- g. Program Pembangunan Infrastruktur Persampahan.
- h. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Program Perencanaan Tata Ruang.
- j. Program Pencegahan Dini Dan Kesiapsiagaan.
- k. Program Penanganan Darurat Bencana.
- l. Program Pemulihan Pasca Bencana.

8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya.
- e. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- f. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- g. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- h. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
- i. Program Penyehatan Lingkungan.
- j. Program Pengembangan Kawasan Permukiman.
- k. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- l. Program peningkatan pelayanan angkutan.

9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
- b. Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan.
- c. Program Pengembangan Agribisnis.

- d. Program Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan).
- e. Program Pemberdayaan Penyuluh/ Perkebunan Lapangan.
- f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- j. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertenakan.
- k. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
- l. Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang ASUH.
- m. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
- n. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
- o. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
- p. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
- q. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- r. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat.
- s. Program Pemanfaatan Ruang.
- t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- u. Program Pengembangan Kemitraan.
- v. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- w. Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata.
- x. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat.
- y. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata.

Keterkaitan antara sasaran, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Badung

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Badung

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1 Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama	1 Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan	1 Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan 2 Desa Adat yang dibina 3 Kehadiran tokoh agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan	108 upacara keagamaan 10 Desa Adat 100%	114 upacara keagamaan 122 Desa Adat 100%	1 Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Disbud
2.	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	1 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya 2 Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah 3 Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya	1 Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal 1 Revitalisasi adat, dan karya seni 2 Restorasi warisan budaya daerah 1 Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya	Persentase lembaga subak yang masih aktif 1 Karya Seni yang di revitalisasi 1 Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2 Situs cagar budaya yang teridentifikasi 1 Jumlah sekaa tabuh yang dibina	100% 86 karya seni 70 cakep 52 situs 5 Sekaa	100% 123 karya seni 615 cakep 58 situs 25 sekaa	1 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya	Fungsi Lainnya Kebudayaan Fungsi Lainnya	Dispenda Disbud Kecamatan Abiansemal, Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan, Mengwi, Petang

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba	1 Jumlah kegiatan seni yang mengikuti lomba 2 Jumlah prestasi di tingkat kabupaten di bidang seni dan budaya yang berhasil diraih 3 Jumlah prestasi dibidang seni dan kebudayaan yang berhasil diraih di tingkat kabupaten 4 Jumlah Prestasi yang diperoleh di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya 5 Jumlah Prestasi yang diperoleh di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya 6 Jumlah Prestasi yang diperoleh di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya	10	10	1 Program Pengembangan Nilai Budaya	Fungsi Lainnya	1 Kecamatan Abiansemal
					20	60	2 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Fungsi Lainnya	2 Kecamatan Kuta
					9	50	3 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Fungsi Lainnya	3 Kecamatan Kuta
					14	22	4 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Fungsi Lainnya	4 Kecamatan Kuta Selatan
					6	30	5 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Fungsi Lainnya	5 Kecamatan Mengwi
					15	20	5 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Fungsi Lainnya	6 Kecamatan Petang
		5 Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima	1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima	1 Desa Adat yang dibina	10 Desa adat	122 Desa adat	1 Program Pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	1 Disbud

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 Melindungi aset pura (pelaba pura)	1 Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura)	1 Desa Adat yang dibina	10 Desa adat	122 Desa adat	1 Program Pengembangan Nilai budaya	Kebudayaan	1 Disbud
		7 Meningkatkan sosialisasi dalam upaya pemahaman simbol-simbol keagamaan yang sakral	1 meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral	1 Desa Adat yang dibina	10 Desa adat	122 Desa adat	1 Program Pengembangan Nilai budaya	Kebudayaan	1 Disbud
3	Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	1 Inteprestasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Fungsi Lainnya	1 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
4	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	1 Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomudirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk	1 Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	93,12%	99%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2 Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan (siak)	Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	93,12%	99%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		3 Meningkatkan kualitas	1 Menciptakan suatu	1 Tingkat kepuasan	79,76	90%	1 Program Peningkatan	Urusan	1 Kantor

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>elayanan</p> <p>4 Mempermudah alur pelayanan umum di bidang perhubungan sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat</p> <p>5 Meningkatkan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan</p> <p>6 Mensosialisasikan standar pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>kondisi yang kondusif</p> <p>2 Mempercepat proses pelayanan</p> <p>1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain</p> <p>1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain</p> <p>1 Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan</p>	<p>masyarakat</p> <p>1 Prosentase penggunaan angkutan umum</p> <p>1 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>2 IKM</p> <p>3 IKM</p>	<p>37.54%</p> <p>81</p> <p>80</p> <p>81.73</p>	<p>48.85%</p> <p>90</p> <p>81,55</p> <p>-</p>	<p>Pengembangan Sistem</p> <p>Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan</p> <p>1 Program peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>1 Program peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>1 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>2 Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>3 Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p>Perpustakaan</p> <p>Perhubungan</p> <p>Perhubungan</p> <p>Fungsi Lainnya</p> <p>Fungsi Lainnya</p> <p>Fungsi Lainnya</p>	<p>Perpustakaan</p> <p>Daerah</p> <p>1 Dishub</p> <p>1 Dishub</p> <p>1 Kecamatan Abiansemal</p> <p>2 Kecamatan Kuta Selatan</p> <p>3 Kecamatan Kuta Utara</p> <p>4 Kecamatan Petang</p>
				4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50	81.55	Program Peningkatan PengembanganSistim	Fungsi Lainnya	4 Kecamatan Petang

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	7 Meningkatkan Persentase Izin dan Non Non Izin yang terbit tepat waktu	1 Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	1 Persentase Izin dan non izin yang terbit tepat waktu	90%	98%	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Fungsi Lainnya	1 BPPT
			2 Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan	2 Persentase Izin dan non izin yang dapat diproses melalui sistem informasi	5%	40%	1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Fungsi Lainnya	1 BPPT
		8 Meningkatkan Pelayanan terhadap Pengaduan Perizinan	1 Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan perizinan	1 Prosentase pengaduan yang dapat ditangani	100%	100%	1 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Fungsi Lainnya	1 BPPT
		9 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pelayanan publik	1 Terselenggaranya pelayanan publik yang prima	1 Persentase penyelenggara pelayanan publik yang berkategori baik	44%	86%	1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Fungsi Lainnya	1 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		1 Memenuhi sarana dan prasarana di seluruh Wilayah Manajemen Kebakaran	1 Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Persentase capaian indikator SPM yang dilaksanakan	79%	92.25%	1 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Dinas Pemadam Kebakaran
	2 Meningkatkan kualitas aparatur Pemadam Kebakaran	1 Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur							
	3 Mempercepat penerapan SPM di Daerah	1 Terlaksananya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1 Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	75%	100%	2 Program Peningkatan kualitas pelayanan minimal	Fungsi Lainnya	1 Bappeda dan Pengampu SPM	
6	Meningkatnya pemanfaatan	1 Menerapkan teknologi informasi komunikasi	1 Meningkatkan SDM dan sarana prasarana	1 Jumlah layanan yang berbasis TIK	4	9	1 Penataan administrasi kependudukan	Fungsi Lainnya	1 Kecamatan Abiansemal

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	teknologi informasi dalam pelayanan publik	dalam pelayanan publik	berbasis teknologi informasi	2 Jumlah layanan berbasis TIK	9	9	2 Program Penataan Administrasi kependudukan	Fungsi Lainnya	2 Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kuta Selatan, Mengwi
				3 Jumlah ijin UMKM yang dikeluarkan tepat waktu	30	105	3 Program Penataan Administrasi kependudukan	Fungsi Lainnya	3 Kecamatan Kuta Selatan
				4 Jumlah layanan berbasis TIK	7	8	4 Program Penataan Administrasi kependudukan	Fungsi Lainnya	4 Kecamatan Petang
		2 Meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	1 Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	1 IKM	80	81,55	1. Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Lainnya	1 Kecamatan Kuta
		3 Pemuatan berita kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah pada media cetak	1 Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat	1 Terpublikasinya berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan	3036 adv	3800 adv	1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Fungsi Lainnya	1 Bagian Humas dan protokol
				2 Terlatihnya Tenaga Kehumasan/PPID yang Profesional Di Kabupaten Badung	28 orang	30 orang	2 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Fungsi Lainnya	1 Bagian Humas dan protokol

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	4 Melayani permintaan informasi masyarakat mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah	Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang ceper, tepat dan akurat	1 Terlaksananya peliputan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	250 liputan 3 lipsus	300 Liputan 3 Liputan Khusus 12 Dialog Interaktif 15 Greeting	1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fungsi Lainnya	1 Bagian Humas dan protokol
		5 Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informasi	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi	1 Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK	0%	100 %	1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	1 Dishub
				2 Jumlah objek wisata yang menyediakan Wifi gratis	0	32	2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	2 Dishub
				3 Jumlah CCTV yang terpasang pada tempat-tempat strategis	15	529	3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	3 Dishub
		1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik	1 Menigkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek 2 Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung 2 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	2,5 2,5	3,3 3,3	1 Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Penataan Daerah Otonomi Baru	Fungsi Lainnya Fungsi Lainnya	1 Bagian APU 2 Bagian APU
		2 Meningkatkan kapasitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	1. Meningkatkan Inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten	1. Inteprestasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten	BB	A	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Fungsi Lainnya	1 Seluruh perangkat daerah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	3	Badung	2 Persentase SKPD yang memperoleh nilai AKIP minimal BB	70%	85%	2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Fungsi Lainnya	1 Seluruh perangkat daerah	
		3	Membuat perencanaan yang baik	1 Meningkatkan kinerja	1 Evaluasi LKJIP	67,68	75	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Urusan Perpustakaan	1 Kantor Perpustakaan Daerah
		1	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah)	1 Opini BPK	WTP	WTP	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daeah	Fungsi Lainnya	1 Bagian Keuangan
		2	Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku	1 Data Barang Milik Daerah yang akurat dan akuntabel.	74 Unit Kerja	74 Unit Kerja	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Fungsi Lainnya	2 Bagian Keuangan
		3	Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Barang di Masing-masing SKPD	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur	1 SDM yang terampil menyusun Neraca Barang Milik Daerah	159 Orang	159 Orang	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Fungsi Lainnya	Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Badung
		4	Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah	1 Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah	1 Proposal yang diverifikasi administratif	100%	100%	1 Peningkatan kesejahteraan rakyat	Fungsi Lainnya	1 Bag. Adm. Kesra
		5	Peningkatan akuntabilitas	1 Memfasilitasi penyusunan laporan	1 Laporan Pertanggungjawaban	100%	100%			1 Bag. Adm. Kesra

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	1 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan	1 Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal 2 Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1 Pemanfaatan dana hibah yang sesuai ketentuan 2 Penerima hibah yang dimonitoring 1 Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang menyebabkan kerugian daerah 2 Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 3 Nilai Pelaksanaan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	100%	100%	1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Fungsi Lainnya	2 Bag. Adm. Kesra 1 Inspektorat
10	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	1 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)	1 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah	1 Kapasitas Fiskal Daerah	4 SKPD	29 SKPD	1 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik di Wilayah Kab. Badung 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Lainnya Fungsi Lainnya	2 Inspektorat 3 Inspektorat 1 Dispenda 2 Dispenda
		2 Mewujudkan PNS yang berkualitas	1 Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan Bintek/sejenisnya sebanyak mungkin terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Badung	1 Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek/sejenisnya di pemerintah Kabupaten Badung $\frac{\text{Jumlah seluruh pegawai}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$ Pemkab. Badung	5%	14%	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Lainnya	1 BKD, Diklat

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	3 Mengkomunikasikan secara komprehensif program pembangunan kepada para pemangku kepentingan	1 Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD	1 Persentase penetapan Peraturan Daerah	100%	100%	1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Fungsi Lainnya	1 Setwan, Bag. Hukum dan HAM	
		4 Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan	1 Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik					1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Fungsi Lainnya	1 Setwan, Bag. Hukum dan HAM
		1 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal	1 Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%	1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	98.83%	100 %	1. Pendidikan anak usia dini	Pendidikan	1 Disdikpora	
			2 Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi	1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan Persentase kelulusan SD Persentase kelulusan SMP	APK SD 113,57 % APK SMP 123.16 %	APK SD 100 % APK SMP 100 %	1 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	2 Disdikpora	
			3 Memantapkan mutu	1 Persentase Warga	-	100 %	1 Pendidikan non formal	Pendidikan	1 Disdikpora	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun	Kabupaten Badung buta aksara (niraksara) usia > 15 Tahun mampu membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan standar nasional pendidikan					
				2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C	60 %	100 %	1 Pendidikan non formal	Pendidikan	2 Disdikpora
			4 Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu	1 Pengelola pendidikan non formal yang terlatih 2 Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 % 47 %	100 % 75 %	1 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	1 Disdikpora
			5 Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif	1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	APK SD 113,57 % APK SMP 123.16 %	APK SD 100 % APK SMP 100 %	1 Wajib belajar pendidikan dasar	Pendidikan	1 Disdikpora
		2 Pengembangan penyelenggaraan pendidikan satu atap jenjang pendidikan dasar	1 Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun	1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	APK SD 113,57 % APK SMP 123.16 %	APK SD 100 % APK SMP 100 %	1 Wajib belajar pendidikan dasar	Pendidikan	1 Disdikpora

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Meningkatnya kompetensi guru	3 penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu	1 Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu	1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	APK SD 113,57 % APK SMP 123.16 %	APK SD 100 % APK SMP 100 %	1 Wajib belajar pendidikan dasar	Pendidikan	1 Disdikpora
		1 Peningkatan guru yang bersertifikasi	1 Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi	1 Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	0 satuan pendidikan	1 satuan pendidikan	1 Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi	Pendidikan	1 Disdikpora
		2 penyediaan sarana prasarana workshop tenaga pendidik	1 pemenuhan sarana prasaran workshop tenaga pendidik	1 Tenaga pendidik yang bersertifikasi	47 %	75 %	1 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	1 Disdikpora
13	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	1 Peningkatan kualitas gedung sekolah yang berkondisi baik	1 Pemenuhan kualitas gedung pendidikan	1 Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	60 %	80 %	1 Peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	1 Disdikpora
				2 Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	11 Cabang	16 Cabang	2 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	2 Disdikpora

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan	1 Peningkatan pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi	1 Indeks Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat	90%	96%	1 Program Pengelolaan BLUD RSUD	Kesehatan	1 RSUD
			2 Menerapkan ISO 9001 : 2008	1 Indeks Kinerja Pelayanan	65%	80%	Program Pengelolaan BLUD RSUD	Kesehatan	1 RSUD
				2 Indeks Kinerja Keuangan	76.50%	85%	Program Pengelolaan BLUD RSUD	Kesehatan	2 RSUD
			3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1 Prosentase Sarana prasarana sesuai standar kelas Rumah Sakit	80.00%	100%	1 Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan	1 RSUD
		2 Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas	1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care).	1 Angka Kematian Ibu (AKI)	96,83/100.000 KH	85/100.000 KH	1 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	1 Dinas Kesehatan
				2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	94.24%	97%			2 Dinas Kesehatan
				3 Angka Kematian Balita (AKABA)	3.87/1000 KH	2.99/1000 KH	2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	3 Dinas Kesehatan
				4 Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	80%	85%		Kesehatan	4 Dinas Kesehatan
				5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	50%	60%	3 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	5 Dinas Kesehatan
			2 Peningkatan peran serta	1 Cakupan ibu hamil	18,2%	50%	1 Program peningkatan	Kesehatan	1 Dinas

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.	mendapat pelayanan P4K (berstiker)			kesehatan ibu melahirkan dan anak		Kesehatan	
				2 Cakupan Deteksi Ibu Hamil oleh masyarakat	54,86%	62,50%	2 Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	2 Dinas Kesehatan	
				3 Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	35%	100%	3 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	3 Dinas Kesehatan	
		3	Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat	1 Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.	1 Persentase Balita Kekurangan gizi	12.50%	10%	1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	1 Dinas Kesehatan
					2 Angka kematian Ibu (AKI)	99.83	40.00	2 Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Kesehatan	2 RSUD
		4	Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.	1 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	300 per 100.000 penduduk	200 per 100.000 penduduk	1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	1 Dinas Kesehatan
					2 Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	30%	50%	2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	2 Dinas Kesehatan
				2 Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah	1 Rata-rata waktu epidemiologi KLB/Wabah	24 jam	12 jam	1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	1 Dinas Kesehatan
			3	Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku	1 Persentase desa yang melaksanakan STBM	20.97	100%	1 Program Pengembangan	Kesehatan	1 Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	<p>hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.</p> <p>1 Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.</p> <p>2 Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan</p> <p>3 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta</p> <p>4 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.</p>	<p>1 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>1 Persentase Kepesertaan JKN</p> <p>1 Persentase Puskesmas Terakreditasi</p> <p>1 Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam</p> <p>2 Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap</p>	<p>54 Pustu 13 Puskesmas 2 RS</p> <p>71%</p> <p>0</p> <p>46.15</p> <p>50%</p>	<p>66 Pustu 17 Puskesmas 3 RS</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Lingkungan Sehat</p> <p>1 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</p> <p>1 Program Upaya Kesehatan masyarakat</p> <p>2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>1 Program Upaya Kesehatan masyarakat</p> <p>2 Program Upaya Kesehatan masyarakat</p>	<p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p>	<p>1 Dinas Kesehatan</p> <p>1 Dinas Kesehatan</p> <p>1 Dinas Kesehatan</p> <p>1 Dinas Kesehatan</p> <p>2 Dinas Kesehatan</p>
		6 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan	1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui	1 Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	4,8%	53%	1 Program Upaya Kesehatan masyarakat	Kesehatan	1 Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	masyarakat	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	2 Cakupan PHBS	80,16	86.00	2 Program Upaya Kesehatan masyarakat	Kesehatan	2 Dinas Kesehatan
		7 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.	1 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.	1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%	100%	1 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	1 Dinas Kesehatan
		8 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.	1 Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).	2 Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	85%	100%	2 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	2 Dinas Kesehatan
		2 Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas	1 Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang	1 Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)	85%	100%	1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kesehatan	1 Dinas Kesehatan
		3 Meningkatkan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada generasi muda dan pasangan usia subur (PUS)	1 Meningkatkan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang	1 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.05%	77.24%	1 Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 BKBKS
			1 Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi	1 Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.22%	0.15%	1 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 BKBKS
			2 Memantapkan sinergitas dengan mitra kerja	1 Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	51.99%	59.12%	1 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 BKBKS
			2 Persentase PPKBD dan Sub	39.14%	100%	2 Program Pembinaan	Pengendalian	2 BKBKS	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	<p>4 Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat</p> <p>1 Peningkatan Pendataan dan pengawasan terhadap penyaluran Raskin agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi kepada masyarakat miskin</p> <p>2 Memperluas Akses Perlindungan Sosial</p> <p>3 Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial</p>	<p>1 Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS</p> <p>1 Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin</p> <p>1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial</p> <p>1 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya</p>	<p>PPKBD yang mendapatkan KIE</p> <p>3 Persentase Banjar yang menjadi sasaran KIE program KB</p>	0	100%	Peran Serta Masyarakat	Penduduk dan Keluarga Berencana	3 BKBKS
				<p>1 Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif</p> <p>1 Persentase rumah tangga sasaran yang mendapatkan perlindungan sosial</p>	100%	100%	<p>1 Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p> <p>1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa</p>	<p>1 BKBKS</p> <p>1 BPMD dan Pempdes</p>
				<p>1 Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat</p> <p>1 Cakupan penyandang disabilitas diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar</p>	56.34%	100%	<p>1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Sosial</p> <p>Sosial</p>	<p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p> <p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p>
				<p>2 Cakupan anak diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar</p> <p>3 Cakupan Lanjut usia terlantar</p>	0%	100%	<p>1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>1 Program Pelayanan</p>	<p>Sosial</p> <p>Sosial</p>	<p>2 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p> <p>3 Dinas Sosial</p>

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Meningkatnya UMKM yang aktif	<p>4 Maksimalisasi sarana prasarana perlindungan sosial</p> <p>1 Pemberdayaan dan Penguatan sektor UMKM</p>	<p>1 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial</p> <p>1 Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing</p>	diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	0%	100%	dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	dan Tenaga Kerja
				4 Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar			1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		4 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				5 Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.			1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		5 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				1 Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan			1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				1 Meningkatnya UMKM yang aktif, kreatif dan berdaya saing			1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM		1 Diskoperindag
							2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	2 Diskoperindag
							3 Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM	Industri	3 Diskoperindag
							4 Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif	Industri	4 Diskoperindag
							5 Program Peningkatan	Perdagangan	5 Diskoperindag

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Meningkatnya Koperasi yang sehat	1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	1 Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi	1 Meningkatnya Koperasi Yang Sehat	64,83%	100%	Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 6 Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi 7 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 8 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Perdagangan Industri Industri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	6 Diskoperindag 7 Diskoperindag 8 Diskoperindag 1 Diskoperindag
19	Meningkatnya penegakan Perda	1 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah 2 Penegakan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1 Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan 2 Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM	1 Menurunnya pelanggaran Perda	70%	95%	1. Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1 Satpol PP 2 Satpol PP
20	Meningkatnya Penanganan permasalahan Hukum dan HAM	1. Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	1. Penegakan Hukum dan HAM	1 Prosentase penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	100%	100%	1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Fungsi Lainnya	1 Bagian Hukum dan HAM
21	Meningkatnya pengarusutamaan gender	1 Membentuk pos pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap	1 Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan	1 Angka IPG	75.47	75.53	1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 KPP

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perempuan dan anak di Desa/Kelurahan	terhadap perempuan dan anak				2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 KPP
		2 Memasyarakatkan kesetaraan gender	1 Meningkatkan kualitas hidup perempuan				3 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 KPP
							4 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 KPP
22	Menurunnya luas lahan kritis	1 Menggalakkan budaya menanam pohon	1. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1 Persentase lahan kritis	10,66 %	9,46 %	1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kehutanan Kehutanan	1 Distanbunhut 2 Distanbunhut
23	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	1 Meningkatkan penataan masyarakat terhadap lingkungan	1 Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan 2 Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan	1 Jumlah izin lingkungan yang diterbitkan 2 Jumlah usaha dan kegiatan yang dibina dan diawasi yang memiliki dokumen lingkungan	600 dokumen 80 usaha	3625 dokumen 500 usaha	1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	1 BLH 2 BLH
		2 Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah. 2. Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam	1 Nilai Indek kualitas lingkungan hidup 1 Jumlah Teknologi Tepat Guna dibidang lingkungan hidup 2 Luasan taman keanekaragaman hayati	> 47 40 unit 0 ha	> 48 150 unit 4 ha	1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 Program Reahabilitasi dan Pemulihan Perusakan Lingkungan Hidup 3 Program Reahabilitasi dan Pemulihan	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	1 BLH 1 BLH 2 BLH

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal (Tahun 2015)	Kondisi Akhir (Tahun 2021)			
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup 2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 3. Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan	1 Jumlah usaha dan kegiatan yang diawasi 1 Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1 Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan	40 Perusahaan 10 Desa Proklam 12 desa adat, 18 sekolah, 50 saka kalpataru 12 Perusahaan 6 orang 50 kasus	220 Perusahaan 50 Desa Proklam 100 desa adat 90 sekolah 50 saka kalpataru 100 Perusahaan 6 orang 250 Kasus	Perusakan Lingkungan Hidup 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	1 BLH 2 BLH 3 BLH
		4 Meningkatkan informasi dibidang lingkungan hidup	1. Peningkatan sistem informasi lingkungan 2. Meningkatkan kualitas database lingkungan	1 tersedianya informasi lingkungan hidup 1 tersedianya data lingkungan hidup	14 sistem informasi lingkungan 14 Data	16 sistem informasi lingkungan 16 Data	1 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kualitas lingkungan hidup 1 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	1 BLH 2 BLH

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Peningkatan Pengelolaan kebersihan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan 2 Meningkatkan pengelolaan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Prosentase Cakupan Pelayanan Sampah 2. Prosentase Sampah yang tertangani 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	30% 78,5% 0.0291 %	57% 94,40% 0,1967 %	Lingkungan Hidup kualitas lingkungan hidup 1. Program Pembangunan Infrastruktur Persampahan 1 Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	1 DKP 2 DKP
25	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	1 Peningkatan penyusunan rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	1. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	1 jumlah rancangan kerja rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten	14,55 %	30,91 %	program perencanaan tata ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 bappeda
26	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana	1 Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1. Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan 2. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan 3. Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai 4. Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat	1 Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	50%	100%	1. Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan 2. Program penanganan darurat bencana 3. Program pemulihan pasca bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Ketenteraman,	1 BPBD 2 BPBD 3 BPBD 4 BPBD

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	<p>1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>2 Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Assesor</p>	<p>5. Penanganan pasca bencana yang komprehensif</p> <p>6. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana</p>	<p>1 Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi</p> <p>1 Melaksanakan akreditasi terhadap LPK</p> <p>2. Meningkatkan jumlah dan kualitas Assesor</p>	<p>1 Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi</p> <p>1 Persentase Lembaga Pelatihan kerja yang memperoleh pembinaan</p> <p>2 Persentase Assesor instruktur latihan Swasta yang memperoleh pelatihan</p>	<p>35.74%</p> <p>76%</p> <p>9%</p>	<p>60.96%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<p>Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</p> <p>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</p> <p>Ketenagakerjaan</p> <p>Ketenagakerjaan</p>	<p>5 BPBD</p> <p>6 BPBD</p> <p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p> <p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p> <p>2 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p>
			<p>3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis</p>	<p>1 Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Sama</p>	<p>1 Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama</p>	<p>50%</p> <p>60%</p>	<p>1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p>	<p>Ketenagakerjaan</p>	<p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p>	
			<p>4 Mengembangkan potensi kewirausahaan</p> <p>5 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan</p>	<p>1 Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan</p> <p>1 Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha</p>	<p>1 Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan</p> <p>1 Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan</p>	<p>50%</p> <p>50%</p> <p>50%</p>	<p>1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p>	<p>Ketenagakerjaan</p> <p>Ketenagakerjaan</p>	<p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p> <p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p>	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri</p> <p>6 Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri</p> <p>7 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)</p>	<p>dan industri, baik dalam maupun luar negeri</p> <p>1 Membuka akses kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri</p> <p>1 Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah</p>	<p>1 Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan</p> <p>1 Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan</p>	50%	50%	<p>1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p>	<p>Ketenagakerjaan</p> <p>Ketenagakerjaan</p>	<p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p> <p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p>
28	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	<p>8 Memfasilitasi dengan para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)</p> <p>1 Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah diantaranya melalui program pengembangan dan</p>	<p>1 Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)</p> <p>1 Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</p>	<p>1 Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja sama</p> <p>1 Prosentase zona rawan banjir dan genangan</p>	50%	60%	<p>1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya</p>	<p>Ketenagakerjaan</p> <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p> <p>1 DBMP</p>

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.</p> <p>2. Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur.</p> <p>3. Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis</p> <p>1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</p>	<p>1 Prosentase ruas jalan kabupaten berkategori baik</p> <p>1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman</p>	94.50%	100.00%	<p>1 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</p> <p>2 Program Rehabilitas / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>1 Program Lingkungan Sehat Perumahan</p>	<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>1 DBMP</p> <p>2 DBMP</p> <p>3 DBMP</p> <p>1 DCK</p>
		<p>4 Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas</p>	<p>1. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas</p>	<p>2 Persentase penduduk yang mendapatkan akses Pengolahan Air Limbah Domestik</p> <p>3 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana</p> <p>1 Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Berfungsi Baik</p> <p>2 Jumlah Daerah Rawan Kemacetan</p>	84.43%	100%	<p>2 Program Penyehatan Lingkungan</p> <p>3 Program Penataan Kawasan Permukiman</p> <p>1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</p> <p>2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas</p>	<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Perhubungan</p> <p>Perhubungan</p>	<p>2 DCK</p> <p>3 DCK</p> <p>1 Dishub</p> <p>2 Dishub</p>

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Meningkatnya produksi beras dan palawija	1 Penelitian dan Pengkajian Potensi Baru Produksi dan produktivitas Pertanian	1 Mengintensifkan penelitian dan Pengembangan Guna Meningkatkan Produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Kabupaten Badung	3 Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio)	0,61	0,45	Perhubungan 3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	3 Dishub
				4 Prosentase pelanggaran lalu lintas	2,60%	1,2%	4 Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	4 Dishub
				5 Prosentase kecelakaan lalu lintas	34,80%	16,00%	5 Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	5 Dishub
				1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Peningkatan produksi Pertanian/perkebunan	Pertanian	1 Distanbunhut
		2 Memetakan potensi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Badung	2 Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Pengembangan sistem data / informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Pertanian	1 Distanbunhut
		3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan	3 Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pertanian	1 Distanbunhut
		4 Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi	4 Optimalisasi ketersediaan sumber daya air	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pertanian	1 Distanbunhut
		5 Melaksanakan pemupukan berimbang	5 Mempertahankan kesuburan tanah	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	1 Distanbunhut

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 Menyediakan sarana produksi yang bermutu.	6 Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	1 Distanbunhut
		7 Mengaktifkan peran Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.	7 Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	1 Distanbunhut
							2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	2 Distanbunhut
		8 Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.	8 Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.	1 Persentase pemenuhan kebutuhan palawija	86.12%	100.0%	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pangan	1 Distanbunhut
							2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	2 Distanbunhut
		9 Pendampingan dan pelatihan inovasi pertanian	9 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian	1 meningkatkan Kualitas SDM Petani	0%	100%	1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	1 Distanbunhut
							2 Program Peningkatan Ketahanan (Pertanian / Perkebunan)	Pangan	2 Distanbunhut
							3 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	3 Distanbunhut
							4 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Pertanian	4 Distanbunhut
		10 Pemberian insentif dan penghargaan bagi Petani berprestasi.	10 Meningkatkan kesejahteraan petani	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pangan	1 Distanbunhut
							2 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Pertanian	2 Distanbunhut

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>11 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis</p> <p>12 Memfasilitasi penyaluran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.</p>	<p>11 Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.</p> <p>12 Membuka akses pemasaran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.</p>	<p>1 Penguatan lembaga Agribisnis</p> <p>1 Tersalurkannya hasil Pertanian lokal</p>	<p>6 kecamatan</p> <p>0</p>	<p>6 kecamatan</p> <p>1 Pasar Agro</p>	<p>1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)</p> <p>1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan</p> <p>2 Program Pengembangan Agribisnis</p>	<p>Pangan</p> <p>Pertanian</p> <p>Pertanian</p>	<p>1 Distanbunhut</p> <p>1 Distanbunhut</p> <p>1 Distanbunhut</p>
		<p>13 Optimalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.</p>	<p>13 Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.</p>	<p>1 tersedianya data jineng yang difungsikan sebagai pengaman stok pangan</p>	<p>0</p>	<p>1 Jenis laporan</p>	<p>1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)</p>	<p>Pangan</p>	<p>1 Distanbunhut</p>

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		14 Memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam-tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.	14 Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga	1 Persentase pemenuhan kebutuhan palawija	86.12%	100.0%	1 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 2 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan) 3 Pemberdayaan penyuluh/ perkebunan lapangan	Pertanian Pangan Pertanian	1 Distanbunhut 2 Distanbunhut 3 Distanbunhut
		15 Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten Badung	15 Pelestarian plasma nutfah tanaman langka	1 Tersedianya tempat pelestarian plasma nutfah tanaman langka	1 lokasi	1 lokasi	1 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Pertanian	1 Distanbunhut

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		16 Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan	16 Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Pertanian	1 Distanbunhut
		17 Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya.	17 Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian	1 Tersalurkannya hasil Pertanian lokal	0	1 Pasar Agro	1 Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian / Perkebunan	Pertanian	1 Distanbunhut
		18 Melaksanakan intensifikasi dan penerapan bio teknologi	18 Meningkatkan produksi beras dan palawija	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Pengembangan Agribisnis	Pertanian	1 Distanbunhut
		19 Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.	19 Memantapkan program Badung go organik	2 Persentase pemenuhan kebutuhan palawija	86.12%	100.0%			
				1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	1 Distanbunhut
		20 Memanfaatkan lahan perkotaan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).	20 Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).	1 Pengembangan pertanian hidroponik	1 kecamatan	6 kecamatan	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pangan	1 Distanbunhut

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Meningkatnya produksi hasil peternakan	21 Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani	21 Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	2 Pemberdayaan penyuluh/ perkebunan lapangan	Pertanian	2 Distanbunhut
		22 Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	22 Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pangan	1 Distanbunhut
		23 Membentuk Peraturan Bupati tentang perlindungan, penampungan, pemasaran, pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan pertanian organik.	23 Menyusun regulasi tentang perlindungan, penampungan, pemasaran, pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan pertanian organik.	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	1 Distanbunhut
		24 Membentuk Peraturan bupati tentang Subak Lestari/Subak Abadi.	24 Menyusun regulasi tentang Subak Lestari/Subak Abadi.	1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras	85.85%	100.0%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pertanian	1 Distanbunhut
		1 Pengembangan Teknologi Peternakan	1. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging sapi	1 Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi	31.42%	42.00%	1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	1 Disnakanlut
							2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		2 Disnakanlut
							3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		3 Disnakanlut
							4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		4 Disnakanlut

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Meningkatnya produksi hasil perikanan	2 Memetakan potensi Peternakan di Kabupaten Badung 1 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan	1 Mengembangkan Peternakan berdasarkan potensi wilayah 1. Meningkatkan produksi ikan	1 Prosentase potensi pengembangan peternakan 1 Persentase pemenuhan kebutuhan ikan	0%	100.00%	5 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang ASUH	Pertanian	5 Disnakanlut
							1 Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Peternakan		1 Disnakanlut
							1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		1 Disnakanlut
							2 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan		1 Disnakanlut
							3 Program Pengembangan Budidaya Perikanan		1 Disnakanlut
4 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1 Disnakanlut								
							5 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	1 Disnakanlut

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	2 Memetakan potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Badung	1 Mengembangkan Perikanan dan Kelautan berdasarkan potensi wilayah	Prosentase potensi pengembangan perikanan dan kelautan	0%	100.00%	6 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	Kelautan dan Perikanan	1 Disnakanlut
							7 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	1 Disnakanlut
							1 Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan dan Kelautan	Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Disnakanlut
							1 Program Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum	1 Dinas Cipta Karya
33	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke	1 Meningkatkan pemasaran pariwisata	1 Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah , luar daerah maupun luar	1 peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	4,000,000	5,105,126	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	1 Diparda
							1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	1 Diparda
		3 Memantapkan kelembagaan pengelola DTW	1 Penetapan Kelembagaan Pengelola DTW				2 Program pengembangan kemitraan	Pariwisata	1 Diparda
		1 Mengembangkan DTW baru sebagai wisata alternatif	1 Mengembangkan pariwisata alternatif	1 Jumlah DTW alternatif	0	1			
		2 Melaksanakan penataan DTW	1. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing DTW 2 Penataan fasilitas penunjang DTW	1 Persentase DTW yang ditata	55%	72%	1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	1 Diparda 2 Diparda
			2 Peningkatan SDM Pengelola DTW						2 Diparda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten Badung		negeri 2 Publikasi pariwisata dalam berbagai media						2 Diparda
		2 Meningkatkan kualitas industri pariwisata	1 Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat 2 Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata				1 Program pengembangan kemitraan 2 Program Pengembangan dan pengelolaan produk wisata	Pariwisata Pariwisata	1 Diparda 2 Diparda
34	Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian	1 Meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata pada desa wisata	1 Penataan desa wisata 2 Peningkatan SDM pengelola desa wisata 3 Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian	1 Jumlah Desa Wisata yang berbasis pertanian	1	6	1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	1 Diparda 1 Diparda
35	Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari	1 Peningkatan kawasan pesisir yang lestari	1 Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir	1 Jumlah kawasan desa pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari	0%	100.00%	1 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat 2 Program pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan	1 Disnakanlut 2 Disnakanlut

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Badung memuat program-program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta program-program strategis yang berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang disertai dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap program tersebut. Program-program prioritas dan strategis yang telah disertai kebutuhan pendanaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada Tabel 8.1 dibawah ini akan disajikan indikasi rencana program prioritas seluruh Perangkat Daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam jangka waktu lima tahun (Tahun 2017-2021) yang dikelompokkan atas : (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (2) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Urusan Pilihan, serta (4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disamping Tabel 8.1, pada RPJMD Kabupaten Badung ini ditambahkan pula Program-Program Prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah khusus Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Tabel 8.2 berikut ini. Penyajian Program-Program Prioritas Tahun 2016 tersebut merupakan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017.

Sedangkan Tabel 8.3 hanya memuat program-program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tertentu selama kurun waktu 2017-2021 yang berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Dengan
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2021
Kabupaten Badung

Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Dengan
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016
Kabupaten Badung

Indikasi Rencana Program Strategis Yang Disertai Dengan
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2021
Kabupaten Badung

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	URUSAN WAJIB				2,050,057.53		2,480,159.43		2,542,027.47		2,814,295.58		3,263,801.19		12,323,828.66	
1.1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,867,139.26		2,297,241.16		2,359,109.20		2,631,377.31		3,080,882.92		12,140,910.39	
01	URUSAN PENDIDIKAN				377,932.91		393,274.67		472,187.00		524,626.26		588,911.80		2,332,197.73	
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA				377,932.91		393,274.67		472,187.00		524,626.26		588,911.80		2,332,197.73	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	21.384.00	100%	4.412.96	100%	21.073.36	100%	21.253.19	100%	21.440.01	100%	89.563.52	Disdikpora
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	958.79	100%	1.555.28	100%	1.411.11	100%	1.552.02	100%	1.706.82	100%	7.184.02	Disdikpora
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	369.76	100%	462.91	100%	508.80	100%	559.18	100%	614.50	100%	2.515.15	Disdikpora
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renia SKPD denoan RKPD	100%	100%	10.68	100%	12.10	100%	13.31	100%	14.64	100%	16.11	100%	66.84	Disdikpora
15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase warga Kab. Badung usia 1-6 Tahun berhak mendapat pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan	100%	100%	6.095.36	100%	5.246.09	100%	5.457.27	100%	785.18	100%	14.477.19	100%	32.061.09	Disdikpora
16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Persentase warga Kab. Badung usia 7-15 Tahun berhak mendapat pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan	100%	100%	229,495.04	100%	363,986.70	100%	435,505.45	100%	491,864.39	100%	541,646.03	100%	2,041,483.28	Disdikpora
		Angka Lulusan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyeteraan Paket C	60%	80%	573.24	85%	4.364.27	90%	706.86	95%	775.94	100%	852.54	100%	3.552.27	Disdikpora
		Pengelola pendidikan non formal yang terlatih	60%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	47%	55%	4.282.03	60%	2.939.37	65%	3.227.85	70%	3.538.71	75%	3.875.61	75%	17.863.57	Disdikpora
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	-	271 sekolah	114,764.00	271 sekolah	10,295.00	271 sekolah	4,283.00	271 sekolah	4,283.00	271 sekolah	4,283.00	271 sekolah	137,908.00	Disdikpora
02	URUSAN KESEHATAN				378,256.64		484,752.01		523,072.58		584,370.76		515,230.60		2,496,142.76	
	DINAS KESEHATAN				213,941.06		254,449.01		277,158.58		270,406.76		278,201.60		1,304,617.18	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	10,143.39	100%	9,954.35	100%	10,102.07	100%	10,268.31	100%	9,938.41	100%	53,930.79	Diskes
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	19,399.10	100%	3,941.25	100%	4,374.01	100%	4,594.87	100%	4,390.10	100%	50,706.96	Diskes
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai evaluasi LKJP Dinas Kesehatan Kab. Badung	BB	BB	345.41	A	319.78	A	319.78	A	319.78	A	319.78	A	1,624.54	Diskes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%			Diskes
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Diskes
		Persentase penyerapan anggaran dalam DPA untuk Belanja Lanosuno dan BTL	84,15%	87%		88%		89%		90%		0.900		0.900			Diskes
	15	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	78,70%	100%	3,777.50	100%	4,042.94	100%	4,045.34	100%	4,047.04	100%	4,049.54	100%	19,962.37	Diskes
	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kepesertaan JKN	70,97%	80%	103,377.12	90%	150,159.86	100%	166,329.70	100%	185,959.49	100%	201,044.71	100%	806,614.58	Diskes
		Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46,15%	46,15 %		46,15%		46,66%		46,66%		52,94%		52,95			Diskes
		Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap	50%	50%		50%		66,67%		100%		100%		100%			Diskes
		Persentase Desa Siaga Aktif purnama dan mandiri	5%	25%		35%		45%		50%		55%		55%			Diskes
		Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	80,16 %	82%		83%		84%		85%		86%		86%			Diskes
		Prosentase siswa sehat	85%	90%		92%		94%		96%		96%		96%			Diskes
		Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	62,70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Diskes
		Cakupan penjarangan pendidikan dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Diskes
		Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Diskes
		Cakupan pelayanan higiene sanitasi pangan pada anak di satuan pendidikan dasar	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Diskes
	17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	85%	90%	88.95	95%	97.76	97%	106.59	100%	115.95	100%	126.25	100%	535.50	Diskes
	20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase Kekurangan gizi pada balita	12,5% (Riskasdas)	12,3%	1,295.02	12,1%	487.19	11,0%	553.02	10,0%	614.07	10,00%	614.07	10,00%	2,335.63	Diskes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase desa yang melaksanakan STBM	20,97%	58,25%	546.29	62,35%	637.84	65,40%	679.13	68,12%	724.54	68,12%	774.49	68,12%	3,362.29	Diskes
22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	0.27%	0.25%	17,744.74	0.24%	18,481.03	0.23%	20,356.12	0.22%	22,439.03	0.22%	24,237.58	0.22%	103,258.49	Diskes
		Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	25%	35%		40%		45%		50%		50%				Diskes
		Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	24 Jam	21 Jam		17 Jam		14 Jam		12 Jam		12 Jam		12 Jam		Diskes
		Cakupan penganan penderita hipertensi	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
		Cakupan penanganan penderita diabetes	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
		Cakupan penemuan penderita TB Paru	52,73%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
		Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	87,82%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
		Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi	7.69%	100,0%	3,743.27	100,0%	2,859.54	100,0%	3,193.99	100,0%	4,989.89	100,0%	3,618.72	100,0%	18,405.41	Diskes
25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 54, Puskesmas 13 dan RS 2	Pustu 54, Puskesmas 13 dan RS 3 Unit	42,965.00	Pustu 58, Puskesmas 15 dan RS 3 Unit	53,342.67	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	56,439.95	Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 Unit	24,731.00	Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 Unit	16,829.00	Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 unit	191,297.43	Diskes
		Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	35%	50%	41.90	65%	46.05	75%	54.13	85%	59.54	100%	60.91	100%	262.52	Diskes
29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Angka Kematian Balita (AKABA)	2,99 per 1000 Kelahiran Hidup	3,74 per 1000 Kelahiran Hidup	54.40	3,37 per 1000 Kelahiran Hidup	58.04	2,99 per 1000 Kelahiran Hidup	58.04	2,99 per 1000 Kelahiran Hidup	389.85	2,99 per 1000 Kelahiran Hidup	92.10	2,99 per 1000 Kelahiran Hidup	652.43	Diskes
		Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	80%	81%		82%		83%		84%		85%		85%		Diskes
		Cakupan pelayanan kesehatan balita		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	50%	54%	1,581.14	56%	1,897.21	58%	2,028.60	60%	2,105.20	60%	2,105.20	60%	8,136.21	Diskes
32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka Kematian Ibu Melahirkan	99.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	93.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	1,162.20	90.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	1,121.04	87.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	968.03	85 per 100.000 Kelahiran Hidup	1,008.12	85 per 100.000 Kelahiran Hidup	1,476.66	85 per 100.000 Kelahiran Hidup	4,739.70	Diskes
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	98,66%	92%		93%		94%		95%		97%		97%		Diskes
		Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	18,2%	25%		30%		35%		40%		50%		50%		Diskes
		Cakupan Deteksi resiko Tinggi Ibu Hamil oleh masyarakat	54,86	56%		58%		60%		61%		62,5%		62,5%		Diskes
		Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	99%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Diskes
		Cakupan pelayanan Kesehatan Bawi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Diskes
36	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100%	100%	7,425.65	100%	6,727.10	100%	7,250.07	100%	7,690.08	100%	8,174.09	100%	37,266.99		Diskes
37	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100%	100%	249.98	100%	275.35	100%	300.00	100%	350.00	100%	350.00	100%	1,525.34		Diskes
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				164,315.58		230,303.00		245,914.00		313,964.00		237,029.00		1,191,525.58		
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Belum semua layanan administrasi kantor terpenuhi	1 pkt. 12 bln. 140 orq	17,675.31	1 pkt. 12 bln. 140 orq	19,103.00	1 pkt. 12 bln. 140 orq	21,014.00	1 pkt. 12 bln. 140 orq	23,114.00	1 pkt. 12 bln. 140 orq	25,424.00	6 pkt. 72 bln. 831 orq	106,330.31		RSUD
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Masih kurangnya sarana prasarana aparatur rumah sakit	2 paket	228.13	2 paket	3,700.00	2 paket	1,000.00	2 paket	350.00	2 paket	305.00	14 paket	5,583.13		RSUD
26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Terperuhnya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	80%	82%	31,412.14	85%	87,500.00	90%	98,900.00	95%	150,500.00	100%	61,300.00	100%	429,612.14		RSUD
40	PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Indeks Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat	75%	76%	115,000.00	77%	120,000.00	78%	125,000.00	79%	140,000.00	80%	150,000.00	80%	650,000.00		RSUD
		Indeks Kinerja Pelayanan	65%	76%		77%		78%		79%		80%		80%			
		Indeks Kinerja Keuangan	76.50%	80%		81%		82%		83%		85%		80%			
03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				850,472.75		1,185,568.00		1,108,111.14		1,241,692.57		1,659,322.97		6,004,200.50		
	PEKERJAAN UMUM				813,350.21		1,145,385.22		1,065,225.09		1,194,291.71		1,607,387.62		5,785,947.93		
	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN				415,934.40		832,855.70		721,731.02		816,726.63		1,192,355.44		4,053,281.11		
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Prasarana Administrasi Perkantoran Untuk Pelaksanaan Tugas	100%	100%	22,054.07	100%	4,307.13	100%	4,715.84	100%	5,175.42	100%	5,669.97	100%	23,826.43		DBMP
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik	100%	100%	1,127.01	100%	1,239.72	100%	1,363.69	100%	1,500.06	100%	1,650.06	100%	6,880.53		DBMP DBMP
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Administrasi Keuangan dengan Baik dan Lancar	100%	100%	808.09	100%	888.90	100%	977.79	100%	1,075.57	100%	1,183.12	100%	4,933.47		DBMP
07	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	94,5 %	96,75 %	270,523.56	98,00%	309,665.48	99,25%	340,632.02	100,00%	374,695.22	100,00%	412,164.75	100%	1,720,379.03		DBMP
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Perencanaan dan Penanganan SKPD	100%	100%	9.99	100%	10.99	100%	12.09	100%	13.29	100%	14.62	100%	60.98		DBMP
15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah Ruas Jalan dan Jembatan Baru Yang Terbangun	100%	100%	1,419.40	100%	280,004.89	100%	131,512.34	100%	152,247.28	-	481,135.89	100%	1,045,320.65		DBMP
18	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	94,5 %	96,75 %	26,919.82	98,00%	124,008.04	99,25%	136,408.84	100,00%	150,049.72	100,00%	165,054.70	100%	688,255.87		DBMP
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai	100%	100%	1,179.20	100%	1,455.54	100%	1,601.10	100%	1,761.20	100%	1,937.33	100%	8,268.42		DBMP
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	94,72 %	96%	91,893.26	96,83%	111,275.03	97,89%	104,507.32	98,94%	130,208.86	100,00%	123,545.01	100%	555,355.74		DBMP
02	DINAS CIPTA KARYA				397,415.81		312,529.52		343,494.07		377,565.08		415,032.19		1,732,666.82		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Terpenuhinya sarana pra sarana pelayanan adminis	19 paket	100%	1.367.08	100%	1.386.25	100%	1.406.88	100%	1.439.56	100%	1.464.52	100%	7.059.29	DCK
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya fasilitas pelayanan yang represen tatif	10 Paket	100%	720.22	100%	1.081.00	100%	1.081.00	100%	1.081.00	100%	1.081.00	100%	5.044.22	DCK
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEUANGAN	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja	3 Paket	100%	642.17	100%	606.00	100%	606.00	100%	606.00	100%	606.00	100%	3.066.17	DCK
12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	1 Paket	5 dokumen	10.00	5 dokumen	10.00	5 dokumen	10.00	5 dokumen	10.00	5 dokumen	10.00	25 dokumen	50.00	DCK
17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Terpantaunya kondisi pantai	1 Paket	1 laporan	3.05	1 laporan	7.00	5 laporan	31.05	DCK						
35	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase Penduduk Terlalani air minum aman dan akses limbah domestik	87.67%	89.67%	121.791.71	91.67%	128.470.88	93.92%	141.317.97	96.47%	155.449.77	98.60%	170.994.74	98.60%	713.025.08	DCK
37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/ GEDUNG	Peningkatan performance gedung	7 Paket	49%	272.881.56	53%	180.968.39	57%	199.065.23	61%	218.971.75	65%	240.868.92	65%	1.004.391.00	DCK
38	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Meningkatnya sistem pengawasan internal	1 Paket	100%	11.92	100%	15.00	100%	15.00	100%	15.00	100%	15.00	100%	71.92	DCK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05	URUSAN PENATAAN RUANG				37.122.54		40.182.78		42.886.05		47.400.86		51.935.35		218.252.57	
	DINAS CIPTA KARYA				36.322.54		38.572.78		42.416.05		46.640.86		51.295.35		213.972.57	
01	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Peningkatan fasilitas umum/ publik	1 Paket	16 kegiatan	35.959.34	10 kegiatan	38.152.78	7 kegiatan	41.968.05	6 kegiatan	46.164.86	5 kegiatan	50.781.35	44 kegiatan	211.751.38	DCK
02	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Tertatanya ruang di wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	4 laporan	363.20	4 laporan	420.00	4 laporan	448.00	4 laporan	476.00	4 laporan	514.00	20 laporan	2.221.20	DCK
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				800.00		1.610.00		470.00		760.00		640.00		4.280.00	
01	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14.55%	16.36%	800.00	0.20	1.610.00	0.24	470.00	0.27	760.00	0.31	640.00	0.31	4.280.00	Bappeda Litbang
04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				243.128.18		211.264.21		232.591.51		254.831.21		280.508.79		1.182.761.40	
	DINAS CIPTA KARYA				220.122.34		202.129.10		222.302.01		244.482.21		268.870.43		1.120.264.74	
01	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	1 paket	70.02%	219,015.03	77.51%	199,355.74	85%	219,251.32	92.49%	241,126.45	100%	265,179.09	100%	1,104,872.37	DCK
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	-	100%	103.28	100%	113.61	100%	124.97	100%	137.47	100%	151.22	100%	630.56	DCK
03	PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN	Tercapainya sarana yang memadai	-	100%	1.004.02	100%	2.659.74	100%	2.925.71	100%	3.218.29	100%	3.540.11	100%	14.761.80	DCK
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN				23,005.84		9,135.11		10,289.50		10,349.00		11,638.36		62,496.66	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan administrasi perkantoran	100%	100%	2.039.87	100%	2.516.86	100%	2.701.80	100%	2.908.93	100%	3.132.08	100%	13.524.54	Disdamkar
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	931.17	100%	368.15	100%	941.39	100%	427.99	100%	1.061.69	100%	1.946.18	Disdamkar
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	93.60	100%	102.36	100%	112.00	100%	122.60	100%	134.26	100%	564.81	Disdamkar
4	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Cakupan pelayanan kebakaran	100%	100%	19.931.20	100%	6.137.75	100%	6.524.32	-	6.879.49	100%	7.300.34	100%	46.411.13	Disdamkar
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran SKPD	3 Dokumen	3 dokumen	10.00	3 Dokumen	10.00	3 Dokumen	10.00	3 Dokumen	10.00	3 Dokumen	10.00	3 Dokumen	50.00	Disdamkar
05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.163.54		15.555.74		15.663.55		17.636.00		27.898.33		87.881.88	
	BADAN KESBANG. POLITIK DAN LINMAS				1.850.56		2.030.61		2.211.67		2.420.84		2.639.92		11.153.59	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	620.54	100%	677.58	100%	723.34	100%	783.68	100%	839.05	100%	3,644.19	Kesbang
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	120.88	100%	132.97	100%	146.27	100%	160.89	100%	176.98	100%	738.00	Kesbang
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	99.67	100%	109.64	100%	120.60	100%	132.66	100%	145.93	100%	608.49	Kesbang
15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	282.20	100%	310.42	100%	341.46	100%	375.61	100%	413.17	100%	1.722.87	Kesbang
19	PRGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	pengawasan terhadap orang asing dalam meniaga ketertiban dan keamanan	31 orang	31 orang	233.03	31 orang	256.34	31 orang	281.97	31 orang	310.17	31 orang	341.18	31 orang	1.422.68	Kesbang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASA PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100%	100%	164.44	100%	180.88	100%	198.97	100%	218.86	100%	240.75	100%	1.003.89	Kesbang
21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	4 kegiatan	4 kegiatan	112.87	4 kegiatan	124.15	4 kegiatan	136.57	4 kegiatan	150.23	4 kegiatan	165.25	4 kegiatan	689.07	Kesbang
37	PROGRAM Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	7 kegiatan	216.93	7 kegiatan	238.63	7 kegiatan	262.49	7 kegiatan	288.74	7 kegiatan	317.61	7 kegiatan	1.324.40	Kesbang
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					5.185.84	8.980.92	8.486.40	9.754.28	19.286.69	51.658.83						
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.001.20	100%	1.110.82	100%	1.285.68	100%	2.195.89	100%	10.972.46	100%	16.799.88	BPBD
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	244.45	100%	908.90	100%	570.79	100%	627.87	100%	690.66	100%	3.042.67	BPBD
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	131.02	100%	144.12	100%	158.54	100%	174.39	100%	191.83	100%	799.90	BPBD
34	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Cakupan Layanan Informasi titik rawan bencana Cakupan layanan sarana dan prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan	55%	9.43%	752.99	42.95%	3.751.33	59.80%	3.099.07	79.80%	3.046.58	100%	3.351.24	100%	14.001.21	BPBD
42	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	100%	3.016.58	100%	3.022.20	100%	3.324.42	100%	3.656.86	100%	4.022.54	100%	16.773.46	BPBD
43	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100%	100%	39.59	100%	43.55	100%	47.91	100%	52.70	100%	57.97	100%	241.71	BPBD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					4.127.15	4.544.21	4.965.49	5.460.88	5.971.72	25.069.46						
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	990.37	100%	1.083.76	100%	1.169.98	100%	1.274.83	100%	1.379.17	100%	5.898.11	SATPOL PP
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	265.64	100%	292.21	100%	321.43	100%	353.57	100%	388.93	100%	1.621.78	SATPOL PP
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kepatuhan aparatur	-	100%	306.00	100%	336.60	100%	370.26	100%	407.29	100%	448.01	100%	1.868.16	SATPOL PP
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	77.14	100%	84.85	100%	93.34	100%	102.67	100%	112.94	100%	470.93	SATPOL PP
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	94.64	100%	104.10	100%	114.52	100%	125.97	100%	138.56	100%	577.79	SATPOL PP
07	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	Cakupan kualitas dan penyebarluasan informasi	100%	100%	10.00	100%	10.00	100%	11.00	100%	11.00	100%	12.00	100%	21.00	SATPOL PP
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dan RKPD	100%	100%	9.88	100%	10.87	100%	11.96	100%	13.15	100%	14.47	100%	60.33	SATPOL PP
44	PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	65%	75%	2.383.47	80%	2.621.82	85%	2.884.00	90%	3.172.40	95%	3.489.64	95%	14.551.35	SATPOL PP
01 URUSAN SOSIAL					6.185.24	6.826.52	7.483.42	8.220.51	9.010.43	37.726.11						
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA					6.185.24	6.826.52	7.483.42	8.220.51	9.010.43	37.726.11						
02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan perkantoran	100%	100%	938.52	100%	1.023.12	100%	1.099.68	100%	1.193.90	100%	1.286.54	100%	5.541.77	Disosnaker
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Cakupan pelayanan sarana	100%	100%	493.56	100%	569.42	100%	626.36	100%	689.00	100%	757.90	100%	3.136.23	Disosnaker

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PRASARANA APARATUR	dan prasarana aparatur														
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	2.273.89	100%	2.501.27	100%	2.751.40	100%	3.026.54	100%	3.329.20	100%	13.882.30	Disosnaker
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	148.58	100%	162.41	100%	178.15	100%	195.47	100%	214.51	100%	899.12	Disosnaker
08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100%	100%	79.27	100%	87.20	100%	95.92	100%	105.51	100%	107.18	100%	475.08	Disosnaker
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Kesesuaian Renja SKPD RKPD	100%	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	50.00	Disosnaker
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	56.34%	68.81%	289.41	76.61%	318.35	84.41%	350.18	92.20%	385.20	100%	423.72	100%	1.766.87	Disosnaker
16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	1.678.83	100%	1.854.25	100%	2.041.17	100%	2.251.29	100%	2.481.42	100%	10.306.95	Disosnaker
		Cakupan Anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Cakupan lanjut usia terlanjar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanoap darurat dan pasca bencana	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100%	100%	273.18	100%	300.50	100%	330.55	100%	363.60	100%	399.97	100%	1.667.80		Disosnaker

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				182,918.27		298,096.28		475,783.46		296,404.29		471,524.04		1,741,227.77	
01	URUSAN TENAGA KERJA				6,017.13		8,152.46		9,019.82		9,824.48		10,879.25		43,729.33	
	15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	35.74%	35.74%	4,433.37	41.39%	4,797.33	47.48%	5,329.17	54.00%	5,764.77	60.96%	6,413.56	60.96%	26,738.20	Disosnaker
		Persentase Asesor instruktur Swasta yang memperoleh pelatihan	9%	23%		39%		57%		77%		100%		100%		Disosnaker
	16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase calon wirasahawan yang memperoleh pelatihan	50%	50%	719.56	50%	2,569.78	50%	2,826.76	50%	3,109.44	50%	3,420.38	50%	12,645.93	Disosnaker
	17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	50%	52%	864.20	54%	785.35	56%	863.88	58%	950.27	60%	1,045.30	60%	4,345.20	Disosnaker
02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,547.80		2,619.87		2,823.25		3,062.83		3,305.41		14,359.15	
	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				2,547.80		2,619.87		2,823.25		3,062.83		3,305.41		14,359.15	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	367.64	100%	391.14	100%	400.48	100%	420.76	100%	432.07	100%	2,012.10	KPP
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	70.17	100%	76.94	100%	84.38	100%	92.57	100%	101.58	100%	425.64	KPP
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	65.10	100%	71.01	100%	77.51	100%	84.66	100%	92.53	100%	390.81	KPP
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD	145 buku	70 buku	10.00	70 buku	10.00	70 buku	10.00	70 buku	10.00	70 buku	10.00	70 buku	50.00	KPP
	15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	85.71%	100%	768.19	100%	764.99	100%	821.29	100%	889.42	100%	954.77	100%	4,198.67	KPP
	16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100%	100%	922.83	100%	1,008.64	100%	1,102.72	100%	1,205.86	100%	1,318.96	100%	5,559.02	KPP
	17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan yang meningkat	1 paket	1 paket	249.27	1 paket	193.08	1 paket	212.39	1 paket	233.63	1 paket	256.99	1 paket	1,145.36	KPP
	18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Perempuan di lembaga pemerintah	11.32	30%	94.60	30%	104.06	30%	114.47	30%	125.92	30%	138.51	30%	577.56	KPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	URUSAN PANGAN				1,536.39		3,832.98		3,657.78		3,712.75		3,766.50		16,506.40	
	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN				1,536.39		3,832.98		3,657.78		3,712.75		3,766.50		16,506.40	
	15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Jumlah luas tanam padi pertahun	17.245 Ha	17.500 Ha	1,536.39	17.750 Ha	3,832.98	18.000 Ha	3,657.78	18.250 Ha	3,712.75	18.500 Ha	3,766.50	18.500 Ha	16,506.40	Distanbunhut
04	URUSAN PERTANAHAN				260.29		277.47		305.22		335.74		368.57		1,547.29	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM				260.29		277.47		305.22		335.74		368.57		1,547.29	
	01 PROGRAM PENATAAN , PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100%	100%	233.31	100%	247.97	100%	272.77	100%	300.05	100%	329.31	100%	1,383.41	BAGIAN APU
	02 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	100%	100%	26.98	100%	29.50	100%	32.45	100%	35.69	100%	39.26	100%	163.88	BAGIAN APU
05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				51,779.62		71,405.81		78,261.21		99,937.73		67,308.01		368,653.03	
	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN				47,455.94		54,603.09		61,563.87		78,820.12		61,671.42		303,944.27	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3,324.15	100%	3,457.15	100%	3,541.13	100%	3,610.43	100%	3,696.70	100%	17,459.38	DKP
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	prosentase sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,810.03	100%	1,303.47	100%	1,060.59	100%	1,149.20	100%	1,194.18	100%	6,517.47	DKP
	03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	191.62	100%	194.00	100%	196.00	100%	198.00	100%	200.00	100%	979.62	DKP
	04 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Sampah	78,5 %	89,8 %	33,923.26	91,1 %	36,145.56	92,1 %	38,511.93	93,3%	41,095.84	94,4 %	43,238.01	94,4 %	192,914.60	DKP
	05 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	123.087,14 m2	126.597,14 m2 (0,0171%)	8,196.88	127.283,84 m2 (0,0172 %)	13,492.91	130.844,40 m2 (0,1777%)	18,244.22	140.364,44 m2 (0,1899%)	32,756.65	145.364,44 m2 (0,1967%)	13,332.54	145.364,44 m2 (0,1967%)	86,023.20	DKP
	06 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Prosentase dokumen perencanaan SKPD	100%	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	50.00	DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BADAN LINGKUNGAN HIDUP				4,323.68		16,802.71		16,697.34		21,117.60		5,636.59		64,708.76	BLH
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	730.35	100%	713.30	100%	727.30	100%	737.30	100%	751.30	100%	3,659.55	BLH
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	prosentase sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	477.59	100%	870.26	100%	237.60	100%	247.61	100%	257.96	100%	2,091.02	BLH
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	95.20	100%	101.20	100%	101.20	100%	101.20	100%	101.20	100%	500.00	BLH
04	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pencajukan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.045.31	100%	2.200.70	100%	2.411.00	100%	2.676.08	100%	2.969.06	100%	12.302.16	BLH
05	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Porsentase SDA yang direhabilitasi dan dikonservasi	100%	100%	267.14	100%	12.309.80	100%	12.349.57	100%	16.380.15	100%	480.00	100%	41.940.36	BLH
06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah dan jenis data informasi Lingkungan Hidup	9 paket	10 paket	532.63	8 paket	418.12	8 paket	650.22	8 paket	717.33	8 paket	793.40	42 paket	3,088.82	BLH
07	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100%	100%	165.45	100%	178.33	100%	208.44	100%	244.94	100%	269.68	100%	1,066.84	BLH
08	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	Prosentase dokumen perencanaan SKPD	100%	100%	10.00	100%	11.00	100%	12.00	100%	13.00	100%	14.00	100%	60.00	BLH
06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,157.04		5,123.50		5,608.22		6,151.41		6,737.92		28,277.98	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				5,157.04		5,123.50		5,608.22		6,151.41		6,737.92		28,277.98	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,368.81	100%	1,494.41	100%	1,616.22	100%	1,760.21	100%	1,907.60	100%	8,147.24	Disduk
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1,284.40	100%	1,631.98	100%	1,795.17	100%	1,974.69	100%	2,172.16	100%	9,057.61	Disduk
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	120 laporan	28 laporan	98.10	28 laporan	107.91	28 laporan	118.70	28 laporan	130.57	28 laporan	143.63	140 laporan	598.91	
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SKPD	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD	40 buku	3 dokumen	10.00	3 dokumen	11.00	3 dokumen	12.10	3 dokumen	13.31	3 dokumen	14.64	3 dokumen	50.00	Disduk
15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	90.02%	92%	2,395.73	94%	1,878.21	95%	2,066.03	97%	2,272.63	98%	2,499.89	98%	10,424.22	Disduk

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.873.45		4.970.17		6.143.05		7.349.75		5.565.12		27.901.53	
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA				3.873.45		4.970.17		6.143.05		7.349.75		5.565.12		27.901.53	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	775.38	100%	831.03	100%	854.23	100%	888.65	100%	915.52	100%	4.264.81	BPMD dan Pemdes
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	137.59	100%	610.54	100%	418.60	100%	460.46	100%	506.50	100%	2.133.69	BPMD dan Pemdes
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	116.10	100%	127.11	100%	139.22	100%	152.54	100%	167.20	100%	702.17	BPMD dan Pemdes
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD	3 dokumen	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	50.00	BPMD dan Pemdes
16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	32 Pasar, 13 BUMDesa	6 Pasar, 13 BUMDesa	33.89	7 Pasar, 10 BUMDesa	119.00	7 Pasar, 8 BUMDesa	129.80	6 Pasar, 13 BUMDesa	128.80	6 Pasar, 13 BUMDesa	145.68	32 Pasar, 46 BUMDesa	557.17	BPMD dan Pemdes
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	262 orang	210 orang	430.26	200 orang	693.64	200 orang	1.803.77	200 orang	2.694.89	200 orang	558.72	1.010 orang	6.181.28	BPMD dan Pemdes
19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah Desa/Kel. yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	62 Desa/Kelurahan	62 ds/kel.	1.635.79	62 ds/kel.	1.807.37	62 ds/kel.	1.977.04	62 ds/kel.	2.163.12	62 ds/kel.	2.367.23	62 ds/kel.	9.950.56	BPMD dan Pemdes
x	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	0	100%	287.49	100%	301.87	100%	316.96	100%	332.81	100%	349.45	100%	1.588.57	BPMD dan Pemdes
23	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah RTS-PM yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	9.883 RTS-PM	9.041	168.31	9.041 RTS-PM	176.73	9.041 RTS-PM	185.56	9.041 RTS-PM	194.84	9.041 RTS-PM	204.58	9.041 RTS-PM	930.02	BPMD dan Pemdes
24	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kelompok posyandu aktif	68 kelompok	12 kelompok	278.64	12 kelompok	292.88	12 kelompok	307.87	12 kelompok	323.64	10 kelompok	340.24	58 kelompok	1.543.27	BPMD dan Pemdes
08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.577.25		3.827.14		3.955.64		4.098.60		4.254.28		20.002.95	
	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				4.577.25		3.827.14		3.955.64		4.098.60		4.254.28		20.002.95	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	920.77	100%	936.47	100%	951.18	100%	967.36	100%	985.16	100%	4.760.95	KBKS
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	261.88	100%	274.35	100%	289.62	100%	306.43	100%	324.91	100%	1.457.18	KBKS
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	20.10	100%	20.10	100%	20.10	100%	20.10	100%	20.10	100%	100.52	KBKS
04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	98.78	100%	98.80	100%	98.80	100%	98.80	100%	98.80	100%	462.07	KBKS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	50.00	KBKS
06	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	75.05	75,26	1,937.78	75,52	1,025.36	76,03	1,037.94	76,40	1,053.39	77,24	1,068.81	77,24	5,391.40	KBKS
07	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Persentase Perkawinan Remaja kurang dari 20 tahun	0,22 %	0,19 %	645.09	0,18 %	711.00	0,17 %	727.40	0,16 %	745.44	0,15 %	765.29	0,15 %	3,648.06	KBKS
08	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	51.99%	53.62%	218.16	55.14%	239.90	56.56%	258.32	57.88%	278.58	59.12%	300.87	59.12%	1,295.82	KBKS
10	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100%	100%	464.69	100%	511.15	100%	562.27	100%	618.50	100%	680.35	100%	2,836.95	KBKS
09	URUSAN PERHUBUNGAN				29,180.68		92,934.27		74,347.83		70,645.74		70,787.46		355,991.98	
	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA				29,180.68		92,934.27		74,347.83		70,645.74		70,787.46		355,991.98	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang memadai	94.05%	100%	7,737.42	100%	27,208.83	100%	28,629.93	100%	30,127.95	100%	31,696.38	100%	143,496.52	Dishub
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memadai	85.61%	100%	2,182.17	100%	4,833.35	100%	10,675.88	100%	5,178.32	100%	2,773.58	100%	25,643.30	Dishub
04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	95.01%	100%	61.05	-	-	100%	67.15	-	-	100%	73.87	100%	202.07	Dishub
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Peninkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	96.58%	100%	324.81	100%	370.96	100%	371.60	100%	372.30	100%	373.47	100%	1,813.14	Dishub
15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Terwujudnya Pemanunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	89.39%	100%	12,532.48	100%	53,497.10	100%	26,876.84	100%	26,468.10	100%	26,521.17	100%	145,895.69	Dishub
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	99.34%	100%	6,332.76	100%	7,013.02	100%	7,714.33	100%	8,485.76	100%	9,334.34	100%	38,880.21	Dishub
23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang baik	98.87%	100%	10.00	100%	11.00	100%	12.10	100%	13.31	100%	14.64	100%	61.05	Dishub
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9,215.81		23,363.10		3,853.24		4,025.87		3,312.76		43,770.78	
	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA				9,215.81		23,363.10		3,853.24		4,025.87		3,312.76		43,770.78	
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	62.76%	100%	9,215.81	100%	23,363.10	100%	3,853.24	100%	4,025.87	100%	3,312.76	100%	43,770.78	Dishub

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				3.906.72		4.409.79		4.828.77		5.299.65		5.487.18		23.932.12	
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				3.906.72		4.409.79		4.828.77		5.299.65		5.487.18		23.932.12	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	3 telepon 11 mobil dan 19 sepeda motor 650 materai 2.100 buah 850 lembar, 5 buku 372 bulan 92 jenis 6 paket 35.472 exp/bulan 687 kotak 36 kg 768 galon 1 LS 152.215 liter 30 unit 2 Orang 9 dus	12 bulan	768.34	12 bulan	839.68	12 bulan	901.64	12 bulan	979.81	12 bulan	1,054.79	60 bulan	4,544.26	Diskopperindag
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11 mobil 88 unit 48 bulan 1 LS 15 sepeda motor 1 paket	12 bulan	747.90	12 bulan	940.59	12 bulan	1,034.64	12 bulan	1,138.11	12 bulan	932.48	60 bulan	4,793.71	Diskopperindag
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	42 ortang 48 bulan 141 buku	12 bulan	139.72	12 bulan	153.69	12 bulan	169.06	12 bulan	185.97	12 bulan	204.57	60 bulan	853.01	Diskopperindag
15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tercapainya rencana kerja secara terprogram sesuai aturan	159 buku	12 bulan	5.86	12 bulan	6.45	12 bulan	7.09	12 bulan	7.80	12 bulan	8.58	60 bulan	35.79	Diskopperindag
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM	200 UMKM	30 UMKM	11.53	30 UMKM	12.69	30 UMKM	13.95	30 UMKM	15.35	30 UMKM	16.88	150 UMKM	70.40	Diskopperindag
15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISIF	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	2 koperasi	474.40	2 koperasi	521.84	2 koperasi	574.02	2 koperasi	631.42	2 koperasi	694.57	2 koperasi	2.896.25	Diskopperindag
17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	8 UMKM 4 koperasi	13 UMKM	541.40	13 UMKM	595.54	13 UMKM	655.10	13 UMKM	720.61	13 UMKM	792.67	65 UMKM	3,305.32	Diskopperindag
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	3.920 orang 1.271 koperasi	12 bulan	1.192.40	12 bulan	1.311.64	12 bulan	1.442.80	12 bulan	1.587.08	12 bulan	1.745.79	60 bulan	7.279.72	Diskopperindag
21	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI	Tercapainya pengembangan sistem data/informasi	156 buku	62 buku	25.17	62 buku	27.69	62 buku	30.45	62 buku	33.50	62 buku	36.85	310 buku	153.66	Diskopperindag

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	URUSAN PENANAMAN MODAL				174.41		191.86		211.04		232.15		255.36		1,064.82	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				174.41		191.86		211.04		232.15		255.36		1,064.82	
17	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Tersedianya Informasi Produk Unqgulan Daerah	6 Kecamatan	6 Kecamatan	42.47	6 Kecamatan	46.71	6 Kecamatan	51.39	6 Kecamatan	56.53	6 Kecamatan	62.18	6 Kecamatan	259.27	Bag.Adm Perekonomian
18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	-	6 Kecamatan	104.89	6 Kecamatan	115.38	6 Kecamatan	126.91	6 Kecamatan	139.61	6 Kecamatan	153.57	6 Kecamatan	640.35	Baq.Adm Perekonomian
19	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Tersedianya informasi peluang investasi	-	6 Kecamatan	27.06	6 Kecamatan	29.76	6 Kecamatan	32.74	6 Kecamatan	36.01	6 Kecamatan	39.62	6 Kecamatan	165.19	Baq.Adm Perekonomian
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				14,991.32		10,980.30		11,578.39		12,486.13		13,485.44		63,496.08	
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				14,991.32		10,980.30		11,578.39		12,486.13		13,485.44		63,496.08	
1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	60%	70%	743.18	75%	855.40	80%	938.96	80%	1,032.86	80%	1,136.14	80%	4,706.54	Disdikpora
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan nasional	11 Cabang	16 Cabang	14,248.14	16 Cabang	10,124.90	16 Cabang	10,639.43	16 Cabang	11,453.27	16 Cabang	12,349.30	16 Cabang	58,789.54	Disdikpora
01	URUSAN KEBUDAYAAN				42,916.88		60,758.83		266,146.61		63,605.43		270,168.13		703,251.64	
	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG				42,916.88		60,758.83		266,146.61		63,605.43		270,168.13		703,251.64	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,014.02	100%	1,988.55	100%	2,075.33	100%	2,160.75	100%	2,247.03	100%	10,485.68	Disbud
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan sarana prasarana aparatur	100%	100%	520.00	100%	473.33	100%	510.93	100%	548.53	100%	586.13	100%	2,638.92	Disbud
04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	134.52	100%	133.19	100%	147.29	100%	161.39	100%	175.49	100%	751.88	Disbud
05	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	10.01	100%	11.00	100%	12.00	100%	13.00	100%	14.00	100%	60.01	Disbud
06	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1. Pelaksanaan Kegiatan upacara keaqamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. kehadiran tokoh Agama dalam perayaan bersama hari besar Keaqamaan 4. Karya seni yang di revitalisasi	108 upacara keaqamaan 10 Desa Adat 100% 98 karya seni	114 upacara keaqamaan 40 Desa Adat 100% 104 sekaa	38,885.78 40 Desa Adat 100% 110 sekaa	114 upacara keaqamaan 40 Desa Adat 100% 110 sekaa	56,482.99 42 Desa Adat 100% 114 sekaa	262,007.70 42 Desa Adat 100% 114 sekaa	114 upacara keaqamaan 0 100% 118 sekaa	59,199.28 0 100% 118 sekaa	114 upacara keaqamaan 0 100% 123 sekaa	265,662.76 0 100% 123 sekaa	114 upacara keaqamaan 122 Desa Adat 100% 123 sekaa	682,238.51 122 Desa Adat 100% 123 sekaa	Disbud	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	07	PROGRAM PENGELOLA KEKAYAAN BUDAYA	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	70 cakep 52 situs	90 cakep -	1,352.55 -	110 cakep 54 situs	1,669.77 -	125 cakep -	1,393.36 -	140 cakep 56 situs	1,522.48 -	150 cakep 58 situs	1,482.71 -	615 cakep 58 situs	7,076.64	Disbud
17	URUSAN PERPUSTAKAAN				1,740.67		2,122.40		1,912.64		2,077.16		2,233.34		10,005.49		
	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH				1,740.67		2,122.40		1,912.64		2,077.16		2,233.34		10,005.49		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	556.29	100%	616.64	100%	668.04	100%	736.41	100%	800.49	100%	3,377.87	Kantor Perpusda
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	363.92	100%	719.22	100%	405.65	100%	445.71	100%	489.78	100%	2,424.28	Kantor Perpusda
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	300 Orang	60 Orang	37.73	60 Orang	39.61	60 Orang	41.59	60 Orang	43.67	60 Orang	45.85	300 Orang	208.45	Kantor Perpusda
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	63.60	100%	69.36	100%	75.70	100%	82.67	100%	90.33	100%	381.65	Kantor Perpusda
	19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kunjungan ke Perpustakaan	12,305 Orang	5,100 Orang	709.14	5,600 Orang	667.57	6,200 Orang	711.67	6,800 Orang	758.71	7,500 Orang	796.88	31,200 Orang	3,563.23	Kantor Perpusda
	#	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	10.00	3 Dokumen	10.00	3 Dokumen	10.00	3 Dokumen	10.00	3 Dokumen	10.00	3 Dokumen	50.00	Kantor Perpusda
24	URUSAN KEARSIPAN				5,042.80		3,126.34		3,130.75		3,558.87		3,609.31		18,737.20		
	KANTOR ARSIP DAERAH				5,042.80		3,126.34		3,130.75		3,558.87		3,609.31		18,737.20		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	521.78	100%	601.39	100%	626.00	100%	666.84	100%	700.77	100%	3,116.79	Ktr. Arsip Daerah
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparaturnya	100%	100%	3,255.37	100%	838.30	100%	651.03	100%	854.54	100%	668.89	100%	6,268.12	Ktr. Arsip Daerah
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Sumber daya Aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	323 orang	139 orang	86.94	139 orang	95.63	139 orang	105.19	139 orang	115.71	139 orang	127.29	695 orang	530.76	Ktr. Arsip Daerah
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	66.00	100%	72.00	100%	78.60	100%	85.86	100%	93.85	100%	396.31	Ktr. Arsip Daerah
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD	30 buku, 3 dokumen	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	15 dokumen	50.00	Ktr. Arsip Daerah
	15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	98 SKPD/Desa	86 SKPD/Desa	87.71	86 SKPD/Desa	96.48	86 SKPD/Desa	106.12	86 SKPD/Desa	116.74	86 SKPD/Desa	128.41	98 SKPD/Desa	535.45	Ktr. Arsip Daerah
	16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5 jenis arsip	5 jenis arsip	387.69	5 jenis arsip	722.50	5 jenis arsip	794.75	5 jenis arsip	874.22	5 jenis arsip	961.64	5 jenis arsip	4,009.93	Ktr. Arsip Daerah
	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah Jenis pelayanan informasi kearsipan	5 Materi	5 Materi	627.32	5 Materi	690.05	5 Materi	759.06	5 Materi	834.96	5 Materi	918.46	5 Materi	3,829.84	Ktr. Arsip Daerah

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	URUSAN PILIHAN				53,837.94		62,911.50		73,468.92		76,566.10		85,411.83		352,196.29	
01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				9,014.36		12,520.15		13,498.73		21,402.44		23,495.43		79,931.11	
	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN				9,014.36		12,520.15		13,498.73		21,402.44		23,495.43		79,931.11	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Jumlah produksi perikanan	155.646,48 ton	7.021.00 ton	36.89	7.154.00 ton	37.96	7.293.0 ton	41.76	7.433.0 ton	45.94	7.575.0 ton	50.53	36.476.00 ton	213.08	Dinas PPK
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN	Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan	5 kelompok	4 kelompok	82.26	3 kelompok	90.48	3 kelompok	99.53	3 kelompok	109.49	3 kelompok	120.43	16 kelompok	502.19	Dinas PPK
19	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	5 kali	1 kali	1.689.85	1 kali	3.500.00	1 kali	4.000.00	1 kali	4.400.00	1 kali	4.840.00	5 kali	18.429.85	Dinas PPK
20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi perikanan budidaya	586.80 ton	598 ton	402.87	603.00 ton	424.69	611.00 ton	447.77	617.00 ton	472.20	623.00 ton	519.42	3.052.00 ton	2.266.94	Dinas PPK
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.890,70 ton	6,423.00 ton	646.00	6,551.00 ton	728.75	6,682.00 ton	801.63	6,816.00 ton	7,509.18	6,952.00 ton	8,260.10	33,424.00 ton	17,945.66	Dinas PPK
23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866.22 ton	5.062 ton	8.78	5.164 ton	24.65	5.267 ton	26.62	5.372 ton	27.68	5.480 ton	29.85	26.345 ton	117.58	Dinas PPK
30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah dokumen data/informasi peternakan, perikanan dan Kelautan	155 exp	105 exp	271.67	105 exp	100.30	105 exp	105.33	105 exp	110.87	105 exp	116.95	525 exp	705.13	Dinas PPK
34	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	5,062.820 ton	5.46	5,164.076 ton	6.00	5,267.358 ton	6.60	5,372.705 ton	7.26	5,480.159 ton	7.99	5,480.159 ton	33.32	Dinas PPK
xx	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	-	-	0.00	20 kelompok	455.00	20 kelompok	460.00	20 kelompok	460.00	20 kelompok	465.00	100 kelompok	1,840.00	Dinas PPK
xx	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA	Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	-	1 kawasan	5.870.59	1 kawasan	7.152.30	1 kawasan	7.509.48	1 kawasan	8.259.83	2 kawasan	9.085.16	6 kawasan	37.877.36	Dinas PPK
02	URUSAN PARIWISATA				18,766.11		22,291.61		23,922.42		23,788.84		26,195.46		114,964.45	
	DINAS PARIWISATA				18,766.11		22,291.61		23,922.42		23,788.84		26,195.46		114,964.45	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,074.64	100%	2,096.97	100%	2,533.03	100%	2,252.35	100%	2,361.95	100%	11,318.94	Dinas Pariwisata
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	prosentase sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.467.13	100%	839.15	100%	881.11	100%	925.16	100%	971.42	100%	5.083.97	Dinas Pariwisata
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	148.85	100%	155.99	100%	163.49	100%	171.37	100%	179.64	100%	819.34	Dinas Pariwisata
03	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	Prosentase dokumen perencanaan SKPD	100%	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	50.00	Dinas Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	3.934.384	5%	11.172.51	5%	14.952.36	5%	15.968.59	5%	15.668.67	5%	17.068.01	25%	74.830.14	Dinas Pariwisata
02	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Prosentase DTW yang ditata	58%	64%	3.241.13	66%	3.707.37	69%	3.648.85	72%	4.178.62	72%	4.814.34	72%	19.590.30	Dnas Pariwisata
03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	488 orang	245 orang	435.54	170 orang	302.27	235 orang	478.85	170 orang	333.25	220 orang	527.16	1,210 orang	2,077.07	Dnas Pariwisata
04.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	jumlah produk wisata yang dibina	180 usaha + 4 obyek	255 usaha + 6 obyek	216.33	255 usaha + 6 obyek	227.50	255 usaha + 6 obyek	238.50	255 usaha + 6 obyek	249.42	255 usaha + 6 obyek	262.94	1.500 usaha + 36 obyek	1.194.69	Dnas Pariwisata
03	URUSAN PERTANIAN				22,301.08		24,615.78		28,547.23		28,077.54		32,099.23		135,640.85	
	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN				10,424.79		11,518.29		13,329.23		12,640.96		15,202.29		63,115.55	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran	60 bulan	12 bulan	2,674.35	12 bulan	2,949.81	12 bulan	3,215.29	12 bulan	3,517.32	12 bulan	3,838.55	60 bulan	16,195.305	Distanbunhut
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur	60 bulan	12 bulan	1,322.84	12 bulan	1,825.82	12 bulan	2,008.41	12 bulan	2,209.25	12 bulan	2,430.17	60 bulan	9,796.485	Distanbunhut
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN APARATUR	Jumlah capaian kinerja dan keuangan SKPD	60 bulan	12 bulan	210.20	12 bulan	230.45	12 bulan	253.49	12 bulan	278.84	12 bulan	306.73	60 bulan	1,279.705	Distanbunhut
15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah peserta pelatihan pertanian	280 orang	345 orang	444.83	345 orang	401.91	345 orang	419.65	345 orang	503.30	345 orang	563.62	1.725 orang	2,333.319	Distanbunhut
17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	15 kali	4 Kali	1,452.18	5 kali	1,568.36	5 kali	1,760.93	5 kali	1,979.91	5 kali	2,229.35	24 Kali	8,990.730	Distanbunhut
19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	120.972 ton	122.500 ton	2,735.22	125.000 ton	4,092.52	127.500 ton	4,047.54	130.000 ton	3,607.80	132.500 ton	3,868.07	132.500 ton	18,351.149	Distanbunhut
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 orang	52 orang	1,267.27	52 orang	247.49	52 orang	1,401.47	52 orang	299.46	52 orang	1,695.78	52 orang	4,911.459	Distanbunhut
26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	3 jenis	2 jenis	6.70	2 jenis	7.10	2 jenis	7.81	2 jenis	8.59	2 jenis	9.45	2 jenis	39.653	Distanbunhut
27	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah komoditi yang dibina	5 komoditi	-	0.00	5 komoditi	12.04	5 komoditi	13.57	5 komoditi	15.31	5 komoditi	17.28	25 komoditi	58.207	Distanbunhut
28	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	jumlah data yang informatif	3 jenis	5 jenis	311.21	3 jenis	182.79	3 jenis	201.07	3 jenis	221.18	3 jenis	243.29	3 jenis	1,159.538	Distanbunhut
	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN				11,876.29		13,097.49		15,217.99		15,436.58		16,896.95		72,525.30	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	5 tahun	1 tahun	2,089.50	1 tahun	2,326.03	1 tahun	2,528.47	1 tahun	2,761.15	1 tahun	3,006.10	5 tahun	12,711.25	Dinas PPK
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang operasional	5 tahun anggaran	1 tahun anggaran	574.23	1 tahun anggaran	631.65	1 tahun anggaran	1,194.82	1 tahun anggaran	764.30	1 tahun anggaran	840.73	5 tahun anggaran	4,005.74	Dinas PPK
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	200.54	6 jenis dokumen	207.92	6 jenis dokumen	218.01	6 jenis dokumen	228.61	6 jenis dokumen	239.74	6 jenis dokumen	1,094.82	Dinas PPK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan penyakit	65.427 ekor	65500 ekor	2.354.33	66300 ekor	2.589.76	67300 ekor	2.848.74	68800 ekor	3.133.61	70000 ekor	3.446.97	71000 ekor	14.373.40	Dinas PPK
22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Jumlah Populasi ternak	1.486.869 ekor	1501775 ekor	6.090.34	1509284 ekor	6.929.58	1516831 ekor	7.471.91	1524914 ekor	8.061.60	15320361 ekor	8.238.56	15320361 ekor	36.791.98	Dinas PPK
23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan	4.579 ton	4764 ton	51.00	4859,28 ton	56.10	4,956.466 ton	61.07	5,055.595 ton	66.50	5,156.707 ton	73.15	2,04732224 ton	307.82	Dinas PPK
25	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah Populasi ternak	1.494.309 ekor	1.501.775 ekor	24.40	1.509.284 ekor	26.84	1.516.831 ekor	29.52	1.524.914 ekor	32.48	1.532.036 ekor	31.94	1.532.036 ekor	145.18	Dinas PPK
26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 jenis	3 jenis	8.33	3 jenis	9.16	3 jenis	10.08	3 jenis	11.09	3 jenis	11.64	3 jenis	50.31	Dinas PPK
30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PETERNAKAN	Jumlah dokumen data/informasi peternakan yang disusun	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	308.12	1 jenis dokumen	185.45	1 jenis dokumen	199.00	1 jenis dokumen	213.90	1 jenis dokumen	213.90	1 jenis dokumen	1.120.38	Dinas PPK
31	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Jumlah produksi daging	16.037 ton	16.679 ton	97.56	16.694 ton	107.31	16.728 ton	118.04	16.862 ton	129.85	16.947 ton	142.83	83,911	595.60	Dinas PPK
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Jumlah Penyuluh dan petugas lapangan yang berkinerja	39 orang	33 orang	77.94	33 orang	27.68	33 orang	538.33	33 orang	33.49	33 orang	651.38	33 orang	1,328.83	Dinas PPK
04	URUSAN KEHUTANAN				73.00		218.14		238.65		259.21		279.82		1,068.81	
	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN				73.00		218.14		238.65		259.21		279.82		1,068.81	
15	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Jumlah kelompok penghijauan	22 kelompok	16 kelompok	61.38	21 kelompok	213.07	21 kelompok	233.07	21 kelompok	253.07	21 kelompok	273.07	105 kelompok	1,033.660	Distanbunhut
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Luas hutan yang masyarakatnya perlu dibina	1.779.87 Ha	1.779.87 Ha	11.62	1.779.87 Ha	5.07	1.779.87 Ha	5.58	1.779.87 Ha	6.14	1.779.87 Ha	6.75	1.779.87 Ha	35.151	Distanbunhut
02	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				300.55		150.18		165.20		181.72		199.89		997.52	
	DINAS CIPTA KARYA				300.55		150.18		165.20		181.72		199.89		997.52	
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Terlaksananya pembinaan Usaha SDA	6 Paket	16.38%	290.57	25.74%	139.20	35.05%	153.12	44.36%	168.43	53.62%	185.28	53.62%	936.60	DCK
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya pembinaan Usaha Energi	1 Paket	44.50%	9.98	49.50%	10.98	54.50%	12.07	59.50%	13.28	64.50%	14.61	64.50%	60.92	DCK
06	URUSAN PERDAGANGAN				2,303.42		1,986.49		3,854.64		1,490.11		1,639.12		11,273.78	
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				2,303.42		1,986.49		3,854.64		1,490.11		1,639.12		11,273.78	
15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Tercapainya peningkatan perlindungan terhadap konsumen	5.600 timbangan	3500 UTPP	1.343.35	3500 UTPP	934.03	3500 UTPP	257.44	3500 UTPP	283.18	3500 UTPP	311.50	3500 UTPP	3.129.51	Diskopperindaq
18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Tercapainya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	480 perusahaan 192 kali 113 perajin 4.500 rumah tangga 3 pameran	12 bulan	960.06	12 bulan	1.052.46	12 bulan	3.597.20	12 bulan	1.206.93	12 bulan	1,327.62	60 bulan	8,144.27	Diskopperindaq

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07	URUSAN INDUSTRI				1,079.42		1,129.14		3,242.06		1,366.26		1,502.89		8,319.76	
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				1,079.42		1,129.14		3,242.06		1,366.26		1,502.89		8,319.76	
	16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	1.000 orang 32 IKM 90 unit usaha	408 IKM	982.18	408 IKM	1,022.18	408 IKM	3,124.40	408 IKM	1,236.84	408 IKM	1,360.53	2.040 IKM	7,726.14	Diskopperindag
	17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Mendayagunakan secara maksimal proses produksi	17 ququs 40 orang	1 ququs	97.23	1 ququs	106.96	1 ququs	117.65	1 ququs	129.42	1 ququs	142.36	5 ququs	593.62	Diskopperindag

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				254,302.38		275,770.25		305,348.30		331,899.63		362,343.22		1,512,274.73	
01	FUNGSI PERENCANAAN				7,842.00		6,810.55		7,457.50		8,236.53		9,024.63		39,257.63	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				7,842.00		6,810.55		7,457.50		8,236.53		9,024.63		39,257.63	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	14 kegiatan	13 kegiatan	933.24	13 kegiatan	1,115.53	13 kegiatan	1,227.09	13 kegiatan	1,349.81	13 kegiatan	1,484.78	13 kegiatan	6,110.45	Bappeda Litbang
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	483.83	100%	560.13	100%	596.14	100%	635.76	100%	679.33	100%	2,955.18	Bappeda Litbang
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 laporan	1 laporan	356.82	1 laporan	431.11	1 laporan	474.22	1 laporan	521.65	1 laporan	573.82	1 laporan	2,357.62	Bappeda Litbang
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPd	100%	100%	38.59	100%	11.14	100%	12.25	100%	13.48	100%	14.82	100%	90.28	Bappeda Litbang
15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	TERSEDINYA DATA DAN INFORMASI YANG MEMADAI	1 paket	1 paket	241.72	1 paket	265.887	1 paket	292.476	1 paket	321.723	1 paket	353.896	1 paket	1,475.698	Bappeda Litbang
21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPd dengan RPJMD	100%	100%	5,067.82	100%	3,648.40	100%	3,999.14	100%	4,384.25	100%	4,807.13	100%	21,793.15	Bappeda Litbang
22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	6 Kecamatan	594.572	6 Kecamatan	640.39	6 Kecamatan	704.43	6 Kecamatan	774.87	6 Kecamatan	852.36	6 Kecamatan	3,566.63	Bappeda Litbang
24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 paket	125.42	4 paket	137.96	3 paket	151.75	3 paket	235.00	2 paket	258.50	15 paket	908.63	Bappeda Litbang
02	FUNGSI KEUANGAN				35,871.99		42,446.51		46,665.42		51,316.21		56,421.08		232,721.21	
	DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG				25,686.53		31,242.50		34,341.00		37,759.35		41,508.54		170,537.92	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	60 bln	12 bln	2,382.99	12 bln	2,612.04	12 bln	2,847.50	12 bln	3,116.50	12 bln	3,401.40	60 bln	14,360.42	Dispenda
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	60 bln	12 bulan	1,630.86	12 bulan	1,366.60	12 bulan	1,503.26	12 bulan	1,653.58	12 bulan	1,818.94	60 bulan	7,973.24	Dispenda
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60 bulan	12 bulan	176.39	12 bulan	194.03	12 bulan	213.43	12 bulan	234.78	12 bulan	258.25	60 bulan	1,076.89	Dispenda
08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Berkembangnya nilai budaya	60 bulan	214 Subak	13,536.92	214 Subak	14,890.61	214 Subak	16,379.67	214 Subak	18,017.64	214 Subak	19,819.40	214 Subak	82,644.23	Dispenda
09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD	12 bulan	12 bulan	8.31	12 bulan	9.14	12 bulan	10.06	12 bulan	11.07	12 bulan	12.17	60 bln	50.75	Dispenda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	60 bulan	10 Jenis Pajak	7,951.05	10 Jenis Pajak	12,170.08	10 Jenis Pajak	13,387.08	10 Jenis Pajak	14,725.79	10 Jenis Pajak	16,198.37	10 Jenis Pajak	64,432.38	Dispenda
		BAGIAN KEUANGAN				10,185.47		11,204.01		12,324.41		13,556.86		14,912.54		62,183.29	
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pembinaan untuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	53 SKPD dan 12 puskesmas	53 SKPD dan 12 puskesmas	58.44	53 SKPD dan 12 puskesmas	64.28	53 SKPD dan 12 puskesmas	70.71	53 SKPD dan 12 puskesmas	77.78	53 SKPD dan 12 puskesmas	85.56	53 SKPD dan 12 puskesmas	356.78	Bag. Keuangan
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan pelaporan keuangan yang akuntabel	1610 bk	495 bk	302.20	495 bk	332.42	495 bk	365.66	495 bk	402.23	495 bk	442.45	2475 bk	1,844.95	Bag. Keuangan
	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/akuntansi pemerintah daerah	20,635 bk	4,679 bk	9,690.88	4,679 bk	10,659.97	4,679 bk	11,725.97	4,679 bk	12,898.56	4,679 bk	14,188.42	23,395 bk	59,163.81	Bag. Keuangan
	18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA	Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh SKPD di Kab. Badung	6900 SPM/UP/ GU/TU	1572 SPM/UP/ GU/TU	133.95	1572 SPM/UP/ GU/TU	147.34	1572 SPM/UP/ GU/TU	162.07	1572 SPM/UP/ GU/TU	178.28	1572 SPM/UP/ GU/TU	196.11	7860 SPM/UP/ GU/TU	817.75	Bag. Keuangan
03		FUNGSI KEPEGAWAIN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				7,798.03		8,957.83		9,630.61		10,394.26		11,640.59		48,416.33	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIKLAT				7,798.03		8,957.83		9,630.61		10,394.26		11,640.59		48,416.33	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	16 kegiatan	16 kegiatan	883.83	16 kegiatan	939.12	16 kegiatan	983.52	16 kegiatan	1,042.79	16 kegiatan	1,095.27	16 kegiatan	4,944.52	BKD,DIKLAT
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	468.66	2 paket	460.86	2 paket	349.40	2 paket	240.34	2 paket	539.82	2 paket	2,059.08	BKD,DIKLAT
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	80%	81%	36.41	83%	36.41	85%	36.41	87%	36.41	88%	36.41	88%	182.06	BKD,DIKLAT
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di Pemkab. Badung	5%	12%	5,305.69	12.5%	6,139.95	13%	6,753.94	13.5%	7,429.33	14%	8,172.27	14%	33,801.17	BKD,DIKLAT
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai akuntabilitas kinerja	70	71	127.20	72	127.20	73	133.26	74	139.62	75	146.30	75	673.59	BKD,DIKLAT
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	2 dokumen	10.00	12 dokumen	50.00	BKD,DIKLAT								
	40	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	80%	81%	801.84	83%	1,056.36	85%	1,162.00	87%	1,278.20	88%	1,406.02	88%	5,704.42	BKD,DIKLAT
	69	PROGRAM PENINGKATAN SDM	Persentase urusan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	100%	113.06	100%	130.44	100%	137.95	100%	146.22	100%	155.31	100%	682.98	BKD,DIKLAT
	96	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	2 kegiatan	2 kegiatan	51.35	2 kegiatan	57.49	2 kegiatan	64.14	2 kegiatan	71.35	2 kegiatan	79.18	2 kegiatan	318.51	BKD,DIKLAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				168.22		185.04		203.55		223.90		246.29		1,027.01	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				168.22		185.04		203.55		223.90		246.29		1,027.01	
26	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	12 Bulan.	12 Bulan.	83.51	12 Bulan.	91.86	12 Bulan.	101.04	12 Bulan.	111.15	12 Bulan.	122.26		509.82	Bappeda Litbang
28	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	12 Bulan.	12 Bulan.	84.71	12 Bulan.	93.19	12 Bulan.	102.50	12 Bulan.	112.75	12 Bulan.	124.03	12 Bulan.	517.19	Bappeda Litbang
05	FUNGSI LAINNYA				202,622.14		217,370.31		241,391.22		261,728.74		285,010.63		1,190,852.55	
	SEKRETARIAT DAERAH				103,520.97		111,806.73		126,472.48		136,339.95		148,021.01		607,045.04	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM				552.02		516.03		562.70		613.13		775.87		3,019.74	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pembavaran iuran anggota APKASI	1 kali	1 kali	25.08	1 kali	25.08	1 kali	25.08	1 kali	25.08	1 kali	25.08	1 kali	125.38	Bagian APU
05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	- Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan - Jumlah kecamatan yang	3 Hari besar 6 Kecamatan	3 Hari besar 6 Kec.	107.26	3 Hari besar 6 Kec.	67.87	3 Hari besar 6 Kec.	72.87	3 Hari besar 6 Kecamatan	77.87	3 Hari besar 6 Kec.	82.87	3 Hari besar 6 Kec.	408.73	
16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari luar daerah	100%	100%	23.23	1.000	21.60	100%	23.60	100%	25.60	100%	27.60	100%	121.64	Bagian APU
27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab.Badung	100%	100%	396.45	100%	401.49	100%	441.15	100%	484.59	100%	640.32	100%	2,364.00	Bagian APU
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT				10,667.69		10,723.67		10,786.08		10,855.67		10,933.26		53,966.37	
01	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Proposal yang diverifikasi administratif	100%	100%	10,667.69	100%	10,723.67	100%	10,786.08	100%	10,855.67	100%	10,933.26	100%	53,966.37	
	BAGIAN HUKUM DAN HAM				2,657.40		2,930.72		3,247.23		3,598.68		3,958.54		16,392.58	
01	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	2.537 Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup, Kep.Bupati)	2000 Produk Hukum Daerah	2,657.40	2000 Produk Hukum Daerah	2,930.72	2000 Produk Hukum Daerah	3,247.23	2000 Produk Hukum Daerah	3,598.68	2000 Produk Hukum Daerah	3,958.54	10.000 Produk Hukum Daerah	16,392.58	Hukum dan HAM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				4,803.60		4,803.60		4,803.60		4,803.60		4,803.60		4,803.60	
01	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	3 paket	3 paket	4,425.27	3 paket	4,791.77	3 paket	5,270.94	3 paket	5,798.04	3 paket	6,377.84	3 paket	26,663.86	Bagian Administrasi Pembangunan
02	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	1 paket	1 paket	99.75	1 paket	108.70	1 paket	119.58	1 paket	131.53	1 paket	144.69	1 paket	604.25	Bagian Administrasi Pembangunan
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	2 paket	2 paket	259.56	2 paket	253.86	2 paket	279.25	2 paket	307.17	2 paket	337.89	2 paket	1,437.73	Bagian Administrasi Pembangunan
04	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah	1 Paket	1 Paket	19.03	1 Paket	20.45	1 Paket	22.49	1 Paket	24.74	1 Paket	27.22	1 Paket	113.94	Bagian Administrasi Pembangunan
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				655.64		823.48		677.31		860.09		1,068.84		4,085.36	
56	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Memperkuat Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa	122 LPD	122 LPD	301.07	122 LPD	331.18	122 LPD	364.30	122 LPD	400.73	122 LPD	440.80	LPD	1,838.08	Bagian Adm. Perekonomian
75	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Terkoordinasinya Ketahanan Pangan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	232.74	6 Kecamatan	358.30	6 Kecamatan	165.61	6 Kecamatan	297.22	6 Kecamatan	449.68	Kecamatan	1,503.54	Bagian Adm. Perekonomian
00	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Mengoptimalkan Profesionalisme Organisasi KTNA	180 orang KTNA	60 orang KTNA	40.51	60 orang KTNA	44.56	60 orang KTNA	49.01	60 orang KTNA	53.91	60 orang KTNA	59.31	300 orang KTNA	247.30	Bagian Adm. Perekonomian
11	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Terkoordinasinya Pengendalian Inflasi Daerah	6 Kecamatan	6 Kecamatan	24.19	6 Kecamatan	26.61	6 Kecamatan	29.27	6 Kecamatan	32.20	6 Kecamatan	35.42	6 Kecamatan	147.68	Bagian Adm. Perekonomian
12	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Badung	12 Bulan	2 Prsh Daerah	57.13	2 Prsh Daerah	62.84	2 Prsh Daerah	69.12	2 Prsh Daerah	76.03	2 Prsh Daerah	83.64	2 Prsh Daerah	348.76	Bagian Adm. Perekonomian
	BAGIAN UMUM				60,679.72		66,840.69		73,503.56		80,832.72		88,894.79		370,805.31	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	49,485.66	100%	54,527.23	100%	59,958.76	100%	65,933.43	100%	72,505.57	100%	302,464.47	Bagian Umum
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,929.27	100%	3,222.20	100%	3,544.42	100%	3,898.86	100%	4,288.74	100%	17,883.48	Bagian Umum
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	7,276.22	100%	8,003.85	100%	8,804.23	100%	9,684.65	100%	10,653.12	100%	44,422.07	Bagian Umum
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	688.56	100%	757.42	100%	833.16	100%	916.48	100%	1,008.13	100%	4,203.75	Bagian Umum
16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	36 kunjungan	36 kunjungan	300.00	36 kunjungan	330.00	36 kunjungan	363.00	36 kunjungan	399.30	36 kunjungan	439.23	180 kunjungan	1,831.53	Bagian Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH				14.385.06		15.370.24		22.681.89		24.147.58		26.432.98		103.094.63	
01	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Jumlah SKPD dan UPT yang melakukan Rekonsiliasi	73 Unit Keria	74 Unit Keria	800.58	74 Unit Keria	963.86	74 Unit Keria	1.058.86	74 Unit Keria	1.163.31	74 Unit Keria	1.278.17	74 Unit Keria	5.341.67	Bagian Perengkapan dan Aset Daerah
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	4 Paket	4 Paket	9,965.31	4 Paket	10,690.43	4 Paket	17,803.09	4 Paket	19,053.30	4 Paket	21,105.27	24 Paket	78,617.40	Bagian Perengkapan dan Aset Daerah
03	PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	Jumlah barang milik daerah yang terasuransikan	55 Gedung dan Bangunan	57 Gedung dan Bangunan	2,000.68	57 Gedung dan Bangunan	2,000.00	57 Gedung dan Bangunan	10,000.68	Bagian Perengkapan dan Aset Daerah						
04	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Jumlah Informasi E-Proc. Melalui LPSE	459 Paket	482 Paket	1,618.48	506 Paket	1,715.95	531 Paket	1,819.95	558 Paket	1,930.96	586 Paket	2,049.54	2,663 Paket	9,134.87	Bagian Perengkapan dan Aset Daerah
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				7.720.69		8.891.58		9.213.71		9.562.21		9.939.41		45.295.21	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	21 jenis koran dan 4 majalah	21 jenis koran dan 4 majalah	942.37	21 jenis koran dan 4 majalah	955.47	21 jenis koran dan 4 majalah	1.003.24	21 jenis koran dan 4 majalah	1.053.40	21 jenis koran dan 4 majalah	1.106.07	21 jenis koran dan 4 majalah	5.028.16	Bagian Humas & Protokol
02	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Jumlah Jumpa Pers	12 Kali	12 Kali	692.80	12 Kali	736.94	12 Kali	784.22	12 Kali	834.92	12 Kali	889.30	60 kali	3.938.18	Bagian Humas & Protokol
03	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Jumlah Pelayanan Media Elektronik	253 Liputan	340 Liputan	1.267.23	350 Liputan	1.393.95	350 Liputan	1.533.35	350 Liputan	1.686.68	350 Liputan	1.855.35	350 Liputan	7.736.55	Bagian Humas & Protokol
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Jumlah Berita pada media massa	3036 Advetorial	3600 Adv.	4,022.52	3650 adv	4,521.31	3700 adv	4,522.38	3750 adv	4,523.50	3800 adv	4,524.67	18500 adv	22,114.38	Bagian Humas & Protokol
05	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang keprotokolan	1 paket	1 paket	795.77	1 paket	835.55	1 paket	877.33	1 paket	921.20	1 paket	967.26	5 Paket	4,397.11	Bagian Humas & Protokol
06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah tenaga protokol yang meningkat kemampuannya	-	-	-	30 orang	448.36	30 orang	493.20	30 orang	542.52	30 orang	596.77	150 orang	2.080.84	Bagian Humas & Protokol
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				1.399.15		906.71		996.38		1.066.27		1.213.72		5.582.23	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pembayaran iuran FORSESDASI	1 kali	1 kali	10.00	1 kali	10.00	1 kali	10.00	1 kali	10.00	1 kali	10.00	5 kali	50.00	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Hasil evaluasi Lakip Kabupaten	75.89	77.00	199.91	78.00	178.09	79.00	195.90	80.00	215.48	81.00	278.85	81.00	1,068.23	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
28	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	53 SKPD	1,145.79	53 SKPD	670.83	53 SKPD	737.91	53 SKPD	782.95	53 SKPD	861.25	53 SKPD	4,198.73	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	-	100%	18.74	100%	20.62	100%	22.68	100%	24.95	100%	27.44	100%	114.44	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	53 SKPD	53 SKPD	24.71	53 SKPD	27.18	53 SKPD	29.89	53 SKPD	32.88	53 SKPD	36.17	53 SKPD	150.83	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	SEKRETARIAT DPRD				50,678.04		55,096.55		60,577.61		66,626.77		73,258.85		306,237.82	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,869.70	100%	4,257.17	100%	4,655.89	100%	5,114.47	100%	5,596.92	100%	23,494.15	Sekretariat DPRD
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3,239.96	100%	2,915.65	100%	3,207.21	100%	3,527.94	100%	3,880.73	100%	16,771.50	Sekretariat DPRD
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	175.27	100%	191.32	100%	208.85	100%	228.13	100%	249.35	100%	1,052.92	Sekretariat DPRD
15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	100%	43,157.57	100%	47,473.33	100%	52,220.67	100%	57,442.73	100%	63,187.00	100%	263,481.31	Sekretariat DPRD
26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Raperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100%	100%	235.53	100%	259.09	100%	285.00	100%	313.50	100%	344.85	100%	1,437.96	Sekretariat DPRD
	INSPEKTORAT				3,491.20		3,405.27		3,715.30		4,066.33		4,676.31		19,354.41	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	714.26	100%	774.94	100%	825.18	100%	890.45	100%	951.25	100%	4,156.09	Inspektorat
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	500.50	100%	135.54	100%	146.84	100%	159.28	100%	407.80	100%	1,349.96	Inspektorat
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan Waktu pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	199.79	100%	219.77	100%	241.75	100%	265.92	100%	292.51	100%	1,219.74	Inspektorat
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	50.00	Inspektorat
20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	5%	4%	1,531.10	3%	1,675.93	2%	1,843.52	2%	2,027.87	1%	2,230.66	1%	9,309.07	Inspektorat
21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	100%	100%	139.44	100%	153.38	100%	168.72	100%	185.60	100%	204.16	100%	851.30	Inspektorat
22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	90%	100%	396.10	100%	435.71	100%	479.29	100%	527.21	100%	579.94	100%	2,418.25	Inspektorat
	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU				2,887.35		2,740.95		2,677.23		2,878.53		3,106.26		14,290.32	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	presentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	842.10	100%	869.49	100%	951.49	100%	1,008.00	100%	1,076.46	100%	4,747.55	BPPT KABUPATEN BADUNG
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	presentase sarana prasarana aparatur	100%	100%	917.65	100%	535.71	100%	285.33	100%	313.61	100%	344.73	100%	2,397.03	BPPT KABUPATEN BADUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	prosentase kapasitas pelayanan publik	100%	100%	781.77	100%	809.24	100%	888.80	100%	977.68	100%	1,075.44	100%	4,532.94	BPPT KABUPATEN BADUNG
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	84.80	100%	84.80	100%	84.800	100%	84.800	100%	84.80	100%	424.00	BPPT KABUPATEN BADUNG
12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	prosentase dokumen perencanaan SKPD	100%	100%	9.89	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	49.89	BPPT KABUPATEN BADUNG
24	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	prosentase Pengaduan yang tertangani Oleh BPPT	100%	100%	70.86	100%	77.95	100%	85.73	100%	94.31	100%	103.74	100%	432.60	BPPT KABUPATEN BADUNG
37	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100%	100%	180.28	100%	353.76	100%	371.07	100%	390.13	100%	411.08	100%	1,706.32	BPPT KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA						3,059.60		3,384.51		3,708.91		4,075.75		4,468.27		18,712.03
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	17 kegiatan	1,541.89	17 kegiatan	1,698.52	17 kegiatan	1,854.33	17 kegiatan	2,035.71	17 kegiatan	2,224.23	17 kegiatan	9,354.68	Kec. Kuta
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	2 paket	2 paket	261.39	2 paket	304.03	2 paket	334.43	2 paket	367.88	2 paket	404.67	2 paket	1,687.40	Kec. Kuta
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik	9 Orang	9 Orang	7.93	2 orang	8.72	2 orang	9.59	3 orang	10.55	2 orang	11.61	18 Orang	48.41	Kec. Kuta
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTIM PELAPORAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	82.25	2 jenis	90.47	2 jenis	99.52	2 jenis	109.47	2 jenis	120.42	2 jenis	502.11	Kec. Kuta
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	12 jenis	340.28	12 jenis	374.31	12 jenis	411.74	12 jenis	452.91	12 jenis	498.20	60 jenis	2,077.45	Kec. Kuta
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	9.38	3 jenis	10.31	3 jenis	11.35	3 jenis	12.48	3 jenis	13.73	3 jenis	57.25	Kec. Kuta
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	48.15	1 dokumen	52.96	1 dokumen	58.26	1 dokumen	64.09	1 dokumen	70.49	1 dokumen	293.95	Kec. Kuta
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/STATISTIK DAERAH	Jenis dokumen Data	2 jenis	2 jenis	24.02	2 jenis	26.42	2 jenis	29.06	2 jenis	31.97	2 jenis	35.17	2 jenis	146.64	Kec. Kuta
78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya	5 kelurahan	5 kelurahan	95.83	5 kelurahan	105.41	5 kelurahan	115.95	5 kelurahan	127.54	5 kelurahan	140.30	5 kelurahan	585.03	Kec. Kuta
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	2 kegiatan	3 kegiatan	17.91	3 kegiatan	19.70	3 kegiatan	21.67	3 kegiatan	23.84	3 kegiatan	26.22	15 kegiatan	109.34	Kec. Kuta
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	167.89	7 hari besar	184.68	7 hari besar	203.15	7 hari besar	223.46	7 hari besar	245.81	7 hari besar	1,024.99	Kec. Kuta
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	1 jenis	369.16	1 jenis	406.07	1 jenis	446.68	1 jenis	491.35	1 jenis	540.48	5 jenis	2,253.74	Kec. Kuta
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	85.23	7 jenis	93.76	7 jenis	103.13	7 jenis	113.44	7 jenis	124.79	7 jenis	520.36	Kec. Kuta
90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	3.82	106 RTM, 101 RTS	4.20	106 RTM, 101 RTS	4.62	106 RTM, 101 RTS	5.09	106 RTM, 101 RTS	5.59	106 RTM, 101 RTS	23.33	Kec. Kuta

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	4.48	5 kelurahan	4.93	5 kelurahan	5.42	5 kelurahan	5.97	5 kelurahan	6.56	5 kelurahan	27.37	Kec. Kuta
	KELURAHAN KUTA				2,067.84		2,034.71		2,207.46		2,361.95		2,566.07		11,238.03	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	960.59	15 kegiatan	1060.91	15 kegiatan	1141.48	15 kegiatan	1237.05	15 kegiatan	1340.58	15 kegiatan	5740.61	Kel.Kuta
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	555.68	2 paket	368.68	2 paket	401.24	2 paket	401.24	2 paket	437.06	2 paket	2163.89	Kel.Kuta
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	58.74	2 jenis	64.00	2 jenis	70.50	2 jenis	71.00	2 jenis	71.50	2 jenis	335.74	Kel.Kuta
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD PADA TAHUN N	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	3 jenis	10.00	3 jenis	10.00	3 jenis	10.00	3 jenis	10.00	3 jenis	50.00	Kel.Kuta
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	21.94	1 jenis dokumen	24.13	1 jenis dokumen	26.55	1 jenis dokumen	29.20	1 jenis dokumen	32.12	1 jenis dokumen	133.95	Kel.Kuta
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data /informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	41.54	2 jenis	45.69	2 jenis	50.26	2 jenis	55.29	2 jenis	60.81	2 jenis	253.59	Kel.Kuta
	PROGRAM Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah lingkungan yang mendapat pelayananan fogging	13 lingkungan	13 lingkungan	33.90	13 lingkungan	37.29	13 lingkungan	41.02	13 lingkungan	45.13	13 lingkungan	49.64	13 lingkungan	206.99	Kel.Kuta
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	13 lingkungan	13 lingkungan	42.32	13 lingkungan	46.56	13 lingkungan	51.21	13 lingkungan	56.33	13 lingkungan	61.97	13 lingkungan	258.40	Kel.Kuta
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	5 lembaga	5 lembaga	132.54	5 lembaga	145.80	5 lembaga	160.38	5 lembaga	176.42	5 lembaga	194.06	5 lembaga	809.19	Kel.Kuta
	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1 Tahun	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.50	1 Tahun	6.05	1 Tahun	6.66	1 Tahun	7.32	1 Tahun	30.53	Kel.Kuta
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	13 lingkungan	13 lingkungan	148.84	13 lingkungan	163.72	13 lingkungan	180.09	13 lingkungan	198.10	13 lingkungan	217.91	13 lingkungan	908.67	Kel.Kuta
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	56.75	7 jenis	62.43	7 jenis	68.67	7 jenis	75.54	7 jenis	83.09	7 jenis	346.49	Kel.Kuta
	KELURAHAN LEGIAN				1,341.00		1,486.10		1,629.21		1,796.63		1,969.80		8,222.74	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	436.76	15 kegiatan	491.43	15 kegiatan	535.08	15 kegiatan	593.08	15 kegiatan	645.89	15 kegiatan	2702.25	Kel Legian
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	212.72	2 paket	233.99	2 paket	257.39	2 paket	283.13	2 paket	311.45	2 paket	1298.69	Kel Legian
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	58.12	2 jenis	63.93	2 jenis	70.32	2 jenis	77.35	2 jenis	85.09	2 jenis	354.82	Kel Legian
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jenis Pengembangan Nilai Budaya	2 Jenis	2 Jenis	217.40	2 Jenis	239.14	2 Jenis	263.05	2 Jenis	289.36	2 Jenis	318.29	2 Jenis	1327.25	Kel Legian
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.96	3 jenis	12.06	3 jenis	13.26	3 jenis	14.59	3 jenis	16.05	3 jenis	66.91	Kel Legian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	16.92	1 jenis dokumen	18.61	1 jenis dokumen	20.47	1 jenis dokumen	22.52	1 jenis dokumen	24.77	1 jenis dokumen	103.28	Kel Leqian
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen statistik daerah	2 jenis	2 jenis	16.25	2 jenis	17.88	2 jenis	19.66	2 jenis	21.63	2 jenis	23.79	2 jenis	99.21	Kel Leqian
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	3 lingkungan	3 lingkungan	42.09	3 lingkungan	46.30	3 lingkungan	50.93	3 lingkungan	56.02	3 lingkungan	61.62	3 lingkungan	256.97	Kel Leqian
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	5 jenis	5 jenis	138.57	5 jenis	152.43	5 jenis	167.67	5 jenis	184.44	5 jenis	202.88	5 jenis	845.98	Kel Leqian
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	2 jenis	2 jenis	17.88	2 jenis	19.67	2 jenis	21.64	2 jenis	23.80	2 jenis	26.18	2 jenis	109.16	
	PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional	8 hari besar	8 hari besar	5.00	8 hari besar	5.50	8 hari besar	6.05	8 hari besar	6.66	8 hari besar	7.32	8 hari besar	30.53	Kel Leqian
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	3 lingkungan	3 lingkungan	153.37	3 lingkungan	168.71	3 lingkungan	185.58	3 lingkungan	204.14	3 lingkungan	224.55	3 lingkungan	936.34	Kel Leqian
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	14.96	7 jenis	16.46	7 jenis	18.11	7 jenis	19.92	7 jenis	21.91	7 jenis	91.36	Kel Legian
	KELURAHAN SEMINYAK				1,133.72		1,220.27		1,247.26		1,376.48		1,507.63		6,485.36	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	447.89	15 kegiatan	503.67	15 kegiatan	548.54	15 kegiatan	607.90	15 kegiatan	662.19	15 kegiatan	2,770.18	Kel.Seminyak
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	2 Paket	224.12	2 Paket	246.54	2 Paket	181.65	2 Paket	199.82	2 Paket	219.80	2 Paket	1,071.92	Kel.Seminyak
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	1 paket	61.90	1 paket	68.09	1 paket	74.90	1 paket	82.39	1 paket	90.63	2 jenis	377.91	Kel.Seminyak
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	3 jenis	11.00	3 jenis	12.10	3 jenis	13.31	3 jenis	14.64	3 jenis	61.05	Kel.Seminyak
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 paket	20.85	1 paket	22.94	1 paket	25.23	1 paket	27.76	1 paket	30.53	1 jenis dokumen	127.31	Kel.Seminyak
	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis dokumen	2 dokumen	13.87	2 dokumen	15.25	2 dokumen	16.78	2 dokumen	18.46	2 dokumen	20.30	2 jenis dokumen	84.66	Kel.Seminyak
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	2 lingkungan	2 lingkungan	41.93	2 lingkungan	46.13	2 lingkungan	50.74	2 lingkungan	55.81	2 lingkungan	61.39	2 lingkungan	256.00	Kel.Seminyak
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	4 jenis	4 jenis	130.80	4 jenis	106.06	4 jenis	116.66	4 jenis	128.33	4 jenis	141.16	4 jenis	623.02	Kel.Seminyak
	PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1 Tahun	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.50	1 Tahun	6.05	1 Tahun	6.66	1 Tahun	7.32	5 Tahun	30.53	Kel.Seminyak
	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	2 lingkungan	2 lingkungan	148.56	2 lingkungan	163.41	2 lingkungan	179.76	2 lingkungan	197.73	2 lingkungan	217.50	2 lingkungan	906.97	Kel.Seminyak
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	28.80	7 jenis	31.68	7 jenis	34.85	7 jenis	38.33	7 jenis	42.16	7 jenis	175.82	Kel.Seminyak
	KELURAHAN TUBAN				1,171.20		1,193.84		1,302.28		1,430.04		1,536.37		6,633.74	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Cakupan Pelayanan Kebutuhan	15 kegiatan	15 kegiatan	527.42	15 kegiatan	578.96	15 kegiatan	620.85	15 kegiatan	675.56	15 kegiatan	724.69	15 kegiatan	3127.48	Kel.Tuban

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PERKANTORAN	Perkantoran														
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	182.55	2 paket	119.15	2 paket	106.63	2 paket	129.39	2 paket	131.38	2 paket	669.10	Kel.Tuban
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Keuangan	2 jenis	2 jenis	57.10	2 jenis	57.10	2 jenis	66.50	2 jenis	67.00	2 jenis	67.50	2 jenis	315.20	Kel.Tuban
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 Jenis	10.00	3 Jenis	10.00	3 Jenis	10.00	3 Jenis	10.00	3 Jenis	10.00	3 Jenis	50.00	Kel.Tuban
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	18.84	1 jenis dokumen	20.73	1 jenis dokumen	22.80	1 jenis dokumen	25.08	1 jenis dokumen	27.59	1 jenis dokumen	115.03	Kel.Tuban
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	22.24	2 jenis	24.46	2 jenis	26.91	2 jenis	29.60	2 jenis	32.56	2 jenis	135.75	Kel.Tuban
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	4 lingkungan	4 lingkungan	43.96	4 lingkungan	48.35	4 lingkungan	53.19	4 lingkungan	58.51	4 lingkungan	64.36	4 lingkungan	268.37	Kel.Tuban
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 jenis	3 Jenis	91.82	3 jenis	96.60	3 Jenis	133.06	3 Jenis	146.37	3 Jenis	161.01	3 Jenis	628.87	Kel.Tuban
	PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari besar yang diperingati nasional	1 Tahun	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.50	1 Tahun	6.00	1 Tahun	6.50	1 Tahun	28.00	Kel.Tuban
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang	4 lingkungan	4 lingk	155.74	4 lingkungan	171.31	4 lingkungan	188.45	4 lingkungan	207.29	4 lingkungan	228.02	4 lingkungan	950.81	Kel.tuban
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan	7 jenis	7 jenis	56.53	7 jenis	62.18	7 jenis	68.40	7 jenis	75.24	7 jenis	82.77	7 jenis	345.13	Kel.Tuban
	KELURAHAN KEDONGANAN				1,121.91		1,284.68		1,299.28		1,371.07		1,543.42		6,425.01	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	632.43	15 kegiatan	703.17	15 kegiatan	732.59	15 kegiatan	779.38	15 kegiatan	850.82	15 kegiatan	3,488.04	Kelurahan Kedonganan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana	2 paket	2 paket	46.38	2 paket	101.38	2 paket	136.13	2 paket	161.13	2 paket	220.04	2 paket	680.06	Kelurahan Kedonganan
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	57.85	2 jenis	57.85	2 jenis	64.04	2 jenis	64.04	2 jenis	70.74	2 jenis	314.52	Kelurahan Kedonganan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	3 jenis	10.00	3 jenis	10.96	3 jenis	10.96	3 jenis	12.06	3 jenis	53.98	Kelurahan Kedonganan
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	18.50	1 jenis dokumen	20.35	1 jenis dokumen	18.21	1 jenis dokumen	18.21	1 jenis dokumen	20.03	1 jenis dokumen	95.30	Kelurahan Kedonganan
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	18.73	2 jenis	20.60	2 jenis	20.60	2 jenis	20.60	2 jenis	22.66	2 jenis	103.19	Kelurahan Kedonganan
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	6 lingk.	6 lingk.	68.84	6 lingk.	75.73	6 lingk.	36.97	6 lingk.	36.97	6 lingk.	40.67	6 lingk.	259.18	Kelurahan Kedonganan
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	3 jenis	3 jenis	96.79	3 jenis	106.47	3 jenis	98.05	3 jenis	98.05	3 jenis	104.20	3 jenis	503.55	Kelurahan Kedonganan
	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar	1 Tahun	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.00	1 Tahun	7.00	1 Tahun	7.00	1 Tahun	10.00	1 Tahun	34.00	Kelurahan Kedonganan
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	6 lingkungan	6 lingkungan	145.41	6 lingkungan	159.95	6 lingkungan	150.54	6 lingkungan	150.54	6 lingkungan	165.59	6 lingkungan	772.03	Kelurahan Kedonganan
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	21.99	7 jenis	24.19	7 jenis	24.19	7 jenis	24.19	7 jenis	26.61	7 jenis	121.16	Kelurahan Kedonganan
	KECAMATAN KUTA UTARA				2,783.67		2,954.78		3,236.51		3,556.41		3,897.30		16,428.68	
01	PROGRAM PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	16 kegiatan	16 kegiatan	1,285.18	16 kegiatan	1,416.45	16 kegiatan	1,544.34	16 kegiatan	1,695.03	16 kegiatan	1,849.78	16 kegiatan	7,790.78	Kecamatan Kuta Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 paket	2 paket	289.55	2 paket	208.51	2 paket	229.36	2 paket	252.29	2 paket	277.52	2 paket	1,257.23	Kecamatan Kuta Utara
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah kepala lingkungan yang dilantik	-	7 kaling	3.30	7 kaling	3.63	5 kaling	3.99	9 kaling	4.39	1 kaling	4.83	29 kaling	20.12	Kecamatan Kuta Utara
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	3 dokumen	3 dokumen	80.10	3 dokumen	88.11	3 dokumen	96.92	3 dokumen	106.61	3 dokumen	117.27	3 dokumen	489.02	Kecamatan Kuta Utara
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya	-	4 jenis	347.95	4 jenis	382.75	4 jenis	421.02	4 jenis	463.12	4 jenis	509.44	20 jenis	2,124.28	Kecamatan Kuta Utara
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 Jenis	10.00	3 Jenis	11.00	3 Jenis	12.10	3 Jenis	13.31	3 Jenis	14.64	3 Jenis	61.05	Kecamatan Kuta Utara
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 dokumen	40.09	1 dokumen	44.10	1 dokumen	48.51	1 dokumen	53.37	1 dokumen	58.70	1 dokumen	244.78	Kecamatan Kuta Utara
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data	2 Jenis	2 Jenis	23.35	2 Jenis	25.68	2 Jenis	28.25	2 Jenis	31.07	2 Jenis	34.18	2 Jenis	142.53	Kecamatan Kuta Utara
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	6 desa/kel	6 Desa/Kel	79.44	6 Desa/Kel	87.39	6 Desa/Kel	96.13	6 Desa/Kel	105.74	6 Desa/Kel	116.31	6 Desa/Kel	485.00	Kecamatan Kuta Utara
79	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	6 desa & kel	3 desa	47.02	3 desa	51.72	3 desa	56.89	3 desa	62.58	3 desa	68.84		287.03	Kecamatan Kuta Utara
82	PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperhatikan	7 hari besar	8 hari besar	128.40	8 hari besar	141.24	8 hari besar	155.37	8 hari besar	170.90	8 hari besar	187.99	8 hari besar	783.91	Kecamatan Kuta Utara
83	PENGLOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	1 Jenis	3 Jenis	391.15	3 Jenis	430.26	3 Jenis	473.29	3 Jenis	520.62	3 Jenis	572.68	3 Jenis	2,387.99	Kecamatan Kuta Utara
85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	7 Jenis	48.73	7 Jenis	53.60	7 Jenis	58.96	7 Jenis	64.85	7 Jenis	71.34	7 Jenis	297.48	Kecamatan Kuta Utara
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM yang Didata	462 RTM	462 RTM	4.95	462 RTM	5.44	462 RTM	5.99	462 RTM	6.58	462 RTM	7.24	462 RTM	30.20	Kecamatan Kuta Utara
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/Kel	6 desa/Kelurahan	4.47	6 desa/Kelurahan	4.91	6 desa/Kelurahan	5.40	6 desa/Kelurahan	5.95	6 desa/Kelurahan	6.54	6 desa/Kelurahan	27.27	Kecamatan Kuta Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KELURAHAN KEROBOKAN				1,424.26		1,584.34		1,733.09		1,862.19		2,003.49		8,607.36	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administratif perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	621.32	15 kegiatan	694.45	15 kegiatan	758.39	15 kegiatan	838.73	15 kegiatan	916.10	15 kegiatan	3828.99	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	2 Paket	226.66	2 Paket	311.16	2 Paket	365.55	2 Paket	370.39	2 Paket	376.43	2 Paket	1650.19	Kelurahan Kerobokan
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	2 Jenis	62.10	2 Jenis	68.31	2 Jenis	75.14	2 Jenis	82.66	2 Jenis	90.92	2 Jenis	379.13	Kelurahan Kerobokan
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Jenis Pengembangan Nilai Budaya	0	1 Jenis	21.85	1 Jenis	0.00	1 Jenis	0.00	1 Jenis	0.00	1 Jenis	0.00	1 jenis	21.85	Kelurahan Kerobokan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Jenis	3 Jenis	10.00	2 Jenis	11.00	2 Jenis	12.10	2 Jenis	13.31	3 Jenis	14.64	3 Jenis	61.05	Kelurahan Kerobokan
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis	1 jenis	21.08	1 jenis	21.52	1 jenis	24.40	1 jenis	28.40	1 jenis	33.50	1 jenis	128.90	Kelurahan Kerobokan
	PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	24.39	2 jenis	26.50	2 jenis	27.20	2 jenis	29.40	2 jenis	30.20	2 jenis	137.69	Kelurahan Kerobokan
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lingkungan Yang Dijaga ketertibannya	10 lingkungan	10 lingkungan	83.73	10 lingkungan	92.10	10 lingkungan	87.40	10 lingkungan	92.00	10 lingkungan	98.80	10 lingkungan	454.03	Kelurahan Kerobokan
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam	3 jenis	4 jenis	144.44	4 jenis	149.70	4 jenis	160.80	4 jenis	172.70	4 jenis	187.30	4 jenis	814.94	Kelurahan Kerobokan
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	2 jenis	2 jenis	15.27	2 jenis	0.00	2 jenis	0.00	2 jenis	0.00	2 jenis	0.00	2 jenis	15.27	Kelurahan Kerobokan
	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan peringatan Hari besar Nasional	1 tahun	1 tahun	5.00	1 tahun	6.00	1 tahun	6.50	1 tahun	7.00	1 tahun	7.50	1 tahun	32.00	Kelurahan Kerobokan
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah Lingkungan Yang bersih	10 Lingkungan	10 Lingkungan	155.64	10 Lingkungan	171.20	10 Lingkungan	180.80	10 Lingkungan	192.20	10 Lingkungan	210.60	10 Lingkungan	910.44	Kelurahan Kerobokan
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	7 jenis	7 jenis	32.78	7 jenis	32.40	7 jenis	34.80	7 jenis	35.40	7 jenis	37.50	7 jenis	172.88	Kelurahan Kerobokan
	KELURAHAN KEROBOKAN KAJA				1,746.27		2,017.12		2,192.83		2,396.12		2,565.88		10,918.22	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	15 Kegiatan	15 Kegiatan	1,104.12	15 Kegiatan	1,225.53	15 Kegiatan	1,342.59	15 Kegiatan	1,481.35	15 Kegiatan	1,622.98	15 Kegiatan	6,776.57	Kel. Kerobokan Kaja
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur kantor	2 paket	2 paket	105.61	2 paket	239.23	2 paket	242.65	2 paket	246.41	2 paket	250.55	2 paket	1,084.45	Kel. Kerobokan Kaja
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Jenis	2 Jenis	59.70	2 Jenis	65.67	2 Jenis	72.24	2 Jenis	79.46	2 Jenis	87.41	2 Jenis	364.47	Kel. Kerobokan Kaja
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Jenis	3 Jenis	10.00	2 Jenis	11.00	2 Jenis	12.10	2 Jenis	13.31	3 Jenis	14.64	3 Jenis	61.05	Kel. Kerobokan Kaja
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	21.67	1 Jenis Dokumen	23.83	1 Jenis Dokumen	26.21	Paket	28.84	1 Jenis Dokumen	31.72	1 Jenis Dokumen	132.27	Kel. Kerobokan Kaja
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INPORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah data informasi statistik daerah disusun	2 Jenis	2 Jenis	45.52	2 Jenis	50.07	2 Jenis	55.08	2 Jenis	60.59	2 Jenis	66.65	2 Jenis	277.91	Kel. Kerobokan Kaja
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Jumlah Lokasi Yang Dipantau diiaqa ketertibannya	23 Lingkungan	23 lingkungan	83.03	23 lingkungan	91.33	23 lingkungan	100.46	23 lingkungan	110.51	23 lingkungan	78.71	23 lingkungan	464.03	Kel. Kerobokan Kaja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	4 Jenis	4 Jenis	132.91	4 Jenis	108.37	4 Jenis	119.21	4 Jenis	131.13	4 Jenis	144.25	4 Jenis	635.87	Kel. Kerobokan Kaia
	PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1 Tahun	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.50	1 Tahun	6.05	1 Tahun	6.66	1 Tahun	7.32	1 Tahun	30.53	Kel. Kerobokan Kaja
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah Lingkungan Yang Bersih	23 Lingkungan	23 Lingkungan	155.23	23 Lingkungan	170.76	23 Lingkungan	187.83	23 Lingkungan	206.62	23 Lingkungan	227.28	23 Lingkungan	947.72	Kel. Kerobokan Kaja
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	7 Jenis	23.48	7 Jenis	25.83	7 Jenis	28.41	7 Jenis	31.25	7 Jenis	34.38	7 Jenis	143.35	Kel. Kerobokan Kaja
	KELURAHAN KEROBOKAN KELOD				1,369.75		1,400.47		1,529.52		1,592.08		1,739.29		7,631.12	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	739.53	15 kegiatan	797.98	15 kegiatan	872.27	15 kegiatan	934.84	15 kegiatan	1.021.82	15 kegiatan	4.366.44	Kel. Krb kelod
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	83.72	2 paket	84.22	2 paket	87.14	2 paket	87.14	2 paket	90.36	2 paket	432.59	Kel. Krb kelod
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	45.35	2 jenis	45.35	2 jenis	49.89	2 jenis	49.89	2 jenis	54.87	2 jenis	245.34	Kel. Krb Kelod
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	jumlah pengembangan nilai budaya	1 jenis	1 jenis	28.23	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis	28.23	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	2 jenis	10.00	2 jenis	11.00	2 jenis	11.00	3 jenis	12.10	3 jenis	54.10	kel. Krb kelod
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	19.75	1 jenis dokumen	19.75	1 jenis dokumen	21.73	1 jenis dokumen	21.73	1 jenis dokumen	23.90	1 jenis dokumen	106.85	kel. Krb kelod
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	33.24	2 jenis	33.24	2 jenis	36.57	2 jenis	36.57	2 jenis	40.23	2 jenis	179.85	kel krb kelod
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	13 lingkungan	13 lingkungan	82.29	13 lingkungan	82.29	13 lingkungan	90.52	13 lingkungan	90.52	13 lingkungan	99.57	13 lingkungan	445.18	kel. Krb kelod
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 jenis	3 jenis	112.72	3 jenis	112.72	3 jenis	123.99	3 jenis	123.99	3 jenis	136.39	3 jenis	609.81	kel. Krb kelod
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jenis kegiatan promosi kesehatan dan	3 jenis	3 jenis	24.28	3 jenis	24.28	3 jenis	26.70	3 jenis	26.70	3 jenis	29.37	3 jenis	131.33	kel. Krb kelod
	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	jenis hari besar yang diperingati	1 Tahun	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.50	1 Tahun	5.50	1 Tahun	6.05	1 Tahun	27.05	kel. Krb kelod
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Kebersihan wilayah lingkungan	13 lingkungan	13 lingkungan	158.96	13 lingkungan	158.96	13 lingkungan	174.86	13 lingkungan	174.86	13 lingkungan	192.34	13 lingkungan	859.99	kel. Krb kelod
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jenis pelayanan adminitrasi kependudukan	13 lingkungan	13 lingkungan	26.68	13 lingkungan	26.68	13 lingkungan	29.35	13 lingkungan	29.35	13 lingkungan	32.29	13 lingkungan	144.35	kel krb. Kelod
	KECAMATAN KUTA SELATAN				2,606.07		2,903.46		3,134.11		3,423.80		3,737.24		15,804.67	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	15 Kegiatan	15 Kegiatan	974.44	15 Kegiatan	1,074.63	15 Kegiatan	1,168.35	15 Kegiatan	1,281.43	15 Kegiatan	1,394.82	15 Kegiatan	5,893.67	Kec. Kuta Selatan
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	2 Paket	302.80	2 Paket	373.08	2 Paket	395.39	2 Paket	419.93	2 Paket	446.92	10 Paket	1,938.11	Kec. Kuta Selatan
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	2 Jenis	84.00	2 Jenis	92.40	2 Jenis	101.64	2 Jenis	111.80	2 Jenis	122.98	10 Jenis	512.83	Kec. Kuta Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	10.00	2 dokumen	11.00	2 dokumen	12.10	2 dokumen	13.31	2 dokumen	14.64	11 dokumen	61.05	Kec. Kuta Selatan
09	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Kegiatan	11 Jenis	11 Jenis	341.53	11 Jenis	375.68	11 Jenis	413.25	11 Jenis	454.57	11 Jenis	500.03	11 Jenis	2,085.05	Kec. Kuta Selatan
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	43.94	1 Dokumen	48.34	1 Dokumen	53.17	1 Dokumen	58.49	1 Dokumen	64.34	5 dokumen	268.28	Kec. Kuta Selatan
38	PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah Dokumen Data	2 Jenis	2 Jenis	23.93	2 Jenis	26.32	2 Jenis	28.95	2 Jenis	31.85	2 Jenis	35.03	10 jenis	146.08	Kec. Kuta Selatan
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Lokasi Yang Dipantau	3 Desa dan 3 Kelurahan	3 Desa dan 3 Kelurahan	112.55	3 Desa dan 3 Kelurahan	123.81	3 Desa dan 3 Kelurahan	136.19	3 Desa dan 3 Kelurahan	149.81	3 Desa dan 3 Kelurahan	164.79	3 Desa dan 3 Kelurahan	687.13	Kec. Kuta Selatan
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	66.20	3 kegiatan	72.82	3 kegiatan	39.76	3 kegiatan	43.73	3 kegiatan	48.10	15 kegiatan	270.61	Kec. Kuta Selatan
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Peringatan Hari Besar	7 hari besar	7 hari besar	126.18	7 hari besar	138.80	7 hari besar	152.68	7 hari besar	167.95	7 hari besar	184.74	7 hari besar	770.35	Kec. Kuta Selatan
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya	1 jenis	1 Jenis	407.27	1 Jenis	448.00	1 Jenis	492.80	1 Jenis	542.07	1 Jenis	596.28	1 Jenis	2,486.42	Kec. Kuta Selatan
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	7 Jenis	7 Jenis	101.64	7 Jenis	111.80	7 Jenis	122.98	7 Jenis	135.28	7 Jenis	148.81	7 Jenis	620.51	Kec. Kuta Selatan
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Desa/kelurahan yang dilaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	6 desa/ kel	6 desa/ kel	6.17	6 desa/ kel	6.79	6 desa/ kel	7.46	6 desa/ kel	8.21	6 desa/ kel	9.03	6 desa/ kel	37.66	Kec. Kuta Selatan
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kepala Lingkungan yang dilantik	5 Kaling	4 Kaling	5.42	0	0.00	7 Kaling	9.41	4 Kaling	5.38	5 Kaling	6.72	20 Kaling	26.92	Kec. Kuta Selatan
KELURAHAN BENOA					1,636.89	2,152.65	1,976.42	2,175.19	2,355.55	10,289.95	Kelurahan Benoa					
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	15 Kegiatan	1,031.41	15 Kegiatan	1,145.56	15 Kegiatan	1,254.61	15 Kegiatan	1,384.57	15 Kegiatan	1,489.23	15 Kegiatan	6,305.38	Kelurahan Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	67.82	2 paket	417.18	2 paket	73.89	2 paket	79.47	2 paket	85.60	2 paket	717.21	Kelurahan Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	60.68	2 jenis	66.75	2 jenis	73.42	2 jenis	80.76	2 jenis	88.84	2 jenis	370.44	Kelurahan Benoa
	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	2 jenis	10.00	2 jenis	10.00	2 jenis	10.00	3 jenis	10.00	3 jenis	50.00	Kelurahan Benoa
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	18.90	1 jenis dokumen	20.78	1 jenis dokumen	22.86	1 jenis dokumen	25.15	1 jenis dokumen	27.66	1 jenis dokumen	115.36	Kelurahan Benoa
	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data / informastatistik daerah	2 jenis	2 jenis	81.34	2 jenis	89.47	2 jenis	98.42	2 jenis	108.26	2 jenis	119.09	2 jenis	496.57	Kelurahan Benoa
	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	16 Lingkungan	16 Lingkungan	37.66	16 Lingkungan	41.42	16 Lingkungan	45.57	16 Lingkungan	50.12	16 Lingkungan	55.14	16 Lingkungan	229.91	Kelurahan Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi dalam membangun desa	4 jenis	4 jenis	115.18	4 jenis	126.70	4 jenis	139.37	4 jenis	153.30	4 jenis	168.63	4 jenis	703.18	Kelurahan Benoa
	PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari besar yang diperingati	8 hari besar	8 hari besar	5.00	8 hari besar	5.00	8 hari besar	5.50	8 hari besar	5.50	8 hari besar	5.50	8 hari besar	26.50	Kelurahan Benoa
	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Kebersihan Lingkungan wilayah	16 Lingkungan	16 Lingkungan	147.06	16 Lingkungan	161.77	16 Lingkungan	177.94	16 Lingkungan	195.74	16 Lingkungan	215.31	16 Lingkungan	897.82	Kelurahan Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan kependudukan	8 jenis	8 jenis	61.85	8 jenis	68.03	8 jenis	74.83	8 jenis	82.32	8 jenis	90.55	8 jenis	377.57	Kelurahan Benoa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KELURAHAN TANJUNG BENOA				1,519.04		1,563.13		1,713.94		1,889.83		2,072.32		8,758.26	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	15 kegiatan	16 kegiatan	709.23	15 kegiatan	758.16	15 kegiatan	828.47	15 kegiatan	915.82	15 kegiatan	1,000.90	15 kegiatan	4,212.59	Kel. Tanjung Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	209.14	2 paket	144.23	2 paket	158.66	2 paket	174.52	2 paket	191.97	2 paket	878.52	Kel. Tanjung Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	70.30	2 jenis	77.33	2 jenis	85.06	2 jenis	93.57	2 jenis	102.93	2 jenis	429.19	Kel. Tanjung Benoa
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	2 jenis	11.00	2 jenis	12.10	2 jenis	13.31	3 jenis	14.64	3 jenis	61.05	Kel. Tanjung Benoa
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis	1 jenis	19.13	1 jenis	21.04	1 jenis	23.14	1 jenis	25.46	1 jenis	28.00	1 jenis	116.76	Kel. Tanjung Benoa
	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	18.46	2 jenis	20.31	2 jenis	22.34	2 jenis	24.58	2 jenis	27.03	2 jenis	112.72	Kel. Tanjung Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Jumlah lokasi yang dipantau	6 lingkungan	6 lingkungan	41.80	6 lingkungan	45.98	6 lingkungan	50.58	6 lingkungan	55.64	6 lingkungan	61.20	6 lingkungan	255.20	Kel. Tanjung Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	4 jenis	157.59	4 jenis	173.34	4 jenis	190.68	4 jenis	209.75	4 jenis	230.72	4 jenis	962.07	Kel. Tanjung Benoa
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 jenis	1 jenis	87.07	1 jenis	95.77	1 jenis	105.35	1 jenis	115.88	1 jenis	127.47	1 jenis	531.54	Kel. Tanjung Benoa
	PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	8 hari besar	5.00	8 hari besar	5.50	8 hari besar	6.05	8 hari besar	6.66	8 hari besar	7.32	8 hari besar	30.53	Kel. Tanjung Benoa
	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	6 lingkungan	6 lingkungan	153.92	6 lingkungan	169.31	6 lingkungan	186.25	6 lingkungan	204.87	6 lingkungan	225.36	6 lingkungan	939.71	Kel. Tanjung Benoa
	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	37.41	7 jenis	41.15	7 jenis	45.26	7 jenis	49.79	7 jenis	54.77	7 jenis	228.37	Kel. Tanjung Benoa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KELURAHAN JIMBARAN				1,778.92		1,707.95		1,873.24		1,939.85		2,127.34		9,419.53	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	908.97	15 kegiatan	970.75	15 kegiatan	1,062.33	15 kegiatan	1,128.94	15 kegiatan	1,235.33	15 kegiatan	5,306.32	Kel. Jimbaran
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	319.12	2 paket	186.37	2 paket	205.00	2 paket	205.00	2 paket	225.51	2 paket	1,133.25	Kel. Jimbaran
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	56.70	2 jenis	56.70	2 jenis	62.37	2 jenis	62.37	2 jenis	68.61	2 jenis	306.75	Kel. Jimbaran
	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	2 jenis	10.00	2 jenis	11.00	2 jenis	11.00	3 jenis	12.10	3 jenis	54.10	Kel. Jimbaran
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	17.32	1 jenis dokumen	17.32	1 jenis dokumen	19.05	1 jenis dokumen	19.05	1 jenis dokumen	20.95	1 jenis dokumen	93.68	Kel. Jimbaran
	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik	2 jenis	2 jenis	34.18	2 jenis	34.18	2 jenis	37.60	2 jenis	37.60	2 jenis	41.36	2 jenis	184.91	Kel. Jimbaran
	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang diajaga ketertibannya	14 lingkungan	14 lingkungan	38.82	14 lingkungan	38.81	14 lingkungan	42.69	14 lingkungan	42.69	14 lingkungan	46.96	14 lingkungan	209.97	Kel. Jimbaran
	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	5 lembaga	5 lembaga	121.90	5 lembaga	121.90	5 lembaga	134.09	5 lembaga	134.09	5 lembaga	147.50	5 lembaga	659.49	Kel. Jimbaran
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 jenis	1 jenis	52.49	1 jenis	52.49	1 jenis	57.74	1 jenis	57.74	1 jenis	63.51	1 jenis	283.96	Kel. Jimbaran
	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan	1 Tahun	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.50	1 Tahun	5.50	1 Tahun	6.05	1 Tahun	27.05	Kel. Jimbaran
	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	14 lingkungan	14 lingkungan	142.19	14 lingkungan	142.19	14 lingkungan	156.41	14 lingkungan	156.41	14 lingkungan	172.05	14 lingkungan	769.23	Kel. Jimbaran
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jumlah jenis pelayanan adminitrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	72.24	7 jenis	72.24	7 jenis	79.46	7 jenis	79.46	7 jenis	87.41	7 jenis	390.81	Kel. Jimbaran
	KECAMATAN MENGWI				3,421.68		3,453.82		3,907.38		4,100.60		4,302.15		19,185.63	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 Kegiatan	17 Kegiatan	1,026.45	17 Kegiatan	1,095.33	17 Kegiatan	1,295.94	17 Kegiatan	1,324.57	17 Kegiatan	1,345.07	17 Kegiatan	6,087.36	Kec. Mengwi
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah Paket Pengadaan dan Pe,eliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	2 Paket	1,006.73	2 Paket	833.97	2 Paket	937.29	2 Paket	937.29	2 Paket	937.29	2 Paket	4,652.56	Kec. Mengwi
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersediannya Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	2 Jenis	88.00	2 Jenis	96.80	2 Jenis	106.48	2 Jenis	117.13	2 Jenis	128.84	2 Jenis	537.25	Kec. Mengwi
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Jenis	3 Jenis	10.00	3 Jenis	11.00	3 Jenis	12.10	3 Jenis	13.31	3 Jenis	14.64	3 Jenis	61.05	Kec. Mengwi
15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan Pengembangan Nilai Budaya	13 Jenis	13 Jenis	437.84	13 Jenis	481.62	13 Jenis	529.79	13 Jenis	582.76	13 Jenis	641.04	13 Jenis	2,673.06	Kec. Mengwi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	53.02	1 Dokumen	58.32	1 Dokumen	64.15	1 Dokumen	70.57	1 Dokumen	77.62	1 Dokumen	323.67	
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah Dokumen data	2 Jenis	2 Jenis	23.37	2 Jenis	23.71	2 Jenis	24.08	2 Jenis	24.49	2 Jenis	24.94	2 Jenis	120.60	Kec. Mengwi
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi Yang dipantau	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel	95.23	20 Desa/Kel	104.75	20 Desa/Kel	115.22	20 Desa/Kel	126.75	20 Desa/Kel	139.42	20 Desa/Kel	581.37	Kec. Mengwi
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah Jenis Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	3 Jenis	3 Jenis	119.53	3 Jenis	130.66	3 Jenis	142.90	3 Jenis	156.37	3 Jenis	171.18	3 Jenis	720.64	Kec. Mengwi
82	PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jenis Hari Besar Yang diperingati	8 Hari Besar	8 Hari Besar	129.17	8 Hari Besar	142.08	8 Hari Besar	156.29	8 Hari Besar	171.92	8 Hari Besar	189.11	8 Hari Besar	788.57	Kec. Mengwi
83	PENGLOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis-jenis pengelolaan keragaman budaya	3 Jenis	3 Jenis	393.90	3 Jenis	433.29	3 Jenis	476.62	3 Jenis	524.28	3 Jenis	576.71	3 Jenis	2,404.80	Kec. Mengwi
85	PENATAAN ADMINISTRASI KPPND/INDUKAN	jenis pelayanan administrasi pendidikan	7 Jenis	7 Jenis	15.89	7 Jenis	17.48	7 Jenis	19.23	7 Jenis	21.16	7 Jenis	23.27	7 Jenis	97.04	Kec. Mengwi
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	3701 RTM	3701 RTM	11.28	3701 RTM	12.41	3701 RTM	13.65	3701 RTM	15.02	3701 RTM	16.52	3701 RTM	68.88	Kec. Mengwi
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kel	20 desa / kelurahan	20 desa / kelurahan	11.27	20 desa / kelurahan	12.39	20 desa / kelurahan	13.63	20 desa / kelurahan	15.00	20 desa / kelurahan	16.50	20 desa / kelurahan	68.79	Kec. Mengwi
KELURAHAN SEMPIDI					1,553.01		1,798.76		1,973.14		2,174.95		2,385.94		9,885.80	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	657.53	15 kegiatan	688.73	15 kegiatan	752.11	15 kegiatan	831.82	15 kegiatan	908.50	15 kegiatan	3,838.69	Kelurahan Sempidi
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	293.39	2 paket	487.38	2 paket	536.12	2 paket	589.73	2 paket	648.70	2 paket	2,555.32	Kelurahan Sempidi
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 jenis	2 jenis	61.70	2 jenis	67.87	2 jenis	74.66	2 jenis	82.12	2 jenis	90.33	2 jenis	376.68	Kelurahan Sempidi
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	2 jenis	11.00	2 jenis	12.10	2 jenis	13.31	3 jenis	14.64	3 jenis	61.05	Kelurahan Sempidi
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	35.53	2 jenis dokumen	39.08	2 jenis dokumen	42.99	2 jenis dokumen	47.28	2 jenis dokumen	52.01	2 jenis dokumen	216.89	Kelurahan Sempidi
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	16.18	2 jenis	17.79	2 jenis	19.57	2 jenis	21.53	2 jenis	23.68	2 jenis	98.75	Kelurahan Sempidi
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	10 lingkungan	10 lingk	45.76	10 lingk	50.34	10 lingk	55.37	10 lingk	60.91	10 lingk	67.00	10 lingk	279.39	Kelurahan Sempidi
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam	5 lembaga	5 lembaga	246.29	5 lembaga	231.26	5 lembaga	254.39	5 lembaga	279.83	5 lembaga	307.81	5 lembaga	1,319.57	Kelurahan Sempidi
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jenis kegiatan pembinaan kesehatan pemberdayaan masyarakat	1 jenis	1 jenis	22.03	1 jenis	24.24	1 jenis	26.66	1 jenis	29.33	1 jenis	32.26	1 jenis	134.52	Kelurahan Sempidi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar	1 Tahun	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.50	1 Tahun	6.05	1 Tahun	6.66	1 Tahun	7.32	1 Tahun	30.53	Kelurahan Sempidi
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	jumlah lingkungan yang bersih	10 lingkungan	10 lingkungan	149.35	10 lingkungan	164.29	10 lingkungan	180.72	10 lingkungan	198.79	10 lingkungan	218.67	10 lingkungan	911.82	Kelurahan Sempidi
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jumlah jenis pelayanan kependudukan	7 jenis	7 jenis	10.25	7 jenis	11.28	7 jenis	12.41	7 jenis	13.65	7 jenis	15.01	7 jenis	62.59	Kelurahan Sempidi
	KELURAHAN LUKLUK				1,483.30		1,504.68		1,547.15		1,731.86		1,842.29		8,109.29	
	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	687.75	15 kegiatan	748.01	15 kegiatan	790.48	15 kegiatan	869.53	15 kegiatan	1,003.96	15 kegiatan	4,099.75	Kelurahan Lukluk
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	341.71	2 paket	214.88	2 paket	214.88	2 paket	266.37	2 paket	241.37	2 paket	1,279.23	Kelurahan Lukluk
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	60.60	2 jenis	66.06	2 jenis	66.06	2 jenis	72.67	2 jenis	72.67	2 jenis	338.05	Kelurahan Lukluk
	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	2 jenis	10.00	2 jenis	10.00	2 jenis	11.00	3 jenis	12.00	3 jenis	53.00	Kelurahan Lukluk
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	19.79	1 jenis dokumen	19.95	1 jenis dokumen	19.95	1 jenis dokumen	21.95	1 jenis dokumen	21.95	1 jenis dokumen	103.58	Kelurahan Lukluk
	PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	25.69	2 jenis	28.06	2 jenis	28.06	2 jenis	30.87	2 jenis	30.87	2 jenis	143.55	Kelurahan Lukluk
	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	9 Lingkungan	9 Lingkungan	42.15	9 Lingkungan	42.15	9 Lingkungan	42.15	9 Lingkungan	46.37	9 Lingkungan	46.37	9 Lingkungan	219.20	Kelurahan Lukluk
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	4 jenis	110.94	4 jenis	183.64	4 jenis	183.64	4 jenis	202.00	4 jenis	202.00	4 jenis	882.22	Kelurahan Lukluk
	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar	1 tahun	1 tahun	5.00	1 tahun	5.50	1 tahun	5.50	1 tahun	6.05	1 tahun	6.05	1 tahun	28.10	Kelurahan Lukluk
	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah Lingkungan yang bersih	9 Lingkungan	9 Lingkungan	162.30	9 Lingkungan	167.89	9 Lingkungan	167.89	9 Lingkungan	184.68	9 Lingkungan	184.68	9 Lingkungan	867.43	Kelurahan Lukluk
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	17.36	7 jenis	18.53	7 jenis	18.53	7 jenis	20.38	7 jenis	20.38	7 jenis	95.18	Kelurahan Lukluk
	KELURAHAN KAPAL				2,000.63		1,707.06		1,870.31		1,945.00		2,016.17		9,539.18	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	1,018.49	15 kegiatan	1,088.73	15 kegiatan	1,192.10	15 kegiatan	1,266.80	15 kegiatan	1,337.96	15 kegiatan	5,904.09	Kelurahan Kapal
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana	2 paket	2 paket	99.43	2 paket	101.92	2 paket	112.12	2 paket	112.12	2 paket	112.12	2 paket	537.71	Kelurahan Kapal
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	70.15	2 jenis	70.15	2 jenis	77.17	2 jenis	77.17	2 jenis	77.17	2 jenis	371.80	Kelurahan Kapal
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	2 jenis	10.00	2 jenis	10.00	2 jenis	10.00	3 jenis	10.00	3 jenis	50.00	Kelurahan Kapal
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	18.10	1 jenis dokumen	17.45	1 jenis dokumen	18.23	1 jenis dokumen	18.23	1 jenis dokumen	18.23	1 jenis dokumen	90.23	Kelurahan Kapal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data / informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	31.44	2 jenis	31.44	2 jenis	34.59	2 jenis	34.59	2 jenis	34.59	2 jenis	166.65	Kelurahan Kapal
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	16 lingkungan	16 lingkungan	42.11	16 lingkungan	42.11	16 lingkungan	46.32	16 lingkungan	46.32	16 lingkungan	46.32	16 lingkungan	223.18	Kelurahan Kapal
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	4 lembaga	4 lembaga	132.67	4 lembaga	183.80	4 lembaga	202.18	4 lembaga	202.18	4 lembaga	202.18	4 lembaga	923.03	Kelurahan Kapal
	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar	1 Tahun	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.00	1 Tahun	5.50	1 Tahun	5.50	1 Tahun	5.50	1 Tahun	26.50	Kelurahan Kapal
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 lingkungan	16 lingkungan	146.29	16 lingkungan	146.29	16 lingkungan	160.92	16 lingkungan	160.92	16 lingkungan	160.92	16 lingkungan	775.35	Kelurahan Kapal
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	10.17	7 jenis	10.17	7 jenis	11.18	7 jenis	11.18	7 jenis	11.18	7 jenis	53.88	Kelurahan Kapal
	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	1 paket	1 paket	204.31		0.00		0.00		0.00		0.00	1 paket	204.31	Kelurahan Kapal
	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Jumlah tapal batas	0	32 unit	212.46		0.00		0.00		0.00		0.00	32 unit	212.46	Kelurahan Kapal
	KELURAHAN ABIANBASE				1,334.02		1,397.94		1,532.23		1,601.42		1,666.53		7,532.14	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	829.34	15 kegiatan	893.26	15 kegiatan	977.09	15 kegiatan	1,046.28	15 kegiatan	1,111.39	15 kegiatan	4,857.35	Kelurahan Abianbase
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	71.74	2 paket	71.74	2 paket	78.91	2 paket	78.91	2 paket	78.91	2 paket	380.22	Kelurahan Abianbase
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	64.80	2 jenis	64.80	2 jenis	71.28	2 jenis	71.28	2 jenis	71.28	2 jenis	343.44	Kelurahan Abianbase
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	3 jenis	10.00	3 jenis	11.00	3 jenis	11.00	3 jenis	11.00	3 jenis	53.00	Kelurahan Abianbase
	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH.	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	17.72	2 jenis	17.72	2 jenis	19.49	2 jenis	19.49	2 jenis	19.49	2 jenis	93.92	Kelurahan Abianbase
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.	Jumlah masyarakat/ lingkungan yang menyampaikan usulan	1 Kelurahan	1 kel	20.78	1 kel	20.78	1 kel	22.86	1 kel	22.86	1 kel	22.86	1 kel	110.13	Kelurahan Abianbase
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA.	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	4 jenis	111.35	4 jenis	111.35	4 jenis	122.49	4 jenis	122.49	4 jenis	122.49	4 jenis	590.16	Kelurahan Abianbase
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN.	Jumlah lingkungan yang bersih	13 lingkungan	13 lingk	152.37	13 lingk	152.37	13 lingk	167.60	13 lingk	167.60	13 lingk	167.60	13 lingk	807.55	Kelurahan Abianbase
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang di pantau	13 Lingkungan	13 Lingk	42.30	13 Lingk	42.30	13 Lingk	46.54	13 Lingk	46.54	13 Lingk	46.54	13 lingk	224.22	Kelurahan Abianbase
	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1 tahun	1 tahun	5.00	1 tahun	5.00	1 tahun	5.50	1 tahun	5.50	1 tahun	5.50	1 tahun	26.50	Kelurahan Abianbase
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	8.61	7 jenis	8.61	7 jenis	9.48	7 jenis	9.48	7 jenis	9.48	7 jenis	45.66	Kelurahan Abianbase
	KELURAHAN SADING				1,171.35		1,199.78		1,469.75		1,573.03		1,709.83		7,123.74	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	593.70	15 kegiatan	664.63	15 kegiatan	725.59	15 kegiatan	802.65	15 kegiatan	876.42	15 kegiatan	3662.986	Kel. Sading

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	143.83	2 paket	57.94	2 paket	219.23	2 paket	192.95	2 paket	198.25	2 paket	812.205	Kel. Sading
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	59.46	2 jenis	65.41	2 jenis	71.95	2 jenis	79.14	2 jenis	87.06	2 jenis	363.009	Kel. Sading
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	9.55	2 jenis	10.51	2 jenis	11.56	2 jenis	12.72	3 jenis	13.99	3 jenis	58.322	Kel. Sading
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis	1 jenis	14.38	1 jenis	15.82	1 jenis	17.40	1 jenis	19.14	1 jenis	21.05	1 jenis	87.787	Kel. Sading
	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	21.01	2 jenis	23.11	2 jenis	25.42	2 jenis	27.96	2 jenis	30.75	2 jenis	128.244	Kel. Sading
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Jumlah lokasi yang dipantau	9 lingkungan	9 lingkungan	38.48	9 lingkungan	42.33	9 lingkungan	46.56	9 lingkungan	51.22	9 lingkungan	56.34	9 lingkungan	234.924	Kel. Sading
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	4 jenis	114.66	4 jenis	126.12	4 jenis	138.73	4 jenis	152.61	4 jenis	167.87	4 jenis	699.980	Kel. Sading
	PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1 tahun	1 tahun	5.00	8 hari besar	5.50	1 tahun	6.05	1 tahun	6.66	1 tahun	7.32	1 tahun	30.526	Kel. Sading
	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	9 lingkungan	9 lingkungan	156.25	9 lingkungan	171.88	9 lingkungan	189.06	9 lingkungan	207.97	9 lingkungan	228.77	9 lingkungan	953.922	Kel. Sading
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	15.04	7 jenis	16.55	7 jenis	18.20	7 jenis	20.02	7 jenis	22.02	7 jenis	91.839	Kel. Sading
	KANTOR CAMAT ABIANSEMAL				3,409.48		3,486.44		3,705.59		3,971.73		4,131.80		20,745.53	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	16 kegiatan	16 Kegiatan	1,720.34	16 Kegiatan	1,895.12	16 Kegiatan	2,070.89	16 Kegiatan	2,274.22	16 Kegiatan	2,401.70	16 Kegiatan	10,362.27	Kantor Camat Abiansemal
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	461.28	2 paket	323.78	2 paket	1,756.39	Kantor Camat Abiansemal						
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	92.80	2 jenis	92.80	2 jenis	92.80	2 jenis	92.80	2 jenis	92.80	2 jenis	464.00	Kantor Camat Abiansemal
08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Kegiatan pengembangan nilai budaya	13 jenis	13 jenis	339.23	13 jenis	339.23	13 jenis	339.23	13 jenis	339.23	13 jenis	339.23	13 jenis	1,696.15	Kantor Camat Abiansemal
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	10.00	3 jenis	12.00	3 jenis	58.00	Kantor Camat Abiansemal						
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	40.44	1 dokumen	41.69	1 dokumen	207.19	Kantor Camat Abiansemal						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data	2 jenis	2 jenis	23.38	2 jenis	23.38	2 jenis	23.38	2 jenis	23.38	2 jenis	23.38	2 jenis	16.92	Kantor Camat Abiansemal
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	18 desa	18 desa	86.61	18 desa	85.00	18 desa	85.00	18 desa	85.00	18 desa	85.00	18 desa	426.61	Kantor Camat Abiansemal
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUNAN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	5 jenis	105.87	5 jenis	106.99	5 jenis	70.64	5 jenis	114.62	5 jenis	119.02	5 jenis	2.657.62	Kantor Camat Abiansemal
82	PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	131.17	7 hari besar	131.17	7 hari besar	131.17	7 hari besar	131.17	7 hari besar	131.17	7 hari besar	655.83	Kantor Camat Abiansemal
83	PROGRAM KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	3 jenis	362.13	3 jenis	398.34	3 jenis	438.17	3 jenis	481.99	3 jenis	530.19	3 jenis	2.210.82	Kantor Camat Abiansemal
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	8 jenis	19.90	8 jenis	20.61	8 jenis	20.61	8 jenis	20.61	8 jenis	20.61	8 jenis	102.36	Kantor Camat Abiansemal
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Desa yang dilakukan pengentasan kemiskinan	18 desa	18 desa	6.42	18 desa	6.42	18 desa	6.42	18 desa	6.42	18 desa	6.42	18 desa	32.08	Kantor Camat Abiansemal
92	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Perbeker yang terpilih	3 desa	3 desa	5.10	2 desa	5.10	9 desa	45.00	4 desa	20.00	0	0.00	18 desa	75.20	Kantor Camat Abiansemal
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	18 kali	18 kali	4.82	18 kali	4.82	18 kali	4.82	18 kali	4.82	18 kali	4.82	18 kali	24.09	Kantor Camat Abiansemal
KECAMATAN PETANG					2,910.97	2,884.31	3,159.00	3,471.14	3,803.51	16,228.93						
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Perkantoran	15 Kegiatan	15 Kegiatan	1,218.58	15 Kegiatan	1,343.19	15 Kegiatan	1,463.76	15 Kegiatan	1,606.39	15 Kegiatan	1,752.28	15 Kegiatan	7,384.20	Kec. Petang
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	2 Paket	2 Paket	510.94	2 Paket	275.53	2 Paket	303.08	2 Paket	333.39	2 Paket	366.73	2 Paket	1,789.68	Kec. Petang
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	81.60	2 jenis	89.76	2 jenis	98.74	2 jenis	108.61	2 jenis	119.47	2 jenis	498.18	Kec. Petang
8	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	12 jenis	340.53	12 jenis	374.58	12 jenis	412.04	12 jenis	453.24	12 jenis	498.56	12 jenis	2,078.94	Kec. Petang
29	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Dokumen Perencanaan	3 Jenis	3 Jenis	10.00	3 Jenis	11.00	3 Jenis	12.10	3 Jenis	13.31	3 Jenis	14.64	3 Jenis	61.05	Kec. Petang
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	43.15	1 Dokumen	47.47	1 Dokumen	52.22	1 Dokumen	57.44	1 Dokumen	63.18	1 Dokumen	263.46	Kec. Petang
38	PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Dokumen Data	2 Jenis	2 Jenis	23.97	2 Jenis	4.36	2 Jenis	4.80	2 Jenis	5.28	2 Jenis	5.81	2 Jenis	44.22	Kec. Petang
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah desa yang dijaga ketertibannya	7 Desa	7 Desa	91.08	7 Desa	88.18	7 Desa	97.00	7 Desa	106.70	7 Desa	117.37	7 Desa	500.33	Kec. Petang
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	2 kegiatan	5 kegiatan	73.76	5 kegiatan	81.13	5 kegiatan	89.24	5 kegiatan	98.17	5 kegiatan	107.99	5 kegiatan	450.29	Kec. Petang
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari besar yang diorganisasi	7 hari besar	7 hari besar	129.17	7 hari besar	142.08	7 hari besar	156.29	7 hari besar	171.92	7 hari besar	189.12	7 hari besar	788.58	Kec. Petang
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya	3 Jenis	1 Jenis	355.35	1 Jenis	390.88	1 Jenis	429.97	1 Jenis	472.97	1 Jenis	520.27	1 Jenis	2,169.44	Kec. Petang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi	7 jenis	7871 kk, 28.720 jiwa	15.95	7 jenis	17.55	7 jenis	19.30	7 jenis	21.23	7 jenis	23.35	7 jenis	97.39	Kec. Petang
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Karang Taruna/PSM yang dibina	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	6.70	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	7.37	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	8.11	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	8.92	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	9.82	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	40.93	Kec. Petang
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan	392 RTM	392 RTM	4.48	392 RTM	4.92	392 RTM	5.42	392 RTM	5.96	392 RTM	6.55	392 RTM	27.33	Kec. Petang
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	JumlahDesayang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7 desa	7 desa	5.72	7 desa	6.29	7 desa	6.92	7 desa	7.61	7 desa	8.37	7 desa	34.92	Kec. Petang

Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
1	URUSAN WAJIB			2,167,349.12	
01	URUSAN PENDIDIKAN			397,020.65	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH			397,020.65	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 Paket	20,520.53	DISDIKPORA
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	2,377.37	DISDIKPORA
	03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Paket	3,825.60	DISDIKPORA
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	370.27	DISDIKPORA
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	1 Paket	9.76	DISDIKPORA
	15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK TK	1 Paket	536.80	DISDIKPORA
	16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	APK SD	1 Paket	353,343.63	DISDIKPORA
	17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	APK SM	1 Paket	10,070.49	DISDIKPORA
	18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Peningkatan profesionalisme dan keterampilan lembaga pendidikan non formal	1 Paket	4,834.91	DISDIKPORA
	20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peningkatan Kualifikasi Guru S.1	1 Paket	1,131.28	DISDIKPORA
02	URUSAN KESEHATAN			338,403.19	
	DINAS KESEHATAN			145,554.78	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung Tupoksi SKPD	1 Paket	9,412.12	DISKES
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	8,847.79	DISKES
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	338.68	DISKES
	15 PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	100%	3,774.12	DISKES
	16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penjangkaran kesehatan anak SD dan setingkat	100%	40,417.91	DISKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	100%	85.23	DISKES
20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan anak balita gizi buruk	100%	526.54	DISKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Cakupan Rumah Sehat	100%	375.02	DISKES
		Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) Sehat	100%		DISKES
22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA+	100%	16,157.75	DISKES
23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kualifikasi pelayanan	100%	5,374.31	DISKES
25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang pelayanan pada puskesmas/BKIA	100%	46,549.17	DISKES
28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase perijinan praktek tenaga kesehatan	100%	37.68	DISKES
29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Angka kematian balita per 1.000 Balita	100%	165.88	DISKES
30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Cakupan lansia mendapat pelayanan kesehatan	100%	1,225.20	DISKES
32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	0	4,049.49	DISKES
36	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Jumlah puskesmas mendapat bahan penunjang medis	6 Kecamatan	7,968.50	DISKES
37	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Jumlah alkes puskesmas yang	13 Puskesmas, 54 Pustu	249.38	DISKES
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)			192,848.41	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	16,740.14	RSUD
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	100%	47,035.16	RSUD
26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	100%	1,873.51	RSUD
40	PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Meningkatnya kemampuan BLUD untuk membiaya operasionalnya secara mandiri		127,199.60	RSUD
03	URUSAN PEKERJAAN UMUM			683,912.41	
	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN			604,127.51	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	4,090.86	DINAS BMP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang	1 Paket	1,716.32	DINAS BMP
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	807.39	DINAS BMP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	07 PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	1 paket	442,667.57	DINAS BMP
	09 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Paket	10.00	DINAS BMP
	15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah ruas jalan dan jembatan yang terbangun	1 Paket	373.25	DINAS BMP
	18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Terpeliharanya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap di Kabupaten Badung	1 Paket	38,990.45	DINAS BMP
	23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Tersedianya prasarana dan sarana kebinamargaan yang memadai	1 Paket	1,127.31	DINAS BMP
	24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	1 Paket	114,344.36	DINAS BMP
	DINAS CIPTA KARYA			79,784.89	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	1,296.59	DCK
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan	1 paket	983.44	DCK
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	1 Paket	805.23	DCK
	09 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 laporan	9.98	DCK
	17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 buku	3.09	DCK
	35 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Tercapainya sarana prasarana air bersih dengan spam untuk perluasan cakupan layanan 80% (30 paket pekerjaan) th 2014	1 Paket	34,635.99	DCK
	37 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Jumlah fasilitas umum yang tertata	1 paket	42,038.98	DCK
	38 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Meningkatnya sistem pengawasan internal keciptakaryaan	1 Paket	11.60	DCK
	04 URUSAN PERUMAHAN			212,133.10	
	DINAS CIPTA KARYA			203,408.82	
	16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	1 Paket	203,408.82	DCK
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			8,724.28	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya pelayanan Administrasi perkkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 Bulan.	1,876.52	DISDAMKAR
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran	12 Bulan	653.86	DISDAMKAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan	98.60	DISDAMKAR
19	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Terlaksananya program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kab.Badung	12 Bulan.	6,085.30	DISDAMKAR
23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terlaksananya program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kab.Badung	12 Bulan	10.00	DISDAMKAR
05	URUSAN PENATAAN RUANG			14,615.50	
	DINAS CIPTA KARYA			13,301.15	
16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Tertatanya ruang di wilayah Kabupaten Badung	1 paket	13,193.55	DCK
17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Terwujudnya pengendalian ruang di Kab. Badung	1 paket	107.60	DCK
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1,314.35	
18	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan	1 Paket	1,314.35	BAPPEDA LITBANG
06	URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN			9,116.43	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			9,116.43	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD	1 Paket	1,037.17	BAPPEDA LITBANG
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	2,470.12	BAPPEDA LITBANG
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	362.23	BAPPEDA LITBANG
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	95%	31.32	BAPPEDA LITBANG
15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data	1 Paket	573.58	BAPPEDA LITBANG
21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	95%	3,934.49	BAPPEDA LITBANG
22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	394.47	BAPPEDA LITBANG
24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	145.24	BAPPEDA LITBANG
26	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	12 Bulan.	83.09	BAPPEDA LITBANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
			5	6		
1	2	3	5	6	7	
	28	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Terbinanya ilmu pengetahuan dan teknologi	12 Bulan.	84.71	BAPPEDA LITBANG
	07	URUSAN PERHUBUNGAN			58,980.73	
		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			58,980.73	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 paket	22,025.82	DISHUBKOMINFO
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	1,034.98	DISHUBKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		384.29	DISHUBKOMINFO
	15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	1 paket	29,198.25	DISHUBKOMINFO
	17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan	1 paket	6,327.40	DISHUBKOMINFO
	23 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan penganggaran SKPD sesuai dengan Rencana	1 paket	9.99	DISHUBKOMINFO
08	URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP			52,423.60	
	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN			49,345.80	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	3,481.00	DKP
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	930.57	DKP
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	195.40	DKP
	15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase penanganan sampah	100%	36,243.94	DKP
	24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	terpeliharanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Badung	100%	8,484.88	DKP
	28 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, Renja, Renstra)	100%	10.00	DKP
	BADAN LINGKUNGAN HIDUP			3,077.81	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	meningkatnya kinerja pelayanan	100%	791.38	BLH
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	247.29	BLH
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	106.18	BLH
	16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	nilai baku mutu kualitas air, udara, dan air laut	20 lokasi	835.61	BLH
	18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	terlaksananya pelestarian sumber daya alam	100%	238.81	BLH
	19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan database lingkungan hidup diKabupaten Badung	1 paket	698.85	BLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	27 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah kelompok masyarakat yang terbina dibidang lingkungan hidup	1 paket	149.69	BLH
	28 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA,RKA)	tersusunnya laporan hasil kinerja SKPD	1 dokumen	10.00	BLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
09	URUSAN PERTANAHAN			910.36	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM			910.36	
	16 PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Tertanganinya permasalahan tanah	100%	892.66	BAG ADM PEM UMUM
	17 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan	4 kasus	17.70	BAG ADM PEM UMUM
10	URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			5,779.02	
	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL			5,779.02	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	12 bulan	1,360.72	DISDUKCAPIL
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	2,965.83	DISDUKCAPIL
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	97.06	DISDUKCAPIL
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Paket	10.00	DISDUKCAPIL
	15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pelayanan kependudukan	12 bulan	1,345.41	DISDUKCAPIL
11	URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2,083.71	
	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2,083.71	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya pelayanan Administrasi perkkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 bulan	389.83	KPP
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan Prasarana aparatur yang memadai	1 paket	79.15	KPP
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	68.49	KPP
	09 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 paket	9.99	KPP
	15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Terwujudnya kualitas keluarga dan institusi masvarakat	1 paket	548.98	KPP
	16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	Terlaksananya pemberdayaan perempuan< PUG dan perlindungan anak	1 paket	797.11	KPP
	17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terbangunnya kesepahaman perlindungan perempuan dan anak	1 paket	154.31	KPP
	18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM	Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender	1 paket	35.86	KPP
12	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			4,237.39	
	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			4,237.39	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung Tupoksi SKPD	1 Paket	931.07	BKBKS
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	454.50	BKBKS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya kegiatan yang berorientasi peningkatan wawasan bidang keluarga berencana	1 kali	17.60	BKBKS
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	101.56	BKBKS
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Program SKPD	3 jenis dokumen	9.45	BKBKS
15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya cakupan jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	100%	1,322.32	BKBKS
16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Meningkatnya cakupan orientasi kesehatan reproduksi bagi remaja	100%	448.66	BKBKS
23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Terwujudnya tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	1 Paket	210.79	BKBKS
26	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT	Terpenuhinya jumlah kader yang secara suka rela berperan aktif melaksanakan /mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat desa/ kelurahan.	1 Paket	132.42	BKBKS
31	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Cakupan wilayah yang mendapatkan pembinaan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS secara berkelanjutan	1 Paket	609.01	BKBKS
13	URUSAN WAJIB SOSIAL			5,310.50	
	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA			5,310.50	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tuboksi SKPD	1 paket	1,001.67	DISOSNAKER
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	790.34	DISOSNAKER
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dengan kualitas yang baik	4 Hari besar nasional	2,017.67	DISOSNAKER
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	153.50	DISOSNAKER
08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Peningkatan Kualitas Bursa Kerja	1 Paket	42.20	DISOSNAKER
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD	1 Paket	9.80	DISOSNAKER
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Peningkatan kemandirian Fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya	1 Paket	257.32	DISOSNAKER
16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Peningkatan UEP dan RTM	1 Paket	774.07	DISOSNAKER
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 Paket	263.93	DISOSNAKER
14	URUSAN KETENAGAKERJAAN			4,347.88	
	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA			4,347.88	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100%	3,136.38	DISOSNAKER
16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Terkendalinya angka pengangguran	1 Paket	494.80	DISOSNAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1 Paket	716.69	DISOSNAKER
	15 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			4,643.03	
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN			4,643.03	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 bulan	929.00	DISKOPERINDAG
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang	12 bulan	1,016.79	DISKOPERINDAG
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	12 bulan	147.17	DISKOPERINDAG
	15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF	Meningkatnya produktifitas, kualitas, kuantitas, pemasaran, pendapatan dan daya saing bagi UMKM	3 koperasi	122.06	DISKOPERINDAG
	17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap hasil produk jiwa kewirausahaan serta pemahaman terhadap peraturan yang berlaku bagi UKM	12 bulan	1,153.92	DISKOPERINDAG
	18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Terwujudnya koperasi yang sehat dan berkualitas	12 bulan	971.38	DISKOPERINDAG
	19 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen yang disusun perencanaan	12 bulan	9.99	DISKOPERINDAG
	21 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/ INFORMASI	Tersedianya buku profil dan buku laporan kegiatan SKPD	62 buku	292.72	DISKOPERINDAG
	16 URUSAN PENANAMAN MODAL			52.57	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			52.57	
	17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH	Tersusunnya buku informasi produk unggulan daerah	6 Kecamatan	32.44	BAG. PEREKONOMIAN
	18 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	6 Kecamatan	20.13	BAG. PEREKONOMIAN
	17 URUSAN KEBUDAYAAN			26,066.38	
	DINAS KEBUDAYAAN			26,066.38	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 Paket	1,951.66	KEBUDAYAAN
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	570.42	KEBUDAYAAN
	03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	1 paket	14.95	KEBUDAYAAN
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	138.57	KEBUDAYAAN
	09 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	9.29	KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan adat dan budaya Bali	1 paket	22,553.66	KEBUDAYAAN
16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Terinventarisasinya produk budaya masyarakat melalui Museum Yadnya	1 paket	827.84	KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
18	URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			8,997.77	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH			8,997.77	
16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Meningkatnya peran serta pemuda dalam penyebaran nilai-nilai kebangsaan dan kepeloporan	1 Paket	796.39	DISDIKORA
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam olah raga	1 Paket	8,201.37	DISDIKORA
19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik			8,644.37	
	Satuan Polisi Pamong Praja			3,107.90	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12 bln	971.33	SATPOLPP
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	307.64	SATPOLPP
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkat disiplin aparatur dalam menjalankan tugas dan mengenakan kelengkapan pakaian serta atribut	100%	307.67	SATPOLPP
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Keterampilan dan wawasan serta taktis dan teknis anggota satpol. PP	100%	79.14	SATPOLPP
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	102.82	SATPOLPP
08	PROGRAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	Tersedianya informasi dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di	1 paket	6.95	SATPOLPP
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan perencanaan dan penqanqqaran	1 paket	9.88	SATPOLPP
15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya situasi, kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di kabupaten Badung	100%	321.58	SATPOLPP
16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANKAMTRIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak kriminal melalui penegakan Perda dan Perbup	100%	1,000.89	SATPOLPP
	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas			1,380.57	KESBANG LINMAS
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 paket	616.70	KESBANG LINMAS
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	1 paket	133.32	KESBANG LINMAS
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia	1 paket	37.99	KESBANG LINMAS
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	81.35	KESBANG LINMAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten	1 paket	114.85	KESBANG LINMAS
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	1 paket	170.79	KESBANG LINMAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam berpolitik	1 paket	75.65	KESBANG LINMAS
37	PROGRAM Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 paket	149.93	KESBANG LINMAS
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			4,155.90	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	1,176.51	BPBD
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	100 %	482.45	BPBD
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	135.39	BPBD
34	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PERINGATAN DINI	jumlah desa/kelurahan tangguh bencana, sekolah aman bencana dan pusat pemerintahan siaga bencana yang terbentuk	100 %	10.66	BPBD
35	PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Meningkatnya penanganan terhadap korban bencana	100 %	135.82	BPBD
39	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA	Meningkatnya Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana	1 paket	89.76	BPBD
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menghadapi bencana	1 paket	206.54	BPBD
41	PROGRAM KESIAPSIAGAAN			28.38	BPBD
42	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Meningkatnya Penanganan Darurat Kebencanaan	1 paket	1,862.92	BPBD
43	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Terlaksananya pemulihan pasca bencana	100 %	27.47	BPBD
20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PRANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN			262,427.68	
	SEKERTARIAT DAERAH			116,891.80	
	BAGIAN UMUM			73,369.59	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket	49,756.14	BAG. UMUM
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket	12,657.37	BAG. UMUM
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkat disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	1 paket	9,867.52	BAG. UMUM
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	688.56	BAG. UMUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA	Terwujudnya pelayanan kedinasan bagi kepala	1 Paket	400.00	BAG. UMUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL			7,928.15	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	4 Paket	919.46	HUMAS DAN PROTOKOL
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	606.32	HUMAS DAN PROTOKOL
35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Meningkatnya Responsibilitas Pemerintah terhadap berbagai informasi di media massa	12 bulan	950.15	HUMAS DAN PROTOKOL
36	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa	12 Bulan	659.99	HUMAS DAN PROTOKOL
37	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Meningkatnya komunikasi Informasi Dengan Media Massa	12 bulan	4,792.23	HUMAS DAN PROTOKOL
	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET DAERAH			16,877.99	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	12,199.57	BAG. ASSET DAERAH
20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Paket	1,628.46	BAG. ASSET DAERAH
33	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan asset daerah	12 Bulan	849.29	BAG. ASSET DAERAH
34	PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	Terasuransinya gedung - gedung yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kab Badung	1 Paket	2,200.67	BAG. ASSET DAERAH
	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA			3,536.91	
91	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya jumlah Proporsal yang diproses tepat waktu	100%	3,536.91	BAG KESRA
	BAGIAN KEUANGAN			6,601.49	
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pembinaan untuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan	53 SKPD	57.44	BAG.KEUANGAN
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan pelaporan keuangan yang akuntabel	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	235.54	BAG.KEUANGAN
17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/akuntansi pemerintah daerah	12 bulan	6,191.26	BAG.KEUANGAN
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada	1572 SPMUP/GU/TU	117.25	BAG.KEUANGAN
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			752.98	
56	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Meningkatnya sistem administrasi pengelolaan LPD	122 LPD	406.10	BAG.PEREKONOMIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	75 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Tercapainya produktivitas pertanian yang memadai	6 Kecamatan	138.18	BAG.PEREKONOMIA N
	92 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan	6 Kecamatan	104.64	BAG.PEREKONOMIA N

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya Profesionalisme Organisasi KTNA	60 Orang	27.41	BAG.PEREKONOMIA N
	11 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	6 kecamatan	19.38	BAG.PEREKONOMIA N
	12 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi	12 bulan	57.27	BAG.PEREKONOMIA N
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM			317.06	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	25.08	BAG ADM PEM UMUM
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	225.68	BAG ADM PEM UMUM
	16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	24 kunjungan	19.60	BAG ADM PEM UMUM
	27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Tertatanya Daerah Otonomi Baru	6 Lokasi	46.71	BAG ADM PEM UMUM
	BAGIAN HUKUM DAN HAM			1,907.48	
	26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	1,900.38	BAG. HUKUM DAN HAM
	03 PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Hukum	1 Paket	7.11	BAG. HUKUM DAN HAM
	BAGIAN ORGANISASI TATALAKSANA			832.00	
	01 ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	4 Paket	10.00	BAG.ORTAL
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah SKPD yang ditingkatkan sumber daya aparaturnya	53 SKPD	28.74	BAG.ORTAL
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	403.16	BAG.ORTAL
	28 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah SKPD yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	6 SKPD	359.18	BAG.ORTAL
	39 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Jumlah SKPD yang ditingkatkan kualitas pelayanan minimal	16 SKPD/Unit Kerja	30.92	BAG.ORTAL
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			4,768.14	
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	53 SKPD	214.98	BAG. ADM PEMBANGUNAN
	16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	6 Kecamatan	298.82	BAG. ADM PEMBANGUNAN
	20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	53 SKPD	4,242.77	BAG. ADM PEMBANGUNAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
89	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelaksanaan operasional administrasi pembangunan	100 %	11.57	BAG. ADM PEMBANGUNAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	SEKRETARIAT DPRD			65,813.25	
01	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	3,735.58	SEKWAN
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	16,270.40	SEKWAN
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya dokumen pelaporan dan capaian kinerja	1 paket	163.18	SEKWAN
15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	45,405.18	SEKWAN
26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	Tertatanya Peraturan Perundang - Undangan	100%	238.92	SEKWAN
	INSPEKTORAT			3,943.02	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	771.33	INSPEKTORAT
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	295.46	INSPEKTORAT
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Terlaksananya TOT dan	1 Paket	27.43	INSPEKTORAT
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Tersedianya honor pelaksana kegiatan	1 Paket	202.80	INSPEKTORAT
09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	3 Dokumen	8.38	INSPEKTORAT
20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terlaksananya pemeriksaan yang komprehensif terhadap 5 aspek pemeriksaan	12 Obrik	1,923.71	INSPEKTORAT
21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Terlaksananya pelatihan tenaga tenaga pemeriksa dan pengawas	1 Paket	37.88	INSPEKTORAT
22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Terlaksananya Reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, sehingga terjamin adanya pelaksanaan tertib administrasi keuangan	100%	676.02	INSPEKTORAT
	DINAS PENDAPATAN / PASEDAHAN AGUNG			14,325.12	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 Bulan	2,180.98	DISPENDA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 Bulan	816.64	DISPENDA
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan	12 Bulan	187.96	DISPENDA
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Meningkatnya Subak Abian/yeh di Kab. Badung yang memiliki Awig-Awig	12 Bulan	2,212.18	DISPENDA
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12 Bulan	10.00	DISPENDA
17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	12 Bulan	8,917.35	DISPENDA
	KECAMATAN KUTA			5,075.53	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1,410.73	KEC KUTA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	1,074.85	KEC KUTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	87.25	KEC KUTA
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1,530.83	KEC KUTA
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9.45	KEC KUTA
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	1 paket	35.49	KEC KUTA
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3.10	KEC KUTA
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 kelurahan	25.71	KEC KUTA
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	66.77	KEC KUTA
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	44.40	KEC KUTA
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	8 hari besar	109.18	KEC KUTA
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	410.55	KEC KUTA
85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1867 KK, 4284 KTP	56.30	KEC KUTA
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 kegiatan	4.57	KEC KUTA
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	7.54	KEC KUTA
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	5 kelurahan	3.34	KEC KUTA
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	5 kelurahan	4.71	KEC KUTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
06	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Terlaksananya penataan bangunan / gedung kantor	2 unit	190.78	KEC KUTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	KECAMATAN KUTA UTARA			4,133.89	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,205.74	KEC KUTA UTARA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	402.77	KEC KUTA UTARA
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	84.98	KEC KUTA UTARA
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1,544.62	KEC KUTA UTARA
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra	1 paket	9.54	KEC KUTA UTARA
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	6 kali	28.64	KEC KUTA UTARA
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3.27	KEC KUTA UTARA
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	22.10	KEC KUTA UTARA
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	120.61	KEC KUTA UTARA
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan promosi kesehatan dari pemberdayaan masyarakat	1 paket	72.87	KEC KUTA UTARA
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terperingatinya hari besar nasional	8 peringatan	109.31	KEC KUTA UTARA
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	390.06	KEC KUTA UTARA
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	85.14	KEC KUTA UTARA
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	5.01	KEC KUTA UTARA
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	8.76	KEC KUTA UTARA
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	4.42	KEC KUTA UTARA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Terlaksananya penataan bangunan / gedung kantor	1 paket	36.04	KEC KUTA UTARA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	KECAMATAN KUTA SELATAN			4,161.70	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	100 %	917.19	KEC KUTA SELATAN
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	697.51	KEC KUTA SELATAN
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	87.21	KEC KUTA SELATAN
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	8 Kegiatan	1,559.24	KEC KUTA SELATAN
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9.99	KEC KUTA SELATAN
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	1 paket	31.65	KEC KUTA SELATAN
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3.37	KEC KUTA SELATAN
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	6 desa /kelurahan	27.28	KEC KUTA SELATAN
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	105.11	KEC KUTA SELATAN
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	67.27	KEC KUTA SELATAN
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	7 hari besar	108.37	KEC KUTA SELATAN
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	363.62	KEC KUTA SELATAN
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	94.82	KEC KUTA SELATAN
86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	4.34	KEC KUTA SELATAN
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	46.01	KEC KUTA SELATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	4.50	KEC KUTA SELATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	99 PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	6 desa /kelurahan	34.22	KEC KUTA SELATAN
	KECAMATAN MENGWI			5,160.34	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1,270.41	KEC MENGWI
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	1,253.86	KEC MENGWI
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	84.59	KEC MENGWI
	08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1,557.03	KEC MENGWI
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	10.00	KEC MENGWI
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	1 paket	46.50	KEC MENGWI
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3.17	KEC MENGWI
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	25.90	KEC MENGWI
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	171.81	KEC MENGWI
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	81.35	KEC MENGWI
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	1 paket	114.53	KEC MENGWI
	83 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	419.80	KEC MENGWI
	85 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	51.52	KEC MENGWI
	86 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	36.59	KEC MENGWI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	11.32	KEC MENGWI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	6.48	KEC MENGWI
98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	1 paket	6.65	KEC MENGWI
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 paket	8.82	KEC MENGWI
KECAMATAN ABIANSEMAL				4,722.71	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1,151.64	KEC ABIANSEMAL
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	992.79	KEC ABIANSEMAL
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	92.39	KEC ABIANSEMAL
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1,556.42	KEC ABIANSEMAL
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9.99	KEC ABIANSEMAL
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	1 paket	28.73	KEC ABIANSEMAL
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3.08	KEC ABIANSEMAL
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	32.00	KEC ABIANSEMAL
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	144.07	KEC ABIANSEMAL
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	69.63	KEC ABIANSEMAL
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	1 paket	103.33	KEC ABIANSEMAL
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	446.13	KEC ABIANSEMAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	62.92	KEC ABIANSEMAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	4.31	KEC ABIANSEMAL
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	10.63	KEC ABIANSEMAL
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	5.06	KEC ABIANSEMAL
98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	1 paket	4.65	KEC ABIANSEMAL
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 paket	4.96	KEC ABIANSEMAL
KECAMATAN PETANG				4,489.34	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1,467.75	KEC PETANG
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	525.21	KEC PETANG
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	73.92	KEC PETANG
08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1,547.67	KEC PETANG
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9.87	KEC PETANG
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	1 paket	36.78	KEC PETANG
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3.97	KEC PETANG
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	36.20	KEC PETANG
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	124.17	KEC PETANG
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	65.99	KEC PETANG
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	1 paket	103.77	KEC PETANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	408.64	KEC PETANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	54.20	KEC PETANG
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	9.94	KEC PETANG
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	11.04	KEC PETANG
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	2.78	KEC PETANG
98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	1 paket	4.58	KEC PETANG
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 paket	2.86	KEC PETANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT				7,777.34	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	870.68	BKD DIKLAT
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Server, 3 Printer, 1 laptop, 9 UPS	1,113.07	BKD DIKLAT
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	500 orang	82.05	BKD DIKLAT
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di Pemkab. Baduna	10 orang	4,327.61	BKD DIKLAT
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai akuntabilitas kinerja	1 LS	122.89	BKD DIKLAT
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	9.99	BKD DIKLAT
69	PROGRAM PENINGKATAN SDM	Persentase urusan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	12 bulan	1,208.73	BKD DIKLAT
96	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase update database kepegawaian	1 LS	42.31	BKD DIKLAT
KELURAHAN KUTA				1,766.46	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	931.49	KEL KUTA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	7 kegiatan	327.39	KEL KUTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	65	63.74	KEL KUTA
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10.00	KEL KUTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 Usulan	19.32	KEL KUTA
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data /informasi statistik daerah	2 Dokumen	43.23	KEL KUTA
73	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Jumlah lokasi fogging masal	2 kegiatan	42.36	KEL KUTA
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	8 kali	73.86	KEL KUTA
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	13 Lingkungan, 4 Duta	91.20	KEL KUTA
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1Kali	3.45	KEL KUTA
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5.00	KEL KUTA
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	13 Lingkungan	148.09	KEL KUTA
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	13 Lingkungan	7.34	KEL KUTA
KELURAHAN LEGIAN				1,197.78	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	425.32	KEL LEGIAN
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	215.87	KEL LEGIAN
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	62.85	KEL LEGIAN
08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Jenis pengembangan Nilai Budaya	2 Jenis	162.89	KEL LEGIAN
09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10.00	KEL LEGIAN
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	15.33	KEL LEGIAN
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi Statistik Daerah	2 Jenis	15.63	KEL LEGIAN
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	3 Lingkungan	33.64	KEL LEGIAN
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	91.86	KEL LEGIAN
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	2 Jenis	2.42	KEL LEGIAN
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 Hari Basar	5.00	KEL LEGIAN
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	3 Klingkungan	150.34	KEL LEGIAN
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	7 Jenis	6.63	KEL LEGIAN
KELURAHAN SEMINYAK				1,131.21	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	436.91	KEL SEMINYAK
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	270.68	KEL SEMINYAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	66.90	KEL SEMINYAK
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terlaksannya perencanaan dan penganggaran SKPD yang baik	3 dokumen	10.00	KEL SEMINYAK
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksannya perencanaan pembangunan daerah yang baik	1 paket	17.23	KEL SEMINYAK
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 dokumen	13.36	KEL SEMINYAK
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	6 lingkungan	59.66	KEL SEMINYAK
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 paket	86.99	KEL SEMINYAK
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 Jenis	3.33	KEL SEMINYAK
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5.00	KEL SEMINYAK
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	2 lingkungan	146.23	KEL SEMINYAK
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	2 Lingkungan	14.93	KEL SEMINYAK
KELURAHAN TUBAN				1,352.69	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	546.43	KEL TUBAN
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	300.76	KEL TUBAN
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	62.10	KEL TUBAN
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10.00	KEL TUBAN
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Jenis	16.90	KEL TUBAN
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	1 dokumen	21.91	KEL TUBAN
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	4 Lingkungan	35.18	KEL TUBAN
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	169.78	KEL TUBAN
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5.00	KEL TUBAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	4 Lingkungan	154.29	KEL TUBAN
94	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	30.34	KEL TUBAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	KELURAHAN KEDONGANAN			1,177.46	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	684.56	KEL KEDONGANAN
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan	2 paket	86.65	KEL KEDONGANAN
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	62.85	KEL KEDONGANAN
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9.96	KEL KEDONGANAN
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Jenis	16.55	KEL KEDONGANAN
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	18.73	KEL KEDONGANAN
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	6 Lingkungan	33.61	KEL KEDONGANAN
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	95.79	KEL KEDONGANAN
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	6.06	KEL KEDONGANAN
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5.00	KEL KEDONGANAN
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	6 Lingkungan	144.47	KEL KEDONGANAN
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	13.24	KEL KEDONGANAN
	KELURAHAN KEROBOKAN			1,301.25	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	597.81	KEL KEROBOKAN
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	209.67	KEL KEROBOKAN
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	69.10	KEL KEROBOKAN
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10.00	KEL KEROBOKAN
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	19.61	KEL KEROBOKAN
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	25.32	KEL KEROBOKAN
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	10 lingkungan	33.76	KEL KEROBOKAN
79	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	96.23	KEL KEROBOKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
81	PROGRAM PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	10 Lingkungan	44.65	KEL KEROBOKAN
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5.00	KEL KEROBOKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	158.32	KEL KEROBOKAN
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	31.77	KEL KEROBOKAN
KELURAHAN KEROBOKAN KAJA				1,624.06	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	1,078.43	KEL KEROBOKAN KAJA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	73.22	KEL KEROBOKAN KAJA
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	64.70	KEL KEROBOKAN KAJA
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10.00	KEL KEROBOKAN KAJA
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	19.26	KEL KEROBOKAN KAJA
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	44.18	KEL KEROBOKAN KAJA
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	23 lingkungan	34.84	KEL KEROBOKAN KAJA
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	116.73	KEL KEROBOKAN KAJA
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5.00	KEL KEROBOKAN KAJA
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	154.46	KEL KEROBOKAN KAJA
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	23.25	KEL KEROBOKAN KAJA
KELURAHAN KEROBOKAN KELOD				1,322.64	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	729.00	KEL KEROBOKAN KELOD
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	158.17	KEL KEROBOKAN KELOD
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	50.35	KEL KEROBOKAN KELOD
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10.00	KEL KEROBOKAN KELOD
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	16.97	KEL KEROBOKAN KELOD
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	32.89	KEL KEROBOKAN KELOD
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	13 lingkungan	33.62	KEL KEROBOKAN KELOD
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	105.27	KEL KEROBOKAN KELOD
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	13 lingkungan	3.75	KEL KEROBOKAN KELOD
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 Paket	5.00	KEL KEROBOKAN KELOD
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	154.85	KEL KEROBOKAN KELOD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	22.76	KEL KEROBOKAN KELOD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	KELURAHAN BENOA			1,625.95	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	1,020.63	KEL BENOA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	126.41	KEL BENOA
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	65.83	KEL BENOA
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9.94	KEL BENOA
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	18.07	KEL BENOA
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	81.32	KEL BENOA
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33.68	KEL BENOA
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	101.08	KEL BENOA
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar nasional	5.00	KEL BENOA
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 Lingkungan	145.98	KEL BENOA
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	18.00	KEL BENOA
	KELURAHAN TANJUNG BENOA			1,779.48	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	699.00	KEL TANJUNG BENOA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	436.55	KEL TANJUNG BENOA
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	75.23	KEL TANJUNG BENOA
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9.00	KEL TANJUNG BENOA
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	17.42	KEL TANJUNG BENOA
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	18.46	KEL TANJUNG BENOA
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33.61	KEL TANJUNG BENOA
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	99.42	KEL TANJUNG BENOA
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5.00	KEL TANJUNG BENOA
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	6 Lingkungan	151.94	KEL TANJUNG BENOA
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	6 Lingkungan	36.87	KEL TANJUNG BENOA
06	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	jumlah bangunan/gedung yang ditata	1 paket	196.99	KEL TANJUNG BENOA
	KELURAHAN JIMBARAN			1,476.36	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	899.09	KEL JIMBARAN
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	121.96	KEL JIMBARAN
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	61.63	KEL JIMBARAN
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9.53	KEL JIMBARAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	16.53	KEL JIMBARAN
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	34.15	KEL JIMBARAN
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33.63	KEL JIMBARAN
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	126.38	KEL JIMBARAN
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5.00	KEL JIMBARAN
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	142.92	KEL JIMBARAN
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	25.54	KEL JIMBARAN
	KELURAHAN SEMPIDI			1,321.21	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	645.89	KEL SEMPIDI
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	215.61	KEL SEMPIDI
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	66.91	KEL SEMPIDI
	08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 kegiatan	27.48	KEL SEMPIDI
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10.00	KEL SEMPIDI
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	32.24	KEL SEMPIDI
	38 PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	16.09	KEL SEMPIDI
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	34.36	KEL SEMPIDI
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	114.82	KEL SEMPIDI
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5.00	KEL SEMPIDI
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	10 lingkungan	146.72	KEL SEMPIDI
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	6.08	KEL SEMPIDI
	KELURAHAN LUKLUK			1,324.57	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	671.53	KEL LUKLUK
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	206.20	KEL LUKLUK
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	65.52	KEL LUKLUK
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10.00	KEL LUKLUK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	18.14	KEL LUKLUK
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	25.51	KEL LUKLUK
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33.73	KEL LUKLUK
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	121.79	KEL LUKLUK
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5.00	KEL LUKLUK
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	9 lingkungan	160.57	KEL LUKLUK
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	6.58	KEL LUKLUK
KELURAHAN KAPAL				1,904.56	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	965.01	KEL KAPAL
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	221.66	KEL KAPAL
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	77.05	KEL KAPAL
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10.00	KEL KAPAL
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	16.52	KEL KAPAL
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	31.36	KEL KAPAL
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	16 Lingkungan	33.86	KEL KAPAL
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	175.96	KEL KAPAL
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	16 lingkungan	11.94	KEL KAPAL
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5.00	KEL KAPAL
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 lingkungan	144.91	KEL KAPAL
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	7.00	KEL KAPAL
05	PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	1 paket	204.30	KEL KAPAL
KELURAHAN ABIANBASE				1,376.97	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	803.07	KEL ABIANBASE
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	133.56	KEL ABIANBASE
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	67.68	KEL ABIANBASE
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	9.97	KEL ABIANBASE

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	18.41	KEL ABIANBASE
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	18.35	KEL ABIANBASE
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	13 lingkungan	33.91	KEL ABIANBASE
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	124.68	KEL ABIANBASE
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	16 lingkungan	7.40	KEL ABIANBASE
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5.00	KEL ABIANBASE
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 lingkungan	150.78	KEL ABIANBASE
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	4.16	KEL ABIANBASE
KELURAHAN SADING				1,263.55	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	580.25	KEL SADING
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	211.48	KEL SADING
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	61.92	KEL SADING
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 Paket	43.46	KEL SADING
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	9.95	KEL SADING
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	12.62	KEL SADING
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	20.30	KEL SADING
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	34.06	KEL SADING
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	123.65	KEL SADING
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5.00	KEL SADING
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 lingkungan	155.58	KEL SADING
94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	5.26	KEL SADING
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU				2,987.44	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah izin yang diterbitkan	100%	1,560.54	BPPT
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang	1 paket	1,194.38	BPPT
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	93.34	BPPT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
24	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Jumlah pengaduan yang tertangani	100%	47.32	BPPT
37	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Tersedianya informasi perizinan dan non perizinan	1 paket	81.94	BPPT
09	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	tersusunnya laporan hasil kinerja SKPD	1 paket	9.93	BPPT
21	URUSAN KETAHANAN PANGAN			26,967.17	
01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN			26,967.17	
16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Produktivitas bahan pangan Utama (padi)	6 Kecamatan	26,967.17	DISTANBUNHUT
22	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5,234.88	
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMDES			5,234.88	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	12 bulan	747.92	BPMD DAN PEMDES
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	444.27	BPMD DAN PEMDES
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	116.30	BPMD DAN PEMDES
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 bulan	10.00	BPMD DAN PEMDES
16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Terwujudnya sistem pengelolaan Pasar Desa/Adat dan BUMDA sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 bulan	143.65	BPMD DAN PEMDES
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 bulan	1,268.70	BPMD DAN PEMDES
19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat di	12 bulan	1,983.26	BPMD DAN PEMDES
23	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Tersalurnya beras untuk RTS-PM Raskin di Desa/Kelurahan	9043 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin	171.11	BPMD DAN PEMDES
24	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	12 bulan	198.92	BPMD DAN PEMDES
25	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	12 bulan	150.74	BPMD DAN PEMDES
24	URUSAN KEARSIPAN			4,794.57	
	KANTOR ARSIP DAERAH			4,794.57	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	12 bulan	646.78	K. ARSIP DAERAH
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	3,289.77	K. ARSIP DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya tatakelola kearsipan di kab. Badung	129 orang	68.30	K. ARSIP DAERAH
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	68.30	K. ARSIP DAERAH
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 BULAN	10.00	K. ARSIP DAERAH
15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Terwujudnya penataan arsip unit kerja peserta lomba	12 bulan	158.14	K. ARSIP DAERAH
16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Terselamatnya arsip yang mempunyai nilai guna dan arsip statis	12 bulan	447.47	K. ARSIP DAERAH
17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Tertata dan terpeliharanya arsip SKPD pada KAD Badung	12 bulan	67.28	K. ARSIP DAERAH
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Terwujudnya penataan arsip di lingkungan Pemkab Badung	12 bulan	38.54	K. ARSIP DAERAH
25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			28,310.87	
	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			28,310.87	
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan pelayanan komunikasi, informasi media komunikasi, informasi media massa	31 %	28,310.87	
26	URUSAN PERPUSTAKAAN			1,935.35	
	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH			1,935.35	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 bulan	555.01	K. PERPUSTAKAAN D.
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang	12 bulan	339.83	K. PERPUSTAKAAN D.

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
			5	6		
1	2	3	5	6	7	
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya pengetahuan petugas perpustakaan Sekolah di bidang layanan pustaka	12 bulan	43.22	K. PERPUSTAKAAN D.
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	69.20	K. PERPUSTAKAAN D.
	19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya jumlah kunjungan ke Perpustakaan	12 bulan	918.09	K. PERPUSTAKAAN D.
	20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 bulan	10.00	K. PERPUSTAKAAN D.
2		URUSAN PILIHAN			50,190.27	
01		URUSAN PERTANIAN			25,880.43	
	01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN			14,429.22	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terealisasinya Pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien	12 Bulan	2,645.72	DISTANBUNHUT
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terealisasinya sarana/prasarana pendukung kinerja aparatur	12 bulan	1,186.29	DISTANBUNHUT
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Terlaksananya dukungan kegiatan SKPD	12 bulan	216.83	DISTANBUNHUT
	15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Terwujudnya Pembinaan dan pelatihan keterampilan	12 Bulan	190.09	DISTANBUNHUT
	17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Terseleenggaranya promosi pemasaran hasil pertanian/perkebunan	6 Kecamatan	1,267.94	DISTANBUNHUT
	19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Terwujudnya peningkatan luas tanam padi	100000 Ha	2,085.60	DISTANBUNHUT
	20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh	63 Penyuluh	6,611.31	DISTANBUNHUT
	26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tersedianya pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatan	3 Jenis	7.69	DISTANBUNHUT
	27	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Terwujudnya Pengembangan agribisnis	4 Kecamatan	18.21	DISTANBUNHUT
	28	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	Tersedianya data pola harapan ketersediaan pangan di kabupaten	3 Jenis	199.54	DISTANBUNHUT
	02	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN			11,451.21	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun anggaran	2,090.96	DISNAKANLUT
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang operasional kantor	1 SKPD	2,035.52	DISNAKANLUT
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 tahun anggaran	188.00	DISNAKANLUT
	21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah populasi ternak yang tertangani dari serangan penyakit	1 tahun anggaran	2,564.24	DISNAKANLUT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
			5	6		
1	2	3	5	6	7	
	22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Jumlah populasi dan produksi hasil peternakan	6 kecamatan	3,993.14	DISNAKANLUT
	23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Peningkatan jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan	1 paket	259.33	DISNAKANLUT
	26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Tahun anggaran	10.00	DISNAKANLUT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
			5	6		
1	2	3	5	6	7	
	30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PETERNAKAN	Tersedianya data/informasi peternakan	1 paket	213.41	DISNAKANLUT
	31	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Tersedianya bahan pangan ternak yang bermutu	1 Tahun Anggaran	96.62	DISNAKANLUT
	02	URUSAN KEHUTANAN			118.77	
	01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN			118.77	
	16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	6 Kecamatan	109.58	DISTANBUNHUT
	17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Terciptanya Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	1767.87 Ha	5.11	DISTANBUNHUT
	19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	Jumlah Desa yang dibina, dimonitor dan diawasi peredaran hasil	10 Desa	4.09	DISTANBUNHUT
	03	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			661.59	
		DINAS CIPTA KARYA			661.59	
	15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Tercapainya Upaya Pembinaan bidang SDA	1 paket	146.13	DCK
	16	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN	Tertibnya Kegiatan Pertambangan rakyat yang diusahakan oleh masyarakat	1 Paket	505.84	DCK
	17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Tercapainya Upaya Pembinaan bidang energi	1 Paket	9.62	DCK
	04	URUSAN PARIWISATA			16,090.87	
		DINAS PARIWISATA			16,090.87	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	1,774.85	DIPARDA
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang	100%	1,372.35	DIPARDA
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan	100%	153.25	DIPARDA
	15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN	Meningkatnya promosi	100%	10,277.54	DIPARDA
	16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Berkembangnya Destinasi Pariwisata	1 paket	2,025.41	DIPARDA
	17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Berkembangnya Kemitraan dalam bidang kepariwisataan	1 paket	427.35	DIPARDA
	18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	Meningkatnya kualitas Produk wisata	1 paket	50.13	DIPARDA
	19	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, Renja, Renstra)	100%	10.00	DIPARDA
	05	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			5,496.43	
	02	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN			5,496.43	
	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Peningkatan produksi hasil perikanan laut	2 Kelompok	69.02	DISNAKANLUT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	Peningkatan kelompok masyarakat pengawas pemanfaatan sumberdaya	1 tahun anggaran	46.43	DISNAKANLUT
19	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA	Terlaksananya Peringatan Hari Nusantara	4 kecamatan	3.44	DISNAKANLUT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	peningkatan produksi budidaya perikanan	1 Paket	443.10	DISNAKANLUT
	21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap	1 Paket	4,805.99	DISNAKANLUT
	23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Peningkatan produksi hasil pengolahan komoditi perikanan	1 Paket	4.15	DISNAKANLUT
	29 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah tenaga penyuluh dan petugas peternakan, perikanan dan kelautan yang meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan teknis di bidang peternakan dan perikanan	1 tahun anggaran	26.79	DISNAKANLUT
	30 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Tersedianya data/informasi perikanan dan kelautan	1 Paket	92.41	DISNAKANLUT
	34 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Hasil Olahan Perikanan	1 Paket	5.08	DISNAKANLUT
06	URUSAN PERDAGANGAN			1,457.17	
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			1,457.17	
	15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Terwujudnya perdagangan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen	12 bulan	438.23	DISKOPERINDAG
	18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan proses perijinan dan Peningkatan Promosi	12 bulan	1,018.94	DISKOPERINDAG
07	URUSAN PERINDUSTRIAN			485.01	
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			485.01	
	16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Untuk menumbuh kembangkan produktifitas dan kualitas kerajinan serta meningkatkan perekonomian kerakyatan melalui industri kecil kerajinan rumah tangga dan tersedianya data yang muktahir dan akurat	12 bulan	329.16	DISKOPERINDAG
	17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Terbangunnya gerakan nasional penerapan GKM melalui percepatan peningkatan mutu dan produktifitas	12 bulan	155.85	DISKOPERINDAG
JUMLAH				2,217,539.39	

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	URUSAN WAJIB															
1.1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
01	URUSAN PENDIDIKAN				355,209.67		386,831.42		449,180.42		501,247.23		565,134.36		2,232,868.21	Disdikpora
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				355,209.67		386,831.42		449,180.42		501,247.23		565,134.36		2,232,868.21	Disdikpora
	15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase warga Kab. Badung usia 1-6 Tahun berhak mendapat pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan	100%	100%	6,095.36	100%	5,246.09	100%	5,457.27	100%	785.18	100%	14,477.19	100%	32,061.09	Disdikpora
	16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Persentase warga Kab. Badung usia 7-15 Tahun berhak mendapat pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan	100%	100%	229,495.04	100%	363,986.70	100%	435,505.45	100%	491,864.39	100%	541,646.03	100%	2,041,483.28	Disdikpora
		Anaka Lulusan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disdikpora
		Anaka Lulusan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disdikpora
	18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyertaan Paket C	60%	80%	573.24	85%	4,364.27	90%	706.86	95%	775.94	100%	852.54	100%	3,552.27	Disdikpora
		Pengelola pendidikan non formal yang terlatih	60%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		Disdikpora
		Persentase warga Kab. Badung buta aksara (nir aksara) usia >15 tahun mampu membaca, menulis dan berhitung sesuai dengan standar nasional pendidikan														
	20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	47%	55%	4,282.03	60%	2,939.37	65%	3,227.85	70%	3,538.71	75%	3,875.61	75%	17,863.57	Disdikpora
	21 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	-	271 sekolah	114,764.00	271 sekolah	10,295.00	271 sekolah	4,283.00	271 sekolah	4,283.00	271 sekolah	4,283.00	271 sekolah	137,908.00	Disdikpora
02	URUSAN KESEHATAN				330,465.29		447,733.63		486,262.71		545,723.80		474,853.31		2,277,967.03	Diskes
	DINAS KESEHATAN				184,053.15		240,233.63		262,362.71		255,223.80		263,553.31		1,198,354.89	Diskes
	15 PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	78,70%	100%	3,777.50	100%	4,042.94	100%	4,045.34	100%	4,047.04	100%	4,049.54	100%	19,962.37	Diskes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kepesertaan JKN	70,97%	80%	103,377.12	90%	150,159.86	100%	166,329.70	100%	185,959.49	100%	201,044.71	100%	806,614.58	Diskes
		Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46,15%	46,15 %		46,15%	46,66%		46,66%		52,94%		52,95		52,95	Diskes
		Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap	50%	50%		50%	66,67%		100%		100%		100%		100%	Diskes
		Persentase Desa Siaga Aktif purnama dan mandiri	5%	25%		35%	45%		50%		55%		55%		55%	Diskes
		Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	80,16 %	82%		83%	84%		85%		86%		86%		86%	Diskes
		Prosentase siswa sehat	85%	90%		92%	94%		96%		96%		96%		96%	Diskes
		Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	62,70%	100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%	Diskes
		Cakupan penjangkaran pendidikan dasar	100%	100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%	Diskes
		Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0%	100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%	Diskes
		Cakupan pelayanan higiene sanitasi pangan pada anak di satuan pendidikan dasar	75%	100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%	Diskes
17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	85%	90%	88.95	95%	97.76	97%	106.59	100%	115.95	100%	126.25	100%	535.50	Diskes
20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase Kekurangan gizi pada balita	12,5% (Riskasdas)	12,3%	1,295.02	12,1%	487.19	11,0%	553.02	10,0%	614.07	10,00%	614.07	10,00%	2,335.63	Diskes
21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase Kekurangan gizi pada balita Persentase desa yang melaksanakan STBM	20,97%	58,25%	546.29	62,35%	637.84	65,40%	679.13	68,12%	724.54	68,12%	774.49	68,12%	3,362.29	Diskes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Angka Kematian Demam Berdarah Denque (DBD)	0.27%	0.25%	17,744.74	0.24%	18,481.03	0.23%	20,356.12	0.22%	22,439.03	0.22%	24,237.58	0.22%	103,258.49	Diskes
		Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	25%	35%		40%		45%		50%		50%				Diskes
		Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	24 Jam	21 Jam		17 Jam		14 Jam		12 Jam		12 Jam		12 Jam		Diskes
		Cakupan penganan penderita hipertensi	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
		Cakupan penanganan penderita diabetes	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
		Cakupan penemuan penderita TB Paru	52,73%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
		Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	87,82%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Diskes	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	0.00	100,0%	3,743.27	100,0%	2,859.54	100,0%	3,193.99	100,0%	4,989.89	100,0%	3,618.72	100,0%	18,405.41	Diskes
25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 54, Puskesmas 13 dan RS 2	Pustu 54, Puskesmas 13 dan RS 3	42,965.00	Pustu 58, Puskesmas 15 dan RS 3	53,342.67	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3	56,439.95	Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3	24,731.00	Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3	16,829.00	Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3	191,297.43	Diskes
		Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	35%	50%	41.90	65%	46.05	75%	54.13	85%	59.54	100%	60.91	100%	262.52	Diskes
29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Angka Kematian Balita (AKABA)	2,99 per 1000 Kelahiran Hidup	3.74 per 1000 Kelahiran Hidup	54.40	3.37 per 1000 Kelahiran Hidup	58.04	2.99 per 1000 Kelahiran Hidup	58.04	2.99 per 1000 Kelahiran Hidup	389.85	2.99 per 1000 Kelahiran Hidup	92.10	2.99 per 1000 Kelahiran Hidup	652.43	Diskes
		Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	80%	81%		82%		83%		84%		85%		85%		Diskes
		Cakupan pelayanan kesehatan balita		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Diskes
30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	50%	54%	1,581.14	56%	1,897.21	58%	2,028.60	60%	2,105.20	60%	2,105.20	60%	8,136.21	Diskes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka Kematian Ibu Melahirkan	99.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	93.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	1,162.20	90.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	1,121.04	87.83 per 100.000 Kelahiran Hidup	968.03	85 per 100.000 Kelahiran Hidup	1,008.12	85 per 100.000 Kelahiran Hidup	1,476.66	85 per 100.000 Kelahiran Hidup	4,739.70	Diskes
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	98,66%	92%	93%	94%	95%	97%								Diskes
		Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	18,2%	25%	30%	35%	40%	50%								Diskes
		Cakupan Deteksi resiko Tinggi Ibu Hamil oleh masyarakat	54,86	56%	58%	60%	61%	62,5%								Diskes
		Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	99%	100%	100%	100%	100%	100%								Diskes
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	95%	100%	100%	100%	100%	100%								Diskes
		Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								Diskes
36	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100%	100%	7,425.65	100%	6,727.10	100%	7,250.07	100%	7,690.08	100%	8,174.09	100%	37,266.99	Diskes
37	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100%	100%	249.98	100%	275.35	100%	300.00	100%	350.00	100%	350.00	100%	1,525.34	Diskes
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					146,412.14		207,500.00		223,900.00		290,500.00		211,300.00		1,079,612.14	RSUD
26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	80%	82%	31,412.14	85%	87,500.00	90%	98,900.00	95%	150,500.00	100%	61,300.00	100%	429,612.14	RSUD
40	PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Indeks Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat	75%	76%	115,000.00	77%	120,000.00	78%	125,000.00	79%	140,000.00	80%	150,000.00	80%	650,000.00	RSUD
		Indeks Kinerja Pelayanan	65%	76%		77%		78%		79%		80%		80%		RSUD
		Indeks Kinerja Keuangan	76.50%	80%		81%		82%		83%		85%		80%		RSUD
03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				825,971.70		1,217,720.04		1,143,484.88		1,280,597.39		1,702,130.16		6,182,604.56	DBMP
	PEKERJAAN UMUM				788,849.17		1,177,537.26		1,100,598.83		1,233,196.53		1,650,194.82		5,964,351.99	DBMP
	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN				395,344.40		826,419.96		714,673.70		808,975.59		1,183,852.28		4,017,640.68	DBMP
07	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	94,5 %	96,75 %	266,859.74	98.00%	309,665.48	99.25%	340,632.02	100.00%	374,695.22	100.00%	412,164.75	100%	1,720,379.03	DBMP
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Perencanaan dan Penqanqqaran SKPD	100%	100%	9.99	100%	10.99	100%	12.09	100%	13.29	100%	14.62	100%	60.98	DBMP
15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah Ruas Jalan dan Jembatan Baru Yang Terbanqun	100%	100%	1,419.40	100%	280,004.89	100%	131,512.34	100%	152,247.28	-	481,135.89	100%	1,045,320.65	DBMP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	94,5 %	96,75 %	33,982.81	98.00%	124,008.04	99.25%	136,408.84	100.00%	150,049.72	100.00%	165,054.70	100%	688,255.87	DBMP
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai	100%	100%	1,179.20	100%	1,455.54	100%	1,601.10	100%	1,761.20	100%	1,937.33	100%	8,268.42	DBMP
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	94,72 %	96%	91,893.26	96,83%	111,275.03	97,89%	104,507.32	98,94%	130,208.86	100.00%	123,545.01	100%	555,355.74	DBMP
DINAS CIPTA KARYA					393,504.76	351,117.30	385,925.13	424,220.94	466,342.53	1,946,711.31						
17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Terpantainya kondisi pantai	1 Paket	1 laporan	3.05	1 laporan	7.00	1 laporan	7.00	1 laporan	7.00	1 laporan	7.00	5 laporan	31.05	DCK
35	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Peningkatan derajat		89.67%	121,791.71	91.67%	128,470.88	93.92%	141,317.97	96.47%	155,449.77	98.60%	170,994.74	98.60%	713,025.08	DCK
37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/ GEDUNG	Peningkatan performance gedung	7 Paket	49%	271,686.16	53%	180,968.39	57%	199,065.23	61%	218,971.75	65%	240,868.92	65%	1,004,391.00	DCK
38	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Meningkatnya sistem pengawasan internal	1 Paket	100%	11.92	100%	15.00	100%	15.00	100%	15.00	100%	15.00	100%	71.92	DCK
PENATAAN RUANG					37,122.54	40,182.78	42,886.05	47,400.86	51,935.35	218,252.57						
DINAS CIPTA KARYA					36,322.54	38,572.78	42,416.05	46,640.86	51,295.35	213,972.57						
01	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Peningkatan fasilitas umum/ publik	1 Paket	16 kegiatan	35,959.34	10 kegiatan	38,152.78	7 kegiatan	41,968.05	6 kegiatan	46,164.86	5 kegiatan	50,781.35	44 kegiatan	211,751.38	DCK
02	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Tertatanya ruang di wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	4 laporan	363.20	4 laporan	420.00	4 laporan	448.00	4 laporan	476.00	4 laporan	514.00	20 laporan	2,221.20	DCK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					800.000	1,610.000	470.000	760.000	640.000	4,280.000						
01	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14.55%	16.36%	800.000	20.00%	1,610.000	23.64%	470.000	27.27%	760.000	30.91%	640.000	30.91%	4,280.000	Bappeda Litbang
04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				217,918.56		202,129.10		222,302.01		244,482.21		268,870.43		1,120,264.74	DCK
DINAS CIPTA KARYA					217,918.56	202,129.10	222,302.01	244,482.21	268,870.43	1,120,264.74						
01	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	1 paket	70.02%	216,811.26	77.51%	199,355.74	85%	219,251.32	92.49%	241,126.45	100%	265,179.09	100%	1,104,872.37	DCK
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	-	100%	103.28	100%	113.61	100%	124.97	100%	137.47	100%	151.22	100%	630.56	DCK
03	PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN	Tercapainya sarana yang memadai	-	100%	1,004.02	100%	2,659.74	100%	2,925.71	100%	3,218.29	100%	3,540.11	100%	14,761.80	DCK
DINAS PEMADAM KEBAKARAN					19,931.20	6,137.75	6,524.32	6,879.49	7,300.34	46,411.13						
4	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Cakupan pelayanan kebakaran	100%	100%	19,931.20	100%	6,137.75	100%	6,524.32	100%	6,879.49	100%	7,300.34	100%	46,411.13	Disdamkar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				1.009.47		1.110.42		1.221.46		1.343.61		1.489.97		6.174.92	Kesbang
	BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS				1.009.47		1.110.42		1.221.46		1.343.61		1.489.97		6.174.92	Kesbang
15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,	100%	100%	282.20	100%	310.42	100%	341.46	100%	375.61	100%	413.17	100%	1.722.87	Kesbang
19	PRGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	keberdayaan masyarakat desa/Kelurahan dalam menjaga ketertiban dan keamanan	31 orang	31 orang	233.03	31 orang	256.34	31 orang	281.97	31 orang	310.17	31 orang	341.18	31 orang	1.422.68	Kesbang
20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100%	100%	164.44	100%	180.88	100%	198.97	100%	218.86	100%	240.75	100%	1.003.89	Kesbang
21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	4 kegiatan	4 kegiatan	112.87	4 kegiatan	124.15	4 kegiatan	136.57	4 kegiatan	150.23	4 kegiatan	165.25	4 kegiatan	689.07	Kesbang
37	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	7 kegiatan	216.93	7 kegiatan	238.63	7 kegiatan	262.49	7 kegiatan	288.74	7 kegiatan	329.61	7 kegiatan	1.336.40	Kesbang
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3.809.16		6.817.08		6.471.39		6.756.13		7.431.75		31.016.38	BPBD
34	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Cakupan Layanan Informasi titik rawan bencana	55%	9.43%	752.99	42.95%	3.751.33	59.80%	3.099.07	79.80%	3.046.58	100%	3.351.24	100%	14.001.21	BPBD
		Cakupan layanan sarana dan prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan														
42	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	100%	3.016.58	100%	3.022.20	100%	3.324.42	100%	3.656.86	100%	4.022.54	100%	16.773.46	BPBD
43	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100%	100%	39.59	100%	43.55	100%	47.91	100%	52.70	100%	57.97	100%	241.71	BPBD
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				2.383.47		2.621.82		2.884.00		3.172.40		3.489.64		14.551.35	SATPOL PP
44	PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	65%	75%	2.383.47	80%	2.621.82	85%	2.884.00	90%	3.172.40	95%	3.489.64	95%	14.551.35	SATPOL PP
01	URUSAN SOSIAL				2.320.70		1.280.15		1.408.91		1.552.80		1.706.14		7.108.35	Disosnaker
	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA				2.320.70		1.280.15		1.408.91		1.552.80		1.706.14		7.108.35	Disosnaker
08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100%	100%	79.27	100%	87.20	100%	95.92	100%	105.51	100%	107.18	100%	475.08	Disosnaker
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	56.34%	68.81%	289.41	76.61%	318.35	84.41%	350.18	92.20%	385.20	100%	423.72	100%	1.766.87	Disosnaker

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	1,678.83	100%	1,854.25	100%	2,041.17	100%	2,251.29	100%	2,481.42	100%	10,306.95	Disosnaker
		Cakupan Anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disosnaker
		Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disosnaker
		Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disosnaker
		Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disosnaker
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100%	100%	273.18	100%	300.50	100%	330.55	100%	363.60	100%	399.97	100%	1,667.80	Disosnaker

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	URUSAN WAJIB															
1.2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
01	URUSAN TENAGA KERJA				6,017.13		8,152.46		9,019.82		9,824.48		10,879.25		43,729.33	Disosnaker
	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA				6,017.13		8,152.46		9,019.82		9,824.48		10,879.25		43,729.33	Disosnaker
15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uii kompetensi	35.74%	35.74%	4,433.37	41.39%	4,797.33	47.48%	5,329.17	54.00%	5,764.77	60.96%	6,413.56	60.96%	26,738.20	Disosnaker
		Persentase Asesor instruktur Swasta yang memperoleh pelatihan	9%	23%		39%		57%		77%		100%		100%		Disosnaker
16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	50%	50%	719.56	50%	2,569.78	50%	2,826.76	50%	3,109.44	50%	3,420.38	50%	12,645.93	Disosnaker
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	50%	52%	864.20	54%	785.35	56%	863.88	58%	950.27	60%	1,045.30	60%	4,345.20	Disosnaker
02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,034.89		2,070.78		2,250.87		2,454.83		2,669.23		11,480.60	KPP
	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				2,034.89		2,070.78		2,250.87		2,454.83		2,669.23		11,480.60	KPP
15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	85.71%	100%	768.19	100%	764.99	100%	821.29	100%	889.42	100%	954.77	100%	4,198.67	KPP
16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100%	100%	922.83	100%	1,008.64	100%	1,102.72	100%	1,205.86	100%	1,318.96	100%	5,559.02	KPP
17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan yang meningkat	1 paket	1 paket	249.27	1 paket	193.08	1 paket	212.39	1 paket	233.63	1 paket	256.99	1 paket	1,145.36	KPP
18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Perempuan di lembaga pemerintah	11,32	30%	94.60	30%	104.06	30%	114.47	30%	125.92	30%	138.51	30%	577.56	KPP
03	URUSAN PANGAN				1,443.98		3,617.86		3,431.90		3,475.58		3,517.48		15,486.80	Distanbunhut
	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN				1,443.98		3,617.86		3,431.90		3,475.58		3,517.48		15,486.80	Distanbunhut
15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Jumlah luas tanam padi pertahun	17.245 Ha	17.500 Ha	1,443.98	17.750 Ha	3,617.86	18.000 Ha	3,431.90	18.250 Ha	3,475.58	18.500 Ha	3,517.48	18.500 Ha	15,486.80	Distanbunhut

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04	URUSAN PERTANAHAN				260.29		277.47		305.22		335.74		368.57		1,547.29	BAGIAN APU
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM				260.29		277.47		305.22		335.74		368.57		1,547.29	BAGIAN APU
	01 PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100%	100%	233.31	100%	247.97	100%	272.77	100%	300.05	100%	329.31	100%	1,383.41	BAGIAN APU
	02 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	100%	100%	26.98	100%	29.50	100%	32.45	100%	35.69	100%	39.26	100%	163.88	BAGIAN APU
05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				45,130.68		64,745.42		72,375.39		93,870.99		61,082.68		337,335.98	BLH
	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN				42,120.15		49,638.46		56,756.15		73,852.49		56,570.55		278,937.80	DKP
	04 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Sampah	78,5 %	89,8 %	33,923.26	91,1 %	36,145.56	92,1 %	38,511.93	93,3%	41,095.84	94,4 %	43,238.01	94,4 %	192,914.60	DKP
	05 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	123.087,14 m2	126.597,14 m2 (0,0171%)	8,196.88	127.283,84 m2 (0,0172%)	13,492.91	130.844,40 m2 (0,1777%)	18,244.22	140.364,44 m2 (0,1899%)	32,756.65	145.364,44 m2 (0,1967%)	13,332.54	145.364,44 m2 (0,1967%)	86,023.20	DKP
	BADAN LINGKUNGAN HIDUP				3,010.53		15,106.95		15,619.24		20,018.50		4,512.13		58,398.18	BLH
	04 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	2,045.31	100%	2,200.70	100%	2,411.00	100%	2,676.08	100%	2,969.06	100%	12,302.16	BLH
	05 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Porsentase SDA yang direhabilitasi dan dikonservasi	100%	100%	267.14	100%	12,309.80	100%	12,349.57	100%	16,380.15	100%	480.00	100%	41,940.36	BLH
	06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah dan jenis data informasi Lingkungan Hidup	9 paket	10 paket	532.63	8 paket	418.12	8 paket	650.22	8 paket	717.33	8 paket	793.40	42 paket	3,088.82	BLH
	07 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100%	100%	165.45	100%	178.33	100%	208.44	100%	244.94	100%	269.68	100%	1,066.84	BLH
06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1,707.46		1,878.21		2,066.03		2,272.63		2,499.89		10,424.22	Disduk
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				1,707.46		1,878.21		2,066.03		2,272.63		2,499.89		10,424.22	Disduk
	15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	90,02%	92%	2,395.73	94%	1,878.21	95%	2,066.03	97%	2,272.63	98%	2,499.89	98%	10,424.22	Disduk

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3,873.45		4,970.17			6,143.05		7,349.75		5,565.12		27,901.53	BPMD dan Pemdes
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA				3,873.45		4,970.17			6,143.05		7,349.75		5,565.12		27,901.53	BPMD dan Pemdes
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	775.38	100%	831.03	100%	854.23	100%	888.65	100%	915.52	100%	4,264.81	BPMD dan Pemdes	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	137.59	100%	610.54	100%	418.60	100%	460.46	100%	506.50	100%	2,133.69	BPMD dan Pemdes	
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM SISTEM PELAPORAN CAPIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	116.10	100%	127.11	100%	139.22	100%	152.54	100%	167.20	100%	702.17	BPMD dan Pemdes	
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD	3 dokumen	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	10.00	3 dokumen	50.00	BPMD dan Pemdes	
16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	32 Pasar, 13 BUMDesa	6 Pasar, 13 BUMDesa	33.89	7 Pasar, 10 BUMDesa	119.00	7 Pasar, 8 BUMDesa	129.80	6 Pasar, 13 BUMDesa	128.80	6 Pasar, 13 BUMDesa	145.68	32 Pasar, 46 BUMDesa	557.17	BPMD dan Pemdes	
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	262 orang	210 orang	430.26	200 orang	693.64	200 orang	1,803.77	200 orang	2,694.89	200 orang	558.72	1,010 orang	6,181.28	BPMD dan Pemdes	
19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah Desa/Kel. yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	62 Desa/Kelurahan	62 ds/kel.	1,635.79	62 ds/kel.	1,807.37	62 ds/kel.	1,977.04	62 ds/kel.	2,163.12	62 ds/kel.	2,367.23	62 ds/kel.	9,950.56	BPMD dan Pemdes	
x	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	0	100%	287.49	100%	301.87	100%	316.96	100%	332.81	100%	349.45	100%	1,588.57	BPMD dan Pemdes	
23	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah RTS-PM yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	9.883 RTS-PM	9,041	168.31	9,041 RTS-PM	176.73	9,041 RTS-PM	185.56	9,041 RTS-PM	194.84	9,041 RTS-PM	204.58	9,041 RTS-PM	930.02	BPMD dan Pemdes	
24	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kelompok posyandu aktif	68 kelompok	12 kelompok	278.64	12 kelompok	292.88	12 kelompok	307.87	12 kelompok	323.64	10 kelompok	340.24	58 kelompok	1,543.27	BPMD dan Pemdes	
08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3,319.54		2,487.42			2,585.93		2,695.91		2,815.31		13,172.23	KBKS
	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAH				3,265.72		2,487.42			2,585.93		2,695.91		2,815.31		13,172.23	KBKS
06	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif Angka Kelahiran Total/Total Fertilitv Rate (TFR)	75.05	75,26	1,937.78	75,52	1,025.36	76,03	1,037.94	76,40	1,053.39	77,24	1,068.81	77,24	5,391.40	KBKS	
07	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Persentase Perkawinan Remaja kurang dari 20 tahun	0,22 %	0.19 %	645.09	0.18 %	711.00	0.17 %	727.40	0.16 %	745.44	0,15 %	765.29	0,15 %	3,648.06	KBKS	
08	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	51.99%	53.62%	218.16	55.14%	239.90	56.56%	258.32	57.88%	278.58	59.12%	300.87	59.12%	1,295.82	KBKS	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100%	100%	464.69	100%	511.15	100%	562.27	100%	618.50	100%	680.35	100%	2,836.95	KBKS
09	URUSAN PERHUBUNGAN				18,858.63		31,919.71		28,683.17		28,945.06		25,061.65		133,468.22	Dishub
	DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO				18,858.63		31,919.71		28,683.17		28,945.06		25,061.65		133,468.22	Dishub
15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Terwujudnya Pembanunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	88,75%	100%	12,525.870	100%	24,906.689	100%	20,968.843	100%	20,459.301	100%	15,727.315	100%	94,588.018	Dishub
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	99,65%	100%	6,332.758	100%	7,013.025	100%	7,714.327	100%	8,485.760	100%	9,334.336	100%	38,880.205	Dishub
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9,171.16		23,291.71		3,780.58		3,949.81		3,232.37		43,425.61	Dishub
	DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO				9,171.16		23,291.71		3,780.58		3,949.81		3,232.37		43,425.61	Dishub
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	64,92%	100%	9,171.16	100%	23,291.71	100%	3,780.58	100%	3,949.81	100%	3,232.37	100%	43,425.61	Dishub
11	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2,244.90		2,469.39		2,716.33		2,987.96		3,286.76		13,705.35	Diskopperindag
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				2,244.90		2,469.39		2,716.33		2,987.96		3,286.76		13,705.35	Diskopperindag
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM	200 UMKM	30 UMKM	11.53	30 UMKM	12.69	30 UMKM	13.95	30 UMKM	15.35	30 UMKM	16.88	120 UMKM	70.40	Diskopperindag
15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	2 koperasi	474.40	2 koperasi	521.84	2 koperasi	574.02	2 koperasi	631.42	2 koperasi	694.57	2 koperasi	2,896.25	Diskopperindag
17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	8 UMKM 4 koperasi	13 UMKM	541.40	13 UMKM	595.54	13 UMKM	655.10	13 UMKM	720.61	13 UMKM	792.67	65 UMKM	3,305.32	Diskopperindag
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	3.920 orang 1.271 koperasi	12 bulan	1,192.40	12 bulan	1,311.64	12 bulan	1,442.80	12 bulan	1,587.08	12 bulan	1,745.79	60 bulan	7,279.72	Diskopperindag
21	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI	Tercapainya pengembangan sistem data/informasi	156 buku	62 buku	25.17	62 buku	27.69	62 buku	30.45	62 buku	33.50	62 buku	36.85	310 buku	153.66	Diskopperindag

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	URUSAN PENANAMAN MODAL				174.41		191.86		211.04		232.15		255.36		1,064.82	Bag.Adm
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				174.41		191.86		211.04		232.15		255.36		1,064.82	Bag.Adm Perekonomian
17	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Tersedianya Informasi Produk Unggulan Daerah	6 Kecamatan	6 kecamatan	42.47	6 kecamatan	46.71	6 kecamatan	51.39	6 kecamatan	56.53	6 kecamatan	62.18	6 Kecamatan	259.27	Bag.Adm Perekonomian
18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	-	6 kecamatan	104.89	6 kecamatan	115.38	6 kecamatan	126.91	6 kecamatan	139.61	6 kecamatan	153.57	6 Kecamatan	640.35	Bag.Adm Perekonomian
19	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Tersedianya informasi peluang investasi	-	6 kecamatan	27.06	6 kecamatan	29.76	6 kecamatan	32.74	6 kecamatan	36.01	6 kecamatan	39.62	6 Kecamatan	165.19	Bag.Adm Perekonomian
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				14,991.32		10,980.30		11,578.39		12,486.13		13,485.44		63,521.58	Disdikpora
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				14,991.32		10,980.30		11,578.39		12,486.13		13,485.44		63,496.08	Disdikpora
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	60%	70%	743.18	75%	855.40	80%	938.96	80%	1,032.86	80%	1,136.14	80%	4,706.54	Disdikpora
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan nasional	11 Cabang	16 Cabang	14,248.14	16 Cabang	10,124.90	16 Cabang	10,639.43	16 Cabang	11,453.27	16 Cabang	12,349.30	16 Cabang	58,789.54	Disdikpora
16	URUSAN KEBUDAYAAN				40,144.09		58,152.76		263,401.06		60,721.76		267,145.48		689,565.15	Disbud
	DINAS KEBUDAYAAN				40,094.07		58,152.76		263,401.06		60,721.76		267,145.48		689,315.15	Disbud
06	PROGRAM : PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1. Pelaksanaan Kegiatan upacara keagamaan	108 upacara keagamaan	114 upacara keagamaan	38,741.52	114 upacara keagamaan	56,482.99	114 upacara keagamaan	262,007.70	114 upacara keagamaan	59,199.28	114 upacara keagamaan	265,662.76	114 upacara keagamaan	682,238.51	Disbud
		2. Desa Adat yang dibina	10 Desa Adat	40 Desa Adat		40 Desa Adat		42 Desa Adat		0		0		122 Desa Adat		
		3. kehadiran tokoh Agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		4. Karya seni yang di revitalisasi	98 karya seni	104 sekaa		110 sekaa		114 sekaa		118 sekaa		123 sekaa		123 sekaa		
07	PROGRAM : PENGELOLA KEKAYAAN BUDAYA	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	70 cakep	90 cakep	1,352.55	110 cakep	1,669.77	125 cakep	1,393.36	140 cakep	1,522.48	150 cakep	1,482.71	615 cakep	7,076.64	Disbud
		2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	52 situs	-	-	54 situs	-	-	-	56 situs	-	58 situs	-	58 situs		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	URUSAN PERPUSTAKAAN				666.12		707.18		753.26		802.38		842.74		3,771.68	Kantor
	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH				746.86		707.18		753.26		802.38		842.74		3,771.68	Kantor Perpusda
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	300 Orang	60 Orang	37.73	60 Orang	39.61	60 Orang	41.59	60 Orang	43.67	60 Orang	45.85	300 Orang	208.45	Kantor Perpusda
19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kunjungan ke Perpustakaan	12,305 Orang	5,100 Orang	709.14	5,600 Orang	667.57	6,200 Orang	711.67	6,800 Orang	758.71	7,500 Orang	796.88	31,200 Orang	3,563.23	Kantor Perpusda
18	URUSAN KEARSIPAN				1,371.84		1,509.02		1,659.93		1,825.92		2,008.51		8,375.22	Ktr. Arsip
	KANTOR ARSIP DAERAH				1,102.71		1,509.02		1,659.93		1,825.92		2,008.51		8,375.22	Ktr. Arsip Daerah
15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	98 SKPD/Desa	36 SKPD/Desa	87.71	36 SKPD/Desa	96.48	36 SKPD/Desa	106.12	36 SKPD/Desa	116.74	36 SKPD/Desa	128.41	98 SKPD/Desa	535.45	Ktr. Arsip Daerah
16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5 jenis arsip	5 jenis arsip	387.69	5 jenis arsip	722.50	5 jenis arsip	794.75	5 jenis arsip	874.22	5 jenis arsip	961.64	5 jenis arsip	4,009.93	Ktr. Arsip Daerah
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah Jenis pelayanan informasi kearsipan	5 Materi	5 Materi	627.32	5 Materi	690.05	5 Materi	759.06	5 Materi	834.96	5 Materi	918.46	5 Materi	3,829.84	Ktr. Arsip Daerah

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.Juta	
				Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	URUSAN PILIHAN															
01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				8,968.64		11,679.35		12,972.40		20,870.07		22,951.48		77,441.93	Dinas PPK
	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN				8,968.64		11,679.35		12,972.40		20,870.07		22,951.48		77,441.93	Dinas PPK
	15 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Jumlah produksi perikanan	155.646,48 ton	7,021.00 ton	36.89	7,154.00 ton	37.96	7,293.0 ton	41.76	7,433.0 ton	45.94	7,575.0 ton	50.53	36,476.00 ton	213.08	Dinas PPK
	16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN	Jumlah pokmaswas yang dibina dan	5 kelompok	4 kelompok	82.26	3 kelompok	90.48	3 kelompok	99.53	3 kelompok	109.49	3 kelompok	120.43	16 kelompok	502.19	Dinas PPK
	19 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	5 kali	1 kali	1,689.85	1 kali	3,500.00	1 kali	4,000.00	1 kali	4,400.00	1 kali	4,840.00	5 kali	18,429.85	Dinas PPK
	20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi perikanan budidaya	586.80 ton	598 ton	402.87	603.00 ton	424.69	611.00 ton	447.77	617.00 ton	472.20	623.00 ton	519.42	3,052.00 ton	2,266.94	Dinas PPK
	21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.890,70 ton	6,423.00 ton	646.00	6,551.00 ton	728.75	6,682.00 ton	801.63	6,816.00 ton	7,509.18	6,952.00 ton	8,260.10	33,424.00 ton	17,945.66	Dinas PPK
	23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	5,062 ton	8.78	5,164 ton	24.65	5,267 ton	26.62	5,372 ton	27.68	5,480 ton	29.85	26,345 ton	117.58	Dinas PPK
	30 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah dokumen data/informasi peternakan, perikanan dan Kelautan	155 exp	105 exp	225.94	105 exp	50.00	525 exp	425.94	Dinas PPK						
	34 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	5,062.820 ton	5.46	5,164.076 ton	6.00	5,267.358 ton	6.60	5,372.705 ton	7.26	5,480.159 ton	7.99	5,480.159	33.32	Dinas PPK
	xx PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA bahari	Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	-	1 kawasan	5,870.59	1 kawasan	6,816.80	1 kawasan	7,498.48	1 kawasan	8,248.33	2 kawasan	9,073.16	6 kawasan	37,507.36	Dinas PPK
02	URUSAN PARIWISATA				15,065.49		19,189.50		20,334.79		20,429.97		22,672.46		97,692.21	Dinas Pariwisata
	DINAS PARIWISATA				15,065.49		19,189.50		20,334.79		20,429.97		22,672.46		97,692.21	Dinas Pariwisata
	01 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	3,934,384	5%	11,172.51	5%	14,952.36	5%	15,968.59	5%	15,668.67	5%	17,068.01	25%	74,830.14	Dinas Pariwisata
	02 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Prosentase DTW yang ditata	58%	64%	3,241.13	66%	3,707.37	69%	3,648.85	72%	4,178.62	72%	4,814.34	72%	19,590.30	Dnas Pariwisata
	03. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	488 orang	245 orang	435.54	170 orang	302.27	235 orang	478.85	170 orang	333.25	220 orang	527.16	1,210 orang	2,077.07	Dinas Pariwisata
	04. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	jumlah produk wisata yang dibina	180 usaha + 4 obyek	255 usaha + 6 obyek	216.33	255 usaha + 6 obyek	227.50	255 usaha + 6 obyek	238.50	255 usaha + 6 obyek	249.42	255 usaha + 6 obyek	262.94	1,500 usaha + 36 obyek	1,194.69	Dinas Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.Juta	
				Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	URUSAN PERTANIAN				15,208.33		16,177.76		18,836.11		17,996.52		21,084.43		89,303.14	Distanbunhut
	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN				6,210.71		6,505.11		7,844.24		6,626.96		8,617.39		35,804.40	Distanbunhut
	15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah peserta pelatihan pertanian	280 orang	345 orang	444.83	345 orang	401.91	345 orang	419.65	345 orang	503.30	345 orang	563.62	1.725 orang	2,333.319	Distanbunhut
	17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	15 kali	4 Kali	1,452.18	5 kali	1,568.36	5 kali	1,760.93	5 kali	1,979.91	5 kali	2,229.35	24 Kali	8,990.730	Distanbunhut
	19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	2,735.22	125.000 ton	4,092.52	127.500 ton	4,047.54	130.000 ton	3,607.80	132.500 ton	3,868.07	132.500 ton	18,351.149	Distanbunhut
	20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 orang	52 orang	1,267.27	52 orang	247.49	52 orang	1,401.47	52 orang	299.46	52 orang	1,695.78	52 orang	4,911.459	Distanbunhut
	27 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah komoditi yang dibina	5 komoditi	-	0.00	5 komoditi	12.04	5 komoditi	13.57	5 komoditi	15.31	5 komoditi	17.28	25 komoditi	58.207	Distanbunhut
	28 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA /INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	jumlah data yang informatif	3 jenis	5 jenis	311.21	3 jenis	182.79	3 jenis	201.07	3 jenis	221.18	3 jenis	243.29	3 jenis	1,159.538	Distanbunhut
	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN				8,997.62		9,672.65		10,991.87		11,369.56		12,467.04		53,498.74	Dinas PPK
	21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan penyakit	65.427 ekor	65500 ekor	2,354.33	66300 ekor	2,589.76	67300 ekor	2,848.74	68800 ekor	3,133.61	70000 ekor	3,446.97	71000 ekor	14,373.40	Dinas PPK
	22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Jumlah Populasi ternak	1.486.869 ekor	1501775 ekor	6,084.27	1509284 ekor	6,679.51	1516831 ekor	7,197.17	1524914 ekor	7,759.73	15320361 ekor	7,906.87	15320361 ekor	35,627.54	Dinas PPK
	23 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan	4.579 ton	4764 ton	51.00	4859.28 ton	56.10	4,956.466 ton	61.07	5,055.595 ton	66.50	5,156.707 ton	73.15	24,792 ton	307.82	Dinas PPK
	25 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah Populasi ternak	1.494.309 ekor	1,501,775 ekor	24.40	1,509,284 ekor	26.84	1,516,831 ekor	29.52	1,524,914 ekor	32.48	1,532,036 ekor	31.94	1,532,036 ekor	145.18	Dinas PPK
	30 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PETERNAKAN	Jumlah dokumen data/informasi peternakan yang disusun	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	308.12	1 jenis dokumen	185.45	1 jenis dokumen	199.00	1 jenis dokumen	213.90	1 jenis dokumen	213.90	1 jenis dokumen	1,120.38	Dinas PPK
	31 PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Jumlah produksi daging	16.037 ton	16.679 ton	97.56	16.694 ton	107.31	16.728 ton	118.04	16.862 ton	129.85	16.947 ton	142.83	83,911	595.60	Dinas PPK
	20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Jumlah Penyuluh dan petugas lapangan yang berkinerja	39 orang	33 orang	77.94	33 orang	27.68	33 orang	538.33	33 orang	33.49	33 orang	651.38	33 orang	1,328.83	Dinas PPK
05	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				300.55		150.18		165.20		181.72		199.89		997.52	DCK
	DINAS CIPTA KARYA				300.55		150.18		165.20		181.72		199.89		997.52	DCK
	15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Terlaksananya pembinaan Usaha SDA	6 Paket	16.38%	290.57	25.74%	139.20	35.05%	153.12	44.36%	168.43	53.62%	185.28	53.62%	936.60	DCK
	17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya pembinaan Usaha Energi	1 Paket	44.50%	9.98	49.50%	10.98	54.50%	12.07	59.50%	13.28	64.50%	14.61	64.50%	60.92	DCK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.Juta	
				Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06	URUSAN PERDAGANGAN				2.303.42		1.986.49		3.854.64		1.490.11		1.639.12		11.273.78	Diskopperindag
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				2.303.42		1.986.49		3.854.64		1.490.11		1.639.12		11.273.78	Diskopperindag
	15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Tercapainya peningkatan perlindungan terhadap konsumen	5.600 timbangan	3500 UTTP	1.343.35	3500 UTTP	934.03	3500 UTTP	257.44	3500 UTTP	283.18	3500 UTTP	311.50	3500 UTTP	3.129.51	Diskopperindag
	18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	480 perusahaan 192 kali 113 perajin 4.500 rumah tangga 3 pameran	12 bulan	960.06	12 bulan	1.052.46	12 bulan	3.597.20	12 bulan	1.206.93	12 bulan	1.327.62	60 bulan	8.144.27	Diskopperindag
07	URUSAN PERINDUSTRIAN				1.079.42		1.129.14		1.242.06		1.366.26		1.502.89		6.319.76	Diskopperindag
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				1.079.42		1.129.14		1.242.06		1.366.26		1.502.89		6.319.76	Diskopperindag
	16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	1.000 orang 32 IKM 90 unit usaha	408 IKM	982.18	408 IKM	1.022.18	408 IKM	1.124.40	408 IKM	1.236.84	408 IKM	1.360.53	2.040 IKM	5.726.14	Diskopperindag
	17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Mendayagunakan secara maksimal proses produksi	17 gugus 40 orang	1 gugus	97.23	1 gugus	106.96	1 gugus	117.65	1 gugus	129.42	1 gugus	142.36	5 gugus	593.62	Diskopperindag

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
01	FUNGSI PERENCANAAN				6,029.52		4,692.64		5,147.80		5,715.84		6,271.88		27,744.10	Bappeda Litbang
01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				6,029.52		4,692.64		5,147.80		5,715.84		6,271.88		27,744.10	Bappeda Litbang
15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data dan informasi yang memadai	1 paket	1 paket	241.72	1 paket	265.887	1 paket	292.476	1 paket	321.723	1 paket	353.896	1 paket	1,475.698	Bappeda Litbang
21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	5,067.82	100%	3,648.40	100%	3,999.14	100%	4,384.25	100%	4,807.13	100%	21,793.15	Bappeda Litbang
22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	6 Kecamatan	594.572	6 Kecamatan	640.39	6 Kecamatan	704.43	6 Kecamatan	774.87	6 Kecamatan	852.36	6 Kecamatan	3566.63	Bappeda Litbang
24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 paket	125.42	4 paket	137.96	3 paket	151.75	3 paket	235.00	2 paket	258.50	15 paket	908.63	Bappeda Litbang
02	FUNGSI KEUANGAN				21,487.97		27,060.69		29,766.75		32,743.43		36,017.77		147,076.61	Dispenda
	DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG				21,487.97		27,060.69		29,766.75		32,743.43		36,017.77		147,076.61	Dispenda
08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Berkembangnya nilai budaya	60 bulan	12 bulan	13,536.92	12 bulan	14,890.61	12 bulan	16,379.67	12 bulan	18,017.64	12 bulan	19,819.40	60 bulan	82,644.23	Dispenda
17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	60 bulan	12 bulan	7,951.05	12 bulan	12,170.08	12 bulan	13,387.08	12 bulan	14,725.79	12 bulan	16,198.37	60 bulan	64,432.38	Dispenda
	BAGIAN KEUANGAN				10,127.03		11,139.73		12,253.70		13,479.07		14,826.98		61,826.51	Bag. Keuangan
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan pelaporan keuangan yang akuntabel	1610 bk	495 bk	302.20	495 bk	332.42	495 bk	365.66	495 bk	402.23	495 bk	442.45	2475 bk	1,844.95	Bag. Keuangan
17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penanganannya, penatausahaan dan pelaporan/akuntansi pemerintah daerah	20635	4679	9,690.88	4679	10,659.97	4679	11,725.97	4679	12,898.56	4679	14,188.42	23395	59,163.81	Bag. Keuangan
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA	Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh SKPD di Kab. Badung	6900 SPM/UP/ GU/TU	1572 SPM/UP/ GU/TU	133.95	1572 SPM/UP/ GU/TU	147.34	1572 SPM/UP/ GU/TU	162.07	1572 SPM/UP/ GU/TU	178.28	1572 SPM/UP/ GU/TU	196.11	7860 SPM/UP/ GU/TU	817.75	Bag. Keuangan
03	FUNGSI KEPEGAWAIN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5,305.69		6,139.95		6,753.94		7,429.33		8,172.27		33,801.17	BKD,DIKLAT
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIKLAT				5,305.69		6,139.95		6,753.94		7,429.33		8,172.27		33,801.17	BKD,DIKLAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di Pemkab. Badung	5%	12%	5,305.69	12.5%	6,139.95	13%	6,753.94	13.5%	7,429.33	14%	8,172.27	14%	33,801.17	BKD,DIKLAT
04	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				168.221		185.043		203.548		223.902		246.293		1,027.007	Bappeda Litbang
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				168.221		185.043		203.548		223.902		246.293		1,027.007	Bappeda Litbang
26	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	12 Bulan.	12 Bulan.	83.507	12 Bulan.	91.858	12 Bulan.	101.043	12 Bulan.	111.148	12 Bulan.	122.262		509.818	Bappeda Litbang
28	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	12 Bulan.	12 Bulan.	84.714	12 Bulan.	93.186	12 Bulan.	102.504	12 Bulan.	112.755	12 Bulan.	124.030	12 Bulan.	517.189	Bappeda Litbang
05	URUSAN FUNGSI LAINNYA				276.01		258.01		281.35		306.56		387.93		1,509.87	Bagian APU
	SEKRETARIAT DAERAH															
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM				276.01		258.01		281.35		306.56		387.93		1,509.87	Bagian APU
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pembayaran iuran anggota APKASI	1 kali	1 kali	25.08	1 kali	25.08	1 kali	25.08	1 kali	25.08	1 kali	25.08	1 kali	125.38	Bagian APU
05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	- Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan	3 Hari besar	3 Hari besar 6 Kec.	107.26	3 Hari besar 6 Kec.	67.87	3 Hari besar 6 Kec.	72.87	3 Hari besar 6 Kecamatan	77.87	3 Hari besar 6 Kec.	82.87	3 Hari besar 6 Kec.	408.73	Bagian APU
16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN	Persentase kunjungan	100%	100%	23.23	1.000	21.60	100%	23.60	100%	25.60	100%	27.60	100%	121.64	Bagian APU
27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab.Badung	100%	100%	396.45	100%	401.49	100%	441.15	100%	484.59	100%	640.32	100%	2,364.00	Bagian APU
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT				10,667.694		10,723.669		10,786.080		10,855.669		10,933.260		53,966.372	Kesra
01	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Proposal yang diverifikasi administratif	100%	100%	10,667.694	100%	10,723.669	100%	10,786.080	100%	10,855.669	100%	10,933.260	100%	53,966.372	Kesra
		Laporan Pertanggung jawaban pemanfaatan dana hibah yang sesuai ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kesra
		Penerima hibah yang dimonitoring seni budaya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kesra
	BAGIAN HUKUM DAN HAM				2,657.40		2,930.72		3,247.23		3,598.68		3,958.54		16,392.58	Hukum dan HAM
01	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		2000 Produk Hukum Daerah	2,657.40	2000 Produk Hukum Daerah	2,930.72	2000 Produk Hukum Daerah	3,247.23	2000 Produk Hukum Daerah	3,598.68	2000 Produk Hukum Daerah	3,958.54	10.000 Produk Hukum Daerah	16,392.58	Hukum dan HAM
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				4,803.60		5,174.78		5,692.26		6,261.49		6,887.64		28,819.77	Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	3 paket	3 paket	4,425.27	3 paket	4,791.77	3 paket	5,270.94	3 paket	5,798.04	3 paket	6,377.84	3 paket	26,663.86	Bagian Administrasi Pembangunan	
02	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	1 paket	1 paket	99.75	1 paket	108.70	1 paket	119.58	1 paket	131.53	1 paket	144.69	1 paket	604.25	Bagian Administrasi Pembangunan	
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	2 paket	2 paket	259.56	2 paket	253.86	2 paket	279.25	2 paket	307.17	2 paket	337.89	2 paket	1,437.73	Bagian Administrasi Pembangunan	
04	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kapasitas aparaturnya pemerintah	1 Paket	1 Paket	19.03	1 Paket	20.45	1 Paket	22.49	1 Paket	24.74	1 Paket	27.22	1 Paket	113.94	Bagian Administrasi Pembangunan	
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN						655.64		823.48		677.31		860.09		1,068.84		4,085.36	Bagian Adm. Perekonomian
56	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Memperkuat Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa	122 LPD	122 LPD	301.07	122 LPD	331.18	122 LPD	364.30	122 LPD	400.73	122 LPD	440.80	122 LPD	1,838.08	Bagian Adm. Perekonomian	
75	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Terkoordinasinya Ketahanan Pangan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	232.74	6 Kecamatan	358.30	6 Kecamatan	165.61	6 Kecamatan	297.22	6 Kecamatan	449.68	6 Kecamatan	1,503.54	Bagian Adm. Perekonomian	
00	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Mengoptimalkan Profesionalisme Organisasi KTNA	60 orang KTNA	60 orang KTNA	40.51	60 orang KTNA	44.56	60 orang KTNA	49.01	60 orang KTNA	53.91	60 orang KTNA	59.31	300 orang KTNA	247.30	Bagian Adm. Perekonomian	
11	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Terkoordinasinya Pengendalian Inplasi Daerah	6 Kecamatan	6 Kecamatan	24.19	6 Kecamatan	26.61	6 Kecamatan	29.27	6 Kecamatan	32.20	6 Kecamatan	35.42	6 Kecamatan	147.68	Bagian Adm. Perekonomian	
12	PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Badung	12 Bulan	12 Bulan	57.13	12 Bulan	62.84	12 Bulan	69.12	12 Bulan	76.03	12 Bulan	83.64	12 Bulan	348.76	Bagian Adm. Perekonomian	
BAGIAN UMUM						300.00		330.00		363.00		399.30		439.23		1,831.53	Bagian Umum
16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	36 kunjungan	36 kunjungan	300.00	36 kunjungan	330.00	36 kunjungan	363.00	36 kunjungan	399.30	36 kunjungan	439.23	180 kunjungan	1,831.53	Bagian Umum	
BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH						14,385.06		15,370.24		22,681.89		24,147.58		26,432.98		103,094.63	Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah
01	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Jumlah SKPD dan UPT yang melakukan Rekonsiliasi	73 Unit Kerja	74 Unit Kerja	800.58	74 Unit Kerja	963.86	74 Unit Kerja	1,058.86	74 Unit Kerja	1,163.31	74 Unit Kerja	1,278.17	74 Unit Kerja	5,341.67	Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah	
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	4 Paket	4 Paket	9,965.31	4 Paket	10,690.43	4 Paket	17,803.09	4 Paket	19,053.30	4 Paket	21,105.27	24 Paket	78,617.40	Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah	
03	Program Asuransi Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terasuransikan	55 Gedung dan Bangunan	57 Gedung dan Bangunan	2,000.68	57 Gedung dan Bangunan	2,000.00	57 Gedung dan Bangunan	10,000.68	Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah							
04	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Informasi E-Proc. Melalui LPSE	459 Paket	482 Paket	1,618.48	506 Paket	1,715.95	531 Paket	1,819.95	558 Paket	1,930.96	586 Paket	2,049.54	2,663 Paket	9,134.87	Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah	
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL						7,720.69		8,891.58		9,213.71		9,562.21		9,939.41		45,295.21	Bagian Humas & Protokol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	21 jenis koran dan 4 majalah	21 jenis koran dan 4 majalah	942.37	21 jenis koran dan 4 majalah	955.47	21 jenis koran dan 4 majalah	1,003.24	21 jenis koran dan 4 majalah	1,053.40	21 jenis koran dan 4 majalah	1,106.07	21 jenis koran dan 4 majalah	5,028.16	Bagian Humas & Protokol	
02	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Jumlah Jumpa Pers	12 Kali	12 Kali	692.80	12 Kali	736.94	12 Kali	784.22	12 Kali	834.92	12 Kali	889.30	60 kali	3,938.18	Bagian Humas & Protokol	
03	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Jumlah Pelayanan Media Elektronik	253 Liputan	340 Liputan	1,267.23	350 Liputan	1,393.95	350 Liputan	1,533.35	350 Liputan	1,686.68	350 Liputan	1,855.35	350 Liputan	7,736.55	Bagian Humas & Protokol	
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Jumlah Berita pada media massa	3036 Adv	3600 Adv.	4,022.52	3650 adv	4,521.31	3700 adv	4,522.38	3750 adv	4,523.50	3800 adv	4,524.67	18500 adv	22,114.38	Bagian Humas & Protokol	
05	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 'APARATUR NEGARA	Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang keprotokolan	1 paket	1 paket	795.77	1 paket	835.55	1 paket	877.33	1 paket	921.20	1 paket	967.26	5 Paket	4,397.11	Bagian Humas & Protokol	
06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah tenaga protokol yang meningkat kemampuannya	-	-	-	30 orang	448.36	30 orang	493.20	30 orang	542.52	30 orang	596.77	150 orang	2,080.84	Bagian Humas & Protokol	
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA						1,389.15		896.71		986.38		1,056.27		1,203.72		5,532.23	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Hasil evaluasi Lakip Kabupaten	75.89	77.00	199.91	78.00	178.09	79.00	195.90	80.00	215.48	81.00	278.85	81.00	1,068.23	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
28	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	53 SKPD	1,145.79	53 SKPD	670.83	53 SKPD	737.91	53 SKPD	782.95	53 SKPD	861.25	53 SKPD	4,198.73	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	-	100%	18.74	100%	20.62	100%	22.68	100%	24.95	100%	27.44	100%	114.44	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	53 SKPD	53 SKPD	24.71	53 SKPD	27.18	53 SKPD	29.89	53 SKPD	32.88	53 SKPD	36.17	53 SKPD	150.83	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
SEKRETARIAT DPRD						43,393.11		47,732.42		52,505.66		57,756.23		63,531.85		264,919.27	Sekwan
15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	100%	43,157.57	100%	47,473.33	100%	52,220.67	100%	57,442.73	100%	63,187.00	100%	263,481.31	Sekwan	
26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Raperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100%	100%	235.53	100%	259.09	100%	285.00	100%	313.50	100%	344.85	100%	1,437.96	Sekwan	
INSPEKTORAT						2,066.65		2,265.02		2,491.53		2,740.68		3,014.75		12,578.63	Inspektorat
20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	5%	4%	1,531.10	3%	1,675.93	2%	1,843.52	2%	2,027.87	1%	2,230.66	1%	9,309.07	Inspektorat	
21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	100%	100%	139.44	100%	153.38	100%	168.72	100%	185.60	100%	204.16	100%	851.30	Inspektorat	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	90%	100%	396.10	100%	435.71	100%	479.29	100%	527.21	100%	579.94	100%	2,418.25	Inspektorat
	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU				1,032.92		1,218.08		1,322.73		1,439.24		1,567.39		6,557.48	BPPT KABUPATEN BADUNG
23	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	prosentase kapasitas pelayanan publik	100%	100%	781.77	100%	809.24	100%	888.80	100%	977.68	100%	1,075.44	100%	4,532.94	BPPT KABUPATEN BADUNG
24	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	prosentase Pengaduan yang tertangani Oleh BPPT	100%	100%	70.86	100%	77.95	100%	85.73	100%	94.31	100%	103.74	100%	432.60	BPPT KABUPATEN BADUNG
37	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100%	100%	180.28	100%	330.89	100%	348.20	100%	367.25	100%	388.21	100%	1,591.95	BPPT KABUPATEN BADUNG
	KECAMATAN KUTA				988.88		1,087.77		1,196.54		1,316.20		1,447.82		6,037.20	Kec. Kuta
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	12 jenis	340.28	12 jenis	374.31	12 jenis	411.74	12 jenis	452.91	12 jenis	498.20	60 jenis	2,077.45	Kec. Kuta
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan daerah	1 dokumen	1 dokumen	48.15	1 dokumen	52.96	1 dokumen	58.26	1 dokumen	64.09	1 dokumen	70.49	1 dokumen	293.95	Kec. Kuta
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/STATISTIK DAERAH	Jenis dokumen Data	2 jenis	2 jenis	24.02	2 jenis	26.42	2 jenis	29.06	2 jenis	31.97	2 jenis	35.17	2 jenis	146.64	Kec. Kuta
78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah kelurahan yang dijaqa ketertibannya	5 kelurahan	5 kelurahan	95.83	5 kelurahan	105.41	5 kelurahan	115.95	5 kelurahan	127.54	5 kelurahan	140.30	5 kelurahan	585.03	Kec. Kuta
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masvarakat	2 kegiatan	3 kegiatan	17.91	3 kegiatan	19.70	3 kegiatan	21.67	3 kegiatan	23.84	3 kegiatan	26.22	15 kegiatan	109.34	Kec. Kuta
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	1 jenis	369.16	1 jenis	406.07	1 jenis	446.68	1 jenis	491.35	1 jenis	540.48	5 jenis	2,253.74	Kec. Kuta
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	85.23	7 jenis	93.76	7 jenis	103.13	7 jenis	113.44	7 jenis	124.79	7 jenis	520.36	Kec. Kuta
90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	3.82	106 RTM, 101 RTS	4.20	106 RTM, 101 RTS	4.62	106 RTM, 101 RTS	5.09	106 RTM, 101 RTS	5.59	106 RTM, 101 RTS	23.33	Kec. Kuta
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	4.48	5 kelurahan	4.93	5 kelurahan	5.42	5 kelurahan	5.97	5 kelurahan	6.56	5 kelurahan	27.37	Kec. Kuta
	KELURAHAN KUTA				329.00		361.90		398.10		437.90		481.70		2008.60	Kel.Kuta
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	21.94	1 jenis dokumen	24.13	1 jenis dokumen	26.55	1 jenis dokumen	29.20	1 jenis dokumen	32.12	1 jenis dokumen	133.95	Kel.Kuta
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data /informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	41.54	2 jenis	45.69	2 jenis	50.26	2 jenis	55.29	2 jenis	60.81	2 jenis	253.59	Kel.Kuta
	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Jumlah lingkungan yang mendapat pelayananan	13 lingkungan	13 lingkungan	33.90	13 lingkungan	37.29	13 lingkungan	41.02	13 lingkungan	45.13	13 lingkungan	49.64	13 lingkungan	206.99	Kel.Kuta

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	13 lingkungan	13 lingkungan	42.32	13 lingkungan	46.56	13 lingkungan	51.21	13 lingkungan	56.33	13 lingkungan	61.97	13 lingkungan	258.40	Kel.Kuta
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	5 lembaga	5 lembaga	132.54	5 lembaga	145.80	5 lembaga	160.38	5 lembaga	176.42	5 lembaga	194.06	5 lembaga	809.19	Kel.Kuta
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	56.75	7 jenis	62.43	7 jenis	68.67	7 jenis	75.54	7 jenis	83.09	7 jenis	346.49	Kel.Kuta
	KELURAHAN LEGIAN				464.07		510.48		561.53		617.68		679.45		2833.21	Kel Legian
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jenis Pengembangan Nilai Budaya	2 Jenis	2 Jenis	217.40	2 Jenis	239.14	2 Jenis	263.05	2 Jenis	289.36	2 Jenis	318.29	2 Jenis	1327.25	Kel Legian
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	16.92	1 jenis dokumen	18.61	1 jenis dokumen	20.47	1 jenis dokumen	22.52	1 jenis dokumen	24.77	1 jenis dokumen	103.28	Kel Legian
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen statistik daerah	2 jenis	2 jenis	16.25	2 jenis	17.88	2 jenis	19.66	2 jenis	21.63	2 jenis	23.79	2 jenis	99.21	Kel Legian
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	3 lingkungan	3 lingkungan	42.09	3 lingkungan	46.30	3 lingkungan	50.93	3 lingkungan	56.02	3 lingkungan	61.62	3 lingkungan	256.97	Kel Legian
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	5 jenis	5 jenis	138.57	5 jenis	152.43	5 jenis	167.67	5 jenis	184.44	5 jenis	202.88	5 jenis	845.98	Kel Legian
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	2 jenis	2 jenis	17.88	2 jenis	19.67	2 jenis	21.64	2 jenis	23.80	2 jenis	26.18	2 jenis	109.16	Kel Legian
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jumlah jenis pelayanan adminitrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	14.96	7 jenis	16.46	7 jenis	18.11	7 jenis	19.92	7 jenis	21.91	7 jenis	91.36	Kel Legian
	KELURAHAN SEMINYAK				236.25		222.05		244.26		268.69		295.55		1,266.81	Kel.Seminyak
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 paket	20.85	1 paket	22.94	1 paket	25.23	1 paket	27.76	1 paket	30.53	1 jenis dokumen	127.31	Kel.Seminyak
	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis dokumen	2 dokumen	13.87	2 dokumen	15.25	2 dokumen	16.78	2 dokumen	18.46	2 dokumen	20.30	2 jenis dokumen	84.66	Kel.Seminyak
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	2 lingkungan	2 lingkungan	41.93	2 lingkungan	46.13	2 lingkungan	50.74	2 lingkungan	55.81	2 lingkungan	61.39	2 lingkungan	256.00	Kel.Seminyak
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	4 jenis	4 jenis	130.80	4 jenis	106.06	4 jenis	116.66	4 jenis	128.33	4 jenis	141.16	4 jenis	623.02	Kel.Seminyak
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	28.80	7 jenis	31.68	7 jenis	34.85	7 jenis	38.33	7 jenis	42.16	7 jenis	175.82	Kel.Seminyak
	KELURAHAN TUBAN				233.39		252.32		304.36		334.80		368.28		1,493.15	Kel.Tuban
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	18.84	1 jenis dokumen	20.73	1 jenis dokumen	22.80	1 jenis dokumen	25.08	1 jenis dokumen	27.59	1 jenis dokumen	115.03	Kel.Tuban

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	22.24	2 jenis	24.46	2 jenis	26.91	2 jenis	29.60	2 jenis	32.56	2 jenis	135.75	Kel.Tuban
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	4 lingkungan	4 lingkungan	43.96	4 lingkungan	48.35	4 lingkungan	53.19	4 lingkungan	58.51	4 lingkungan	64.36	4 lingkungan	268.37	Kel.Tuban
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 jenis	3 Jenis	91.82	3 jenis	96.60	3 Jenis	133.06	3 Jenis	146.37	3 Jenis	161.01	3 Jenis	628.87	Kel.Tuban
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayananan	7 jenis	7 jenis	56.53	7 jenis	62.18	7 jenis	68.40	7 jenis	75.24	7 jenis	82.77	7 jenis	345.13	Kel.Tuban
	KELURAHAN KEDONGANAN				224.85		247.33		198.02		198.02		214.17		1,082.39	Kel. Kedonganan
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	18.50	1 jenis dokumen	20.35	1 jenis dokumen	18.21	1 jenis dokumen	18.21	1 jenis dokumen	20.03	1 jenis dokumen	95.30	Kel. Kedonganan
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	18.73	2 jenis	20.60	2 jenis	20.60	2 jenis	20.60	2 jenis	22.66	2 jenis	103.19	Kel. Kedonganan
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	6 lingk.	6 lingk.	68.84	6 lingk.	75.73	6 lingk.	36.97	6 lingk.	36.97	6 lingk.	40.67	6 lingk.	259.18	Kel. Kedonganan
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	3 jenis	3 jenis	96.79	3 jenis	106.47	3 jenis	98.05	3 jenis	98.05	3 jenis	104.20	3 jenis	503.55	Kel. Kedonganan
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayananan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	21.99	7 jenis	24.19	7 jenis	24.19	7 jenis	24.19	7 jenis	26.61	7 jenis	121.16	Kel. Kedonganan
	KECAMATAN KUTA UTARA				987.14		1,085.85		1,194.44		1,313.88		1,445.27		6,026.57	Kec. Kuta Utara
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya		4 jenis	347.95	4 jenis	382.75	4 jenis	421.02	4 jenis	463.12	4 jenis	509.44	20 jenis	2,124.28	Kec. Kuta Utara
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 dokumen	40.09	1 dokumen	44.10	1 dokumen	48.51	1 dokumen	53.37	1 dokumen	58.70	1 dokumen	244.78	Kec. Kuta Utara
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/	Jumlah dokumen data	2 Jenis	2 Jenis	23.35	2 Jenis	25.68	2 Jenis	28.25	2 Jenis	31.07	2 Jenis	34.18	2 Jenis	142.53	Kec. Kuta Utara
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	6 desa/kel	6 Desa/Kel	79.44	6 Desa/Kel	87.39	6 Desa/Kel	96.13	6 Desa/Kel	105.74	6 Desa/Kel	116.31	6 Desa/Kel	485.00	Kec. Kuta Utara
79	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	6 desa & kel	3 desa	47.02	3 desa	51.72	3 desa	56.89	3 desa	62.58	3 desa	68.84		287.03	Kec. Kuta Utara
83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	1 Jenis	3 Jenis	391.15	3 Jenis	430.26	3 Jenis	473.29	3 Jenis	520.62	3 Jenis	572.68	3 Jenis	2,387.99	Kec. Kuta Utara
85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	7 Jenis	48.73	7 Jenis	53.60	7 Jenis	58.96	7 Jenis	64.85	7 Jenis	71.34	7 Jenis	297.48	Kec. Kuta Utara
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM yang Didata	462 RTM	462 RTM	4.95	462 RTM	5.44	462 RTM	5.99	462 RTM	6.58	462 RTM	7.24	462 RTM	30.20	Kec. Kuta Utara
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/Kel	6 Desa/Kelurahan	4.47	6 Desa/Kelurahan	4.91	6 Desa/Kelurahan	5.40	6 Desa/Kelurahan	5.95	6 Desa/Kelurahan	6.54	6 Desa/Kelurahan	27.27	Kec. Kuta Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KELURAHAN KEROBOKAN				343.54		322.22		334.60		357.90		387.30		1,745.56	Kel Kerobokan
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	jumlah Jenis Pengembangan Nilai Budaya	0	1 Jenis	21.85	1 Jenis	0.00	1 jenis	21.85	Kel Kerobokan						
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis	1 jenis	21.08	1 jenis	21.52	1 jenis	24.40	1 jenis	28.40	1 jenis	33.50	1 jenis	128.90	Kel Kerobokan
	PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	24.39	2 jenis	26.50	2 jenis	27.20	2 jenis	29.40	2 jenis	30.20	2 jenis	137.69	Kel Kerobokan
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lingkungan Yang Dijaga ketertibannya	10 lingkungan	10 lingkungan	83.73	10 lingkungan	92.10	10 lingkungan	87.40	10 lingkungan	92.00	10 lingkungan	98.80	10 lingkungan	454.03	Kel Kerobokan
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam	3 jenis	4 jenis	144.44	4 jenis	149.70	4 jenis	160.80	4 jenis	172.70	4 jenis	187.30	4 jenis	814.94	Kel Kerobokan
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	2 jenis	2 jenis	15.27	2 jenis	0.00	2 jenis	15.27	Kel Kerobokan						
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	7 jenis	7 jenis	32.78	7 jenis	32.40	7 jenis	34.80	7 jenis	35.40	7 jenis	37.50	7 jenis	172.88	Kel Kerobokan
	KELURAHAN KEROBOKAN KAJA				306.60		299.44		329.38		362.32		355.70		1,653.43	Kel Kerobokan kaja
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	21.67	1 Jenis Dokumen	23.83	1 Jenis Dokumen	26.21	Paket	28.84	1 Jenis Dokumen	31.72	1 Jenis Dokumen	132.27	Kel Kerobokan kaja
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INPORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah data informasi statistik daerah disusun	2 Jenis	2 Jenis	45.52	2 Jenis	50.07	2 Jenis	55.08	2 Jenis	60.59	2 Jenis	66.65	2 Jenis	277.91	Kel Kerobokan kaja
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Jumlah Lokasi Yang Dipantau dijaga ketertibannya	23 Lingkungan	23 lingkungan	83.03	23 lingkungan	91.33	23 lingkungan	100.46	23 lingkungan	110.51	23 lingkungan	78.71	23 lingkungan	464.03	Kel Kerobokan kaja
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam	4 Jenis	4 Jenis	132.91	4 Jenis	108.37	4 Jenis	119.21	4 Jenis	131.13	4 Jenis	144.25	4 Jenis	635.87	Kel Kerobokan kaja
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	7 Jenis	23.48	7 Jenis	25.83	7 Jenis	28.41	7 Jenis	31.25	7 Jenis	34.38	7 Jenis	143.35	Kel Kerobokan kaja
	KELURAHAN KEROBOKAN KELOD				327.19		298.96		328.86		328.86		361.74		1,645.60	Kel Kerobokan kelod
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	jumlah pengembangan nilai	1 jenis	1 jenis	28.23	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis	28.23	Kel Kerobokan kelod
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	19.75	1 jenis dokumen	19.75	1 jenis dokumen	21.73	1 jenis dokumen	21.73	1 jenis dokumen	23.90	1 jenis dokumen	106.85	Kel Kerobokan kelod
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik disusun	2 jenis	2 jenis	33.24	2 jenis	33.24	2 jenis	36.57	2 jenis	36.57	2 jenis	40.23	2 jenis	179.85	Kel Kerobokan kelod
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	13 lingkungan	13 lingkungan	82.29	13 lingkungan	82.29	13 lingkungan	90.52	13 lingkungan	90.52	13 lingkungan	99.57	13 lingkungan	445.18	Kel Kerobokan kelod
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 jenis	3 jenis	112.72	3 jenis	112.72	3 jenis	123.99	3 jenis	123.99	3 jenis	136.39	3 jenis	609.81	Kel Kerobokan kelod
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jenis kegiatan promosi kesehatan dan	3 jenis	3 jenis	24.28	3 jenis	24.28	3 jenis	26.70	3 jenis	26.70	3 jenis	29.37	3 jenis	131.33	Kel Kerobokan kelod
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jenis pelayanan adminitrasi kependudukan	13 lingkungan	13 lingkungan	26.68	13 lingkungan	26.68	13 lingkungan	29.35	13 lingkungan	29.35	13 lingkungan	32.29	13 lingkungan	144.35	Kel Kerobokan kelod

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KECAMATAN KUTA SELATAN				1,103.22		1,213.55		1,294.55		1,424.01		1,566.41		6,601.74	Kec. Kuta Selatan
22	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya	11 Jenis	11 Jenis	341.53	11 Jenis	375.68	11 Jenis	413.25	11 Jenis	454.57	11 Jenis	500.03	11 Jenis	2,085.05	Kec. Kuta Selatan
33	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	43.94	1 Dokumen	48.34	1 Dokumen	53.17	1 Dokumen	58.49	1 Dokumen	64.34	5 dokumen	268.28	Kec. Kuta Selatan
29	PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah Dokumen Data	2 Jenis	2 Jenis	23.93	2 Jenis	26.32	2 Jenis	28.95	2 Jenis	31.85	2 Jenis	35.03	10 jenis	146.08	Kec. Kuta Selatan
46	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi Yang Dipantau	3 Desa dan 3 Kelurahan	3 Desa dan 3 Kelurahan	112.55	3 Desa dan 3 Kelurahan	123.81	3 Desa dan 3 Kelurahan	136.19	3 Desa dan 3 Kelurahan	149.81	3 Desa dan 3 Kelurahan	164.79	3 Desa dan 3 Kelurahan	687.13	Kec. Kuta Selatan
38	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	66.20	3 kegiatan	72.82	3 kegiatan	39.76	3 kegiatan	43.73	3 kegiatan	48.10	15 kegiatan	270.61	Kec. Kuta Selatan
78	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya	1 jenis	1 Jenis	407.27	1 Jenis	448.00	1 Jenis	492.80	1 Jenis	542.07	1 Jenis	596.28	1 Jenis	2,486.42	Kec. Kuta Selatan
79	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis Pelayanan Admistrasi Kependudukan	7 Jenis	7 Jenis	101.64	7 Jenis	111.80	7 Jenis	122.98	7 Jenis	135.28	7 Jenis	148.81	7 Jenis	620.51	Kec. Kuta Selatan
81	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Desa/kelurahan yang dilaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	6 desa/ kel	6 desa/ kel	6.17	6 desa/ kel	6.79	6 desa/ kel	7.46	6 desa/ kel	8.21	6 desa/ kel	9.03	6 desa/ kel	37.66	Kec. Kuta Selatan
	KELURAHAN BENOA				314.92		346.41		381.05		419.15		461.07		1,922.59	Kelurahan Benoa
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	18.90	1 jenis dokumen	20.78	1 jenis dokumen	22.86	1 jenis dokumen	25.15	1 jenis dokumen	27.66	1 jenis dokumen	115.36	Kelurahan Benoa
	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data / informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	81.34	2 jenis	89.47	2 jenis	98.42	2 jenis	108.26	2 jenis	119.09	2 jenis	496.57	Kelurahan Benoa
	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	16 Lingkungan	16 Lingkungan	37.66	16 Lingkungan	41.42	16 Lingkungan	45.57	16 Lingkungan	50.12	16 Lingkungan	55.14	16 Lingkungan	229.91	Kelurahan Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi dalam membangun desa	4 jenis	4 jenis	115.18	4 jenis	126.70	4 jenis	139.37	4 jenis	153.30	4 jenis	168.63	4 jenis	703.18	Kelurahan Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan kependudukan	8 jenis	8 jenis	61.85	8 jenis	68.03	8 jenis	74.83	8 jenis	82.32	8 jenis	90.55	8 jenis	377.57	Kelurahan Benoa
28	KELURAHAN TANJUNG BENOA				361.45		397.59		437.35		481.09		529.19		2,206.67	Kel. Tanjung Benoa
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis	1 jenis	19.13	1 jenis	21.04	1 jenis	23.14	1 jenis	25.46	1 jenis	28.00	1 jenis	116.76	Kel. Tanjung Benoa
	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	18.46	2 jenis	20.31	2 jenis	22.34	2 jenis	24.58	2 jenis	27.03	2 jenis	112.72	Kel. Tanjung Benoa
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Jumlah lokasi yang dipantau	6 lingkungan	6 lingkungan	41.80	6 lingkungan	45.98	6 lingkungan	50.58	6 lingkungan	55.64	6 lingkungan	61.20	6 lingkungan	255.20	Kel. Tanjung Benoa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	4 jenis	157.59	4 jenis	173.34	4 jenis	190.68	4 jenis	209.75	4 jenis	230.72	4 jenis	962.07	Kel. Tanjung Bena
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 jenis	1 jenis	87.07	1 jenis	95.77	1 jenis	105.35	1 jenis	115.88	1 jenis	127.47	1 jenis	531.54	Kel. Tanjung Bena
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	37.41	7 jenis	41.15	7 jenis	45.26	7 jenis	49.79	7 jenis	54.77	7 jenis	228.37	Kel. Tanjung Bena
	KELURAHAN JIMBARAN				336.94		336.94		370.63		370.63		407.69		1,822.83	Kel. Jimbaran
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	17.32	1 jenis dokumen	17.32	1 jenis dokumen	19.05	1 jenis dokumen	19.05	1 jenis dokumen	20.95	1 jenis dokumen	93.68	Kel. Jimbaran
	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	34.18	2 jenis	34.18	2 jenis	37.60	2 jenis	37.60	2 jenis	41.36	2 jenis	184.91	Kel. Jimbaran
	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	14 lingkungan	14 lingkungan	38.81	14 lingkungan	38.81	14 lingkungan	42.69	14 lingkungan	42.69	14 lingkungan	46.96	14 lingkungan	209.97	Kel. Jimbaran
	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	5 lembaga	5 lembaga	121.90	5 lembaga	121.90	5 lembaga	134.09	5 lembaga	134.09	5 lembaga	147.50	5 lembaga	659.49	Kel. Jimbaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jenis kegiatan promosi kesehatan dan	1 jenis	1 jenis	52.49	1 jenis	52.49	1 jenis	57.74	1 jenis	57.74	1 jenis	63.51	1 jenis	283.96	Kel. Jimbaran
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jumlah jenis pelayanan adminitrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	72.24	7 jenis	72.24	7 jenis	79.46	7 jenis	79.46	7 jenis	87.41	7 jenis	390.81	Kel. Jimbaran
	KECAMATAN MENGWI				1,161.33		1,274.64		1,399.28		1,536.39		1,687.20		7,058.84	Kec. Mengwi
15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan Pengembangan Nilai Budaya	13 Jenis	13 Jenis	437.84	13 Jenis	481.62	13 Jenis	529.79	13 Jenis	582.76	13 Jenis	641.04	13 Jenis	2,673.06	Kec. Mengwi
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	53.02	1 Dokumen	58.32	1 Dokumen	64.15	1 Dokumen	70.57	1 Dokumen	77.62	1 Dokumen	323.67	Kec. Mengwi
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah Dokumen data	2 Jenis	2 Jenis	23.37	2 Jenis	23.71	2 Jenis	24.08	2 Jenis	24.49	2 Jenis	24.94	2 Jenis	120.60	Kec. Mengwi
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi Yang dipantau	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel	95.23	20 Desa/Kel	104.75	20 Desa/Kel	115.22	20 Desa/Kel	126.75	20 Desa/Kel	139.42	20 Desa/Kel	581.37	Kec. Mengwi
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah Jenis Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	3 Jenis	3 Jenis	119.53	3 Jenis	130.66	3 Jenis	142.90	3 Jenis	156.37	3 Jenis	171.18	3 Jenis	720.64	Kec. Mengwi
83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis-jenis pengelolaan keragaman budaya	3 Jenis	3 Jenis	393.90	3 Jenis	433.29	3 Jenis	476.62	3 Jenis	524.28	3 Jenis	576.71	3 Jenis	2,404.80	Kec. Mengwi
85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jenis pelayanan administrasi pendudukan	7 Jenis	7 Jenis	15.89	7 Jenis	17.48	7 Jenis	19.23	7 Jenis	21.16	7 Jenis	23.27	7 Jenis	97.04	Kec. Mengwi
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan penentasan kemiskinan	3701 RTM	3701 RTM	11.28	3701 RTM	12.41	3701 RTM	13.65	3701 RTM	15.02	3701 RTM	16.52	3701 RTM	68.88	Kec. Mengwi
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kel	20 desa / kelurahan	desa / kelurah	11.27	desa / kelurah	12.39	desa / kelurah	13.63	desa / kelurah	15.00	desa / kelurah	16.50	desa / kelurah	68.79	Kec. Mengwi
	KELURAHAN SEMPIDI				376.04		373.99		411.39		452.52		497.78		2,111.71	Kel Sempidi
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	35.53	2 jenis dokumen	39.08	2 jenis dokumen	42.99	2 jenis dokumen	47.28	2 jenis dokumen	52.01	2 jenis dokumen	216.89	Kel Sempidi
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	16.18	2 jenis	17.79	2 jenis	19.57	2 jenis	21.53	2 jenis	23.68	2 jenis	98.75	Kel Sempidi
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	10 lingkungan	10 lingk	45.76	10 lingk	50.34	10 lingk	55.37	10 lingk	60.91	10 lingk	67.00	10 lingk	279.39	Kel Sempidi
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam	5 lembaga	5 lembaga	246.29	5 lembaga	231.26	5 lembaga	254.39	5 lembaga	279.83	5 lembaga	307.81	5 lembaga	1,319.57	Kel Sempidi
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jenis kegiatan pembinaan kesehatan pemberdayaan masyarakat	1 jenis	1 jenis	22.03	1 jenis	24.24	1 jenis	26.66	1 jenis	29.33	1 jenis	32.26	1 jenis	134.52	Kel Sempidi
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jumlah jenis pelayanan kependudukan	7 jenis	7 jenis	10.25	7 jenis	11.28	7 jenis	12.41	7 jenis	13.65	7 jenis	15.01	7 jenis	62.59	Kel Sempidi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KELURAHAN LUKLUK				215.93		292.33		292.33		321.57		321.57		1,443.73	Kel Lukluk
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	19.79	1 jenis dokumen	19.95	1 jenis dokumen	19.95	1 jenis dokumen	21.95	1 jenis dokumen	21.95	1 jenis dokumen	103.58	Kel Lukluk
	PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	25.69	2 jenis	28.06	2 jenis	28.06	2 jenis	30.87	2 jenis	30.87	2 jenis	143.55	Kel Lukluk
	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	9 Lingkungan	9 Lingkungan	42.15	9 Lingkungan	42.15	9 Lingkungan	42.15	9 Lingkungan	46.37	9 Lingkungan	46.37	9 Lingkungan	219.20	Kel Lukluk
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	4 jenis	110.94	4 jenis	183.64	4 jenis	183.64	4 jenis	202.00	4 jenis	202.00	4 jenis	882.22	Kel Lukluk
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	17.36	7 jenis	18.53	7 jenis	18.53	7 jenis	20.38	7 jenis	20.38	7 jenis	95.18	Kel Lukluk
	KELURAHAN KAPAL				651.26		284.97		312.50		312.50		312.50		1,873.74	Kel Kapal
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	18.10	1 jenis dokumen	17.45	1 jenis dokumen	18.23	1 jenis dokumen	18.23	1 jenis dokumen	18.23	1 jenis dokumen	90.23	Kel Kapal
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data / informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	31.44	2 jenis	31.44	2 jenis	34.59	2 jenis	34.59	2 jenis	34.59	2 jenis	166.65	Kel Kapal
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	16 lingkungan	16 lingkungan	42.11	16 lingkungan	42.11	16 lingkungan	46.32	16 lingkungan	46.32	16 lingkungan	46.32	16 lingkungan	223.18	Kel Kapal
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	4 lembaga	4 lembaga	132.67	4 lembaga	183.80	4 lembaga	202.18	4 lembaga	202.18	4 lembaga	202.18	4 lembaga	923.03	Kel Kapal
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	10.17	7 jenis	10.17	7 jenis	11.18	7 jenis	11.18	7 jenis	11.18	7 jenis	53.88	Kel Kapal
	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	1 paket	1 paket	204.31		-		-		-		-	1 paket	204.31	Kel Kapal
	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Jumlah tapal batas lingkungan yang dibangun	-	32 unit	212.46		-		-		-		-	32 unit	212.46	Kel Kapal
	KELURAHAN ABIANBASE				200.77		200.77		220.85		220.85		220.85		1,064.08	Kel Abianbase
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi statistik dhaer	2 jenis	2 jenis	17.72	2 jenis	17.72	2 jenis	19.49	2 jenis	19.49	2 jenis	19.49	2 jenis	93.92	Kel Abianbase
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah masyarakat/ lingkungan yang	1 Kelurahan	1 kel	20.78	1 kel	20.78	1 kel	22.86	1 kel	22.86	1 kel	22.86	1 kel	110.13	Kel Abianbase
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	4 jenis	111.35	4 jenis	111.35	4 jenis	122.49	4 jenis	122.49	4 jenis	122.49	4 jenis	590.16	Kel Abianbase
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang di pantau	13 Lingkungan	13 Lingk	42.30	13 Lingk	42.30	13 Lingk	46.54	13 Lingk	46.54	13 Lingk	46.54	13 lingk	224.22	Kel Abianbase
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	8.61	7 jenis	8.61	7 jenis	9.48	7 jenis	9.48	7 jenis	9.48	7 jenis	45.66	Kel Abianbase

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KELURAHAN SADING				203.56		223.92		246.31		270.94		298.04		1,242.77	Kel. Sading
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 jenis	1 jenis	14.38	1 jenis	15.82	1 jenis	17.40	1 jenis	19.14	1 jenis	21.05	1 jenis	87.787	Kel. Sading
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	2 jenis	21.01	2 jenis	23.11	2 jenis	25.42	2 jenis	27.96	2 jenis	30.75	2 jenis	128.244	Kel. Sading
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Jumlah lokasi yang dipantau	9 lingkungan	9 lingkungan	38.48	9 lingkungan	42.33	9 lingkungan	46.56	9 lingkungan	51.22	9 lingkungan	56.34	9 lingkungan	234.924	Kel. Sading
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	4 jenis	114.66	4 jenis	126.12	4 jenis	138.73	4 jenis	152.61	4 jenis	167.87	4 jenis	699.980	Kel. Sading
	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	15.04	7 jenis	16.55	7 jenis	18.20	7 jenis	20.02	7 jenis	22.02	7 jenis	91.839	Kel. Sading
	KECAMATAN ABIANSEMAL				988.80		1,026.48		1,029.96		1,117.76		1,170.36		7,373.83	Kec Abiansemal
11	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Kegiatan pengembangan nilai budaya	13 jenis	13 jenis	339.23	13 jenis	339.23	13 jenis	339.23	13 jenis	339.23	13 jenis	339.23	13 jenis	1,696.15	Kec Abiansemal
43	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	40.44	1 dokumen	41.69	1 dokumen	207.19	Kec Abiansemal						
33	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data	2 jenis	2 jenis	23.38	2 jenis	23.38	2 jenis	23.38	2 jenis	23.38	2 jenis	23.38	2 jenis	16.92	Kec Abiansemal
22	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	18 desa	18 desa	86.61	18 desa	85.00	18 desa	426.61	Kec Abiansemal						
12	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	5 jenis	105.87	5 jenis	106.99	5 jenis	70.64	5 jenis	114.62	5 jenis	119.02	5 jenis	2,657.62	Kec Abiansemal
14	PROGRAM KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	3 jenis	362.13	3 jenis	398.34	3 jenis	438.17	3 jenis	481.99	3 jenis	530.19	3 jenis	2,210.82	Kec Abiansemal
16	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	8 jenis	19.90	8 jenis	20.61	8 jenis	102.36	Kec Abiansemal						
17	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Desa yang dilakukan pengentasan kemiskinan	18 desa	18 desa	6.42	18 desa	6.42	18 desa	6.42	18 desa	6.42	18 desa	6.42	18 desa	32.08	Kec Abiansemal
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	18 kali	18 kali	4.82	18 kali	4.82	18 kali	4.82	18 kali	4.82	18 kali	4.82	18 kali	24.09	Kec Abiansemal
	KECAMATAN PETANG				960.68		1,022.74		1,125.02		1,237.52		1,361.27		5,707.24	Kec. Petang
09	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	12 jenis	340.53	12 jenis	374.58	12 jenis	412.04	12 jenis	453.24	12 jenis	498.56	12 jenis	2,078.94	Kec. Petang
10	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	43.15	1 Dokumen	47.47	1 Dokumen	52.22	1 Dokumen	57.44	1 Dokumen	63.18	1 Dokumen	263.46	Kec. Petang
13	PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	Dokumen Data	2 Jenis	2 Jenis	23.97	2 Jenis	4.36	2 Jenis	4.80	2 Jenis	5.28	2 Jenis	5.81	2 Jenis	44.22	Kec. Petang
15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah desa yang diajaga ketertibannya	7 Desa	7 Desa	91.08	7 Desa	88.18	7 Desa	97.00	7 Desa	106.70	7 Desa	117.37	7 Desa	500.33	Kec. Petang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	2 kegiatan	5 kegiatan	73.76	5 kegiatan	81.13	5 kegiatan	89.24	5 kegiatan	98.17	5 kegiatan	107.99	5 kegiatan	450.29	Kec. Petang
17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya	3 Jenis	1 Jenis	355.35	1 Jenis	390.88	1 Jenis	429.97	1 Jenis	472.97	1 Jenis	520.27	1 Jenis	2,169.44	Kec. Petang
18	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi	7 jenis	7871 kk, 28.720 jiwa	15.95	7 jenis	17.55	7 jenis	19.30	7 jenis	21.23	7 jenis	23.35	7 jenis	97.39	Kec. Petang
19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Karang Taruna/PSM yang dibina	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	6.70	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	7.37	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	8.11	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	8.92	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	9.82	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	40.93	Kec. Petang
10	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	392 RTM	392 RTM	4.48	392 RTM	4.92	392 RTM	5.42	392 RTM	5.96	392 RTM	6.55	392 RTM	27.33	Kec. Petang
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Desayang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7 desa	7 desa	5.72	7 desa	6.29	7 desa	6.92	7 desa	7.61	7 desa	8.37	7 desa	34.92	Kec. Petang

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja pemerintah daerah berkenaan.

Tabel 9.1 berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Daerah.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1.	Pertumbuhan PDRB	7.07	7.64	6.82	6.97	6,24 - 6,58	7,2 - 7,6	7,75 - 8,18	7,91 - 8,35	8,2 - 8,65	8,5 - 8,97	8,5 - 8,97
1.2.	Laju inflasi provinsi	3.75	4.71	7.35	8.03	2.70	4,38 - 4,85	4,3 - 4,75	4,21 - 4,65	4,12 - 4,55	4,03 - 4,45	4,03 - 4,45
1.3.	PDRB per kapita	39.80	41.79	43.58	45.56	44,97 - 49,7	49,3 - 54,49	52,05 - 57,53	55,07 - 60,87	58,48 - 64,63	62,3 - 68,86	62,3 - 68,86
1.4.	Indeks Gini	0.3385	0.3258	0.3468	0.3404	0,3694 - 0,4082	0,3377 - 0,3732	0,31 - 0,3427	0,3251 - 0,3593	0,3319 - 0,3669	0,3379 - 0,3735	0,3379 - 0,3735
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	19.20	19.75	15.12	18.64	18,8 - 20,78	19,46 - 21,51	20,04 - 22,15	20,43 - 22,58	20,9 - 23,09	21,35 - 23,6	21,35 - 23,6
1.6.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	2.62	2.16	2.46	2.54	2,39 - 2,64	2,34 - 2,59	2,31 - 2,56	2,29 - 2,53	2,27 - 2,51	2,24 - 2,48	2,24 - 2,48
1.7.	Pertumbuhan ekonomi (%)	7.07	7.64	6.82	6.97	6,24 - 6,58	7,2 - 7,6	7,75 - 8,18	7,91 - 8,35	8,2 - 8,65	8,5 - 8,97	8,5 - 8,97
1.8.	Laju inflasi (%)	2.33	3.59	7.67	7.31	2,34 - 2,58	3,99 - 4,41	3,91 - 4,32	3,83 - 4,23	3,75 - 4,14	3,67 - 4,06	3,67 - 4,06
1.9.	PDRB Konstan Th. 2010 (Triliyun)	22.32	24.03	25.67	27.46	27,72 - 30,64	31,72 - 35,06	34,19 - 37,79	36,91 - 40,8	39,95 - 44,16	43,36 - 47,93	43,36 - 47,93
1.10.	PDRB berlaku (Triliyun)	31.79	27.20	31.79	37.06	39,22 - 43,35	50,99 - 56,35	58,44 - 64,59	67,01 - 74,06	76,94 - 85,04	88,48 - 97,79	88,48 - 97,79
1.11.	PDRB per kapita (ADHB)	41.91	47.31	53.97	61.49	66,64 - 67,31	82,99 - 83,82	93,18 - 94,12	104,72 - 105,77	117,95 - 119,14	133,15 - 134,49	133,15 - 134,49
	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1.	IPM	76.66	77.26	77.63	77.98	78,14 - 82,08	78,76 - 82,74	79,06 - 83,06	79,38 - 83,39	79,71 - 83,73	80,05 - 84,1	80,05 - 84,1
2.	Angka usia harapan hidup	73.91	74.05	74.19	74.30	74,31 - 78,03	74,5 - 78,23	74,58 - 78,31	74,65 - 78,38	74,73 - 78,47	74,81 - 78,56	74,81 - 78,56
3.	Pengeluaran per Kapita (Rp. 000)	15,507.72	15,794.76	16,024.52	16,080.47	16326,87 - 17229,36	17024,24 - 17965,28	17612,16 - 18585,7	18007,89 - 19003,31	18512,87 - 19536,19	18935,29 - 19981,96	18935,29 - 19981,96
4.	IPG	93.25	93.89	94.68	94.88	95,09 - 95,61	95,9 - 96,43	96,23 - 96,76	96,62 - 97,15	97,02 - 97,56	97,45 - 97,98	97,45 - 97,98
5.	IDG				55.24	55,37 - 58,16	55,84 - 58,66	56,03 - 58,86	56,26 - 59,1	56,49 - 59,35	56,74 - 59,61	56,74 - 59,61
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat											
1.	Pendidikan											
1.1.	Angka melek huruf (BPS)	92.96	93.01	93.93	95.71							
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (BPS)	8.96	9.07	9.18	9.29							
1.3.	Angka partisipasi kasar	115.01	129.23	117.73	120.37	118.89	100	100	100	100	100	100
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	99.95	99.96	99.99	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.	Angka Partisipasi Murni											
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96.87	103.67	98.62	99.12	99.98	100	100	100	100	100	100
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	91.28	101.62	91.59	92.1	109.95	100	100	100	100	100	100
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	78.04	91.09	83.69	83.72	104.44	100	100	100	100	100	100
1.6.	PAUD :											
1.6.1.	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	96.02	96.46	100.45	102.93	103.06	100	100	100	100	100	100
1.7.	Pendidikan Dasar 9 Tahun :											
1.7.1.	APK SD/MI (%)	110.04	117.84	112.31	113.16	113.57	100	100	100	100	100	100
1.7.2.	APM SD/MI (%)	96.87	103.67	98.62	99.12	99.98	100	100	100	100	100	100
1.7.3.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%)	100	94.6	97.91	96.99	99.37	100	100	100	100	100	100
1.7.5.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	99.99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.6.	Setiap sekolah memiliki minimal 6 ruang kelas (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.7.7.	Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.8.	Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%)	55.71782288	60.14586716	64.57391144	69.00195572	73.43	82.42804428	86.85608856	91.28413284	95.71217712	100	100
1.7.9.	Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%)	70	72	74	77	80	86	88	92	96	99	100
1.7.10.	Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7.11.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	36	37	38	39	80	85	87	90	95	100	100
1.7.12.	Setiap Sekolah memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi (%)	42	43	44	45	46	70	80	90	95	100	100
1.7.13.	APK SMP/MTs (%)	122.57	137.63	125.12	128.14	123.16	100	100	100	100	100	100
1.7.14.	APM SMP/MTs (%)	91.28	101.62	91.59	92.19	109.95	100	100	100	100	100	100
1.7.15.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0.01	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.16.	Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA (%)	89.27	94.89	98.44	100	95.93	100	100	100	100	100	100
1.7.17.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	99.97	99.99	99.99	100	100	100	100	100	100	100
1.7.18.	Rasio Rombel / Kelas 1:1 (%)	1.4	1.38	1.36	1.33	1.3	1.15	1.1	1.05	1.05	1	1
1.7.19.	Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.20.	Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%)	99.89	99.97	99.99	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.21.	Setiap sekolah memiliki Lab ipa lengkap dengan prabotnya (%)	99.98	99.99	99.76	98.97	98.08	100	100	100	100	100	100
1.7.22.	Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit)	99.79	99.88	99.99	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.23.	Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%)	84	86	90	95	97	98	98.5	99	99.5	100	100
1.7.24.	Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7.25.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	48	49	50	55	80	85	87	90	95	100	100
1.7.26.	Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%)	23	24	25	26	27	70	80	90	95	100	100
1.8.	Pendidikan Menengah :											
1.8.1.	APK SMA/MA/SMK (%)	112.42	132.21	115.75	119.81	119.95	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	APM SMA/MA/SMK (%)	78.04	91.09	83.69	83.72	104.44	0	0	0	0	0	0
1.8.3.	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%)	0	0.12	0.06	0.01	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	100	100	99.98	100	100	0	0	0	0	0	0
1.8.5.	Rasio Rombel / Kelas 1 : 1 (%)	1.35	1.29	1.28	1.26	1.3	0	0	0	0	0	0
1.8.6.	Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%)	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
1.8.7.	Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%)	81	81.85	81.95	81.99	82.93	0	0	0	0	0	0
1.8.8.	Setiap sekolah memiliki Lab IPA lengkap dengan prabotnya (%)	80.97	80.49	81.75	81.99	82.11	0	0	0	0	0	0
1.8.9.	Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit)	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
1.8.10.	Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%)	99.06	99.99	99.99	99.87	99.88	0	0	0	0	0	0
1.8.11.	Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1.8.12.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	45	46	47	48	49	0	0	0	0	0	0
1.8.13.	Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%)	45	46	47	48	49	0	0	0	0	0	0
1.9.	Pendidikan Non Formal :											
1.9.1.	Angka Kelulusan Paket A (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.9.2.	Angka Kelulusan Paket B (%)	100	100	98	100	99	100	100	100	100	100	100
1.9.3.	Angka Kelulusan Paket C (%)	100	100	93	100	100	100	100	100	100	100	100
1.10.	Manajemen Pelayanan Pendidikan :											
1.10.1.	Persentase Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.10.2.	Persentase SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.10.3.	Persentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.10.4.	Persentase SMA/SMK/MA Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
1.11.	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan :											
1.11.1.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	82.50	89.19	92.50	94.40	91.22	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.11.2.	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	85.90	88.00	90.00	93.30	91.81	95.00	96.00	97.00	98.00	100.00	100.00
1.11.3.	Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	88.00	89.50	90.00	90.90	92.63	-	-	-	-	-	-
2.	Kesehatan :											
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	0,951/1000	0,997/ 1000	0,997/ 1000	0,995/ 1000							
2.2.	Angka usia harapan hidup	71.85	71.9	71.91	74.3	74,3	74,6	74,7	74,8	74,9	75	75
2.3.	Prevalensi balita gizi buruk	0.21	0.11	0.42	0.25	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
2.4.	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya :											
2.4.1	Persentase Puskesmas kondisi baik (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.2	Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk)	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109
2.5.	Pengelolaan BLUD RSUD :											
2.5.1.	Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat	-	85%	87.50%	90%	90%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
2.5.2.	Kinerja Pelayanan	-	61.75%	66.13%	61.63%	65%	76%	77%	78%	79%	80%	80%
2.5.3.	Kinerja Keuangan	-	83%	74.50%	79%	76.50%	80%	81%	82%	83%	85%	85%
2.6.	Pengawasan Obat dan Makanan :											
2.6.1.	Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%)	90,50	91,75	92,15	92,50	93,75	94,75	95,20	96	96,50	96,75	96,75
2.7.	Pengembangan Tenaga Kesehatan :											
2.7.1.	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	36.5	26.2	55.3	110	110	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.7.2.	Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk)	78.2	73.5	73.3	61.72	61.72	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.9.	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan											
2.9.1.	Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.2.	Persentase Faskes swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS	0	0	0	40%	45%	50%	55%	80%	90%	100%	100%
2.10.	Upaya Kesehatan Masyarakat :											
2.10.1.	Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
2.11.	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	74.5	77.39	78	79	80.16	80.25	80.5	80.75	81	81	81
2.11.1	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	0	0	0	2%	3%	20%	30%	40%	50%	53%	53%
2.11.2.	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	0	0	0	2%	3%	20%	30%	40%	50%	53%	53%
2.12.	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.1.	Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) (%)	3	3	4	7	3	3	3	3	3	3	3
2.12.2.	AFP rate per 10.000 penduduk < 15 tahun	2.13	1.46	6.8	1.5	2.5						
2.12.3.	Penemuan penderita Pneumonia balita (%)	48.9	40.2	45.2	53.8	45.6	100	100	100	100	100	100
2.12.4.	Penemuan pasien baru TB BTA positif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.5.	Penderita DBD yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.6.	Penemuan penderita Diare (%)	<0.5	<0.5	<0.5	0.43	0.43	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
2.12.7.	Penemuan dan penanganan HIV AIDs (%)	<0.5	<0.5	<0.5	0.43	0.43	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.6
2.13.	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak											
2.13.1.	Angka usia harapan hidup (tahun)	106.7	132	98.91	43.7	99.89	93.83	90.83	87.83	85		
2.13.2.	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH	4.27	2.83	2.54	4.09	2.99	3.74	3.37	2.99	2.99	2.99	2.99
2.13.3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH	5.1	5.2	3.1	2.8	4.7	3.62					
2.13.4.	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)	96.14	90.34	93.28	95.3	90.36	92	93	94	95	95	95
2.13.5.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	60.34	54.93	60.62	73.23	74.21	77	78	80	80	80	80
2.13.6.	Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani (%)	99.09	92.03	95.7	99.72	94.24	92	93	94	95	97	97
2.13.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang	97.77	90.44	99.97	95.66	93.76	98.3	98.4	98.5	98.6	98.6	98.6
2.13.8.	Cakupan pelayanan ibu nifas (%)	65.43	50.73	80.76	87.77	71.98	72.5	73	75	80	80	80
2.13.9.	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	105,87	96,42	96,77	97,88	96,57	96,62	96,64	96,65	96,67	96,97	96,97
2.13.10.	Cakupan kunjungan bayi (%)	105,87	96,42	96,77	97,88	96,57	96,62	96,64	96,65	96,67	96,97	96,97
2.14.	Perbaikan Gizi Masyarakat	3.79	3.27	3.85	3.01	2.97	12.3	12.1	11	10	10	10
2.14.1.	Persentase Balita gizi kurang (%)	13.1	9.96	8.69	8.39	10.53	20	20	20	20	20	20
2.14.2.	Prevalensi Balita Stunting (%)	76.29	78.06	80.77	84.44	86.02	84	85	85	85	85	85
2.14.3.	Cakupan Pelayanan Anak Balita (D/S) (%)	0.21	0.11	0.42	0.16	0.21	12.3	12.1	11	10	10	10
2.14.4.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.14.5.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	61.34	64.54	66.69	68.2	70.29	44	47	50	50		
2.14.6.	Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.14.7.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.8.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat (%)	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
2.14.9.	Rasio Posyandu per 1.000 balita	90,91	92,92	93,29	94,35	95,91	95,92	99,29	99,35	99,45	100	100
2.15.	Pengembangan Lingkungan Sehat	99,88	99,88	99,89	99,92	99,95	100	100	100	100	100	100
2.15.1.	Persentase Keluarga memiliki Jamban (%)	90,91	92,92	93,29	94,35	95,91	95,92	99,29	99,35	99,45	100	100
2.15.2.	Persentase Keluarga memiliki Sarana Air Bersih (%)	99,88	99,88	99,89	99,92	99,95	100	100	100	100	100	100
2.16	Persentase Sarana dan Prasarana sesuai standar kelas rumah sakit	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Ketenagakerjaan											
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja	54.53	54.49	56.18	53.58	0	0	0	0	0	0	0
4.	Perumahan (Bidang Praswil)											
4.1.	pengembangan perumahan :											
4.1.1.	Rumah layak huni (%)	74.67%	75.36%	76.05%	76.74%	77.43%	79,50%	80,19%	80,88%	81,57%	82,26%	82,26%
4.3.	Lingkungan sehat perumahan						91.90%	92.90%	94.40%	96.50%	97.20%	97.20%
4.3.1.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%)	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
4.3.2.	Persentase Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	88,00%	86,00%	86,96%	82,77%	75,62%	87,43%	90,43%	93,43%	96,43%	100%	100%
5.	Penataan Ruang (Bidang Praswil) :											
5.1.	Perencanaan Tata Ruang :											
5.1.1.	Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah)	-	-	-	-	6	1	2	2	2	2	2
5.1.2.	Terlaksananya perijinan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang.	-	-	-	-	-	2	4	4	4	4	4
5.2.	Pemanfaatan Ruang:											
5.2.2.	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinciannya	-	-	3000	5000	4000	4000	3000	2000	2000	1500	1500
6.	Perencanaan :											
6.1.	Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan :											
6.1.1.	Hasil Evaluasi RKPD (dokumen)	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.1.2.	Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen)	-	-	Ada	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Perencanaan Pembangunan Daerah :											
6.2.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Perhubungan :											
7.1.	Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan :											
7.1.1.	Jumlah Terminal Bis	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
7.2.	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ :											
7.2.1.	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ berfungsi dengan baik (%)	87,0%	87,2%	87,4%	88,6%	89,9%	92,0%	93,8%	95,2%	96,8%	98,4%	98,4%
7.3.	Peningkatan Pelayanan Angkutan :											
7.3.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	372750	1552142	1307679	1279597	695433	920000	966000	1014300	1065015	1118265.75	1118265.75
7.3.2.	Rasio ijin trayek per jumlah penduduk	0,0000075	0,0000071	0,0000051	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050
7.3.3.	Persentase Angkutan darat terhadap penumpang (%)	44.5%	37.0%	59.0%	64.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%
7.4.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor :											
7.4.1.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KTR)	46 menit	46 menit	46 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit
7.4.2.	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	7138	10500	12285	13689	13655	15055	15808	16598	17428	18300	18300
8.	Lingkungan Hidup (Bidang Praswil) :											
8.1.	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup :											
8.1.1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
8.1.2.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.1.3.	Pencemaran status mutu air (%)	73.33	92.86	79.22	76.25	75.00	77.00	78.00	79.00	79.00	79.00	79.00
8.1.4.	Penegakan hukum lingkungan (%)	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
8.2.	Peningkatan Pengendalian Polusi :											
8.2.1.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.3.	Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam :											
8.3.2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.3.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.4.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) :											
8.4.1.	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)	8,47 Ha	8,54 Ha	10,58 Ha	12,20 Ha	12,30 Ha	12,65 Ha	12,72 Ha	13,08 Ha	14,03Ha	14,50 Ha	14,50 Ha
8.5.	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup :											
8.5.1.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	-	-	-	42.56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.6.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan :											
8.6.1.	Prosentase Cakupan pelayanan sampah	25.00%	25.00%	27.00%	26.00%	30.00%	37.00%	42.00%	47.00%	52.00%	57.00%	57.00%
8.6.2.	Prosentase Sampah yang Tertangani	72,9	89,3	97,3	97,9	78,5	89,8	91,1	92,1	93,3	94,4	94,4
9.	Pertanahan :											
9.1.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah :											
9.1.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	-	148115 bidang	161592 bidang	175626 bidang	189148 bidang						
9.2.	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan :	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9.2.1.	Penyelesaian kasus tanah Negara	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
10.	Kependudukan Dan Catatan Sipil											
10.1.	Penataan administrasi kependudukan :											
10.1.1.	Kepemilikan KTP (%)	99%	99%	98%	99%	90.02%	92%	94%	95%	97%	100%	100%
10.1.2.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) (%)	-	97%	98%	99%	100%						
10.1.3.	Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	99.43%		98%	99%	100%						
10.1.4.	Rasio bayi berakte kelahiran	70%	86%	90%	92%	84.33%	85%	87%	89%	90%	92%	92%
10.1.5.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	74%	77%	60%	10%	80%	85%	90%	93%	89%	95%	95%
10.1.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	99%	99%	98%	99%	90%	94%	95%	98%	99%	100%	100%
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang Litbang)											
11.1.	Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan :											
11.1.1.	Jumlah organisasi perempuan aktif (%)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
11.2.	penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak :											
11.2.1.	Jumlah Focal Point SKPD yang aktif (unit)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
11.2.2.	Keterampilan perencanaan SKPD mengenai cara penyusunan PPRG (SKPD)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
11.2.3.	Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok)	-	-	1	1	1	7	7	7	7	7	7
11.2.4.	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif (%)	1	1	1	1	63	63	63	63	63	63	63
11.3.	keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak :											
11.3.1.	Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk perda dan perbup (buah)	3	2	1	1	7	7	1	1	1	1	12
11.3.2.	Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dalam bentuk perda dan Perbup (buah)	6	57	67	-	75	-	-	-	-	-	-
11.4.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak :											
11.4.1.	Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan (unit)	1	1	1	1	13	35	40	50	55	63	63
11.4.2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	0.45%	0.48%	0.50%								
11.4.3.	Rasio KDRT	0.011%	0.023%	0.012%	0.015%	0.012%						
11.4.4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	0.44%	0.42%	0.43%	0.31%							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
11.4.5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	0.60%	100%	100%	100%	100%	100%
11.4.6	IPG	74.31	75.27	-	75.30	75.47	75.48	75.49	75.50	75.51	75.52	75.52
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
12.1.	Keluarga Berencana :											
12.1.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,14	2,10	2,11	2,12	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	2,00	2,00
12.1.2.	Rasio akseptor KB (%)	85,26	85,31	85,32	84,31	78,64	78,76	78,82	78,86	78,90	78,94	78,94
12.1.3.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	0,20	0,16	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
12.1.4.	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	82,21	85,49	85,57	88,91	75,05	75,26	75,52	76,03	76,40	77,24	77,24
12.1.5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	1,75	1,79	1,67	1,86	1,52	2,39	2,35	2,3	2,25	2,15	2,15
12.1.6.	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan	2,00	1,09	1,07	1,11	1	1	1	1	1	1	1
12.1.7.	Ratio PembantuPembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.1.8.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.1.9.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.2.	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU :											
12.2.1.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	92,56	90,89	88,28	88,55	91,31	89,16	89,23	89,30	89,36	89,43	89,43
12.2.2.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	79,63	85,46	87,55	84,28	94,83	75,73	75,77	75,81	75,84	75,87	75,87
12.3.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR :											
12.3.1.	Jumlah kelompok PIK KRR aktif (unit)	2	2	3	3	6	8	14	17	19	21	87
12.3.2.	Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya)	10	28	15	18	78	24	56	68	76	80	320
13.	Sosial (Bidang Kersos) :											
13.1.	pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya :											
13.1.1.	Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala kabupaten/kota	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	100%	75%	81,25%	81,25%	87,5%	100%	100%
13.1.2.	Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	100%	75%	81,25%	81,25%	87,5%	100%	100%
13.2.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial :											
13.2.1.	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2.2.	Cakupan anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2.3.	Cakupan lanjut usia terlanjar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2.4.	Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2.5.	Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.3.	Pembinaan anak terlanjar :											
13.4.	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma.											
13.4.1.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	75%	87,5%	87,5%	100%	100%	100%
13.5.	Pembinaan panti asuhan/ panti jompo :											
13.5.1.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
13.6.	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) :	758	2082	1585	1899	2004	450	450	450	450	450	100%
13.6.1.	Jumlah Pengemis yang terbina (jiwa)	556	410	430	346	239	400	400	400	400	400	400
13.7.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial :											
14.	Ketenagakerjaan (Bidang Kersos)											
14.1.	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja :											
14.1.1.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.1.2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.1.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.2.	Peningkatan Kesempatan Kerja :											
14.2.3.	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (orang)	1583	1223	451	653	401	600	650	675	700	725	#REF!
14.3.	Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan :											
14.3.1.	Jumlah tenaga kerja kepesertaan Jamsostek (orang)	-	-	-	19100	13102						
14.3.4.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	17	13	17	15	19	16	18	18	19	19	19
14.3.5.	Persentase perusahaan menerapkan Keselamatan dan perlindungan (%)	100	100	92,57	89,22	65,45	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.3.6.	Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	86,11	76,47	83,24	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Koperasi Dan Usaha Kecil menengah :											
15.1.	Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah :											
15.1.1.	Jumlah orang yang dilatih pelatihan kewirausahaan	40 UKM	40 UKM	40 UKM	80 Orang	-	30 Orang					
15.1.2.	Jumlah koperasi dan UMKM bermitra (unit)	14	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20
15.2.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah :											
15.2.1.	Jumlah UMKM yang telah memiliki ijin usaha (unit)	980	1,053	377	1,163	1,108	1,218	1,273	1,328	1,383	1,438	1,438
15.2.2.	Jumlah UMKM yang mampu mengakses permodalan usaha (unit)	61	92	236	225	230	240	242	246	248	250	250
15.3.	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif :											
15.3.1.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	14,754	15,862	17,162	18,366	19,173	21,327	22,404	23,481	24,558	25,635	25,635
15.3.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UMKM (%)	84,74	85,95	89,18	66,83	81,99	83,05	83,65	83,90	84,35	85,10	85,10
15.4.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi :											
15.4.1.	Persentase koperasi aktif (%)	88,87	90,00	78,00	78,92	81,51	81 koperasi					
15.4.2.	Persentase koperasi sehat (%)	14,81 (40)	14,81 (40)	18,51 (50)	14,81 (40)	37,03 (100)	60 koperasi					
15.4.3.	Jumlah koperasi yang telah dilatih prinsip-prinsip koperasi (koperasi)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
16.	Penanaman Modal (Bidang Ekonomi) :											
16.1.	Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi :											
16.1.1.	Jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali
16.1.2.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	25 buku	15 buku	15 buku	15 buku	85 buku	15 buku	15 buku	15 buku	15 buku	15 buku	75 buku
16.2.	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi :											
16.2.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (investor)	689	777	785	1,459	5,739	2,231	2,357	2,496	2,649	2,817	12,550
16.2.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah)	3,173,814,437,239.00	7,180,810,126,088.00	6,147,499,450,989.00	2,618,136,988,815.00	6,329,353,227,774.00	2,419,842,370.05	2,871,927,176.75	3,359,197,642.05	3,899,203,310.35	4,493,089,023.15	17,043,259,522.35
16.2.3.	Jumlah tenaga kerja terserap	4.33	8.73	21.68	6.49	6.34	9,514	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
17.	Kebudayaan (Bidang Kersos) :											
17.1.	Pengembangan Nilai Budaya :											
17.1.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
17.2.	Pengelolaan Kekayaan Budaya :											
17.2.1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	-	52 situs	52 situs	52 situs	52 situs	54 situs	54 situs	56 situs	58 situs	58 situs
17.3.	Pengelolaan Keragaman Budaya :											

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
17.3.1.	Jumlah Kelompok Seni	2334 sekaa/klp	2353 sekaa/klp	2359 sekaa/klp	2365 sekaa/klp	2371 sekaa/klp	2378 sekaa/klp	2378 sekaa/klp				
17.3.3.	Cakupan Kajian Seni	46 sekaa	46 sekaa	58 sekaa	70 sekaa	86 sekaa	104 sekaa	110 sekaa	114 sekaa	118 sekaa	123 sekaa	123 sekaa
17.3.4.	Cakupan Fasilitas Seni	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat				
17.3.5.	Cakupan Gelar Seni	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	25 Kegiatan				
17.3.6.	Misi Kesenian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
17.3.7.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	75 orang				
17.3.8.	Cakupan Organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi
18.	Pemuda Dan Olah Raga :											
19.1.	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda :											
18.1.1.	Jumlah organisasi pemuda	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
18.1.2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	11	13	15	11	11	11	11	11	11	11
18.4.	Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga :											
18.4.1.	Jumlah organisasi olahraga	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
18.4.2.	Jumlah kegiatan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
18.4.3.	Jumlah prestasi olahraga	11 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor				
18.5.	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga :											
18.5.1.	Gelanggan / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.5.2.	Jumlah Lapangan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
19.	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri (Bidang Stamonev):											
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang)	60	46	40	40	40	65	70	75	80	85	375
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah (orang)	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	5
19.4.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%)	92%	93%	94%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.5.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	33.01	33.18	33.47	31.71	31.18	31.18	31.18	31.18	31.18	31.18	155.9
19.6.	Jumlah kasus Penegakan PERDA	1712 pelanggaran	1660 pelanggaran	1608 pelanggaran	1560 pelanggaran	1500 pelanggaran	1000 pelanggaran	900 pelanggaran	800 pelanggaran	700 pelanggaran	600 pelanggaran	600 pelanggaran
19.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.55	0.65	0.7	0.8	0.9	0.9
20.	Otonomi Daerah :											
20.1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	16.66%	16.66%	33.33%	67.00%	67.00%	67.00%	83.33%	83.33%	100.00%	100.00%	100.00%
20.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	80.40%	88.14%	88.32%	96.33%	91.95%	92.05%	92.10%	92.15%	92.20%	92.25%	92.25%
20.3.	Unit pelayanan yang telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Layanan	2	3	5	7	41	30	30	30	30	30	30
20.4.	Masyarakat (unit)	22 Desa	32 Desa	42 Desa	54 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa
20.7.	Persentase SKPD memiliki dan menerapkan SOP/SPP (%)				0.056603774	0.377358491	0.679245283	0.849056604	1	1	1	1
20.8.	Status audit Keuangan BPK	WTP	WTP	OTW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.9.	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa dengan e-procurement melalui LPSE (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.10.	Tersusunnya LKJP Bupati	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.11.	Tersusunnya LPPD Bupati	70 buku	70 buku	70 buku	70 buku	70 buku	70 buku	70 buku				
20.12.	Persentase Desa tertib administrasi ADD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.13.	Persentase desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%)	100	98	97	95	92	92	92	92	92	92	92
20.14.	Inteprestasi evaluasi AKIP Kabupaten	C	CC	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
20.16.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (trilyun rupiah)	1406	1868	2279	2720	2938	3413	3695	3978	4261	4544	5000
21.	Ketahanan Pangan :											
21.1.	Peningkatan Ketahanan Pangan :											
21.1.1.	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)	68,95	62,92	49,12	41,03	33,24	35	40	50	60	70	70
21.1.2.	Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	2246,00	2145,00	2058,00	2160,00	2093,00	210,00	2150,00	2200,00	2225,00	2250,00	2250,00
21.1.3.	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	40,96	42,28	38,66	46,03	45,58	47	47	48	49	50	50
21.1.4.	Penguatan Cadangan Pangan (%)	68.45	62.96	49.12	41.03	33.24	35	40	45	50	55	55

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
21.1.5.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	93.88	95.25	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21.1.6.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	0	0	100	100	85	95	100	100	100	100	100
21.1.7.	Stor Pola Pangan Harapan (SPPH)	0	0	78.16	95.91	51	96.5	97	97.5	98	98.5	98.5
21.1.8.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	0	0	0	100	85	95	100	100	100	100	100
21.1.10.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
21.1.11.	Ketersediaan pangan utama (%)	68.95	62.92	49.12	41.03	33.24	35	40	50	60	70	70
21.1.12.	Konsumsi Energi Per Kapita (kcal/kap/hr)	0	0	2115	2167	2067	2125	2150	2175	2200	2225	2225
21.1.13.	Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	0	0	65	76.1	66.88	70	72.5	75	77.5	80	80
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bidang Litbang):											
22.1.	Meningkatnya kapasitas lembaga desa tentang perencanaan partisipatif	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa				
22.2.	Tersusunnya RPJMDes	43 desa	43 desa	43 desa	43 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
22.3.	Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan dan teknik pendataan profil desa	12 desa/kel.	24 desa/kel.	37 desa/kel.	47 desa/kel.	52 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.
22.4.	Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	12 desa/kel.	24 desa/kel.	37 desa/kel.	40 desa/kel.	42 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.
22.5.	Meningkatnya lembaga dalam penyusunan perencanaan yang responsif gender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.6.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa
22.7.	Meningkatnya LKM berprestasi	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel				
22.8.	Terbangunnya infrastruktur desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
22.9.	Terbangunnya kantor desa yang layak	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa				
22.10.	Terbentuknya BUMDES	0	0	0	0	12 BUMDesa	13 BUMDesa	10 BUMDesa	8 BUMDesa	6 BUMDesa	9 BUMDesa	46 BUMDesa
23.	Statistik (Bidang Stamonev):											
23.1.	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.3.	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi	2.33	3.59	7.67	7.31	2.7						
23.4.	Sistem Informasi Profil Daerah											
23.5.	Buku "Kecamatan dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	Komunikasi Dan Informatika (Bidang Praswil):											
24.1.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :											
24.1.1.	Jumlah Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (pertahun)	1196 adv	1646 adv	2064 adv	2472 adv	3036 adv	3600 adv	3650 adv	3700 adv	3750 adv	3800 adv	18500 adv
24.1.2.	Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari)	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari				
24.2.	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi :											
24.3.	Kerjasama informasi dan media massa :											
24.3.1.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.3.2.	Jumlah surat kabar nasional/lokal (media)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
24.3.3.	Jumlah Web site milik pemerintah daerah	43	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
25.	Perpustakaan (Bidang Litbang) :											
25.1.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan:											
25.1.1.	Jumlah perpustakaan	336	336	428	440	438	439	439	439	439	439	439
25.1.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	817	1024	4621	3507	1396	5100	5600	6200	6800	7500	31200
25.1.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	31118	34579	43684	50043	52633	65819	69969	74269	78769	83469	83469
26.	Pertanian :											
26.1.	Produktivitas Padi	42.78	49.66	56.49	57.27	36.19	47.4	47.41	47.42	47.43	47.44	47.44
26.2.	Produktivitas Jagung	12.93	12.53	13.65	14.48	15.12	15.10	15.15	15.18	15.20	15.20	15.2
26.3.	Produktivitas Kedelai	18.50	14.88	12.30	12.86	12.76	13.32	13.33	13.35	13.38	13.40	13.4
26.4.	Produktivitas K.Tanah	10.00	-	8.57	10.00	-	-	-	-	-	-	-

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
26.5.	Produktivitas K.Hijau	209.84	124.78	213.37	218.46	243.51	153.55	153.56	153.57	153.6	153.6	153.6
26.6.	Produktivitas Ubi Kayu	155.31	181.79	186.19	240.35	174.76	154.50	154.50	154.50	154.50	154.50	154.5
26.7.	Produktivitas Ubi jalar	235	228	227	226	362	398	414	430	447	465	2154
26.8.	Produksi Kakao	1954	2149	1977	1977	2167	2388	2627	2685	2792	3071	13563
26.9.	Produksi kelapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.10.	Produksi tebu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.11.	Produksi kapas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.12.	Produksi kemiri	17	22	23	23	29	31.5	33	34.5	36	37.5	172.5
26.13.	Produksi cengkeh	30	32	61	77	93	58	58	58	58	58	58
26.14.	Cakupan bina kelompok petani (kelompok)	30 klp	33 klp	36 klp	39 klp	42 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	48 klp
26.15.	Jumlah komoditas unggulan yang dipasarkan keluar daerah (jenis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.16.	Kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian (kelompok)	-	1	4	17	-	6	11	10	10	10	10
26.17.	Persentase kepemilikan KIT penyuluhan (%)											
26.18.	Jumlah populasi sapi	48,049	49,051	38,128	37,862	30,771	31,079	31,235	31,391	31,548	31,706	31,706
26.19.	Jumlah populasi kambing	897	620	720	807	893	902	906	911	916	921	921
26.20.	Jumlah populasi itik	-	-	92,173	97,332	90,971	91,883	92,342	92,804	93,268	93,734	93,734
26.21.	Jumlah populasi ayam	1,361,246	1,092,246	1,102,948	1,197,465	1,208,581	1,220,697	1,226,801	1,232,935	1,239,099	1,245,294	1,245,294
26.25.	Angka Kesakitan Ternak	6,500	6,500	7,500	15,000	12,000	6,750	6,500	6,300	6,000	5,000	37,550
26.26.	Jumlah Ternak yang diberikan vaksin	21,000	21,000	22,000	24,000	30,000	38,000	42,000	45,000	47,000	50,000	258,000
26.27.	Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak	6,750	6,500	7,500	15,000	12,000	6,750	6,500	6,300	6,000	5,000	37,550
27.	Kehutanan :											
27.2.	Luas lahan kritis yang tertutupi di luar kawasan hutan (Ha)	1,683.66	642.68	1,500.50	599.53	33.15	100	100	100	100	100	500
27.3.	Luas lahan kritis yang tertutupi di luar kawasan hutan (Unit)	331,496.00	127,436.00	297,100.00	112,575.00	2,200.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000
27.6.	Tertanamnya bibit tanaman kehutanan dalam rangka penghijauan lingkungan	15044	23150	525	4000	1000	20000	22000	24000	26000	28000	120,000
27.9.	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan	8	8	8	8	40	0	0	0	0	0	-
27.10.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang dampak kebakaran	830 Orang	831 Orang	832 Orang	833 Orang	3.320 Orang	2.616 Orang	2.616 Orang	2.616 Orang	2.616 Orang	13.080 Orang	13.080 Orang
28.	Pariwisata :											
28.1.	Kunjungan wisata (orang)	2,756,579	2,892,019	3,148,443	3,681,342	3,934,384	4,200,000	4,410,000	4,630,500	4,862,025	5,105,126	5,105,126
29.	Perikanan Kelautan:											
29.1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4,551.40	4,632.40	4,765.10	6,112.50	6,173.90	6,423.33	6,551.79	6,682.83	6,816.48	6,952.81	33,427.24
29.2.	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Terbedayakan (KUB)	41	43	46	49	49	50	50	51	52	53	54
29.3.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	33,834.90	43,931.60	44,334.20	507.10	586.80	598.59	604.58	610.63	616.73	622.90	3,053.43
29.4.	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat sarana Produksi Budidaya (Pokdakan)	24	11	16	12	9	5	5	5	5	5	
29.5.	Jumlah Produksi Ikan Olahan (Ton)	3,420	3,780	4,140	4,500	4,860	5,056	5,157	5,260	5,365	5,472	26,310.00
29.6.	Jumlah Poklamsar yang berkembang (kelompok)	7	7	13	18	23	29	32	35	38	41	41
29.7.	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas) aktif	6	5	5	5	5	7	8	9	10	11	11
29.8.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (Unit)	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47
30.	Perdagangan :											
30.3.	Data Pengawasan UTTP	-	-	-	-	3500	400	400	400	400	2400	2400
30.4.1.	Unit Usaha	732	766	284	877	871	871	910	949	988	1027	1027
30.4.2.	Tenaga Kerja	3660	3830	1420	3560	4355	4330	4500	4670	4840	5010	5010
30.4.3.	Modal	85,104,534,660	524,853,101,211	252,413,559,153	161,170,291,869	117,060,303,908	228,120,358,160	239,526,376,068	250,932,393,976	262,338,411,884	273,744,429,792	273,744,429,792
30.5.1.	Unit Usaha	141	141	39	209	197	215	233	251	259	287	287
30.5.2.	Tenaga Kerja	1410	2115	702	5635	3940	4085	4180	4267	4304	4592	4592
30.5.3.	Modal	666,416,944,408	222,955,729,211	216,400,000,000	239,892,005,840	294,911,615,703	344,521,021,984	360,926,784,936	377,332,547,888	393,738,310,840	410,144,073,792	410,144,073,792

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
30.6.1.	Unit Usaha	10	8	2	14	3	4	6	8	10	12	12
30.6.2.	Tenaga Kerja	200	160	50	37	150	221	265	309	353	397	397
30.6.3.	Modal	538,659,294,408	100,991,986,327	170,000,000,000	397,646,017,794	124,747,132,665	158,784,759,216	198,480,949,020	238,177,138,824	277,873,328,628	17,569,518,432	17569518432
30.7.	Kontribusi Perdagangan dalam PDRB (%)	7,39	7,28	7,42	7,56	7,60	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,71
30.8.	Perdagangan	883	915	325	1102	1071	1770	1864	1214	1244	1300	1300
30.9.	Dagang Besar	10	8	2	13	3	7	7	7	7	7	7
30.10.	Dagang Menengah	141	141	39	377	197	758	785	200	210	220	220
30.11.	Dagang Kecil	732	766	284	712	871	1005	1072	1139	1205	1073	1073
30.12.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
31.	Perindustrian :											
31.1.	Perkembangan IKM	54	56	58	28	29	37	41	45	49	53	53
31.2.	Jumlah Unit Usaha (unit)	1055	1111	1148	1176	1205	132753	133025	1313	1340	1367	1367
31.3.	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	11282	11690	12393	12665	12937	1154646110	1154646110	133297	133569	133841	133841
31.4.	Nilai Produksi (000)	959049793	1001948167	1072840966	1093292252	1113743538	1154646110	1154646116	11175097396	1195548682	1215999968	1215999968
31.5.	Nilai Investasi (000)	4699752	4890528	4959392	492409765	133511884	143321310	148226023	153130736	158035449	162940162	162940162
31.6.	Sentra IK	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31.7.	KUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.8.	Kontribusi Perindustrian dalam PDRB	4,59	4,47	4,53	4,67	4,72	4,81	4,84	4,87	4,91	4,95	4,95
31.9.	Industri	815	859	904	297	948	978	1065	1152	1239	1326	1326
31.10.	Industri Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.11.	Industri Menengah	13	15	18	18	19	17	17	17	17	17	17
31.12.	Industri Kecil	802	844	886	909	929	961	1048	1135	1222	1309	1309
	Fokus Seni Budaya											
1	Jumlah klub olahraga	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
2	Jumlah gedung olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	ASPEK PELAYANAN UMUM											
	Fokus Layanan Urusan Wajib											
1.	Pendidikan :											
1.1.	Pendidikan dasar:											
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	108.07	115.87	111.37	113.13	105.32	100	100	100	100	100	100
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	49	52	50	51	51	52	52	52	52	52	52
1.1.3.	Rasio guru/murid	58	57	57	59	60	40	40	40	40	40	40
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	29	29	28	28	27	33	34	35	36	37	37
1.2.	Pendidikan menengah:											
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	117.54	133.5	118.19	123.19	122.35	100	100	100	100	100	100
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	23	27	23	23	22	23	23	23	23	23	23
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	67	68	65	66	65	60	55	50	45	40	40
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	39	38	37	35	34	33	33	32	32	32	32
1.3.	Fasilitas Pendidikan:											
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	269	271	272	274	275	278	278	278	278	278	278
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85	87	87	91	93	97	97	97	97	97	97
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):											
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	320	320	320	320	338	350	365	370	380	390	390
1.5.	Angka Putus Sekolah:											
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.01	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0	0.12	0.06	0.01	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Angka Kelulusan:											
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99.99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99.97	99.99	99.99	100	100	100	100	100	100	100
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	99.98	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	94.6	97.91	96.93	99.37	100	100	100	100	100	100
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89.27	94.89	98.44	103.49	95.93	100	100	100	100	100	100
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	61.04	62.56	80.32	81.61	91.81	95	96	97	98	100	100
2.	Kesehatan :											
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	80.8	53.2	59	60	60	58	56	54	52	50	50
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	14.7	14.8	14.9	15.9	1,23	1,33	1,44	1,45	1,71	1,86	1,86
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.07	0.069	0.1	0.116	0,01	0,01	0,01	0,01	0,016	0,016	0,016
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	36.5	26.2	55.3	110	0,70	0,84	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	78.2	73.5	73.3	61.72	0,70	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60.3	54.9	80.6	72.99	74,41	75	77	78	80	80	80
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99.09	92	95.7	99.72	98,68	92	93	94	95	96	96
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positive	8.49	43	45.2	51.8	45.6	59	61.5	66	66.5	69	69
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	105.87	104.3	96.77	93.86	100	100	100	100	100	100	100
2.14.	Jumlah puskesmas	12	12	13	13	13	14	15	16	17	17	17
2.15.	Jumlah pembantu puskesmas	53	54	54	54	54	54	57	60	60	60	60
3.	Pekerjaan Umum :											
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	62.79%	84.22%	89.07%	91.39%	91.39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	57	57.1	56.7	56.7	56.7	80	80	90	90	100	100
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk											
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	88,00%	86,00%	86,96%	82,77%	75,62%	87,43%	90,43%	93,43%	96,43%	100%	100%
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk											
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.7.	Rasio rumah layak huni	81,136	81,886	82,636	83,386	84,136	86,386	87,136	87,886	88,636	89,386	89,386
3.8.	Rasio permukiman layak huni	58.83%	62.39%	65.06%	65.06%	65.06%	96.35%	97.08%	97.81%	98.54%	99.27%	99.27%
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	565,981	628,744	628,744	628,744							
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)											
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	355,353	529,517	560,018	574,626	625,274	96.75%	98.00%	99.25%	100.00%	100.00%	100.00%
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	-	-	259.7495	39.15%	44.07%	44.07%	44.07%	44.07%	44.07%
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	-	-	259.7495	45.12%	45.12%	45.12%	45.12%	45.12%	45.12%
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota											
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	10,272.39	10,345.77	10,685.17	10,829.64	10860.59	96.45%	97.50%	98.50%	100.00%	100.00%	100.00%
3.18.	Lingkungan Pemukiman											
4.	Perumahan :											
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	64,025.50	63,025.50	83,002.67	86,667.00	97,066.83	92,313,550	93,318,050	94,824,800	96,934,250	97,637,400	97,637,400
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	86,519	868.580	89,035	105,154	105,154	87,823,435	90,836,935	93,850,435	96,863,935	100,450,000	100,450,000

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
4.5.	Rumah layak huni	85,636	85,636	85,636	85,636	85,636	86,386	87,136	87,886	88,636	89,386	89,386
5.	Perencanaan Pembangunan :											
5.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.4.	Penjabaran RPJMD kedalam RKPd	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Perhubungan :											
6.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	372,750	1,552,142	1,307,679	1,279,597	695433	920000	966000	1,014,300	1,065,015	1,118,266	1,118,266
6.2.	Rasio ijin trayek	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,376
6.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	7,138	10,500	12,285	13,689	13655	15055	15808	16,598	17,428	18,300	18,300
6.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
6.5.	Angkutan darat	319322	308939	232568	461359	484426.95	560,785	588,824	618265.1847	649178.4439	681637.3661	715719.2344
6.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	7,150	7,464	8,909	10,316	10145	11834	12781	13,803	14,907	16,100	16,100
6.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	46 menit	46 menit	46 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit
6.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	37,500	37,500	37,500	37,500	37500	37500	37500	37,500	37,500	37,500	37,500
6.9.	Pemasangan Rambu-rambu	4861	4969	5088	5508	5553	6453	6753	7053	7353	7653	7953
7.	Lingkungan Hidup :											
7.1.	Persentase penanganan sampah	72.9	89.3	97.3	97.9							
7.2.	Persentase Penduduk berakses airminum	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
7.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	67.24%	71.32%	75.44%	80.29%	85.15%	89.03%	90.97%	92.91%	94.86%	96.80%	96.80%
7.4.	Pencemaran status mutu air	73.33	92.86	79.22	76.25	75.00	77	78	79	79	79	79
7.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air											
7.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
7.8.	Penegakan hukum lingkungan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pertahanan :											
8.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	-	67.6	73.75	80.16	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	18	22	24	28	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Penyelesaian izin lokasi	31.58%	45.83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil :											
9.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	99%	99%	98%	99%	90.02%	92%	94%	95%	97%	100%	100%
9.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	70%	86%	90%	92%	84.33%	85%	87%	89%	90%	92%	92%
9.3.	Rasio pasangan berakte nikah	74%	77%	60%	10%	80%	85%	90%	93%	89%	95%	95%
9.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	700	800	900	920							
9.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi											
9.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	99%	99%	98%	99%	90%	94%	95%	98%	99%	100%	100%
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :											
10.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	44.69%	45.12%	44.31%	46.56%	48.81%	51.06%	53.31%	55.56%	57.81%	60.06%	62.31%
10.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta											
10.3.	Rasio KDRT	0.5	0.071	0.044	0.048	0.044	0.048	0.044	0.048	0.044	0.048	0.044
10.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur											
10.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan											
10.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	6 Kasus	13 Kasus	12 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	0	0	0	0	0	0
10.7.	Persentase Penanganankasus KDRT yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :											

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
11.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,14	2,10	2,11	2,12	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	2,00	2,00
11.2.	Rasio akseptor KB	85,26	85,31	85,32	84,31	78,64	78,76	78,82	78,86	78,90	78,94	78,94
11.3.	Cakupan peserta KB aktif	82,21% (65.885)	85,46% (67.070)	85,57% (67.145)	88,91% (70.384)	88,91% (70.384)	89,02 (73623)	89,13 (76862)	89,24 (80101)	89,35 (83340)	89,46 (86579)	89,57 (89818)
12.	Ketenagakerjaan :											
12.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	2.36	1.63	2.2	3.28	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	51	54	54	62	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	77.8	72.92	73.04	73.05	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	1,251	1,396	1,312	1,128	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Tingkat pengangguran terbuka	2.3	1.6	0.77	0.48	0	0	0	0	0	0	0
13.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :											
13.1.	Persentase koperasi aktif	88,87	90,00	78,00	78,92	81,51	7,75%	8,45%	9,50%	10,21%	11,27%	11,27%
13.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	14,754	15,862	17,162	18,366	19173	21327	22404	23,481	24,558	25635	25635
13.3.	Jumlah BPR/LKM	607	629	639	663	666	702	732	762	792	822	822
13.4.	Usaha Mikro dan Kecil	839	912	338	953	911	831	871	911	951	991	991
14.	Penanaman Modal :											
14.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	689	777	785	1,459	5,739	2,231	2,357	2,496	2,649	2,817	12,550
14.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3,173,814,437,239.00	7,180,810,126,088.00	6,147,499,450,989.00	2,618,136,988,815.00	6,329,353,227,774.00	2,419,842,370.05	2,871,927,176.75	3,359,197,642.05	3,899,203,310.35	4,493,089,023.15	17,043,259,522.35
14.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	4.33	8.73	21.68	6.49	6.34	9.514	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
14.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1,740.50	1,355.46	27.46	-1,467.29	1,308.02		322.20	376.05	424.59	487.23	
15.	Kebudayaan :											
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
15.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	23 Situs	52 Situs	-	52 Situs	52 Situs	54 Situs	54 Situs	56 Situs	58 Situs	58 Situs
16.	Kepemudaan dan Olahraga :											
16.1.	Jumlah organisasi pemuda	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
16.2.	Jumlah organisasi olahraga	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
16.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	11	13	15	11	11	11	11	11	11	11
16.4.	Jumlah kegiatan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
16.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6.	Lapangan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
17.	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :											
17.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60	46	40	40	40	65	70	75	80	85	375
17.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	5
18.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :											
18.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6.2	5.4	5.2	5.1							
18.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	33.01	33.18	33.47	31.71	31.18	31.18	31.18	31.18	31.18	31.18	155.9
18.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	1890
18.4.	Pertumbuhan ekonomi	7.07	7.64	6.82	6.97	6.27						
18.7.	Penegakan PERDA	105.23	113.43	104.88	106.88	104.48	75	80	85	90	95	95
18.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam	2 kali patroli dalam	2 kali patroli dalam	2 kali patroli dalam	2 kali patroli dalam	2 kali patroli dalam	2 kali patroli dalam			
18.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	60%	65%	70%	75%	80%	55%	65%	70%	80%	90%	90%
18.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922
18.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	84.20%	84.20%	295.4%	295.4%	295.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	84.20%	84.20%	295.4%	295.4%	295.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	80.40%	88.14%	88.32%	96.33%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
18.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	47 desa	48 desa	49 desa	50 desa	51 desa	52 desa	53 desa
18.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	79,9	80,9	81,9
19.	Ketahanan Pangan :											
19.1.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.2.	Ketersediaan pangan utama	68.95%	62.92%	49.12%	41.03%	33%	34%	40%	50%	60%	70%	70%
20.	Pemberdayaan Masyarakat Desa :											
20.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok
20.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok
20.3.	Jumlah LSM	7	7	7	5	2	2	2	2	2	2	10
20.4.	LPM Berprestasi	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok
20.5.	PKK aktif	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok
20.6.	Posyandu aktif	572 Kelompok	572 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok
20.7.	Swadaya Masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat	93.50%	79.40%	89.30%	93.90%	94.30%						
20.8.	Pemeliharaan Pasca pemberdayaan masyarakat	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	63 Kelompok	64 Kelompok	65 Kelompok	66 Kelompok	67 Kelompok	68 Kelompok	69 Kelompok
21.	Statistik :											
21.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.	Kearsipan :											
22.1.	Pengelolaan arsip secara baku	30 SKPD	30 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	180 SKPD
22.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	40 Orang	40 Orang	104 Orang	132 Orang	129 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	824 Orang
23.	Komunikasi dan Informatika :											
23.1.	Jumlah jaringan komunikasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
23.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.000567697	0.00054038	0.000358234	0.000350091	0.000197037	0.000127551	0.0000995605	0.0000837943	0.0000680913	0.0000547912	0.0000547912
23.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.5.	Web site milik pemerintah daerah	43	43	62	62	62	62	62	62	62	62	62
23.6.	Pameran/expo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
24.	Perpustakaan :											
24.1.	Jumlah perpustakaan	336	336	428	440	438	439	439	439	439	439	439
24.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	817	1,024	4,621	3,507	2,336	5,100	5,600	6,200	6,800	7,500	31,200
24.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	31,118	34,579	43,684	50,043	52,633	65,819	69,969	74,269	78,769	83,469	83,469
	Fokus Layanan Urusan Pilihan											
1.	Pertanian :											
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62.88	63.2	64.61	62.91	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	12,91 M	13,43 M	14,21 M	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	666,32 M	693,76 M	744,55 M	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Cakupan bina kelompok petani	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp
1.7.	Jumlah Populasi Ternak	1,661,692	1,357,001	1,366,005	1,476,035	1,486,869	1,501,775	1,509,284	1,516,831	1,524,414	1,532,036	1,532,036
1.8.	Kelautan dan Perikanan											
1.8.1.	Produksi perikanan	38,386.30	48,563.50	49,099	6,619.60	6,724.65	5,335.96	5,389.32	5,443	5,497.62	5,552.60	27,219
1.8.2.	Konsumsi ikan	30.91	31.1	32.2	32.87	32.89	32.96	33.01	33.06	33.11	33.15	33.15
1.8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	150	169	167	167	149	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp
1.8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	4,467.9	4,570.30	4,748.40	6,094.70	6,137.81	4,737.32	4,784.69	4,832.54	4,880.86	4,929.66	24,165
2.	Kehutanan :											
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	331496	127436	297100	112575	2200	40000	40000	40000	40000	40000	240000

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral											
4.	Pariwisata											
4.1.	Kunjungan wisata	2,756,579	2,892,019	3,148,443	3,681,342	3934384	4,200,000.00	4,410,000.00	4,630,500	4,862,025	5105126	5105126
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	5,948,208.92	7,186,658.79	8,807,667.89	10,815,279.76							
4.3.	Persentase DTW yang ditata	30%	30%	42%	44%	55%	64%	66%	69%	72%	72%	72%
4.4.	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	2,756,579	2,892,019	3,148,443	3,681,342	3,934,384	4,200,000	4,410,000	4,630,500	4,862,025	5,105,126	5,105,126
4.5.	Jumlah Desa wisata yang berbasis pertanian	-	2	2	2	3	1	1	1	1	1	6
5.	Kelautan dan Perikanan :											
5.1.	Produksi perikanan	38,386.30	48,563.50	49,099	6,619.60	6,724.65	5,335.96	5,389.32	5,443	5,497.62	5,552.60	27,219
5.2.	Konsumsi ikan	30.91	31.1	32.2	32.87	32.89	32.96	33.01	33.06	33.11	33.15	33.15
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	150	169	167	167	149	14 klp					
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	4,467.9	4,570.30	4,748.40	6,094.70	6,137.81	4,737.32	4,784.69	4,832.54	4,880.86	4,929.66	24,165
6.	Perdagangan :											
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9.30%	10.30%	9.82%	8.68%	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	128,296,174.45	64,119,363.27	57,770,469.90	63,675,447.62	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal											
7.	Perindustrian :											
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4.58%	4.36%	4.21%	4.01%	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri											
7.3.	Pertumbuhan Industri.	54	41	50	22	-	-	-	-	-	-	-
	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
1.	Pertanian :											
1.1.	Nilai tukar petani	1.103	1	0.98	1.265	-	-	-	-	-	-	-
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
1.	Perhubungan :											
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1.77	2.04	2.7	1.36	1.292	1	1	0.999724971	0.949738723	0.902251787	0.857139197
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	372,750	1,552,142	1,307,679	1,279,597	695433	920000	966000	1,014,300	1,065,015	1,118,266	1,118,266
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	334677	1447702	1176531	1156821	561527	98155	100118.1	102120.462	104162.8712	106246.1287	108371.0512
2.	Lingkungan Hidup :											
2.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
3.	Komunikasi dan Informatika :											
3.1.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	12,32%	12,06%	8,86%	0.0891	0.093555	0.108301607	0.113716687	0.119402522	0.125372648	0.13164128	0.138223344
	Fokus Iklim Berinvestasi											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :											
1.1.	Angka kriminalitas	0.11%	0.09%	0.13%	0.10%	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Jumlah demo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Lama proses perijinan											
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	9 Pajak dan 13 Retribusi	10 Pajak dan 14 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	3	20	4	5	5	5	5	5	5	25

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Badung Tahun 2016 dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Tahun 2015.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD Kabupaten Badung Tahun 2017 yang telah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Badung dengan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait;

- 2) Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung;
- 3) Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung agar betul-betul melaksanakan program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- 4) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- 5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung;
- 6) Penyusunan RKPD Kabupaten Badung dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- 7) RKPD Kabupaten Badung harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- 8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Badung merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD;
- 9) Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- 10) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
- 11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan di masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Badung menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- 12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Kabupaten Badung yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung, berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali. Hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Badung untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI BADUNG,

ttd.

I NYOMAN GIRI PRASTA